

PEMIKIRAN

Transformasi Pendidikan Islam di Indonesia

Ahmad Barizi
Nada Oktavia

P E M I K I R A N

Transformasi Pendidikan Islam di Indonesia

Ahmad Barizi
Nada Oktavia



PUSTAKA
PERADABAN

Pemikiran Transformasi Pendidikan Islam di Indonesia

Penulis : Ahmad Barizi
Nada Oktavia

Editor : Moh. Anas Kholish

ISBN : 978-623-880-691-1

Copyright © Juni 2022

Ukuran : 15,5 cm x 23 cm; Hal: x + 164

Isi merupakan tanggung jawab penulis.
Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Desainer sampul & Penata isi : Hasan Almuntaza

Cetakan I, Juli 2022

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh

CV. Pustaka Peradaban

Vila Bukit Tidar Blok E2 No 163-164 Karang Besuki - Sukun Kota Malang

Kecamatan Lowokwaru Kota Malang

Email: pustakaperadaban.mlg@gmail.com

PENGANTAR PENULIS

Sejak sejarah manusia lahir mewarnai rutinitas kegiatan alam fana ini, pendidikan sudah merupakan “barang penting” dalam komunitas sosial. Adam, yang memulai kehidupan baru di jagat raya ini, senantiasa dibekali ‘akal’ untuk memelajari setiap yang ia temukan dan kemudian menjadikannya sebagai konsep atau pegangan hidupnya. Di zaman yang sudah modern ini, pendidikan juga masih dianggap sebagai kekuatan utama dalam komunitas sosial untuk mengimbangi laju berkembangnya ilmu dan teknologi. Persepsi masyarakat ini kiranya telah mampu memobilisasi kaum cerdik-cendikia untuk selalu merespon secara simultan terhadap perkembangan dan sistem pendidikan.

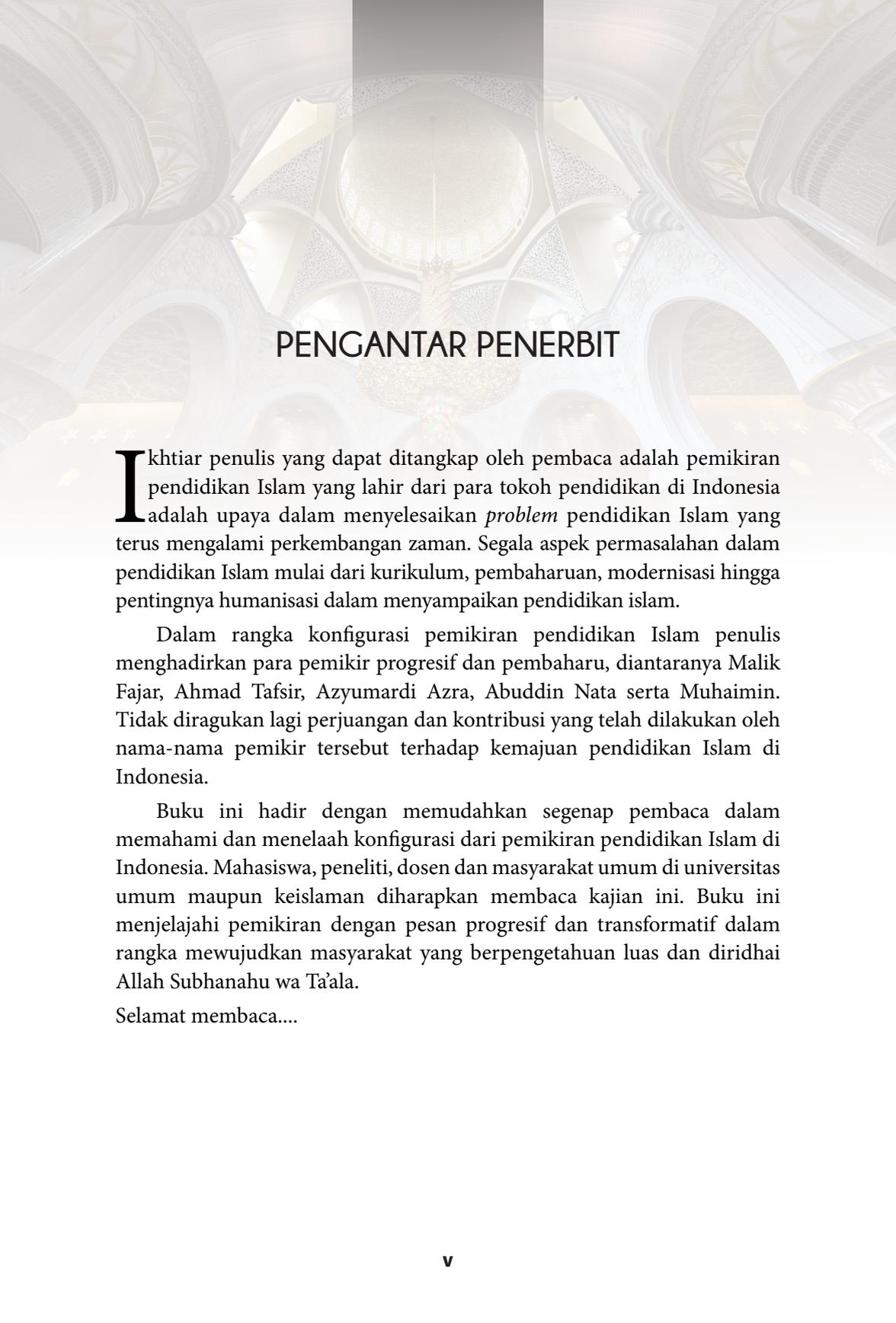
Setiap sebuah perkembangan dipengaruhi oleh sebuah perubahan. Perubahan itu sendiri merupakan sesuatu yang tak bisa dielakkan, karena ia *built in* dalam proses pembaruan suatu sistem yang dikonstruksi oleh manusia. Setiap manusia menginginkan adanya perubahan hidup dan sekaligus mengusahakannya ke arah yang lebih baik. Bisa dimaklumi bahwa kebutuhan untuk bisa *survive* dalam perubahan menjadi tuntutan segenap orang. Reinterpretasi, renovasi, remodifikasi, dan (de/re)-konstruksi adalah tarikan nalar pembaruan yang senantiasa harus didialogkan, dikembarakan, disinggungkan, dan dikemukakan dengan narasi-narasi kontekstual lainnya.

Dalam konteks itu, membaca konfigurasi pemikiran pendidikan Islam di Indonesia selaksa pemikiran soliter yang memungkinkan pendidikan itu berproses, memperbarui diri, ke arah yang lebih *applicable* dan *genuine* dengan kenyataan-kenyataan yang dihadapi. Di sini dicoba dikembangkan, meminjam istilah filsafat, pembaharuan, modernisasi hingga humanisme dalam alokasi posisionil pendidikan di era global. Tidak berlebihan bila dikatakan bahwa mereka adalah manusia soliter, yaitu manusia tidak pernah

berhenti sampai di sini. Terus gelisah sambil bertanya mencari jawaban-jawaban koheren dan signifikan tentang getaran pengalaman dan energi pendidikan bagi manusia.

Membaca buku ini yang mengesankan adalah sekalipun merupakan jahitan dari anyaman pemikiran 5 tokoh yang berserakan adalah visinya tentang pondasi pendidikan sebagai amunisi memperkokoh bangunan pemikiran pendidikan islam di masa depan. Sekalipun ini hanya sekadar jahitan dari ruasan ide-ide yang muncul secara tidak sistematis dan bahkan kadang terjadi pengulangan, tapi jika dibaca secara saksama maka akan terkuak kedalaman relevansi dan tingkat urgensi masalah yang diangkat.

Akhir kata terima kasih kepada para tokoh yang telah menyumbangkan pemikirannya dalam upaya konfigurasi pemikiran pendidikan Islam di Indonesia. Terima kasih juga kepada pihak yang terlibat dalam pembuatan buku ini. Semoga buku ini memberikan kebermanfaatan kepada kita semua.



PENGANTAR PENERBIT

Ikhtiar penulis yang dapat ditangkap oleh pembaca adalah pemikiran pendidikan Islam yang lahir dari para tokoh pendidikan di Indonesia adalah upaya dalam menyelesaikan *problem* pendidikan Islam yang terus mengalami perkembangan zaman. Segala aspek permasalahan dalam pendidikan Islam mulai dari kurikulum, pembaharuan, modernisasi hingga pentingnya humanisasi dalam menyampaikan pendidikan islam.

Dalam rangka konfigurasi pemikiran pendidikan Islam penulis menghadirkan para pemikir progresif dan pembaharu, diantaranya Malik Fajar, Ahmad Tafsir, Azyumardi Azra, Abuddin Nata serta Muhaimin. Tidak diragukan lagi perjuangan dan kontribusi yang telah dilakukan oleh nama-nama pemikir tersebut terhadap kemajuan pendidikan Islam di Indonesia.

Buku ini hadir dengan memudahkan segenap pembaca dalam memahami dan menelaah konfigurasi dari pemikiran pendidikan Islam di Indonesia. Mahasiswa, peneliti, dosen dan masyarakat umum di universitas umum maupun keislaman diharapkan membaca kajian ini. Buku ini menjelajahi pemikiran dengan pesan progresif dan transformatif dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berpengetahuan luas dan diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Selamat membaca....

DAFTAR ISI

PENGANTAR PENULIS - iii

PENGANTAR PENERBIT - v

DAFTAR ISI - vii

DAFTAR GAMBAR - ix

DAFTAR TABEL - ix

BAB I

MASA DEPAN DAN TANTANGAN PEMBAHARUAN

PENDIDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA

A. Memahami Pengertian Pendidikan Islam	1
B. Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia	4
C. Peran Muhammadiyah dalam mewarnai Pendidikan Islam di Indonesia	8
D. Peran Nahdlatul Ulama dalam mewarnai Pendidikan Islam di Indonesia	13
E. Masa Depan dan Tantangan Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia	20

BAB II

MENELISIK PEMIKIRAN AHMAD TAFSIR TENTANG FILSAFAT

PENDIDIKAN ISLAM

A. Biografi dan karir intelektual Ahmad Tafsir	21
B. Filsafat Ilmu sebagai Pondasi Berfikir menurut Ahmad Tafsir	22
C. Filsafat Pendidikan Islami perspektif Ahmad Tafsir	31

BAB III

KONFIGURASI PENDIDIKAN ISLAM HUMANIS DALAM PERSPEKTIF ABUDDIN NATA

- A. Biografi dan karir intelektual Abuddin Nata 35
- B. Pendidikan Islam dalam Membangun Karakter menurut Abuddin Nata 38
- C. Pendidikan Islam Humanis perspektif Abuddin Nata 40

BAB IV

MENAKAR MASA DEPAN MADRASAH DAN PEMBAHARUAN PENDIDIKAN ISLAM MENURUT AZYUMARDI AZRA

- A. Biografi dan karir intelektual Azyumardi Azra 49
- B. Pembaharuan Pendidikan Islam perspektif Azyumardi Azra 52
- C. Modernisasi Pendidikan Islam perspektif Azyumardi Azra 54

BAB V

TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA: SEBUAH UPAYA MELACAK JEJAK REKAM INTELEKTUAL A. MALIK FADJAR

- A. Biografi dan Sepak Terjang Karir Intelektual A. Malik Fajar 59
- B. Dialog Perguruan Tinggi Negeri menurut A. Malik Fajar 86
- C. Urgensi Tranformasi dari STAIN Menuju UIN dalam Perspektif A. Malik Fajar 86
- D. Sintesa Perguruan Tinggi dan Pesantren menurut A. Malik Fajar 102
- E. Pengembangan Pendidikan Islam di indonesia menurut A. Malik Fajar 108

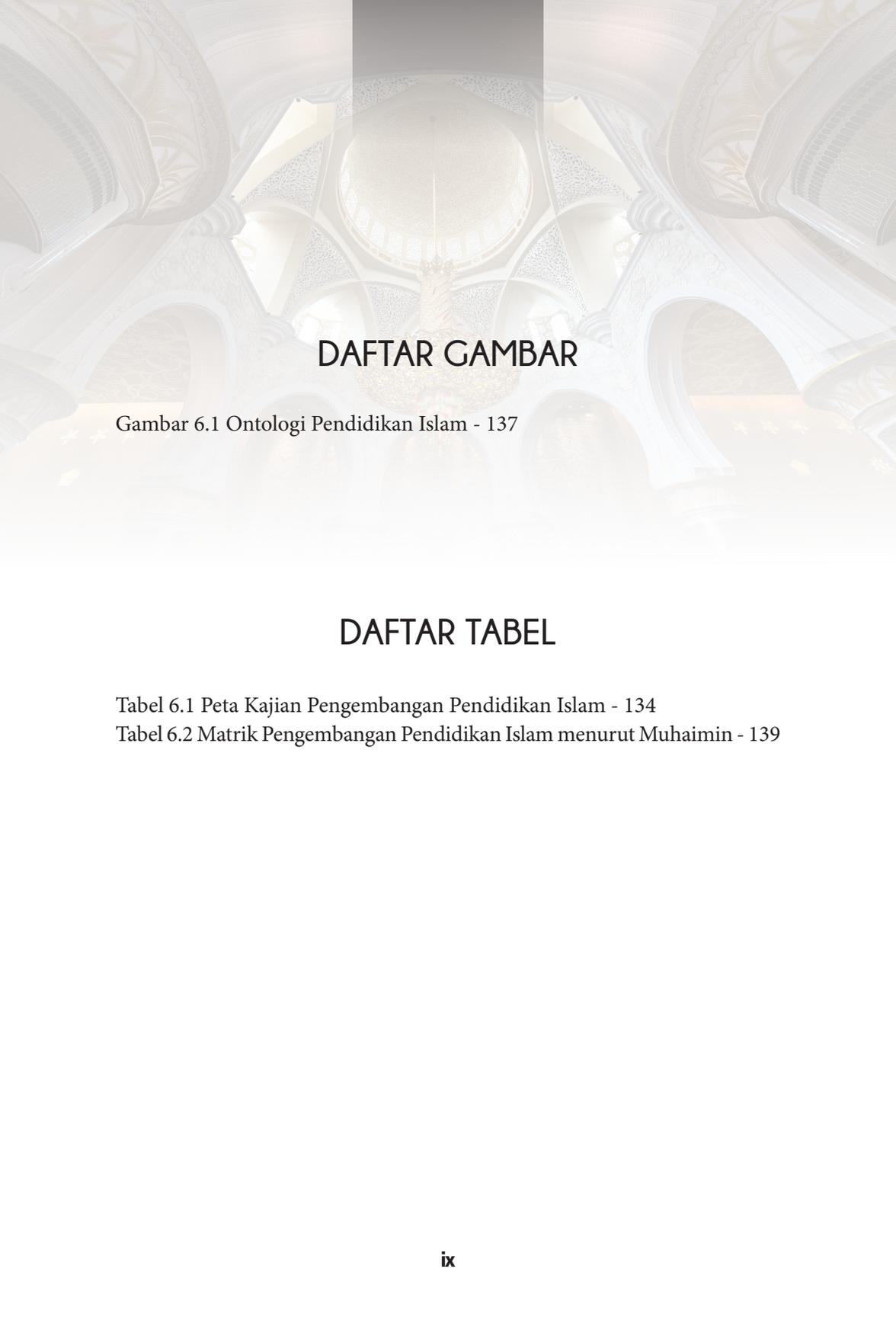
BAB VI

PEMBAHARUAN PENDIDIKAN ISLAM DALAM TINJAUAN MUHAIMIN

- A. Biografi dan karir intelektual Muhaimin 123
- B. Kurikulum Pendidikan Agama Islam menurut Muhaimin 127
- C. Pembaharuan Pendidikan Islam perspektif Muhaimin 129

DAFTAR PUSTAKA - 151

TENTANG PENULIS - 157



DAFTAR GAMBAR

Gambar 6.1 Ontologi Pendidikan Islam - 137

DAFTAR TABEL

Tabel 6.1 Peta Kajian Pengembangan Pendidikan Islam - 134

Tabel 6.2 Matrik Pengembangan Pendidikan Islam menurut Muhaimin - 139



BAB I

MASA DEPAN DAN TANTANGAN PEMBAHARUAN PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA

Memahami Pengertian Pendidikan Islam

Pendidikan adalah sesuatu yang penting bagi manusia, hal ini dikarenakan pendidikan berfungsi sebagai cara agar manusia bisa menghadapi alam semesta dan mempertahankan hidupnya untuk tetap bertahan. Secara terminologis, pendidikan diartikan sebagai proses perbaikan, penguatan dan penyempurnaan terhadap semua kemampuan dari potensi yang dimiliki manusia. Selain itu, pendidikan juga dapat diartikan sebagai suatu ikhtiar manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai dan kebudayaan yang ada dalam masyarakat. Pendidikan merupakan salah satu upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan amanat UUD 1945 yang tertera dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, alinea keempat yang berbunyi:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia...”

Dalam upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa tersebut, bisa melalui pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Islam menempatkan pendidikan pada kedudukan yang penting dan tinggi dalam doktrinnya. Membicarakan pendidikan melibatkan banyak hal yang harus direnungkan. Sebab, pendidikan meliputi keseluruhan tingkah laku manusia yang dilakukan demi memperoleh kesinambungan, pertahanan dan peningkatan hidup. Upaya mencerdaskan kehidupan bangsa sejalan dengan yang Islam ajarkan, yakni mengajarkan bahwa orang-orang yang berilmu

akan memiliki derajat yang tinggi dihadapan Allah SWT. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT. surah al – Mujadilah ayat 11, yakni:

فَإِذْشُرُوا لِلَّهِ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾

Artinya: “... Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Mujadilah: 11)

Dalam Islam, kata pendidikan dapat bermakna *tarbiyah*, berasal dari kata kerja *rabba* yang berarti bertambah atau tumbuh. Kata *tarbiyah* digunakan untuk mengungkapkan pekerjaan orang tua yang mengasuh anaknya sewaktu kecil. Kata *tarbiyah* juga memiliki unsur-unsur seperti menjaga, memelihara dan mengarahkan fithrah, mengembangkan seluruh potensi, dan proses pendidikan yang dilakukan secara bertahap. Selain itu, pendidikan juga bermakna *ta'dib*, berasal dari kata *addaba* yang berarti pengenalan secara bertahap. Dalam hal ini, *ta'dib* merupakan upaya untuk membimbing manusia ke arah pengenalan dan pengakuan kekuasaan dan keagungan Tuhan di dalam tatanan wujud dan keberadaan. Selanjutnya, pendidikan juga bisa dimaknai dengan kata *ta'lim*, dan berasal dari kata kerja *allama* yang mengandung arti memberi tahu. Kata *ta'lim* juga diartikan sebagai proses pemberian pengetahuan, pemahaman, pengertian, tanggung jawab, dan penanaman amanah dalam rangka pembersihan diri manusia untuk memungkinkan menerima hikmah, serta mempelajari segala yang bermanfaat baginya.

Berkaitan dengan beberapa definisi dari pendidikan tersebut, Ahmad Tafsir mendefinisikan pendidikan Islam sebagai bimbingan yang diberikan oleh seseorang agar ia berkembang secara maksimal sesuai dengan ajaran Islam. Atau dengan kata lain, bimbingan terhadap seseorang agar ia menjadi muslim semaksimal mungkin. Dalam hal ini, Ahmad Tafsir menekankan kepada sifat dari aktivitas pendidikan Islam, yakni bimbingan sebagai suatu upaya yang tidak hanya ditekankan kepada aspek pengajaran, berupa arahan dan pemberian petunjuk, serta pelatihan menuju pembentuk muslim seutuhnya. Berbeda halnya dengan Muhaimin, dalam hal ini Muhaimin memberikan beberapa definisi terkait pendidikan Islam, antara lain:

1. Pendidikan (menurut) Islam atau pendidikan Islami, yaitu pendidikan yang dipahami dan dikembangkan dari ajaran dan nilai-nilai fundamental yang

terkandung dalam al-Qur'an dan al-Sunnah. Dalam hal ini, pendidikan Islam dapat berwujud pemikiran dan teori yang mendasarkan diri atau dibangun dan dikembangkan dari sumber-sumber dasar tersebut;

2. Pendidikan ke-Islam-an atau pendidikan (agama) Islam, yakni upaya mengajarkan agama Islam atau ajaran dan nilai-nilainya, agar menjadi *way of life* (pandangan hidup dan sikap hidup seseorang). Dalam pengertian ini, pendidikan Islam dapat berwujud dalam dual hal, yakni:
 - a. Segenap kegiatan yang dilakukan seseorang atau suatu lembaga untuk membantu seseorang atau sekelompok peserta didik dalam menanamkan agama Islam atau menumbuhkembangkan ajaran Islam dan nilai-nilainya dalam diri dan kehidupannya;
 - b. Segenap fenomena atau peristiwa perjumpaan dua orang atau lebih yang dampaknya ialah tertanamnya nilai-nilai ajaran Islam dan atau tumbuhkembangnya ajaran Islam dan nilai-nilainya pada salah satu atau beberapa pihak.
3. Pendidikan dalam Islam diartikan sebagai proses dan praktik penyelenggaraan pendidikan yang berlangsung dan berkembang dalam sejarah agama Islam. Dalam arti proses tumbuhkembangnya Islam dan umatnya baik Islam sebagai agama, ajaran, maupun sistem dan peradaban sejak zaman Nabi Muhammad SAW. sampai sekarang. Dalam pengertian ini, istilah pendidikan Islam dijadikan sebagai proses pembudayaan ajaran Islam, budaya, peradaban umat Islam dari generasi ke generasi sepanjang sejarah.

Selanjutnya, Muhaimin juga mengemukakan, walaupun pendidikan Islam tersebut dapat dipahami secara berbeda, namun pada hakikatnya pendidikan Islam merupakan satu kesatuan dan mewujud secara operasional dalam suatu sistem yang utuh. Konsep dan teori kependidikan Islam sebagaimana yang dibangun dan dikembangkan dari Qur'an dan Sunnah mendapatkan justifikasi dan perwujudan secara operasional dalam proses pembudayaan dan pewarisan serta pengembangan ajaran Islam, budaya dan peradabannya dari generasi ke generasi yang berlangsung sepanjang sejarah umat Islam. Proses tersebut dalam praktiknya berlangsung dari proses pengembangan dan pembinaan manusia atau pribadi muslim pendukungnya pada setiap generasi sepanjang sejarah umat Islam.

Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia

1. Pendidikan Islam di masa kedatangan Islam di Indonesia

Pendidikan Islam terjadi sejak Nabi Muhammad SAW. diangkat menjadi Rasul di Mekkah, dan beliau yang menjadi gurunya. Pendidikan masa ini merupakan *prototype* yang terus menerus dikembangkan oleh umat Islam untuk kepentingan pendidikan umat pada zamannya. Ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. berfungsi meluruskan perkembangan budaya umat manusia pada zaman tersebut dan meletakkan unsur-unsur baru yang menjadi dasar untuk memacu perkembangan budaya selanjutnya.

Masa tersebut berlangsung sejak Muhammad SAW. menerima pengangkatannya sebagai Rasul sampai dengan lengkap dan sempurnanya agama Islam menjadi warisan budaya umat Islam sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Masa tersebut berlangsung selama 22 tahun atau 23 tahun sejak beliau menerima wahyu pertama kali, yaitu tanggal 17 Ramadhan, yakni 13 tahun sebelum Hijriah bertepatan dengan 6 Agustus 610 Masehi, sampai dengan wafatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal 11 Hijriah, bertepatan dengan 8 Juni 832 Masehi.

Kemudian, beralih kepada sejarah pendidikan Islam di Indonesia, diawali dengan masuknya Islam ke Indonesia. Dalam hal ini, masuknya Islam memiliki keunikan tersendiri karena prosesnya dengan perdamaian dibawa oleh pedagang dan mubalig. Sejarah mencatat bahwa Islam telah masuk ke Indonesia sejak abad ke-7 M/1H. Perkembangan Islam mulai terlihat pada abad ke-13 M. Meluasnya Islam ditandai dengan adanya kerajaan Perlak dan Samudra Pasai di Aceh pada tahun 1292 dan 1297 M. Perkembangan dan penyebaran Islam saat itu melalui zona perdagangan di daerah pantai Sumatera Utara dan melalui urat nadi perdagangan Malaka. Agama Islam kemudian menyebar ke pulau Jawa dan seterusnya ke Indonesia bagian timur.

Ajaran Islam masuk ke Indonesia tak bisa terpisahkan dari pengaruh pendidikan, di mana dalam mengajarkan agama Islam masih secara Informal dengan memakai metode dakwah, yaitu seperti ceramah dan dialog interaktif. Pada tahap awal pendidikan Islam dimulai dari kontak-kontak pribadi maupun kolektif antara mubalig (pendididik) dengan peserta didiknya. Pada tahap awal pendidikan Islam berlangsung secara Informal. Mubalig memberikan tauladan akhlakul karimah yang baik dalam pergaulan dan juga perkawinan hingga terbentuknya masyarakat muslim. Masyarakat muslimlah yang menjadi cikal bakal tumbuh dan berkembangnya kerajaan Islam.

Dari proses tersebut terjadilah proses pendidikan dan pengajaran Islam, meskipun dalam bentuk yang sederhana. Materi pelajaran yang pertama sekali adalah kalimat syahadat yang berarti seseorang tersebut menjadi seorang muslim. Dengan demikian dapat difahami bahwa Islam sangat praktis dan mulai dari situlah masyarakat mudah untuk menerima ajaran Islam. Komunitas muslim terbentuk dan mereka membuat mushola/masjid di daerah masing-masing untuk menunaikan salat 5 waktu dan salat jumat secara berjamaah sesuai anjuran agama Islam. Selain itu, masjid juga digunakan untuk tempat pembelajaran agama Islam seperti zaman Rasulullah dengan para sahabatnya.

Pendidikan Formal mulai berlangsung, yaitu pendidikan yang terencana, punya waktu, tempat dan materi tertentu. Beberapa lembaga pendidikan yang muncul di Indonesia diantaranya yang pertama, masjid dan langgar dalam pendidikan digunakan untuk pengajian yang dilakukan orang dewasa oleh para mubalig dan masyarakat. Materi yang disampaikan berkenaan dengan akidah, ibadah dan akhlak. Sedangkan pengajian yang dilaksanakan untuk anak-anak berpusat pada pengajian al-Qur'an menitikbertkan kepada kemampuan membaca yang baik dan benar sesuai kaidah tajwid, selain itu juga bertumpu kepada rukun iman, tata cara salat dan akhlak berperilaku sehari-hari.

Sistem pengajaran dimasjid berupa *halaqah*, yaitu guru membaca dan menerangkan pelajaran, sedangkan siswa mempelajari atau mendengar saja, hampir mirip dengan sistem klasikal yang berlaku sekarang. Keunggulan dari sistem ini adalah para peserta didik disuruh mempelajari terlebih dahulu materi yang akan disampaikan guru, setelah itu guru menjelaskan dan menyelaraskan pemahaman antara guru dan murid. Sistem ini mendidik agar peserta didik untuk belajar mandiri. Metode yang digunakan adalah *bandongan* atau *sorogan*. Metode ini adalah seorang guru membacakan dan menjelaskan isi sebuah kitab, dikerumuni oleh sejumlah murid yang masing-masing memegang kitab yang serupa, mendengarkan dan mencatat keterangan yang diberikan gurunya berkenaan dengan bahasan yang ada dalam kitab tersebut pada kertas catatan lain.

Pendidikan Islam di langgar bersifat elementer, dimulai dari mempelajari abjad huruf Arab sebagai pengenalan awal tentang al-Qur'an sambil mengikuti gurunya, anak-anak belajar dengan duduk bersila dan belum memakai meja dan bangku. Tujuan pembelajaran al-Qur'an di langgar adalah agar dapat membaca berirama dan baik serta belum ditekankan untuk mengetahui isi al-Qur'an. Dalam penyampaian materi menggunakan metode *sorogan* di mana

perindidu belajar dengan kyai/guru dan metode *halaqah*, yakni seorang guru dalam pembelajarannya duduk dengn dikelilingi murid-muridnya.

Meunasah, *Rangkang* dan *Dayah* adalah lembaga pendidikan Islam yang saling berkaitan di aceh. *Meunasah* adalah lembaga pendidikan Islam formal pada tingkat Dasar (SD) di wilayah kesultanan pasai. Pemimpin madrasah adalah Tengku *Meunasah* tidak hanya memimpin agama tapi juga merangkap sebagai pemimpin adat. Fungsi *meunasah* adalah lambang dari kesatuan aceh, pusat penyiaran berita, balai gempong, tempat musyawarah, tempatt tidur ketika malam, tempat perayaan hari besar Islam. Kurikulum *meunasah* meliputi pembelajaran al-Qur'an, dasar-dasar pengetahuan agama dan bahasa arab. Kitab yang dikaji, Masail al-Muhtadi li Ikhwan al-Muhtadi, Bidayat al Muhtadi, kitab *sharf*, kitab al-Awamil. Jika pemimpin *meunasah* adalah imam besar kitab yang dikaji adalah kitab Hasyiyyat al-Bajuriy karya al-Bajuriy dan kitab Alfiyyah karya Ibn Malik.

Rangkang atau *ma'had* sebagai tempat tinggal murid di dekat masjid. *Rangkang* juga menyediakan pendidikan menengah Pertama (SMP), sebagai lanjutan dari *Meunasah*. Pengetahuan agama yang diajarkan setingkat lebih tinggi dari pendidikan *meunasah*. Kurikulum pendidikan *Rangkang* terpusat pendidikan agama dan bahasa arab. Kitab bahasa arab yang digunakan *al-Jurumiyyah*, *Mutammimah*. Sementara pengetahuan agama menggunakan kitab Matan Taqrib karya Abu Syuja' dan kitab *Hasyiyyat al-Bajuri* karya al-Bajuri. Semua kitab menggunakan bahasa arab. Sistem pendidikan sama dengan pesantren berbentuk *halaqah* dan metode yang digunakan *sorogan* dan *wetonan*.

Dayah merupakan pendidikan tinggi lanjutan dari *rangkang*. Pemimpin *Dayah* disebut Teungku Chik. Di *Dayah* diajarkan kemandirian, yaitu belajar, memasak dan mencuci pakaian sendiri. Ilmu agama Islam yang diajarkan adalah Ilmu Fikih, Ushul Fikih, Tauhid, Tafsir, Hadis, Balaghah, Nahwu Sharaf, Tarikh dan Mantik. Terdapat 2 jenis santri, yaitu menetap atau mukim dan kalong atau tidak mukim. Metode yang digunakan adalah hafalan, *meudrah*, *muedeubat* atau disebut *sorogan* dan *wetonan*.

Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang di dalamnya sarat dengan pendidikan Islam yang di pahami dan dihayati serta diamalkan dengan menekankan pentingnya moral agama Islam sebagai pedoman hidup. Pesantren pertama yang berdiri di indonesia adalah pesantren Pamekasan di Madura, yang berdiri pada tahun 1062, biasanya disebut dengan pesantren Jan Tampes II. Lembaga pendidikan jawa kuno bernama *pawiyatan*, KI sebutan guru dan Cantrik sebutan murid. Pesantren juga disebutkan muncul

ketika kesultanan Mataram hingga meluas di Jawa dan Madura tingkatan pembelajaran pesantren ada tingkatan dasar, menengah, atas, Takhassus.

Surau merupakan bangunan kecil di Minangkabau yang berdiri pada 1356 M. Setelah mengalami Islamisasi *surau* menjadi pusat kegiatan agama Islam. *Surau Ulakan Pariaman* dipimpin oleh Syekh Burhanuddin untuk mengajarkan dan mengembangkan Islam. *Surau* hampir sama dengan pesantren dari sistem dan metode pembelajarannya masih secara tradisional. *Suara Ulakan* juga sebagai perkembangan Tarekat. Pendidikan *Indigeneus* nusantara atau pendidikan pesantren. Terdapat sumber yang mengatakan bahwa pesantren sudah mulai muncul sejak zaman Walisongo yang didirikan oleh Raden Rahmad pada abad 16 di daerah Gresik, Jawa Timur. Sejak UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional secara eksplisit menempatkan pesantren memiliki posisi yang sama dengan lembaga pendidikan lainnya. Pesantren sebagai Institusi sosial telah memberikan kontribusi besar dalam pengembangan kehidupan rohaniah masyarakat muslim.

2. Pendidikan Islam di masa kolonialisme dan pasca kolonialisme

Setelah datangnya kaum penjajah barat (Belanda), peranan pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam semakin kokoh. pesantren mengajarkan ilmu agama, sistem pendidikan Islam baik metode, sarana dan fasilitas lainnya bersifat tradisional. Metode seperti *sorogan*, *wetonan* hapalan. Pertumbuhan madrasah merupakan respon pendidikan Islam terhadap kebijakan pemerintah Hindia Belanda dalam kerangka politik etisnya yang berkaitan dengan sistem pendidikan. Kemudian, ada beberapa hal lain yang melatarbelakangi pertumbuhan dan perkembangan madrasah pada awal abad 20, yang dalam hal ini merupakan gerakan pembaharuan Islam di Indonesia, dan memiliki kontak cukup intensif dengan gerakan pembaharuan di Timur Tengah. Sebagai agama yang universal, Islam membawakan peradabannya sendiri termasuk dalam bidang pendidikan yang berakar pada tradisi yang sangat panjang sejak masa Rasulullah SAW.

Madrasah sudah berkembang pesat dalam sejarah Islam masa pertengahan, tetapi madrasah baru berkembang di Indonesia pada awal abad 20 dengan konotasi madrasah di Timur Tengah masa modern sudah mengajarkan baik ilmu-ilmu agama maupun ilmu-ilmu umum. Sebelum abad 20 tradisi pendidikan Islam di Indonesia agaknya tidak mengenal istilah madrasah, kecuali pengajian al-Qur'an, masjid, langgar, pesantren, *surau*, *meunasah* dan *dayah*. Dalam sistem pendidikan tradisional memang belum dilakukan pengkelasan dalam pengertian modern, tetapi dalam prakteknya

tetap ada penjenjangan yang biasanya diatur berdasarkan tingkatan kitab yang diajarkan.

3. Pendidikan Islam di masa orde lama dan orde baru

Orde baru menolak, pertama, tuntutan kelompok Islam agar Piagam Jakarta dilegalisasikan kembali pada sidang MPRS Tahun 1968. Kedua, dilangsungkannya kongres Umat Islam Indonesia pada tahun yang sama. Kiprah intelektual Islam pada tahun 1970-an dipelopori oleh Nurcholis Majid. Perjuangan umat Islam diarahkan kepada substansi ajaran Islam melalui pemodernan pemahaman Islam. Nurcholis Majid mengumandangkan sekularisasi dilanjutkan wacana keIslaman, seperti sekularisasi dan kontekstualisasi yang dikemukakan oleh Gus Dur, gagasan pribumisasi dan reaktualisasi yang dikemukakan oleh Munawir Syadjali. Harun Nasution juga berperan dalam penyebaran pemikiran mu'tazilah Indonesia.

Pada Tahun 1980 cendekiawan muslim pembaharuan Islam adalah Fachry Ali dan M. Dawam Raharjo yang menyebarkan pemikiran Islam ala Cak Nur. Fachry sebagai pemimpin mengajak teman seangkatan dan juga juniornya seperti Azyumardi Azra, Komaruddin Hidayat, Bahtiar Effendy, Badri Yatim, dan Hadi Mulyo untuk melakukan *Intellectual Community* di Ciputat yang di dasarkan pemikiran Cak Nur. Pasca pembaharuan Nur Cholis Majid, kemudian muncul pemikiran Moeslem Abdurrahman tentang teologi transformatif dan Kuntowijoyo tentang konsep teologi profetik.

Selain dari berbagai tokoh yang ada tersebut, peran organisasi kemasyarakatan juga sangat berpengaruh dalam pengembangan pendidikan Islam di Indonesia. Ada banyak organisasi Islam yang ada di Indonesia, organisasi seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah menjadi organisasi kemasyarakatan yang memiliki penganut terbanyak di Indonesia. Eksistensinya Membuat organisasi itu yang awalnya perkumpulan hingga merambah ke ranah lain seperti sekolah, bisnis, dan lainnya.

Peran Muhammadiyah dalam mewarnai Pendidikan Islam di Indonesia

Pertumbuhan Pendidikan Islam di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari perjuangan tokoh ulama dan rakyat Indonesia. Dalam hal ini, ada beberapa organisasi masyarakat (ormas) Islam yang ikut andil dalam mengembangkan pendidikan Islam, salah satunya adalah organisasi masyarakat Islam bernama Muhammadiyah, yang didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan. Ia dilahirkan di Yogyakarta pada tahun 1869, dengan nama Muhammad Darwis. Ahmad Dahlan merupakan anak dari seorang kyai Haji bernama Abu Bakar bin Kyai

Sulaiman, yang merupakan khotib di masjid Sultan kala itu. Ibunya adalah anak dari seseorang bernama Ibrahim, yang berprofesi sebagai penghulu. Setelah ia menyelesaikan pendidikan dasarnya dalam nahwu, fiqh dan tafsir di Yogya dan sekitarnya. Ia pergi ke Mekah tahun 1890 selama setahun, dan belajar dari salah seorang gurunya di Mekah yang bernama Syekh Ahmad Khatib. Kemudian, sekitar tahun 1903, ia mengunjungi tanah suci dan kembali ke tanah air setelah dua tahun lamanya.

Ahmad Dahlan diakui sebagai salah satu tokoh pembaruan dan pergerakan Islam di Indonesia, karena mengambil peran dalam mengembangkan pendidikan Islam dengan pendekatan-pendekatan yang lebih modern. Pada 1 Desember 1911, ia mendirikan sekolah dasar di lingkungan Keraton Yogyakarta, dan memberikan pengaruh keagamaan yang cukup kuat. Guru-guru pribumi dilibatkan dalam sekolah itu sebagai pengajar dalam mata pelajaran umum dengan sistem pengajaran yang menyerupai sekolah *Gubernemen*, sehingga sekolah ini menerima subsidi pemerintah Hindia Belanda. Ahmad Dahlan kecil tidak belajar di sekolah formal, hal ini karena sikap orang-orang Islam pada waktu itu yang melarang anak-anaknya memasuki sekolah *gubernemen* (Belanda). Namun demikian, Darwis diasuh dan dididik sendiri oleh ayahnya dengan sistem pengajian. Kemudian ia meneruskan pelajaran mengaji Tafsir dan Hadis serta bahasa Arab dan Fiqih kepada ulama di Yogyakarta dan sekitarnya, sehingga menguasai dasar-dasar ilmu agama.

Atas bantuan kakaknya, Haji Shaleh, pada tahun 1890 M, Darwis dikirim ke Mekah untuk memperdalam pengetahuan agama Islam, seperti seni membaca al-Qur'an, Tafsir, Tauhid, Ilmu Hukum dan Ilmu Falaq (perbintangan). Ia tinggal di Mekah kurang lebih satu tahun. Salah seorang gurunya adalah Syekh Ahmad Khatib, ulama' Syafi'iyah di Mekah. Kesempatan belajar di Mekah yang cukup singkat ini, tidak disia-siakan oleh Darwis untuk melakukan dialog intens dengan ide dan pemikiran-pemikiran Wahabi dan kaum pembaru Islam Timur tengah lainnya, seperti Jamaludin al-Afghani (1838-1897) dan Muhammad Abduh (1849-1905). Kemudian, mendorongnya melakukan pembaruan lewat Muhammadiyah di Indonesia. Hal ini diikuti kelompok pembaru lain seperti Persatuan Islam (Persi, didirikan 1923) dan Al Irsyad (didirikan tahun 1913). Bahkan kitab *Tafsir al-Manar* karya pembaru Mesir Syekh Muhammad Abduh sangat diminatinya, tafsir ini memberikan cahaya terang dalam hatinya serta membuka cakrawala berpikir jauh ke depan tentang eksistensi Islam di Indonesia yang pada waktu itu mengalami tekanan karena penjajahan Belanda.

Pada tahun 1903 sampai tahun 1906 KH. Ahmad Dahlan membawa putranya yaitu Muhammad Siradj yang berumur enam tahun ke Mekah. Keberangkatan KH. Ahmad Dahlan ke Mekah untuk kedua kalinya ini dibiayai oleh Sultan Hamengkubuwono VII, dan dilatarbelakangi ide pembaruan KH. Ahmad Dahlan membetulkan arah kiblat Masjid Agung dengan menggarisi lantai Masjid Agung dengan garis miring 241/2 derajat ke utara. Menurut ilmu Hisab yang ia pelajari, arah kiblat tidaklah lurus ke arah Barat seperti arah Masjid Jawa pada umumnya. Perbuatannya ini ditentang masyarakat dan bahkan Kanjeng Kiai Penghulu memerintahkan untuk menghapuskannya. Lalu ia membangun langgar sendiri dengan arah kiblat dimiringkan ke arah utara 241/2 derajat, Kanjeng Kiai Penghulupun merobohkannya. KH. Ahmad Dahlan terus mensosialisasikan ide pembaruannya tersebut hingga hal ini mendapat perhatian dari Sultan Hamengkubuwono VII.

Selanjutnya, berangkatlah KH. Ahmad Dahlan ke Mekah untuk mempelajari dan mendalami ilmu-ilmu agama yang sudah didapat sebelumnya, seperti permasalahan kiblat. Ketika di Mekah selain berguru dengan Syekh Ahmad Khatib al-Minangkabau, ia juga berteman dengan Kyai Nawawi dari Banten, Kyai Mas Abdullah dari Surabaya, Kyai Faqih Maskumambang dari Gresik. Selain itu KH. Ahmad Dahlan juga berguru ilmu Fiqih kepada Kyai Machful Tremas, Kyai Muhtaram Banyumas, Syekh Shaleh Bafadhal. Syekh Sa'id Jamani, Syekh Sa'id Babusyel. Belajar ilmu Hadis kepada Mufti Syafi'i, belajar ilmu Falak kepada Kyai Asy'ari Baweyan dan berguru ilmu Qira'at kepada Syekh Ali Mishri. Pencarian ilmu KH. Ahmad Dahlan dari satu syekh ke Syekh yang lain menunjukkan tradisi keilmuan masa itu antara satu pesantren dengan pesantren lain mempunyai *takhassus* dalam keilmuan tertentu, bila ingin menguasai berbagai keilmuan agama maka harus melakukan pengembaraan keilmuan.

Menurut tradisi pesantren, pengetahuan seseorang diukur oleh jumlah buku yang telah pernah dipelajarinya dan kepada ulama mana ia berguru. Jumlah buku standar dalam tulisan Arab yang dikarang oleh Ulama terkenal yang harus dibaca para santri telah ditentukan oleh lembaga-lembaga pesantren. Kemudian masing-masing kyai dari berbagai pesantren biasanya mengembangkan diri untuk memiliki keahlian dalam cabang pengetahuan tertentu, dimana kitab-kitab yang dibaca juga cukup dikenal, hal inilah yang menjadikan beberapa pesantren mempunyai ketakhassusan dalam disiplin ilmu tertentu. Sebagai contoh Pesantren Tremas di Pacitan dengan kyai-kyainya yang ahli dalam tata bahasa, Pesantren Jampes di Kediri dengan kyai-kyainya yang ahli dalam bidang Tasawuf.

Sebelum mendirikan organisasi Muhammadiyah, KH. Ahmad Dahlan menjadi tenaga pengajar agama di kampungnya. Di samping itu, ia juga mengajar di sekolah negeri, seperti *Kweekschool* (Sekolah Pendidikan Guru) di Jetis Yogyakarta dan *Opleiding School Voor Inlandhsche Ambtenaren* (OSVIA, yaitu sekolah untuk pegawai pribumi) di Magelang. Kemudian, pada awal abad ke 20, umat Islam mengalami kemandegan dan tidak memiliki kemajuan dalam berbagai segi. Umat Islam Indonesia mengalami keadaan formalisme, artinya masyarakat hanya berpegang pada wujud lahir dan tidak menjalankan maksud serta makna yang ada di dalam peraturan dan ketentuan Islam. Tidak terdapat sinar kebesaran dan kecemerlangan dalam masyarakat pemeluk agama Islam di Indonesia pada waktu itu. Kehidupan umat Islam serba susah, ekonomi tidak maju, pendidikan terbelakang dan kehidupan sosial budaya tidak membesarkan hati. KH. Ahmad Dahlan terpenggil untuk turut memikirkan dan memperbaiki keadaan terpuruk umat Islam Indonesia. Usaha KH. Ahmad Dahlan terealisasi dengan berdirinya Organisasi Muhammadiyah.

Organisasi Muhammadiyah didirikan pada tahun 1912, yang kemudian diajukan pengesahannya pada tanggal 20 Desember 1912 dengan mengirim "Statuten Muhammadiyah" (Anggaran Dasar Muhammadiyah yang pertama, tahun 1912), dan baru disahkan oleh Gubernur Jenderal Belanda pada 22 Agustus 1914. Ada sembilan orang tokoh pendiri Muhammadiyah yaitu; K.H. Ahmad Dahlan, H. Abdullah Siradj, Raden Ketib Cendana Haji Ahmad, Haji Abdurrahman, R. H. Sarkawi, H. Muhammad, R. H. Djaelani, H. Anis, dan H. Muhammad Fakih. Gagasan itu juga merupakan saran dari salah seorang siswa KH. Ahmad Dahlan di *Kweekschool* Jetis dimana Kyai mengajar agama pada sekolah tersebut secara ekstrakurikuler, yang sering datang ke rumah Kyai dan menyarankan agar kegiatan pendidikan yang dirintis Kyai Dahlan tidak diurus oleh Kyai sendiri, tetapi oleh suatu organisasi agar terdapat kesinambungan setelah kyai wafat.

Sejarah kelahiran Muhammadiyah didasari oleh dua faktor, yaitu faktor subyektif dan faktor obyektif. Faktor subyektif yang utama dan penentu bagi munculnya Muhammadiyah adalah hasil pendalaman, penelaahan dan pemahaman kritis KH. Ahmad Dahlan terhadap al-Qur'an. Seperti telaah terhadap ayat al-Qur'an, yang terdapat pada surah Ali Imran ayat 104, Allah SWT. berfirman:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.” (QS. Ali Imran: 104)

Atas dasar pendalaman pada ayat tersebut, KH. Ahmad Dahlan berpandangan bahwa umat Islam harus digerakkan untuk berjuang dan beramal dengan suatu kekuatan organisasi. Faktor obyektif yang bersifat internal, yang pertama: Ketidakmurnian pengamalan ajaran Islam akibat tidak dijadikannya al-Qur’an dan sunnah Nabi sebagai satu-satunya rujukan oleh sebagian besar umat Islam Indonesia. Hal ini dikarenakan pengaruh dari kepercayaan dan tradisi Hindu Budha yang lebih dulu datang dan sudah mengakar dalam masyarakat Indonesia. Sehingga terjadilah proses sinkretisme antara agama Hindu dan Islam yang sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Yang kedua, pondok pesantren sebagai salah satu lembaga pendidikan umat Islam sekaligus merupakan sistem pendidikan yang khas di Indonesia yang berkembang saat itu, tidak mampu menghadapi tantangan dan perubahan zaman. Muatan isi yang ada pada sistem pendidikan saat itu dianggap kurang bisa memadai dalam rangka mengantisipasi perkembangan zaman.

Adapun faktor obyektif yang bersifat eksternal bagi munculnya Muhammadiyah adalah, pertama, dikarenakan pengaruh positif *Etische Politiek* yang berakibat pada munculnya golongan intelektual pribumi. Yang kedua, semakin meningkatnya gerakan Kristenisasi di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Belanda ketika masuk ke Indonesia mengibarkan panji “3G”, yaitu *gold* (motif mencari kekayaan), *glory* (motif berkuasa), dan *gospel* (motif menyebarkan ideologi). Dalam mewujudkan tiga motif tersebut pemerintah Hindia Belanda menggarap penduduk pribumi lewat dua langkah besar, yaitu program asosiasi. Faktor obyektif yang bersifat eksternal yang ketiga: pengaruh gerakan pembaruan dalam dunia Islam. Gerakan Muhammadiyah yang dibangun KH. Ahmad Dahlan sesungguhnya merupakan salah satu mata rantai yang panjang dari gerakan pembaruan dalam Islam yang dimulai sejak tokoh pertamanya, yaitu Ibnu Taimiyyah, Muhammad bin Abdul Wahab, Jamaludin al Afghani, Muhammad Abduh, Rasyid Ridha dan sebagainya., Organisasi Sosial dan Pendidikan Islam Muhammadiyah. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, dan juga hasil interaksi

KH. Ahmad Dahlan dengan kawan-kawan dari Budi Oetomo serta KH. Syekh Ahmad Syurkati, Ahmad Dahlan dengan dibantu oleh murid-muridnya, mendirikan organisasi Muhammadiyah.

Setelah berdirinya organisasi Muhammadiyah, KH. Ahmad Dahlan memberikan nasihat dan mengungkapkan akan pentingnya pendidikan untuk kemajuan organisasi Muhammadiyah khususnya umat Islam pada umumnya. Muhammadiyah sekarang ini lain dengan Muhammadiyah yang akan datang. Maka teruslah kamu bersekolah, menuntut ilmu pengetahuan di mana saja. Jadilah guru, kembalilah ke Muhammadiyah. Jadilah dokter, kembalilah ke Muhammadiyah. Jadilah master, insinyur dan lain-lain dan kembalilah kepada Muhammadiyah. Pernyataan KH. Ahmad Dahlan tersebut menunjukkan betapa ia peduli terhadap masa depan dan kemajuan organisasi Muhammadiyah dengan mengajak pada para anggota-anggota Muhammadiyah untuk menjadikan menuntut ilmu sebagai prioritas sebagai media mencapai tujuan yang dicita-citakan dan meningkatkan kualitas diri untuk kepentingan masyarakat sehingga akan muncul generasi yang intelek ulama.

Adapun intelek ulama yang berkualitas yang akan diwujudkan itu harus memiliki kepribadian al-Qur'an dan sunnah. Dalam hal ini, Ahmad Dahlan memiliki pandangan mengenai pentingnya pembentukan kepribadian sebagai target penting dari tujuan-tujuan pendidikan. Dia berpendapat bahwa tidak seorangpun dapat mencapai kebesaran di dunia ini dan di akhirat kecuali mereka yang memiliki kepribadian yang baik. Seorang yang berkepribadian yang baik adalah orang yang mengamalkan ajaran-ajaran al-Quran dan hadis. Karena Nabi merupakan contoh pengamalan al-Qur'an dan hadis, maka dalam proses pembentukan kepribadian siswa harus diperkenalkan pada kehidupan dan ajaran-ajaran Nabi.

Peran Nahdlatul Ulama dalam mewarnai Pendidikan Islam di Indonesia

Perkembangan pendidikan Islam di Indonesia diwarnai dengan berbagai tokoh ulama dan organisasi masyarakat Islam yang ikut membantu perkembangan pendidikan Islam di Indonesia. Selain ormas Islam yang bernama Muhammadiyah, ada juga ormas Islam yang bernama Nahdlatul Ulama atau sering disebut dengan singkatan NU, yang didirikan oleh KH. Hasyim Asy'ari. Ia lahir dari keluarga elit Kyai Jawa pada tanggal 24 Dzul Qādah 1287 / 14 Februari 1871, di desa Gedang, Jombang. Ayahanda KH. Hasyim Asy'ari adalah Kyai Asy'ari yang berasal dari Demak, Semarang. Kyai

Asy'ari adalah santri Kyai Usman (pendiri Pesantren Gedang) yang paling pandai, cakap, rajin dan bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, dan karena kedekatan Kyai Asy'ari dengan gurunya Kyai Usman, diambillah ia sebagai menantu Kyai Usman dengan dijodohkan dengan puterinya yang bernama Halimah. Ibu KH. Hasyim Asy'ari merupakan anak pertama dari tiga saudara laki-laki dan dua perempuan: Muhammad, Leler, Fadil dan Nyonya Arif. Selain itu, moyangnya yakni Kyai Sihah, adalah pendiri Pesantren Tambakberas, Jombang.

KH. Hasyim Asy'ari dibesarkan sejak kecil sampai berusia 14 tahun dalam asuhan orang tua dan kakeknya Kyai Usman di Pesantren Gedang. Di pesantren ini para santri mengamalkan ajaran agama Islam dan belajar berbagai cabang ilmu agama Islam. Suasana ini tidak diragukan lagi mempengaruhi karakter KH. Hasyim Asy'ari yang sederhana dan rajin belajar. Ketidakpuasan dan dahaga yang sangat terhadap ilmu, membuat ia berkeinginan untuk mencari sumber pengetahuan lain, di luar pesantren ayahnya. Oleh sebab itu, semenjak usia 15 tahun, ia berkelana dari satu pesantren ke pesantren lain. Tradisi berkelana mencari ilmu dari satu pesantren ke pesantren lainnya merupakan aktualisasi dari ajaran Islam bahwa kewajiban mencari ilmu tidak ada ujung akhirnya. Seorang santri seringkali dikatakan sebagai *talib al-'ilmi* (pencari ilmu) yang mencari guru yang paling masyhur dalam berbagai cabang-cabang pengetahuan Islam. Dengan demikian pengembaraan merupakan ciri utama kehidupan pengetahuan di pesantren dan menyumbangkan terbangunnya kesatuan sistem pendidikan pesantren dan stimulus bagi kemajuan ilmu. Tradisi pesantren ini merupakan hasil akulturasi kebudayaan antara dorongan orang Jawa untuk mencari hakikat kehidupan dan kebijaksanaan, dan tradisi Islam di mana berkelana mencari ilmu merupakan ciri utama sistem pendidikan zaman Abbasiyah.

Mulai menjadi santri di Pesantren Wonokoyo (Probolinggo), Pesantren Langitan (Tuban), Pesantren Trenggilis (Semarang), Pesantren Kademangan, Bangkalan di bawah asuhan Kyai Kholil. Namun tidak lama berada di bawah asuhan Kyai Kholil, Hasyim pindah lagi ke Pesantren Siwalan, Sidoarjo yang diasuh oleh Kyai Ya'qub. Kyai Ya'qub dikenal sebagai ulama yang berpandangan luas dan alim dalam ilmu agama. Di sinilah, agaknya Hasyim merasa benar-benar menemukan sumber pengetahuan Islam yang diinginkannya. Kyai Ya'qub kagum terhadap kecerdasan dan kealiman pemuda Hasyim Asy'ari, sehingga berkeinginan untuk mengambil menantu. Akarhanaf menyebutkan bahwa pada mulanya, KH. Hasyim Asy'ari berkeberatan terhadap maksud sang Kyai, karena ia masih berhasrat untuk memperdalam ilmu pengetahuan.

Setelah menikah, KH. Hasyim Asy'ari mendapat hadiah lain dari mertuanya berupa naik haji bersama istrinya. Sekembali dari tanah suci, mertua KH. Hasyim Asy'ari menganjurkannya untuk menuntut ilmu di Mekah. Dimungkinkan hal ini didorong tradisi pada saat itu seorang ulama belum dikatakan cukup ilmunya jika belum menuntut ilmu ke Mekah selama bertahun-tahun. KH. Hasyim Asy'ari menuntut ilmu di Mekah selama tujuh tahun lamanya, mulai tahun 1893 M sampai tahun 1900 M. Ia belajar berbagai disiplin ilmu di antaranya ilmu Fiqih Syafi'iyah dan Ilmu hadis terutama literatur *Shahih Bukhari* dan Muslim kepada Syekh Mahfud al-Tarmasy, putra Kyai Abdullah, yakni pemimpin Pesantren Tremas, Pacitan, Jawa Timur. Dari Syekh Mahfud al-Tarmasy inilah KH. Hasyim Asy'ari mendapat ijazah untuk mengajar hadis *Shahih Bukhari*.

Selain itu, KH. Hasyim Asy'ari banyak belajar kepada ulama besar lainnya seperti Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi imam Masjidil Haram penganut madzhab Syafi'i, syekh al-'allahamah Abdul Hamid al-Darustany, Syekh Muhammad Syu'aib, Syekh Ahmad Amin al-Attar, Syekh Sultan Bin Hisyam, Sayyid Ahmad Zawawi, Syekh Ibrahim Arab, Syekh Said Yamani, Sayyid Huseini al-Habsy, Sayyid Bakar Syathha, Syekh Rahmatullah, Sayyid Alawi Bin Ahmad al-Saqqaf, Sayyid Abbas Maliky, Sayyid Abdullah al-Zawawy, Syekh Saleh Bafadol dan Syekh Sulthan Hasyim Daghastani. Disebutkan juga beliau juga belajar dengan Syekh Nawawi al-Bantani. Bahkan dari pemikiran Syekh Nawawi al-Bantanilah memberi pengaruh besar terhadap rasa patriotisme, anti-kolonialisme dan imperialisme KH. Hasyim Asy'ari. Hal ini nampak pada masa gerakan revolusioner Nusantara, KH. Hasyim Asy'ari mengeluarkan resolusi jihad yang berisi seruan untuk mempertahankan kemerdekaan dan mengusir penjajah dari tanah air. Hasil dari resolusi jihad tersebut adalah meletusnya peristiwa 10 November di Surabaya yang kemudian diperingati sebagai hari pahlawan.

Tahun 1900 KH. Hasyim Asy'ari kembali dari Mekah dan mengajar beberapa bulan di pesantren ayahnya, sebelum mencoba mendirikan pesantren sendiri di tempat mertuanya, Plemahan (Kediri). Namun, usaha ini tidak berhasil. Tidak surut dari semangat mendirikan pesantren, ia mencoba lagi dan kali ini ia berhasil mendirikan sebuah pesantren di desa Tebuireng, sekitar dua kilometer dari pesantren ayahnya. KH. Hasyim Asy'ari adalah sosok ulama yang *parexcellent* yang mewariskan ilmu dan amal. Warisan ilmu KH. Hasyim Asy'ari terwujud dari karya-karyanya yang begitu banyak, di antaranya sebagaimana didokumentasikan oleh cucunya Isham Hadziq, antara lain:

1. *Al-Tibyan fi al-Nahyi 'an Muqata'at al-Arham wa al-Aqarib wa al-Ikhwān*, diterbitkan oleh Maktabah al-Turath al-Islami, Pesantren Tebuireng. Secara umum, buku ini berisi pentingnya membangun persaudaraan di tengah perbedaan serta bahaya memutus tali persaudaraan;
2. *Muqaddimah al-Qanun al-'Asasi li Jam'iyat Nahdlatul Ulama'*, karangan ini berisi pemikiran dasar NU terdiri dari ayat-ayat al-Qur'an, hadis dan pesan-pesan penting yang melandasi berdirinya NU;
3. *Risalah fi Ta'kid al-Akhdzi bi Madzhab al-Aimmah al-Arba'ah*, karangan ini berisi pentingnya berpedoman kepada empat imam Madzhab, yaitu Iman Syafi'I, Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal;
4. *Mawa'idz*, karangan ini berisi nasehat bagaimana menyelesaikan masalah yang muncul di tengah umat akibat hilangnya kebersamaan dalam membangun pemberdayaan;
5. *Arba'ina hadisan Tata'allaqu bi Mabadi' Jam'iyat Nahdlatul Ulama*, karya ini berisi 40 hadis yang mesti dipedomani oleh Nahdlatul Ulama;
6. *An-Nur al-Mubin fi Mahabbati Sayyid Al-Mursalin*. Kitab ini berisi seruan agar tiap Muslim mencintai Rasulullah SAW dengan mengirim shalawat setiap saat dan mengikuti ajarannya;
7. *Al-Tanbihat al-Wajibat Liman Yashna' al Mawlid bi al-Munkarat*, kitab ini berisi tentang peringatan tentang hal-hal yang harus diperhatikan dalam merayakan Maulid Nabi;
8. *Risalah Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah fi hadis al-Mawta wa Syuruth al-Sa'ah wa Bayani Mafhum al-Sunnah wa al-Bid'ah*, kitab ini merupakan salah satu karya penting karena di dalamnya diberikan distingsi paradigmatis antara sunnah dan bid'ah;
9. *Ziyadat Ta'liqat 'ala Mandzumah Syaikh 'Abdullah bin Yasin al-Fasuruani*, kitab ini berisi perdebatan antara KH. Hasyim Asy'ari dan Syaikh 'Abdullah bin Yasin;
10. *Dhaw'il Misbah fi Bayan Ahkam al-Nikah*, kitab ini berisi hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan, mulai dari aspek hukum, syarat, rukun, hingga hak-hak dalam pernikahan;
11. *Al-Dzurrah al-Muntashirah fi Masa'il Tis'a 'Asharah*, kitab ini berisi 19 masalah tentang kajian wali dan *tariqah*;
12. *Ar-Risalah fi al-Tasawuf*, berisi masalah tasawuf, kitab ini dicetak dalam satu buku dengan kitab *al-Risalah fi al Aqa'id*;
13. *Adab al-'Alim wa al-Muta'allim fi ma Yahtaju Ilayh al-Muta'allim fi Ahwal Ta'limihi wa ma Yatawaqqafu 'alayhi al-Mu'allim fi Maqamati Ta'limihi*, kitab ini berisi hal-hal yang harus dipedomani oleh seorang pelajar dan

pengajar sehingga proses belajar-mengajar berlangsung dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan dalam dunia pendidikan, kitab ini merupakan resume dari beberapa kitab yaitu *Adab al-Mu'allim* karya Syaikh Muhammad bin Sahnun (871 M);

14. *Ta'lim al-Muta'allim fi Tariqah al-Ta'allum* karya Syaikh Burhanuddin al Zarnuji, dan *Tadzkirot al-Shaml wa al-Mutakallim fi 'Adab al-'Alim wa al-Muta'allim* karya Syaikh Ibnu Jama'ah.

Selain ke-14 karya di atas, ada sejumlah karya yang masih dalam bentuk manuskrip dan belum diterbitkan. Karya-karya tersebut antara lain:

1. *Hashiyat 'ala Fath al-Rahman bi Sharh Risalat al-Wali Ruslan li Syaikh al-Islam Zakariyya al-Anshari*;
2. *Al-Risalat al-Tawhidiyyah al-Qalaid fi Bayan ma Yajib min al-Aqa'id*;
3. *Al-Risalat al-Jama'ah*;
4. *Tamyuz al-Haqq min al-Batil*;
5. *Al-Jasus fi Ahkam al-Nuqus*;
6. *Manasik Sughra*.

Adapun warisan amal yang ditinggalkan KH. Hasyim Asy'ari adalah berdirinya organisasi Nahdlatul Ulama, perjuangan nasional dan pengabdianya di pesantren. Karya-karyanya yang telah membentuk sebuah karakter keberagaman yang khas keindonesiaan, yang mampu beradaptasi dengan kebudayaan lokal dan tradisi-tradisi yang berkembang, khususnya tradisi Jawa. Melalui karya-karya tulis inilah dapat ditelusuri berbagai pemikiran KH. Hasyim Asy'ari, selain melalui aktifitas dan usaha dalam berbagai kegiatan seperti membentuk Organisasi Nahdlatul Ulama (NU). Organisasi NU berdiri pada tanggal 31 Januari 1926 sebagai gerakan sosial keagamaan untuk menjawab dua tantangan yang saat itu sedang terjadi.

Pertama, globalisasi Wahabi, ketika Arab Saudi dikuasai oleh kelompok Wahabi, dunia Islam banyak mengimpor gagasan-gagasan Wahabi dalam bentuk pemurnian Islam. gerakan Wahabi yang kemudian mengambil bentuk *salafiyah* dengan puritannya dan berbagai variannya seperti terjelma dalam diri Syaikh Soorkati, KH. Ahmad Dahlan, A Hassan dan perintis-perintis awal pemurnian dengan segala perbedaan masing-masing, mulai muncul kontestasi dan kontroversi dengan keislaman pesantren yang bercorak tasawuf, bertarekat dan bermadzhab. Kedua, globalisasi imperialisme fisik konvensional yang dilakukan Belanda, Inggris dan Jepang atas Indonesia. Akibat dua dorongan ini, sebuah rapat para ulama di Surabaya tanggal 31 Januari 1926 akhirnya memutuskan untuk mengirimkan Komite Hijaz dan membentuk NU.

Deliar Noer memberi dua alasan berdirinya NU sebagai benteng perlawanan para pembaru: pertama, untuk mengimbangi Komite Khilafat yang secara berangsur-angsur jatuh ke tangan golongan pembaru. Kedua, untuk berseru kepada Ibnu Sa'ud, penguasa baru di tanah Arab, agar kebiasaan beragama secara tradisi dapat diteruskan, usulan ini disampaikan pada kongres Al Islam (di Yogyakarta 21-27 Agustus 1925 dan Bandung 6 Februari 1926) yang diadakan sebagai reaksi atas undangan dari Ibnu Sa'ud kepada Kaum Islam di Indonesia untuk menghadiri kongres di Mekah. Usulan KH. A. Abdul Wahab untuk melestarikan Islam tradisi pada kongres Islam tidak mendapat sambutan pada Kongres Islam yang didominasi para pembaru Islam Indonesia, KH. A. Abdul Wahab dan ke tiga temannya keluar dari kongres Islam selanjutnya berinisiatif mengadakan rapat-rapat kalangan kaum tua, mulanya ulama dari Surabaya, kemudian Semarang, Pasuruan, Lasem, Pati. Mereka bersepakat mendirikan panitia yang disebut Komite Merembuk Hijaz, komite inilah yang diubah menjadi Nahdlatul Ulama di Surabaya tanggal 31 Januari 1926.

Sumber-sumber tertulis dan kebijakan-kebijakan yang diambil semasa hidupnya serta keterlibatannya dalam berbagai forum dapat menjadi sumber yang dijadikan untuk menggambarkan pemikiran beliau. Karakter pemikiran pendidikan KH. Hasyim Asy'ari dapat dimasukkan ke dalam garis mazhab Syafi'iyah. Karena disadari atau tidak hampir segala bentuk tindakan syar'i yang dilakukan oleh KH. Hasyim Asy'ari adalah berdasarkan pada mazhab Syafi'i. Bukti yang cukup kuat untuk menunjukkan hal itu adalah banyaknya ulama Syalafi'iyah, termasuk imam al-Syafi'i sendiri, yang seringkali dikutip oleh penulis kitab ini ketimbang ulama mazhab lain. Maka, tidak heran apabila ide-ide atau gagasan pendidikan yang dikeluarkan oleh KH. Hasyim Asy'ari lebih kental dengan Syafi'i.

Kecenderungan lain dalam pemikiran KH. Hasyim Asy'ari tentang pendidikan Islam adalah mengetengahkan nilai-nilai estetis yang bernafaskan sufistik. Kecenderungan ini dapat terbaca dalam gagasan-gagasannya. Misalnya dalam keutamaan menuntut ilmu. Untuk mendukung itu dapat dikemukakan bahwa KH. Hasyim Asy'ari ilmu yang sangat istimewa adalah bagi orang yang benar-benar *Lillahi Ta'ala*. Kemudian, ilmu dapat diraih jika jiwa orang yang mencari ilmu tersebut suci dan bersih dari segala sifat yang jahat dan aspek-aspek keduniawian. Kecenderungan yang demikian agaknya lebih didominasi oleh pemikiran KH. Hasyim Asy'ari yang juga menekankan pada dimensi sufistik sehingga cukup kentara nuansa-nuansa demikian pada karya-karya itu. Kecenderungan ini merupakan wacana

umum bagi literatur-literatur kitab kuning yang tidak bisa dihindari dari persoalan-persoalan sufistik, yang secara umum merupakan bentuk replikasi atas prinsip-prinsip sufisme al-Ghazali.

KH. Hasyim Asy'ari aktif mengoganisir perjuangan politik melawan kolonial untuk menggerakkan masa, dalam upaya menentang dominasi politik Belanda. Pada tanggal 7 September 1947 (1367 H), KH. Hasyim Asy'ari, yang bergelar Hadrat Asy-Syaikh wafat. Berdasarkan keputusan Presiden No. 29/1964, ia diakui sebagai seorang pahlawan kemerdekaan nasional, suatu bukti bahwa ia bukan saja tokoh utama agama, tetapi juga sebagai tokoh nasional.

Pemikiran pendidikan KH. Hasyim Asy'ari sangat dipengaruhi dengan keahliannya dalam bidang hadis, fiqh dan tasawuf. Serta didorong pula oleh situasi pendidikan yang terjadi pada saat itu, dari kebiasaan lama yang sudah mapan ke dalam bentuk modern akibat pengaruh sistem pendidikan barat yang diterapkan Hindia Belanda di Indonesia. Didukung dengan KH. Hasyim Asy'ari yang dilahirkan dan dibesarkan dalam lingkungan pesantren, menuntut ilmu dan berkecimpung langsung di dalamnya, serta interaksinya saat menuntut ilmu di pesantren-pesantren Jawa dan dengan para ulama di Mekah. Atas dasar pengalamannya, hal ini sangat mempengaruhi pola pikir dalam konsep pendidikan Islam. KH. Hasyim Asy'ari menyebutkan bahwa tujuan utama ilmu pengetahuan dan belajar adalah mengamalkan agar ilmu yang dimiliki menghasilkan manfaat sebagai bekal untuk kehidupan akhirat kelak dan merupakan ibadah untuk mencari ridha Allah.

Banyak faktor yang mempengaruhi pemikiran pendidikan KH. Hasyim Asy'ari. Pemikiran Pendidikan KH. Hasyim Asy'ari yang tertuang dalam kitab *Adab al-'Alim wa al-Muta'allim fi ma Yahtaju Ilayh al-Muta'allim fi Ahwal Ta'limihi wa ma Yatawaqqafu 'alayhi al-Mu'allim fi Maqamati Ta'limihi*, dijelaskan secara gamblang kode etik seorang pendidik dan peserta didik dalam mendapatkan ilmu, sehingga tidak salah orang mengatakan bahwa kitab yang dikarang oleh KH. Hasim Asy'ari merupakan kitab dengan desain dua karakter (*double cover*) yang mensejajarkan peserta didik dan pendidik bersama-sama dilejut untuk senantiasa semangat belajar dan kreatif serta antusias dalam tirakat sebagai modal dalam pengumpulan ilmu pengetahuan yang beda secara konsep dan substansi dengan kitab lain pada umumnya yang semasa dengan kitab tersebut. Pemikiran ini mirip pemikiran Burhan al-Din al-Zarnuji dengan karyanya *Ta'lim al-Muta'allim Tariq al-Ta'allum*, yang lebih dulu ada, yaitu berisi paradigma belajar dengan mengacu pada penghargaan dan penjunjangan terhadap nilai pendidikan yang berakar paradigma akhlak bernuansa sufistik.

KH. Hasyim Asy'ari menyimpulkan bahwa tujuan pendidikan Islam di samping pemahaman terhadap pengetahuan adalah pembentukan *insan Islam kamil* yang penuh pemahaman secara benar dan sempurna terhadap ajaran-ajaran Islam serta mampu mengaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari secara konsisten. Tujuan pendidikan ini akan mampu direalisasikan jika siswa mampu terlebih dahulu mendekatkan diri pada Allah SWT dan ketika proses dalam pendidikan berlangsung, dalam diri siswa harus steril dari unsur materialisme, kekayaan, jabatan dan popularitas. Dari sini nampak KH. Hasyim Asy'ari mengedepankan nilai-nilai ketuhanan.

Dengan mengedepankan nilai-nilai tersebut, harapannya semua manusia yang dalam melaksanakan dan ikut dalam proses pendidikan selalu menjadi insan purna yang bertujuan selalu mendekatkan diri kepada Allah SWT, sehingga mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Oleh karenanya, pendidikan budi pekerti dan akhlak merupakan jiwa dari pendidikan Islam. Pemahaman ini tidak berarti bahwa pendidikan Islam tidak memperhatikan terhadap pendidikan jasmani, akal, dan ilmu pengetahuan.

Masa Depan dan Tantangan Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia

Pembaharuan bisa diartikan belum dipahami, belum diterima, atau belum dilaksanakan oleh penerima pembaharuan, meskipun bukan hal baru bagi orang lain. Secara etimologis, pembaharuan merupakan asal kata dari *modernasition* yang dalam berarti proses menjadi baru. Pembaharuan berarti upaya untuk menata kembali struktur-struktur sosial, politik, pendidikan dan keilmuan yang mapan dan ketinggalan zaman, termasuk struktur pendidikan Islam. Jika dilihat konteks pembahasan dalam tulisan ini, pembaharuan yang dimaksud adalah pembaharuan pendidikan.

Pembaharuan pendidikan biasanya digunakan sebagai proses perubahan untuk memperbaiki keadaan sebelumnya menuju kondisi yang lebih baik. Pendidikan Islam dalam hal ini diartikan bimbingan jasmani rohani, berdasarkan hukum-hukum agama Islam menuju kepada terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam. Menurut Muhaimin, pendidikan Islam adalah pendidikan yang dipahami dan dikembangkan serta disusun dari ajaran-ajaran dan nilai-nilai yang terkandung dalam al-Quran dan hadits. Dalam konteks inilah, gagasan-gagasan pemikir seperti Ahmad Tafsir, Azyumardi Azra, Abuddin Nata, A. Malik Fadjar, dan Muhaimin menjadi ekslempar penting dan cukup relevan untuk dikaji sebagai representasi teori Pembaharuan pendidikan Islam dalam merespons *problem* pendidikan Islam saat ini.



BAB II

MENELISIK PEMIKIRAN AHMAD TAFSIR TENTANG FILSAFAT PENDIDIKAN ISLAM

Biografi dan karir intelektual Ahmad Tafsir

Ahmad Tafsir lahir di Bengkulu 19 April 1942. Pendidikannya diawali di Sekolah Rakyat (sekarang SD) di Bengkulu, melanjutkan sekolah di PGA (Pendidikan Guru Agama) selama 6 tahun di Yogyakarta. Selanjutnya belajar di Fakultas Tarbiyah IAIN Yogyakarta, dan menyelesaikan Jurusan Pendidikan Umum pada tahun 1969. Kemudian, Ahmad Tafsir mengambil mengambil kursus Filsafat di IAIN Yogyakarta sejak tahun 1975-1976 (selama 9 bulan). Pada tahun 1982, dirinya mengambil Program Strata Dua (S2) di IAIN Jakarta. Kemudian, tahun 1987 dirinya sudah menyelesaikan S3 di IAIN Jakarta juga. Sejak tahun 1970, Tafsir mengajar di Fakultas Tarbiyah IAIN Bandung, sampai sekarang. Dan pada tahun 1993, Ahmad Tafsir menjadi Guru Besar Ilmu Pendidikan dan mempelopori berdirinya Asosiasi Sarjana Pendidikan Islam. (ASPI). Sejak Januari 1997 diangkat menjadi Guru Besar pada Fakultas Tarbiyah IAIN Bandung.

Pada dasarnya Ahmad Tafsir merupakan praktisi di bidang pendidikan dan dakwah. Pengalaman pendidikan, pekerjaan, dan pergaulannya menempatkannya sebagai sosok yang kaya pengalaman dengan lingkungan pergaulan yang luas menembus batas. Latar belakang pendidikannya berangkat dari Pesantren Salafi, tetapi selanjutnya mengikuti pendidikan formal hingga pada jenjang pendidikan doktoral (S3). Setelah lulus pada jenjang pendidikan doktoral tersebut, kemudian Ahmad Tafsir menjadi dosen sekaligus guru besar Ilmu Pendidikan di fakultas tarbiyah IAIN Bandung, dan di lembaga ini Ahmad Tafsir memulai menuliskan buku berjudul *filsafat pendidikan Islami* pada tahun 2012.

Ahmad Tafsir sebagai guru besar telah banyak mencurahkan pemikirannya dengan menyusun beberapa karya berbentuk tulisan. Di antara karya tulis yang telah dipublikasikan oleh Ahmad Tafsir, adalah sebagai berikut:

1. Filsafat Pendidikan Islami, yang diterbitkan di Bandung, oleh penerbit PT. Remaja Rosdakarya, pada tahun 2006;
2. Metodologi Pengajaran Agama Islam, yang diterbitkan di Bandung, oleh penerbit PT. Remaja Rosdakarya, pada tahun 2002;
3. Filsafat Ilmu Mengurai Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi Pengetahuan, yang diterbitkan di Bandung, oleh penerbit PT. Remaja Rosdakarya, pada tahun 2004;
4. Filsafat Umum Akal dan Hati Sejak Thales Sampai Capra, yang diterbitkan di Bandung, oleh penerbit PT. Remaja Rosdakarya, pada tahun 2004;
5. Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam, yang diterbitkan di Bandung, oleh penerbit PT. Remaja Rosdakarya, pada tahun 2004;

Keresahan Ahmad Tafsir mengenai pemikiran pendidikan Islam diawali dengan tidak adanya pondasi yang kuat dalam memahami ritme pemikiran pendidikan Islam. Pondasi yang digunakan sebagai logika berpikir dalam memahami pemikiran Islam. Filsafat terdiri dari ontologi, epistemologi, dan aksiologi.

Filsafat Ilmu sebagai Pondasi Berfikir menurut Ahmad Tafsir

Logika berpikir yang dibangun oleh Ahmad Tafsir berangkat dengan menggunakan logika filsafat. Kata filsafat berasal dari bahasa Yunani, yakni *philosophia*. Kata *philosophia* merupakan gabungan dari dua kata, yakni *philos* dan *sophia* dengan makna pengetahuan dan kearifan. Dengan demikian, arti dari kata *philosophia* adalah cinta pengetahuan. Kemudian, *philosophia* juga diartikan sebagai orang yang senang mencari ilmu dan kebenaran. Dalam karyanya yang berjudul Filsafat Ilmu: Mengurai Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Pengetahuan (2004), Ahmad Tafsir menguraikan pemikirannya yang berfokus pada pengetahuan pada *science* dan pengetahuan pada filsafat menggunakan struktur asumsi filosofis, yakni ontologi, epistemologi, dan aksiologi.

Pengetahuan Science

Pembahasan pengetahuan *science*, berbicara tentang ontologi *science* yang membahas hakikat dan struktur *science*. Kemudian, Epistemologi *science* difokuskan pada cara kerja metode ilmiah. Sedangkan, pembahasan aksiologi *science* diutamakan pada cara sains menyelesaikan masalah yang

dihadapi manusia.

1. **Ontologi Pengetahuan *Science***

Ontologi *science* membahas mengenai hakikat dan struktur pengetahuan *science*. Jika dijelaskan, hakikat *science* membahas dan menjawab pertanyaan apa *science* itu sebenarnya. Sedangkan struktur *science* seharusnya menjelaskan cabang-cabang *science*, serta isi setiap cabang itu. Namun, di sini hanya dijelaskan mengenai cabang-cabang dari *science* itu sendiri.

a. **Hakikat Pengetahuan *Science***

Pengetahuan *science* adalah pengetahuan rasional empiris. Masalah rasional dan empiris inilah yang akan dijadikan sebagai pembahasan yakni, pertama, masalah rasional. Hipotesis yang dibangun harus berdasarkan rasio, dengan kata lain hipotesis harus rasional. Hipotesis yang telah diajukan belum diuji kebenarannya. Kebenarannya barulah dugaan. Tetapi hipotesis itu telah mencukupi dari segi kerasionalannya. Dengan kata lain, hipotesis yang diajukan tersebut telah rasional. Kata “rasional” di sini menunjukkan adanya hubungan pengaruh atau hubungan sebab akibat.

Langkah selanjutnya, pembahasan mengenai masalah empiris. Yang dimaksud di sini adalah hipotesis yang telah diajukan tersebut mulai diuji (kebenarannya) mengikuti prosedur metode ilmiah, bisa menggunakan metode eksperimen ataupun metode lainnya. Pada dasarnya cara kerja *science* adalah kerja mencari hubungan sebab-akibat atau mencari pengaruh sesuatu terhadap yang lain. Asumsi dasar *science* ialah tidak ada kejadian tanpa sebab.

b. **Struktur Pengetahuan *Science***

Secara garis besar pengetahuan *science* dibagi dua, yaitu *science* kealaman dan *science* sosial. Dalam hal ini, Ahmad Tafsir menjelaskan mengenai cabang-cabang dari pengetahuan *science* itu sendiri. Jika dirincikan, yakni:

- 1) *Science* kealaman terdiri dari beberapa cabang, yakni astronomi, fisika (mekanika, bunyi, cahaya dan optik, serta fisika nuklir), kimia (kimia organik, dan kimia teknik), ilmu bumi (paleontologi, ekologi, geofisika, geokimia, mineralogi, dan geografi), dan ilmu hayati (biofisika, botani, dan zoologi);
- 2) *Science* sosial terdiri dari beberapa cabang, yakni sosiologi (sosiologi komunikasi, sosiologi politik, dan sosiologi pendidikan), antropologi (antropologi budaya, antropologi ekonomi, antropologi politik), psikologi (psikologi pendidikan, psikologi anak, psikologi

abnormal), ekonomi (ekonomi makro, ekonomi lingkungan, dan ekonomi pedesaan), dan politik (politik dalam negeri, politik hukum, dan politik internasional;

- 3) Humaniora terdiri dari beberapa cabang, yakni seni (seni abstrak, seni grafika, seni pahat, dan seni tari), hukum (hukum pidana, hukum tata usaha negara, hukum adat), filsafat (logika, etika, dan estetika), bahasa (sastra), agama (Islam, Kristen, dan Confusius), dan sejarah (sejarah Indonesia, dan sejarah dunia).

2. Epistemologi Pengetahuan *Science*

Epistemologi *science* difokuskan pada cara memperoleh pengetahuan *science* dan cara mengukur benar-tidaknya pengetahuan *science*. Dalam hal ini, epistemologi pengetahuan *science* berbicara tentang tiga hal, yakni objek pengetahuan *science*, cara memperoleh pengetahuan *science*, dan ukuran kebenaran dari pengetahuan *science*.

a. Objek pengetahuan *science*

Objek pengetahuan *science* (objek-objek yang diteliti *science*) ialah semua objek yang empiris. Dalam hal ini, objek kajian *science* hanyalah objek yang berada dalam ruang lingkup pengalaman manusia. Yang dimaksud pengalaman di sini ialah pengalaman indera. Objek kajian *science* haruslah objek-objek yang empiris sebab bukti-bukti yang harus ia temukan adalah bukti-bukti yang empiris. Bukti empiris ini diperlukan untuk menguji bukti rasional yang telah dirumuskan dalam hipotesis.

b. Cara memperoleh pengetahuan *science*

Pengalaman manusia sudah berkembang sejak lama. Yang dapat dicatat dengan baik ialah sejak tahun 600-an SM. Yang mula-mula timbul agaknya ialah pengetahuan filsafat dan hampir bersamaan dengan itu berkembang pula pengetahuan *science* dan pengetahuan mistik. Kemudian, perkembangan *science* juga didorong oleh paham Humanisme. Humanisme ialah paham filsafat yang mengajarkan bahwa manusia mampu mengatur dirinya dan alam. Setelah adanya paham humanisme, kemudian lahirlah paham rasionalisme, sebagai perwujudan dari manusia yang memiliki akal untuk berpikir.

Rasionalisme ialah paham yang mengatakan bahwa akal itulah alat pencari dan pengukur pengetahuan. Setelah adanya paham rasionalisme tersebut, selanjutnya lahirnya paham empirisme. Empirisme ialah paham filsafat yang mengajarkan bahwa yang benar ialah yang logis dan ada bukti empiris. Empirisme hanya menemukan konsep yang sifatnya umum. Konsep itu belum operasional, karena belum terukur.

Jadi, masih diperlukan alat lain. Alat lain itu ialah aliran Positivisme. Positivisme mengajarkan bahwa kebenaran ialah yang logis, ada bukti empirisme, yang terukur.

c. Ukuran kebenaran pengetahuan *science*

Jika Anda mengambil sebuah buku Ilmu (*science*) mengenai Pendidikan, maka Anda akan menemukan teori-teori tentang pendidikan. Jika anda mengambil literasi tentang Ilmu Bumi, maka akan membicarakan teori-teori tentang bumi. Kemudian, jika literasi Ilmu Hayat maka akan membahas teori-teori tentang makhluk hidup., demikian seterusnya. Jadi, isi ilmu ialah teori. Berkaitan dengan sebuah kebenaran yang logis, berangkat dari pembuktian dari hipotesis.

Jika hipotesis terbukti, maka pada saatnya ia menjadi teori. Jika sesuatu teori selalu benar, yaitu jika teori itu selalu didukung bukti empiris, maka teori itu naik tingkat keberadaannya menjadi hukum atau *aksioma*. Hipotesis (dalam *science*) ialah pernyataan yang sudah benar secara logika, tetapi belum ada bukti empirisnya. Belum atau tidak ada bukti empiris bukanlah merupakan bukti bahwa hipotesis itu salah. Hipotesis benar, bila logis, titik. Ada atau tidak ada bukti empirisnya adalah soal lain. Dari sini tahulah kita bahwa kelogisan suatu hipotesis, juga teori, lebih penting ketimbang bukti empirisnya. Dan yang perlu dicatat, bahwa kesimpulan itu penting.

3. Aksiologi Pengetahuan *Science*

Pembahasan aksiologi pengetahuan *science* membicarakan pada tiga hal, yakni kegunaan dari *science*, cara *science* menyelesaikan masalah, dan netralitas dari *science*. Pembahasan aksiologi pengetahuan *science*, jika dirincikan maka:

a. Kegunaan pengetahuan *science*

Apa guna *science*? Pertanyaannya sama dengan apa guna pengetahuan ilmiah, karena *science* (ilmu) berisi tentang teori (ilmiah). Secara umum, teori artinya pendapat yang beralasan, dan alasan itu dapat berupa argumen logis. Sekurang-kurangnya ada tiga kegunaan teori *science*, yakni:

- 1) Sebagai alat membuat eksplanasi, yang berarti memahami masa lampau, sekarang, serta mengubah masa depan;
- 2) Sebagai alat peramal, yang berarti ketika *science* digunakan sebagai alat untuk membuat eksplanasi, biasanya ilmuwan telah mengetahui juga faktor penyebab terjadinya gejala itu. Dengan merubah faktor penyebab itu, ilmuwan dapat membuat ramalan. Dalam bahasa kaum ilmuwan ramalan itu disebut dengan prediksi;

3) Sebagai alat pengontrol, yang berarti ketika *science* dijadikan sebagai alat eksplanasi dan bahan untuk membuat ramalan. Selain mampu membuat ramalan berdasarkan eksplanasi gejala, juga Ilmuwan juga dapat membuat kontrol terhadap kejadian di masa yang akan datang.

b. Cara *science* menyelesaikan masalah

Ilmu atau *science* yang berisi teori dibuat untuk memudahkan kehidupan. Bila kita menghadapi kesulitan (biasanya disebut masalah), dalam hal ini kita menghadapi dan menyelesaikan masalah itu dengan menggunakan ilmu (khususnya teori ilmu). Langkah-langkah yang dimiliki seseorang untuk menyelesaikan masalah, yakni *pertama*, mengidentifikasi masalah. Kedua, seseorang tersebut mencari teori tentang sebab-sebab dari permasalahan yang terjadi. Ketiga, seseorang kembali membaca literatur lagi, dan mencari teori yang menjelaskan cara memperbaiki permasalahan yang terjadi.

c. Netralitas *science*

Netral biasanya diartikan tidak memihak. Dalam kata *science* netral pengertian itu juga terpakai. Artinya, *science* tidak memihak pada kebaikan dan tidak juga pada kejahatan. Itulah sebabnya istilah *science* netral sering diganti dengan istilah *science* bebas nilai. Bebas nilai (*value free*) itulah yang disebut *science* netral. Sedangkan lawannya ialah *science* terikat, yaitu terikat nilai (*value bound*). Sekarang, manakah yang benar, apakah *science* seharusnya *value free* atau *value bound*? Apakah *science* itu sebaiknya bebas nilai atau terikat nilai? Ketahuilah bahwa persoalan ini bukanlah persoalan kecil.

Hal ini merupakan persoalan besar karena banyak sekali aspek kehidupan manusia yang diatur secara langsung oleh *science*. Jadi, paham bahwa sains itu netral atau *science* itu terikat, akan mempengaruhi kehidupan manusia secara langsung. Karena itu sebaiknya kita berhati-hati dalam menetapkan paham kita tentang ini. Apa untungnya bila *science* netral? Bila *science* itu kita anggap netral, atau kita mengatakan bahwa *science* sebaiknya netral keuntungannya ialah perkembangan *science* akan cepat terjadi. Karena tidak ada yang menghambat atau menghalangi tatkala peneliti, memilih dan menetapkan objek yang hendak diteliti, cara meneliti, dan tatkala menggunakan produk penelitian. Orang yang menganggap sains tidak netral, akan dibatasi oleh nilai dalam, yakni memilih objek penelitian, cara meneliti, dan menggunakan hasil penelitian.

Paham *science* netral sebenarnya telah melawan atau menyimpang dari maksud penciptaan *science*. Tadinya *science* dibuat untuk membantu manusia dalam menghadapi kesulitan hidupnya. Paham ini sebenarnya telah bermakna bahwa *science* itu tidak netral, *science* memihak pada kegunaan membantu manusia menyelesaikan kesulitan yang dihadapi oleh manusia. Sementara itu, paham *science* netral justru akan memberikan tambahan kesulitan bagi manusia. Kata kunci terletak dalam aksiologi *science*, yaitu tatkala peneliti akan membuat teori, sebenarnya ia telah berniat akan membantu manusia menyelesaikan masalah dalam kehidupannya, mengapa justru temuannya menambah masalah bagi manusia? Karena ia menganut *science* netral padahal seharusnya ia menganut *science* tidak netral.

Berdasarkan uraian sederhana tersebut, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa yang paling bijaksana ialah kita memihak atau memilih paham bahwa *science* tidaklah netral. *science* itu bagian dari kehidupan, sementara kehidupan itu secara keseluruhan tidaklah netral. Paham *science* tidak netral adalah paham yang sesuai dengan ajaran semua agama dan sesuai pula dengan niat ilmuwan tatkala menciptakan teori *science*. Jadi, sebenarnya tidak ada jalan bagi penganut *science* netral.

Pengetahuan Filsafat

Pembahasan selanjutnya mengenai pengetahuan filsafat, dan pada dasarnya pengetahuan filsafat juga menguraikan tentang ontologi yang membahas tentang hakikat, dan struktur filsafat, kemudian epistemologi membahas tentang objek pengetahuan filsafat dan cara memperoleh serta ukuran kebenaran pengetahuan filsafat. Terakhir, aksiologi membahas tentang masalah kegunaan filsafat dan cara filsafat menyelesaikan masalah.

1. Ontologi Pengetahuan Filsafat

Ontologi filsafat membicarakan tiga hal, yakni hakikat filsafat, yaitu apa pengetahuan filsafat itu sebenarnya. Selanjutnya mengenai struktur filsafat dibahas juga di sini. Yang dimaksud struktur di sini ialah cabang-cabang filsafat serta isi (yaitu teori) dalam setiap cabang itu. Dan terakhir, mengenai struktur dalam arti cabang-cabang filsafat sering juga disebut sistematika filsafat.

a. Hakikat Pengetahuan Filsafat

Filsafat dijadikan sebagai sejenis pengetahuan yang berusaha mencari sebab yang sedalam-dalamnya bagi segala sesuatu berdasarkan akal pikiran belaka. Kemudian, filsafat juga diartikan sebagai sejenis

pengetahuan yang menyelidiki segala sesuatu dengan mendalam mengenai ketuhanan, alam semesta dan manusia, sehingga dapat menghasilkan pengetahuan tentang bagaimana hakikatnya sejauh yang dapat dicapai akal manusia dan bagaimana sikap manusia itu seharusnya setelah mencapai pengetahuan itu.

b. Struktur Pengetahuan Filsafat

Filsafat terdiri atas tiga cabang besar, yaitu: ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ketiga cabang itu sebenarnya merupakan satu kesatuan, antara lain:

- 1) Ontologi, membicarakan hakikat (segala sesuatu) ini berupa pengetahuan tentang hakikat segala sesuatu;
- 2) Epistemologi, cara memperoleh pengetahuan itu;
- 3) Aksiologi, membicarakan guna pengetahuan itu.

Ontologi mencakupi banyak sekali filsafat, mungkin semua filsafat masuk di sini, misalnya Logika, Metafisika, Kosmologi, Teologi, Antropologi, Etika, Estetika, Filsafat Pendidikan, Filsafat Hukum dan lain-lain. Epistemologi hanya mencakup satu bidang saja yang disebut Epistemologi dan membicarakan cara memperoleh pengetahuan filsafat. Ini berlaku bagi setiap cabang filsafat. Sedangkan aksiologi hanya mencakup satu cabang filsafat yaitu aksiologi dan membicarakan guna pengetahuan filsafat.

Selain itu, Ahmad Tafsir juga menjabarkan tentang dua macam filsafat, antara lain:

1) Filsafat *Perennial* (*Philosophia Perennis*)

Istilah *perennial* berasal dari bahasa Latin yakni *perennis*, yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa Inggris yakni *perennial*, dan berarti kekal. Dengan demikian, Filsafat *Perennial* (*Philosophia Perennis*) adalah filsafat yang dipandang dapat menjelaskan segala kejadian yang bersifat hakiki, menyangkut kearifan yang diperlukan dalam menjalani hidup yang benar, yang menjadi hakikat seluruh agama dan tradisi besar spiritualitas manusia.

Hakikat itu menjadi inti pembicaraan Filsafat *Perennial*, yaitu adanya yang suci (*The Sacred*) atau yang satu (*The One*) dalam seluruh manifestasinya seperti dalam agama, filsafat, seni, dan *science*. Jadi, dalam definisi teknisnya filsafat *perennial* ialah pengetahuan filsafat tentang yang selalu ada.

2) Filsafat Post Modern (*Post Modern Philosophy*)

Di dalam literatur filsafat, sejarah filsafat dibagi menjadi tiga, yakni Filsafat Yunani Kuno (*Ancient Philosophy*) yang didominasi Rasionalisme, Filsafat Abad Menengah (*Middle Ages Philosophy*), disebut juga *The Dark Ages Philosophy* (Filsafat Abad Kegelapan), yang didominasi oleh pemikiran tokoh Kristen, dan Filsafat Modern (*Modern Philosophy*) yang didominasi lagi oleh Rasionalisme. Kemudian, dalam perkembangannya telah muncul Filsafat terbaru, yakni Pascamodern (*Post Modern Philosophy*).

Orang-orang yang menganut *Post Modern* mengatakan Filsafat Modern itu harus didekonstruksi. Filsafat Modern didominasi oleh Rasionalisme, maka yang didekonstruksi itu adalah Rasionalisme itu. Rasionalisme ialah paham filsafat yang mengatakan akal itulah alat pencari dan pengukur kebenaran.

2. Epistemologi Pengetahuan Filsafat

Epistemologi filsafat membicarakan tiga hal, yaitu objek filsafat (yaitu yang dipikirkan), cara memperoleh pengetahuan filsafat dan ukuran kebenaran (pengetahuan) filsafat. Jika dijelaskan lebih rinci, maka:

a. Objek Filsafat

Setiap cabang filsafat ditentukan oleh objek apa yang diteliti (dipikirkan) nya. Jika ia memikirkan pendidikan maka jadilah Filsafat Pendidikan. Jika yang dipikirkannya hukum maka hasilnya tentulah Filsafat Hukum, dan seterusnya. Seberapa luas yang mungkin dapat dipikirkan? Luas sekali. Yaitu semua yang ada dan mungkin ada. Inilah objek filsafat. Jika ia memikirkan pengetahuan jadilah ia Filsafat Ilmu, jika memikirkan etika jadilah Filsafat Etika, dan seterusnya.

Objek penelitian filsafat lebih luas dari objek penelitian *science*. *Science* hanya meneliti objek yang ada, sedangkan filsafat meneliti objek yang ada dan mungkin ada. Sebenarnya masih ada objek lain yang disebut objek forma yang menjelaskan sifat kemendalaman penelitian filsafat. Ini dibicarakan pada epistemologi filsafat. Perlu juga ditegaskan (lagi) bahwa *science* meneliti objek-objek yang ada dan empiris; yang ada tetapi abstrak (tidak empiris) tidak dapat diteliti oleh *science*. Sedangkan filsafat meneliti objek yang ada tetapi abstrak, adapun yang mungkin ada, sudah jelas abstrak itu pun jika ada.

b. Cara memperoleh pengetahuan filsafat

Pertama-tama filosof harus membicarakan (mempertanggung jawabkan) cara mereka memperoleh pengetahuan filsafat. Yang menyebabkan kita hormat kepada para filosof antara lain ialah karena ketelitian mereka, sebelum mencari pengetahuan mereka membicarakan lebih dahulu (dan mempertanggungjawabkan) cara memperoleh pengetahuan tersebut. Sifat itu sering kurang dipedulikan oleh kebanyakan orang. Pada umumnya orang mementingkan apa yang diperoleh atau diketahui, bukan cara memperoleh atau mengetahuinya. Ini gegabah, para filosof bukan orang yang gegabah.

Science mengetahui sebatas fakta empiris. Ini tidak mendalam. Filsafat ingin mengetahui di belakang sesuatu yang empiris itu. Inilah yang disebut mendalam. Tetapi itupun mempunyai rentangan. Sebagaimana hal abstrak di belakang fakta empiris itu dapat diketahui oleh seseorang, akan banyak tergantung pada kemampuan berpikir seseorang.

c. Ukuran kebenaran (pengetahuan) filsafat

Pengetahuan filsafat ialah pengetahuan yang logis tidak empiris. Pernyataan ini menjelaskan bahwa ukuran kebenaran filsafat ialah logis tidaknya pengetahuan itu. Bila logis benar, bila tidak logis, salah. Ada hal yang patut diingat., adalah kita tidak boleh menuntut bukti empiris untuk membuktikan kebenaran filsafat. Pengetahuan filsafat ialah pengetahuan yang logis dan hanya logis. Bila logis dan empiris, itu adalah pengetahuan *science*.

Kebenaran teori filsafat ditentukan oleh logis tidaknya teori itu. Ukuran logis tidaknya tersebut akan terlihat pada argumen yang menghasilkan kesimpulan (teori) itu. Fungsi argumen dalam filsafat sangatlah penting, sama dengan fungsi data pada pengetahuan *science*. Argumen itu menjadi kesatuan dengan konklusi, konklusi itulah yang disebut teori filsafat.

3. Aksiologi Pengetahuan Filsafat

Yang diuraikan dalam aksiologi pengetahuan filsafat ada dua hal, yakni kegunaan pengetahuan filsafat, dan cara filsafat menyelesaikan masalah.

a. Kegunaan pengetahuan filsafat

Untuk mengetahui kegunaan filsafat, kita dapat memulainya dengan melihat filsafat sebagai tiga hal, pertama, filsafat sebagai kumpulan teori filsafat. Kedua, filsafat sebagai metode pemecahan masalah. Ketiga, filsafat sebagai pandangan hidup (*philosophy of life*).

Mengetahui teori-teori filsafat amat perlu karena dunia dibentuk oleh teori-teori itu. Jika Anda tidak senang pada Komunisme maka Anda harus mengetahui Marxisme, karena teori filsafat untuk Komunisme itu ada dalam Marxisme. Jika Anda menyenangi ajaran Syi'ah Dua Belas di Iran, maka Anda hendaknya mengetahui filsafat Mulla Shadra. Begitulah kira-kira, dan jika Anda hendak membentuk dunia, baik dunia besar maupun dunia kecil (diri sendiri), maka Anda tidak dapat mengelak hati dari penggunaan teori filsafat. Jadi, mengetahui teori-teori filsafat amatlah perlu. Filsafat sebagai teori filsafat juga perlu dipelajari oleh orang yang akan menjadi pengajar dalam bidang filsafat.

Yang amat penting juga ialah filsafat sebagai *methodology*, yaitu cara memecahkan masalah yang dihadapi. Di sini filsafat digunakan sebagai satu cara atau model pemecahan masalah secara mendalam dan universal. Filsafat selalu mencari sebab terakhir dan dari sudut pandang seluas-luasnya. Hal ini diuraikan pada bagian lain sesudah ini. Kemudian, Filsafat sebagai *philosophy of life* sama dengan agama, dalam hal sama mempengaruhi sikap dan tindakan penganutnya. Bila agama dari Tuhan atau dari langit, maka filsafat (sebagai pandangan hidup) berasal dari pemikiran manusia.

b. Cara filsafat menyelesaikan masalah

Kegunaan filsafat yang lain ialah sebagai *methodology*, maksudnya sebagai metode dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah bahkan sebagai metode dalam memandang dunia (*world show*). Dalam hidup kita, kita menghadapi banyak masalah. Masalah artinya kesulitan. Kehidupan akan dijalani lebih enak bila masalah itu terselesaikan. Ada banyak cara dalam menyelesaikan masalah, mulai dari yang amat sederhana sampai yang rumit. Sesuai dengan sifatnya, filsafat menyelesaikan masalah secara mendalam dan universal. Penyelesaian filsafat bersifat mendalam, artinya ia ingin mencari asal masalah. Universal, artinya filsafat ingin masalah itu dilihat dalam hubungan seluas-luasnya agar nantinya penyelesaian itu cepat dan berakibat seluas mungkin.

Filsafat Pendidikan Islami perspektif Ahmad Tafsir

Filsafat diartikan sebagai orang yang senang mencari ilmu dan kebenaran. Selanjutnya, berkaitan dengan pendidikan, dalam hal ini pendidikan adalah berbagai usaha yang dilakukan oleh seseorang (pendidik) terhadap seseorang (anak didik) agar tercapai perkembangan maksimal yang positif. Tujuan pendidikan Islam yaitu terwujudnya muslim yang kaffah, yaitu muslim

yang jasmaninya sehat serta kuat, akal nya cerdas serta pandai, dan hatinya dipenuhi iman kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. selain itu, pendidikan harus mampu mendidik manusia dan meningkatkan derajat kemanusiaanya.

Kemudian, Arifin memberikan pengertian lain tentang Filsafat Pendidikan Islam, dan pada hakikatnya adalah “Konsep berpikir tentang pendidikan yang bersumber pada ajaran Islam tentang hakikat kemampuan manusia untuk dapat dibina dan dikembangkan serta dibimbing menjadi manusia muslim yang seluruh pribadinya dijiwai oleh ajaran Islam. Dalam hal ini, Mulkhan juga memberikan pengertian Filsafat Pendidikan Islam, yakni suatu analisis atau pemikiran rasional yang dilakukan secara kritis, radikal, sistematis dan metodologis untuk memperoleh pengetahuan mengenai hakikat pendidikan Islam.

Dari pendapat beberapa tokoh di atas dapat disimpulkan bahwa Filsafat Pendidikan Islam merupakan suatu kajian secara filosofis mengenai masalah yang terdapat dalam kegiatan pendidikan yang didasarkan pada al-Qur'an dan hadis sebagai sumber primer, dan pendapat para ahli, khususnya para filosof Muslim, sebagai sumber sekunder. Dengan demikian, Filsafat Pendidikan Islam secara singkat dapat dikatakan sebagai filsafat pendidikan yang berdasarkan ajaran Islam atau filsafat pendidikan yang dijiwai oleh ajaran Islam. Jadi, ia bukan filsafat yang bercorak liberal, bebas, tanpa batas etika sebagaimana dijumpai dalam pemikiran filsafat pada umumnya.

Bidang garapan Filsafat Ilmu terutama diarahkan pada komponen-komponen yang menjadi tiang penyangga bagi eksistensi ilmu, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Dalam hal ini, Ontologi ilmu meliputi apa hakikat ilmu itu?. Apa hakikat kebenaran dan kenyataan yang inheren dengan pengetahuan ilmiah? Hal ini tidak terlepas dari persepsi filsafat tentang apa dan bagai-mana (yang) “ada” sesuatu. Paham monisme yang terpecah menjadi idealisme atau spiritualisme, paham dualisme, pluralisme dengan berbagai nuansanya, merupakan paham ontologik yang pada akhirnya menentukan pendapat bahkan keyakinan masing masing mengenai apa dan bagaimana (yang) ada sebagaimana manifestasi kebenaran yang dicari.

Kemudian, Epistemologi ilmu meliputi sumber, sarana, dan tata cara menggunakan sarana tersebut untuk mencapai pengetahuan (ilmiah). Perbedaan mengenal pilihan landasan ontologik akan dengan sendirinya mengakibatkan perbedaan dalam menentukan sarana yang akan dipilih. Akal dan pengalaman atau komunikasi antara akal dan pengalaman serta intuisi, merupakan sarana yang dimaksud dalam epistemologik, sehingga dikenal adanya model-model epistemologik, seperti: rasionalisme, empirisme,

kritisisme atau rasionalisme kritis, positivisme, fenomenologi dengan berbagai variasinya. Ditunjukkan pula bagai-mana kelebihan dan kelemahan sesuatu model epistemologi beserta tolak ukurnya bagi pengetahuan itu seperti teori koherensi, korespondensi, pragmatis, dan teori intersubjektif.

Selanjutnya, Aksiologi Ilmu meliputi nilai-nilai yang bersifat normatif dalam pemberian makna terhadap kebenaran atau ke-nyataan, sebagaimana dijumpai dalam kehidupan yang menjelajahi berbagai kawasan, seperti kawasan sosial, kawasan simbolik atau pun fisik material. Lebih dari itu, nilai-nilai juga ditunjukkan oleh aksiologi ini sebagai suatu yang wajib dipatuhi dalam semua kegiatan, baik dalam melakukan penelitian maupun di dalam menerapkan ilmu. Dalam perkembangannya, filsafat Ilmu juga mengarahkan pandangannya pada strategi pengembangan ilmu, yang menyangkut etik dan heuristik. Bahkan sampai pada dimensi ke-budayaan untuk menangkap tidak saja kegunaan atau kemanfaatan ilmu, tetapi juga arti maknanya bagi kehidupan.

Pemikiran filsafat pendidikan Islam yang ditawarkan oleh Ahmad Tafsir mengacu pada beberapa hal, antara lain:

1. Landasan atau dasar theologis. Yang dimaksud di sini adalah menuliskan konsep dari al-Quran dan hadits yang akan menjadi dasar dalam pengembangan pendidikan Islam.
2. Landasan atau dasar filosofis. Yang dimaksud di sini adalah menyesuaikan teori filsafat dengan ayat al-Qur'an yang dijadikan dasar theologis tersebut.
3. Landasan atau dasar teoritis. Yang dimaksud di sini adalah menyesuaikan teori mengajar yang efektif serta efisien yang akan digunakan.
4. Semua landasan itu bertujuan untuk mengintegrasikan pengetahuan dari al-Qur'an dan pengetahuan dari alam.

BAB III

KONFIGURASI PENDIDIKAN ISLAM HUMANIS DALAM PERSPEKTIF ABUDDIN NATA

Biografi dan karir intelektual Abuddin Nata

Abuddin Nata lahir pada tanggal 2 Agustus 1954 lahir di Desa Cibuntu Kulon, Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ayahnya bernama Muallim Nata, merupakan tamatan pesantren Balai Rombeng Salafiyah di Banten. Ia bekerja sebagai guru ngaji, imam dan khatib di Masjid kampung, sambil berdagang dan bertani menggarap sawah milik tetangganya. Kemudian, adapun ibunya bernama Siti Aisyah, ia seorang wanita tak pandai baca tulis, namun ibunya taat beragama, patuh pada suami, bekerja sebagai ibu rumah tangga dan membantu pekerjaan suami di sawah. Abuddin Nata merupakan anak ketiga dari enam bersaudara, dua kakak perempuannya berprofesi sebagai ibu rumah tangga, sedangkan dua adik perempuannya juga berprofesi sebagai ibu rumah tangga dan guru mengaji, kemudian seorang adik laki-lakinya bekerja sebagai pedagang kuliner di Jakarta dan pernah bersekolah di Pendidikan Guru Agama (PGA) selama 4 tahun, tetapi tidak tamat.

Pendidikan Abuddin Nata dimulai di Madrasah Ibtidaiyah di Jati Pinggir Tanah Abang Jakarta hingga kelas 3, pada tahun 1963. Dilanjutkan di Madrasah Wajib Belajar (BWB) di Desa Nagrog Ciampe Bogor, dan selesai pada tahun 1968. Setelah tamat PGA selama 4 tahun, Abuddin Nata juga belajar kitab kuning di Pondok Pesantren Nurul Ummah dan belajar di Madrasah Tsanawiyah pada sore hari di tempat yang sama. Selanjutnya, Abuddin Nata dilanjutkan di Pendidikan Guru Agama tingkat atas (PGAA/ PG 6 tahun) sambil belajar kitab kuning di Pondok Pesantren Jauharatin

Naqiyah, Cibeer, Cilegon, Banten, hingga tamat pada tahun 1974.

Pada tahun 1978, Abuddin Nata meraih gelar Sarjana Muda (BA) Jurusan Pendidikan Agama Islam dengan judul penelitian, Risalah Takwa sebagai Tujuan Pendidikan, dan pada tahun 1982 meraih gelar sarjana lengkap Drs. (*Doctorandus*) dengan Jurusan Pendidikan Agama Islam pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan skripsi yang berjudul Sumbangan Pendidikan Islam bagi Pemeliharaan Lingkungan Hidup. Selanjutnya pada tahun 1994, Abuddin Nata mendapat gelar MA (*Master of Art*), kemudian tahun 1997 mendapat gelar Dr. (Doktor) dalam bidang ilmu agama Islam dengan konsentrasi Pendidikan Islam dari Program Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kemudian, pada tahun 1999-2000, mengikuti *Visiting Postdoctorate Programme* di Islamic Studies McGill University, Montreal Kanada.

Abuddin Nata di masa kecilnya merupakan siswa yang aktif, yang dalam hal ini aktif sebagai ketua kelas, dan semasa di PGA Tsanawiyah, dan PGAA aktif sebagai ketua kesiswaan, olahraga, seni, pengembangan minat bakat dan lainnya dengan meraih berbagai prestasi dan kejuaraan, adapun semasa menjadi mahasiswa di intra aktif sebagai pengurus senat Mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, serta Ketua Badan Koordinasi Kegiatan Mahasiswa (BKK) yang setingkat dengan dewan mahasiswa, adapun di ekstra aktif di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), dimulai sebagai ketua HMI komisi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Ketua Lembaga Pendidikan Mahasiswa Islam (Lapenmi), hingga menjadi sebagai ketua II Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Ciputat. Kegiatan di HMI ini dimulai sejak tahun 1975, hingga sekarang dengan jabatan sebagai ketua presidium korp HMI (Kahmi) Cabang Ciputat.

Abuddin Nata memulai karier dengan menjadi tenaga peneliti lepas pada Lembaga Studi Pembangunan (LSP) di Jakarta (1981-1982). Kemudian, dia menjadi Instruktur pada Lembaga Bahasa dan Ilmu al-Qur'an (LBIQ) DKI Jakarta (1982-1985), pengisi acara Obrolan Ramadhan (OBOR) pada Radio Mustag Jakarta (1992-1998), hingga kini dia bertugas sebagai dosen mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam pada Fakultas Tarbiyah IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan dosen tidak tetap pada Fakultas Agama Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dengan berbagai pengalaman kerjanya, dia juga menuangkan pengetahuan, keilmuan dan pemikirannya melalui berbagai buku yang ditulisnya.

Dia memulai karier dengan menjadi tenaga peneliti lepas pada Lembaga Studi Pembangunan (LSP) di Jakarta (1981-1982). Kemudian,

dia menjadi Instruktur pada Lembaga Bahasa dan Ilmu al-Qur'an (LBIQ) DKI Jakarta (1982-1985), pengisi acara Obrolan Ramadhan (OBOR) pada Radio Mustag Jakarta (1992-1998), hingga kini dia bertugas sebagai dosen mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam pada Fakultas Tarbiyah IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan dosen tidak tetap pada Fakultas Agama Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dengan berbagai pengalaman kerjanya, dia juga menuangkan pengetahuan, keilmuan dan pemikirannya melalui berbagai buku yang ditulisnya.

Abuddin Nata merupakan seorang Guru Besar Sejarah dan Filsafat Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, serta Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Semasa kuliah, ia merupakan mahasiswa yang aktif menulis di berbagai media masa, antara lain Harian Umum Pelita, Harian Umum Republika, Majalah Mimbar Ulama, Majalah Panji Masyarakat, dan berbagai jurnal lainnya. Selain itu, Abuddin Nata juga telah menghasilkan beberapa karya tulis buku, antara lain:

1. Sejarah Agama;
2. Ilmu Kalam, Filsafat dan Tasawuf;
3. Dirasat Islamiyah;
4. Metodologi Studi Islam;
5. Studi Islam Komperhensif;
6. Pendidikan salam Prespektif al-Qur'an;
7. Kapita Seleкта Pendidikan Islam;
8. Filsafat Pendidikan Islam, Sejarah Pendidikan Islam;
9. Sejarah Sosial Intelektual Pendidikan Islam;
10. Sosiologi Pendidikan Islam, Paradigma Pendidikan Islam;
11. Pendidikan Islam di Era Global;
12. Ilmu Pendidikan Islam;
13. Manajemen Pendidikan Islam;
14. Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan;
15. Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga-lembaga Pendidikan Islam;
16. Pendidikan Islam Multidisipliner;
17. Akhlak Tasawuf;
18. Islamisasi Ilmu Pengetahuan;
19. Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam;
20. Ilmu Kalam;
21. Filsafat dan Tasawuf;
22. Peta Keragaman Pendidikan Islam di Indonesia;

23. Tema-tema Pokok al-Qur'an Bibliografi Beranotasi al-Qur'an;
24. Materi Dakwah Terurai, menuju guru uang profesional;
25. Pendidikan dalam Perspektif Hadis;
26. Kontributor tulisan untuk Ensiklopedia Islam;
27. Ensiiklopedia Islam di Indonesia;
28. Modul Program Penyetaraan Guru Agama Islam;
29. Perspektif Islam Tentang Pendidikan Kedokteran;
30. Strategi Pembelajaran;
31. Fikih Kedokteran;
32. Pembaruan Pendidikan Islam, dan lain sebagainya.

Pendidikan Islam dalam Membangun Karakter menurut Abuddin Nata

Pendidikan Islam yaitu pendidikan yang dalam pelaksanaannya berdasarkan pada ajaran islam yang bersumber pada al-Qur'an dan as-Sunnah dengan demikian perbedaan pendidikan islam dengan pendidikan lainnya ditentukan dengan ajaran tersebut. Tujuan pendidikan islam untuk mempersiapkan manusia menghambakan diri kepada Allah SWT. Pendidikan juga bersifat sosial kemasyarakatan yang berpengaruh pada perkembangan masyarakat. Hasil dari proses pendidikan (lulusan pendidikan) akan turun ke masyarakat dan ikut serta membangun masyarakat.

Menciptakan lulusan pendidikan yang kompeten dan berkarakter sangat diperlukan di era sekarang. Memadukan pendidikan islam dan karakter menjadi sebuah keharusan dalam mempertahankan pancasila. Tujuan pendidika islam salah satunya adalah berkaitan dengan karakter, karena karakter dianggap sebagai nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Allah SWT, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, perasaan, dan perbuatan berdasarkan norma agama, hukum tata krama, budaya, adat istiadat dan etika.

Berbagai pandangan al-Qur'an terhadap akhlak dan karakter yang demikian itu menjadi dasar yang penting bagi perumusan konsep pendidikan islam, yaitu selain menjadi salah satu mata pelajaran, juga dapat dipertimbangkan dengan cara-cara membina akhlakyang merupakan jiwa dari pendidikan islam. Berikut salah satu ayat al-Qur'an yang berbicara tentang akhlak:

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿٤﴾

Artinya: "Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung" (QS. Al-Qalam: 4)

Dari ayat di atas Imam Al-Maraghi ketika menafsirkan ayat tersebut mengatakan bahwa Allah telah memberkahi Nabi Muhammad SAW. dengan sifat pemalu, memuliakan orang, pemberani, pemaaf, dan setiap akhlak mulia lainnya.

Pendidikan merupakan, proses perubahan atau pendewasaan manusia, berawal dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak biasa menjadi biasa, dari tidak paham menjadi paham dan dari tidak trampil menjadi trampil dan kurang dan kurang berkarakter menjadi berkarakter (akhlak mulia). Sehingga, pendidikan bisa didapatkan dan dilakukan dimana saja, bisa di lingkungan sekolah, masyarakat dan keluarga, dan yang penting untuk diperhatikan adalah bagaimana memberikan atau mendapat pendidikan dengan baik dan benar agar manusia tidak terjerumus dalam kehidupan yang negatif. Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam menjamin kelangsungan hidup negara, karena pendidikan merupakan sarana untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia. Dengan pendidikan kehidupan manusia menjadi terarah.

Dasar pendidikan yaitu merupakan pandangan hidup yang melandasi seluruh aktivitas pendidikan. Karena dasar menyangkut masalah ideal dan fundamental, maka diperlukan landasan pandangan hidup yang kukuh dan komperhensif, serta tidak mudah berubah, karena diyakini memiliki kebenaran yang telah teruji oleh sejarah. Selanjutnya karena pandangan hidup (teologi) seorang muslim berdasarkan al-Qur'an dan al-Sunnah, maka yang menjadi dasar pendidikan Islam adalah al-Qur'an dan al-Sunnah. Hal yang demikian dilakukan karena dalam teologi umat Islam, al-Qur'an dan al-Sunnah diyakini mengandung kebenaran yang multak yang bersifat transendental, universal, dan eternal (abadi), sehingga secara akidah diyakini oleh pemeluknya akan selalu sesuai dengan fitrah manusia artinya memenuhi kebutuhan manusia kapan dan dimana saja.

Karakter adalah perbuatan yang yang dilakukan dengan mudah dan tanpa pemikiran terlebih dahulu. Ini tidak berarti bahwa pada saat melakukan sesuatu perbuatan, yang bersangkutan dalam keadaan tidak sadar, hilang ingatan, tidur atau gila. Pada saat yang bersangkutan melakukan sesuatu perbuatan ia tetap sehat akal pemikiran dan sadar. Oleh karena itu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dalam keadaan tidur, hilang ingatan, mabuk, atau perbuatan refleksi seperti berkedip, tertawa dan sebagainya bukanlah perbuatan akhlak ataupun karakter. Perbuatan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sehat akal pemikirannya. Namun karena perbuatan tersebut sudah mendarah daging maka pada saat akan mengerjakannya sudah

tidak lagi memerlukan pertimbangan atau pemikiran lagi hal yang demikian tak ubahnya dengan seseorang yang sudah mendarah daging mengerjakan salat lima waktu, maka pada saat datang panggilan salat ia tidak lagi merasa berat lagi mengerjakannya dan tanpa pikir-pikir lagi ia sudah dengan mudah dan ringan dalam mengerjakannya.

Untuk mendapatkan karakter yang baik atau akhlak yang mulia maka peserta didik harus dibina dengan benar dan pada kenyataannya dilapangan, usaha-usaha pembinaan akhlak melalui berbagai lembaga pendidikan dan melalui berbagai macam metode terus dikembangkan. Ini menunjukkan bahwa akhlak memang perlu dibina, dan pembinaan ini ternyata membawa hasil berupa terbentuknya pribadi-pribadi muslim yang berakhlak mulia, taat kepada Allah dan Rasul-Nya, hormat kepada ibu bapak, sayang kepada sesama makhluk Tuhan dan seterusnya. Sebaliknya keadaan sebaliknya juga menunjukkan bahwa anak-anak yang tidak dibina akhlaknya, atau dibiarkan tanpa bimbingan, arahan dan pendidikan, ternyata menjadi anak-anak yang nakal, mengganggu masyarakat, melakukan berbagai perbuatan tercela dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa akhlak memang perlu dibina.

Pandangan baru terhadap akhlak di era sekarang ini pada tahap selanjutnya mampu mengubah konsep-konsep akhlak termasuk dalam menilai sesuatu yang baik dan mulia. Keutamaan kedermawanan, misalnya tidak lagi dianggap mempunyai nilai yang tinggi sebagaimana yang terjadi pada abad pertengahan. Sementara masalah keadilan menempati posisi sebagai akhlak yang mulia yang melampaui pandangan abad sebelumnya. Selanjutnya pandangan akhlak mereka diarahkan pada perbaikan yang berkaitan dengan kehidupan para pemuda, wanita dan anak-anak dengan tujuan agar mereka menjadi anggota masyarakat yang mandiri. Penyelidikan baru yang mereka lakukan itu berjasa bagi penentuan patokan mengenai hak dan kewajiban yang pada akhirnya melahirkan masyarakat yang bersifat individualistik, mandiri dan inovatif.

Pendidikan Islam Humanis perspektif Abuddin Nata

Abuddin Nata mengemukakan bahwa ada beberapa prinsip dalam pendidikan Islam yang juga merupakan prinsip yang diajarkan oleh al-Qur'an dan Sunnah, antara lain:

1. Prinsip pendidikan wajib belajar dan mengajar.
2. Prinsip pendidikan untuk semua.
3. Prinsip pendidikan sepanjang hayat.
4. Prinsip pendidikan berwawasan global.

5. Prinsip pendidikan integralistik dan seimbang.
6. Prinsip pendidikan yang sesuai dengan bakat manusia.
7. Prinsip pendidikan yang berbasis riset dan rencana.
8. Prinsip pendidikan yang unggul dan profesional.
9. Prinsip pendidikan yang berbasis masyarakat.
10. Prinsip pendidikan yang sesuai dengan perkembangan zaman.

Berdasarkan beberapa prinsip di atas, maka dipahami bahwa nilai-nilai pokok dalam Islam harus menjadi acuan dalam proses pendidikan. Sehingga hal itu akan membedakan antara pendidikan Islam dan pendidikan di luar Islam. Terutama bisa melahirkan lulusan pendidikan Islam yang berkarakter. Selain itu juga, prinsip pendidikan Islam merupakan upaya untuk mewujudkan cita-cita ideal Islam, yaitu menjadi rahmat bagi alam semesta. Jika melihat kembali ke sejarahnya, sejak awal kedatangannya di Indonesia, agama Islam telah mengambil peran dalam kegiatan pendidikan, antara lain:

1. Islam memiliki karakter sebagai agama dakwah dan pendidikan.
 Dalam hal ini, Islam itu sendiri berkewajiban mengajak, membimbing, dan membentuk kepribadian umat manusia sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Dengan inisiatif awalnya, umat Islam mulai membangun sistem dan lembaga pendidikan, yakni pesantren, madrasah, dan akademi. Melalui lembaga pendidikan tersebut, telah dilahirkan para ulama, tokoh agama, dan para pemimpin masyarakat, yang nantinya bertujuan untuk memberikan sumbangan yang besar bagi kemajuan bangsa.
2. Terdapat hubungan simbiotik fungsional antara ajaran Islam dengan kegiatan pendidikan.
 Hubungan antara ajaran Islam dan kegiatan pendidikan, terlihat dari bagaimana agama Islam memberikan dasar sebagai perumusan visi, misi, tujuan dan berbagai aspek dari pendidikan itu sendiri. Kemudian, dari sisi pendidikan, Islam membutuhkan pendidikan sebagai sarana yang strategis untuk menyampaikan nilai dan praktik ajaran Islam kepada masyarakat.
3. Harkat dan martabat manusia yang diangkat oleh agama Islam.
 Dalam hal ini, Islam melihat bahwa pendidikan merupakan sarana yang paling strategis untuk mengangkat harkat dan martabat manusia dalam berbagai kehidupan. Hal ini sejalan dengan surat al-Alaq ayat 1-5, Allah SWT. berfirman:

أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝١ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝٢ اقْرَأْ وَرَبُّكَ
 الْأَكْرَمُ ۝٣ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝٤ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝٥

Artinya: (1) Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan. (2) Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. (3) Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah. (4) Yang mengajar (manusia) dengan perantara kalam. (5) Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. (QS. Al-Alaq: 1-5)

Berdasarkan ayat tersebut, dapat diambil lima aspek pendidikan, yang merupakan aspek atau komponen utama dalam kegiatan pendidikan, antara lain:

- a. Aspek proses dan metodologinya, yaitu membaca dalam arti yang seluas-luasnya, yaitu mengumpulkan informasi, memahami, mengklasifikasi, membandingkan, menganalisis, menyimpulkan dan memverifikasi;
- b. Aspek guru yang dalam hal ini kembali kepada Allah SWT;
- c. Aspek murid yang dalam hal ini adalah Nabi Muhammad SAW. dan umat manusia;
- d. Aspek sarana prasarana yang dalam hal ini disebut dengan kata *qalam* (pena);
- e. Aspek kurikulum yang dalam hal ini segala sesuatu yang belum diketahui manusia.

Dalam sebuah kegiatan pendidikan, dari sejak dahulu hingga sekarang ada berbagai macam faktor yang mempengaruhi pendidikan itu sendiri, antara lain:

1. Pendidikan dijadikan sebagai media untuk menyalurkan gagasan para filsuf
 Pada zaman Yunani Kuno, pendidikan dijadikan sebagai media bagi para filsuf untuk menyalurkan gagasan dan pemikirannya. Dalam hal ini, para filsuf tersebut berusaha mempengaruhi dan membentuk pola pikir karakter masyarakat menurut pandangannya. Seperti halnya pemikiran dari Socrates, Plato, Aristoteles, dan Plotinus, yang masih bisa dijumpai dalam seluruh bidang ilmu pengetahuan termasuk dalam studi Islam hingga sekarang. Hal ini mengartikan bahwa betapa kuatnya pengaruh filsafat ke dalam dunia pendidikan.

2. Pendidikan di bawah pengaruh kaum agama
Dunia pendidikan pernah berada di dalam genggaman kaum agama, yakni para kaum agama pengelola gereja, kuil, wihara, sinagog, masjid, dan pesantren, yang dalam hal ini memiliki pengaruh yang begitu kuat dalam mengendalikan proses pendidikan. Dengan pandangan yang dikotomis dan adanya wibawa dan otoritas kaum agama, ilmu pengetahuan hanya dapat diterima sebagai doktrin agama. Kuatnya pengaruh kaum agama terhadap pendidikan, di satu sisi pihak memberikan sumbangan yang besar bagi timbulnya stabilitas dan ketentraman kehidupan masyarakat, serta adanya kesinambungan regenerasi para ulama. Namun, di sisi lain mereka tertinggal dalam manajemen dan ilmu pengetahuan modern, yang kurang mapu mendialogkan ilmu agama dengan berbagai permasalahan yang kontekstual dan aktual. Hal ini menyebabkan para lulusan pendidikan agama kurang memiliki akses untuk memasuki dunia kerja modern.
3. Pendidikan di bawah pengaruh ideologi politik pemerintah
Berbagai kebijakan politik pemerintah juga berpengaruh dalam dunia pendidikan. Seperti halnya pada masa Orde Baru, perpolitikan diwarnai dengan politik yang bersifat sentralistik, dengan titik tekan pada pembangunan ekonomi yang ditopang oleh kekuatan birokrasi pemerintah, angkatan bersenjata, dan konglomerat. Keadaan tersebut mengekang kebebasan masyarakat untuk berkreasi, berinovasi, berinisiatif, berimajinasi dan seterusnya.
4. Pendidikan di bawah tekanan supremasi ilmu pengetahuan dan teknologi
Pendidikan berada di bawah tekanan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang dalam hal ini memiliki corak karakter yang rasional, objektif, empiris dan naturalis. Pengaruh-pengaruh pendidikan seperti halnya filsafat, agama, seni, politik, dan sebagainya, mulai bergeser akibat adanya perkembangan teknologi. Akibat dari hal tersebut, berdampak pada berkurangnya minat pada keilmuan non eksakta. Selain itu, juga berdampak pada lulusan pendidikan tersebut, yang akhirnya menjadi sangat rasional, kurang mendapatkan sentuhan emosionalitas, dan spiritualitas.
5. Pendidikan di bawah tekanan dunia perdagangan bebas
Pendidikan yang berada di bawah tekanan perdagangan bebas, diawali dengan adanya sebuah riset yang dilakukan oleh Amerika Serikat, yang hasil riset tersebut menyatakan investasi dalam dunia pendidikan, lebih menguntungkan daripada investasi di bidang saham. Dalam hal

ini, Amerika Serikat menghasilkan sebuah riset dan membuat sistem pendidikan yang berorientasi pada pasar. Dampak yang terjadi dengan adanya sistem pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan pasar dan logika bisnis, mengakibatkan adanya perubahan pada pola pikir menjadi materialistik, ekonomis, pragmatis, dan sistemik.

Berkaitan dengan tantangan pendidikan Islam, tantangan yang ada saat ini jauh berbeda dengan tantangan pendidikan pada masa klasik ataupun masa pertengahan dahulu. Tantangan pendidikan Islam di zaman sekarang selain menghadapi pertarungan ideologi-ideologi, juga menghadapi berbagai kecenderungan. Dalam hal ini, kecenderungan yang dimaksud, yakni:

1. Kecenderungan integrasi ekonomi
Kecenderungan ini menyebabkan terjadinya persaingan bebas dalam dunia pendidikan. Dunia pendidikan saat ini termasuk salah satu kegiatan yang diperdagangkan dan dihadapkan dengan logika bisnis. Munculkan konsep pendidikan yang berbasis pada sistem dan infrastruktur, kemudian manajemen berbasis mutu terpadu, *interpreneur university*, dan lahirnya Undang-undang Badan Hukum Pendidikan (BHP), yang dalam hal ini menempatkan pendidikan sebagai komoditas yang diperdagangkan.
2. Kecenderungan fragmentasi politik
Kecenderungan ini berasal dari terjadinya peningkatan tuntutan dan harapan dari masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat semakin membutuhkan perlakuan yang adil, demokratis, egaliter, transparan, akuntabel, cepat, tepat, dan profesional. Kecenderungan ini dilihat dari adanya pengelolaan manajemen pendidikan yang berbasis sekolah (*school based management*), pemberian peluang kepada komite atau majelis sekolah/madrasah untuk ikut dalam perumusan kebijakan dan program pendidikan, pelayanan proses belajar mengajar yang lebih memberikan peluang dan kebebasan peserta didik, yakni model belajar mengajar yang partisipatif, aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan.
3. Kecenderungan penggunaan teknologi canggih (*sophisticated technology*)
Kecenderungan ini berangkat dari penggunaan teknologi komunikasi dan informasi seperti halnya komputer, laptop, dan sebagainya. Kehadiran dari teknologi ini berdampak pada terjadinya tuntutan dari masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang lebih cepat dan transparan, serta tidak dibatasi waktu dan tempat. Melalui teknologi ini, para peserta didik atau mahasiswa dapat melakukan pendaftaran kuliah atau mengikuti kegiatan belajar dari jarak jauh. Sementara itu, peran

dan fungsi tenaga pendidik juga bergeser menjadi fasilitator, katalisator, motivator dan dinamisator. Peran pendidikan saat ini, tidak lagi sebagai satu-satunya sumber pengetahuan. Keadaan ini mengharuskan adanya model pengelolaan pendidikan yang berbasis pada teknologi komunikasi dan informasi.

4. Kecenderungan kesalingtergantungan (*interdependency*)

Kecenderungan ini terjadi ketika suatu keadaan seseorang, dapat memenuhi kebutuhannya apabila dibantu oleh orang lain. Berkaitan dengan dunia pendidikan, suatu kesalingtergantungan ini muncul dengan adanya badan akreditasi pendidikan baik di tingkat nasional maupun internasional. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan mutu pendidikan, dan juga menunjukkan ketergantungan lembaga pendidikan terhadap pengakuan dari pihak eksternal dari lembaga pendidikan tersebut. Kemudian, kesalingtergantungan ini berkaitan juga dengan kebutuhan lulusan pendidikan terhadap lapangan pekerjaannya, hal ini memiliki ketergantungan ketika seseorang lulusan yang telah lulus dari lembaga pendidikan tersebut, pasti membutuhkan pekerjaan nantinya.

5. Kecenderungan penajahan baru dalam bidang kebudayaan

Kecenderungan ini berasal dari adanya perubahan pola pikir (*mindset*) masyarakat yang melakukan kegiatan pendidikan, yang semula belajar untuk meningkatkan kemampuan intelektual, moral, fisik, dan psikisnya, dan pola pikir tersebut berubah menjadi belajar dengan tujuan mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang besar. Dengan adanya perubahan pola pikir tersebut, berdampak juga pada pemilihan program studi bagi setiap siswa yang telah lulus dan ingin ke tahap selanjutnya.

Program studi yang menawarkan pekerjaan dan penghasilan yang besar, akan semakin diminati oleh orang-orang tersebut. Selain itu, kecenderungan ini juga memiliki dampak yang memunculkan budaya pop atau budaya urban, yaitu budaya yang serba hedonistik, materialistik, rasional, ingin serba cepat praktis, pragmatis, dan instan. Hal ini menjadikan kecenderungan terhadap ajaran agama akhirnya kurang diminati, karena bersifat normatif dan tidak menarik, serta ketinggalan zaman. Karenanya, para guru atau ahli agama, juga dituntut untuk berkembang dalam pembelajarannya dengan reformulasi, reaktualisasi, dan kontekstualisasi, sehingga ajaran agama terasa efektif dan transformatif.

Berkaitan dengan pendekatan yang digunakan dalam mengembangkan pendidikan Islam, Abuddin Nata memiliki beberapa pendekatan dalam proses pembelajaran pendidikan Islam, antara lain:

1. Pendekatan tematik, yakni pendekatan dengan memilih tema-tema yang menarik sesuai dengan jiwa anak, seperti halnya tema menangkap ikan di kolam, bercocok tanam dan berkemah;
2. Pendekatan rekreatif, yakni pendekatan dengan cara bermain peran. Seperti halnya memainkan permainan tradisional anak-anak yang ada di desa, atau menciptakan permainan baru yang melatih psikis ataupun psikologis;
3. Pendekatan pakem, yakni pendekatan berangkat dengan pembelajaran partisipatif, aktif, kreatif, efektif, menyenangkan, menggembirakan, dan memuaskan;
4. Pendekatan pola asuh antara ibu atau bapak dan anak, yakni pendekatan yang didasarkan pada rasa cinta, perhatian, kasih sayang, teladan yang baik, bimbingan yang jelas dan terarah.

Berkaitan dengan paradigma yang dibangun oleh Abuddin Nata mengenai pendidikan Islam, Dalam hal ini, ada beberapa paradigma dalam pembangunan pendidikan Islam itu sendiri, antara lain:

1. Paradigma dari sisi pembangunan sumber daya manusia (SDM)
Paradigma yang berasal dari bagaimana membangun sumber daya manusia, pada dasarnya berdasar pada beberapa hal, antara lain:
 - a. Ketahanan suatu masyarakat berdasarkan pada adanya integrasi antara sumber daya alam, sumber daya manusia yang berkualitas, dan sumber daya kebudayaan serta kesejahteraan. Jika dianalogikan, sumber daya alam yang melimpah belum bisa menjamin bahwa negara itu akan maju, dan masyarakat yang ada di negara tersebut dapat hidup makmur. Begitu juga sebaliknya, sumber daya alam yang tidak melimpah, bisa menjadikan negara itu menjadi negara maju dan hidup masyarakat yang makmur.
 - b. Dampak dari era globalisasi, yang dewasa ini memunculkan pemikiran bahwa harus adanya rumusan baru tentang paradigma dalam membangun sumber daya manusia. Dalam hal ini, dampak dari globalisasi itu sendiri memunculkan beberapa kecenderungan, yakni integrasi ekonomi, fragmentasi politik, penggunaan teknologi canggih, kesalingtergantungan, dan penjajahan baru dalam kebudayaan.

2. Paradigma dari sisi pendidikan karakter perspektif al-Qur'an dan hadits
Paradigma yang berasal dari bagaimana pendidikan karakter berdasarkan al-Qur'an dan hadits, pada dasarnya berdasar pada beberapa hal, antara lain:
 - a. Munculnya berbagai tindakan masyarakat yang merugikan sesama. Jika melihat bagaimana situasi dan kondisi di sekitar kita, kehidupan masyarakat khususnya di Indonesia, terasa kurang nyaman, kacau balau dan kurang tertib sebagai akibat dari adanya krisis di bidang karakter manusia itu sendiri.
 - b. Pendidikan agama yang dilakukan oleh pilar-pilar pendidikan karakter dirasa kurang efektif. Pendidikan agama terjebak pada upaya pemberian pengetahuan tentang nilai-nilai agama secara kognitif semata, tanpa disertai dengan adanya penghayatan dan pengamalan dari semua pihak, seperti halnya di rumah (orang tua), sekolah (guru), dan masyarakat.
 - c. Pendidikan karakter yang dilaksanakan oleh pemerintah melalui lembaga pendidikan formal dirasa kurang efektif. Dewasa ini, pendidikan dinilai sebagai nilai investasi oleh sebahagian masyarakat, hal ini merupakan dampak dari adanya perubahan pola pikir yang pada awalnya meningkatkan kemampuan intelektual, moral, fisik, dan psikisnya, kemudian berubah menjadi pola pikir kebutuhan pasar dan logika bisnis.
3. Paradigma dari sisi pendidikan karakter perspektif psikologis
Paradigma yang berasal dari pendidikan karakter dengan perspektif psikologis, pada dasarnya berdasar pada beberapa hal, antara lain:
 - a. Pendidikan karakter yang semakin kabur (tidak jelas) dari segi visi, misi, tujuan, strategi dan pendekatan. Jika melihat pada masa lalu, banyak dijumpai para pemimpin bangsa yang berkarakter baik dan unggul. Sedangkan, pada masa sekarang kita memang mudah menjumpai orang yang pandai, berilmu tinggi dan memiliki keterampilan yang unggul, namun tidak memiliki karakter.
 - b. Lembaga pendidikan formal dan non formal yang mulai tidak efektif, karena dampak dari kekaburan dari pendidikan karakter yang terjadi. Seorang anak dianggap sudah cukup baik jika bisa menjelaskan berbagai istilah dalam pendidikan karakter, seperti ikhlas, jujur, sabar, adil, dan sebagainya. Akan tetapi, anak tersebut baru memiliki pengetahuan tentang pendidikan karakter yang sudah dijelaskannya, namun yang jadi permasalahan adalah

belum tentu dirinya bisa menghayati dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-harinya.

- c. Era globalisasi berdampak pada penjajahan baru dalam bidang kebudayaan, dan tuntutan masyarakat tentang perlunya penegakkan hak asasi manusia. Dampak dari adanya penjajahan dalam bidang kebudayaan ini, yakni masuknya nilai-nilai barat seperti materialistik, hedonistik, pragmatis, dan sekularistik. Hal ini menjadikan nilai-nilai spiritual, nilai-nilai transendental, dan nilai-nilai lainnya dianggap tidak memberikan keuntungan secara material dan keduniaan.
- d. Manusia berbeda dengan manusia lainnya karena kondisi psikologisnya. Dalam kegiatan belajar mengajar, psikolog menganjurkan beberapa hal, antara lain:
 - 1) Seorang peserta didik tidak hanya sekedar menerima dalam keadaan pasif, melainkan harus aktif dan dinamis;
 - 2) Harus adanya respon terhadap apa yang diajarkan dalam sebuah kegiatan pembelajaran;
 - 3) Respon yang diberikan oleh peserta didik, harus diperkuat dan diakui dalam bentuk *reward*, pujian, pengakuan, dan lain sebagainya.



BAB IV

MENAKAR MASA DEPAN MADRASAH DAN PEMBAHARUAN PENDIDIKAN ISLAM MENURUT AZYUMARDI AZRA

Biografi dan karir intelektual Azyumardi Azra

Azyumardi Azra lahir di Lubuk Alung Sumatera Barat pada tanggal 04 Maret 1955. Dalam keluarganya, Azyumardi biasa dipanggil Edy atau Mardi. Azyumardi merupakan anak ketiga dari enam bersaudara, dan anak laki-laki pertama dari pasangan suami istri yang bernama, Azikar dan Ramlah. Azyumardi dibesarkan oleh orangtua yang sadar pentingnya pendidikan. Meski kondisi keluarganya sulit, ayahnya berkemauan keras agar anak-anak bisa sekolah. Ayahnya bercita-cita agar semua anaknya sekolah. Padahal, ekonomi keluarganya tidak memungkinkan untuk membiayai pendidikan. Profesi yang dijalani ayahnya pun hanya sebagai tukang kayu, pedagang kopra dan cengkih, dan ibunya bekerja sebagai guru agama.

Perkenalan Azyumardi dengan dunia pendidikan berawal dari kata-kata yang terpampang di badan bus dan di belakang truk, ia juga belajar membaca dari judul-judul berita pada robekan kertas koran bekas dan majalah bungkus. Ayahnya pun setia menemaninya saat ia baru belajar mengeja kata di badan bus yang setiap hari melintas di depan rumahnya. Pada Tahun 1963, Azyumardi masuk sekolah dasar yang berada dekat dengan rumahnya. Sekolah tersebut bernama SD Negeri 01 Lubuk Alung. Berjarak 10 menit dengan berjalan kaki. Karena sudah pandai membaca, pelajaran sekolah dirasanya mudah saja.

Di masa SD ini, Azyumardi memulai kecintaannya pada buku. Azyumardi kerap meminjam buku di perpustakaan sekolah dan membawanya pulang ke

rumah. Buku kesukaan Azyumardi antara lain; Salah Asuhan karya Abdoel Moeis, Tenggelamnya Kapal Van Der Wijk, karya Hamka. Dan juga buku cerita klasik seperti Sekali Tepuk Tujuh Nyawa, Musang Berjanggut, dan karya-karya Taguan Marjo. Meski sebenarnya buku-buku tersebut bukan ditujukan buat anak-anak. Cerita di dalamnya yang membuat munculnya kesadaran sosial dalam diri Azyumardi.

Setelah selesai menempuh pendidikan Sekolah Dasar dekat rumahnya. Tahun 1969 ia melanjutkan pendidikannya ke Sekolah Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) Padang. Di sekolah menengah ini, bakat Azyumardi sebagai seorang pelajar yang cukup cerdas sudah terlihat, terutama di bidang pelajaran Matematika. Karena kemahirannya di bidang pelajaran tersebut, Azyumardi mendapatkan gelar Pak Karmiyus, yang merupakan guru Aljabar dan Ilmu Ukur (sekarang matematika) apabila Pak Karmiyus tidak hadir, teman-temannya sering meminta bantuan Azyumardi untuk menjelaskan mata pelajaran yang sama di depan kelas.

Di luar sekolah, dalam bidang sosial keagamaan, Azyumardi banyak bersentuhan dengan nilai-nilai Islam modernis, kendati ia juga merasa dekat dengan tradisi Islam tradisional. Kemudian pada tahun 1975 Azyumardi berhasil menyelesaikan pendidikan sekolah menengahnya. Setelah lulus dari PGAN, ayahnya menghendaki Azyumardi agar kuliah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padang. Namun, Azyumardi tidak berminat. Azyumardi menginginkan kuliah di Ilmu keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP), atau belajar Sejarah di Universitas Andalas, Padang. Namun orangtuanya tetap menginginkan Azyumardi agar kuliah di Perguruan Tinggi Agama Islam itu. Akhirnya, Azyumardi menentukan sikapnya yaitu kuliah di IAIN yang ada di Jakarta. Hal ini didasarkan pada pertimbangan, bahwa di kota metropolitan itu adalah tempat yang kosmopolit, dan kondusif untuk menghirup tradisi intelektual. Setidaknya, banyak putra Minang yang punya nama besar, dan pernah merantau di Jakarta, seperti Muhammad Natsir, Buya Hamka, dan sejumlah nama lainnya.

Azyumardi diizinkan oleh kedua orangtuanya untuk melanjutkan kuliah di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Semasa kuliah, Azyumardi dikenal sebagai aktivis di organisasi intra maupun ekstra di kampus. Di intra, Azyumardi menjabat sebagai ketua senat Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan di ekstra, Azyumardi menjadi ketua umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Ciputat, yakni pada tahun 1981 sampai dengan 1982. Azyumardi pernah mengorganisasi kawan-kawan mahasiswa untuk melakukan demo terhadap pemerintahan Soeharto dalam sidang umum MPR tahun 1978. Hingga pada

tahun 1982, Azyumardi berhasil menyelesaikan kuliahnya.

Pada tahun 1986 Azyumardi memperoleh beasiswa S2 *Fullbright* di Universitas Colombia, New York, Amerika Serikat dengan konsentrasi Sejarah. Dalam tempo dua tahun ia berhasil menyelesaikan program MA nya pada Departemen Bahasa dan Kebudayaan Timur Tengah (1988). Selanjutnya, pada tahun 1989 Azyumardi memperoleh gelar MA nya yang kedua pada Universitas yang sama dalam bidang Sejarah melalui program *Colombia University President Fellowship*. Ditambah gelar M.Phil pada tahun 1999 dalam bidang Sejarah. Akhirnya dari Jurusan Sejarah ini pula, Azyumardi memperoleh gelar Ph.D nya. Selanjutnya Azyumardi juga mengikuti program *post doctoral* di Universitas Oxford selama satu tahun (1995-1996).

Pemikiran Azyumardi Azra diawali dengan keresahannya dalam perkembangan kajian keIslaman yang kurang signifikan. Mencoba mengabungkan ajaran barat dan agama timur untuk mengemas pendidikan Islam menjadi lebih menarik dan dapat diterima dikalangan masyarakat. Sistem pendidikan Islam masih mengalami berbagai kendala. Salah satu diantaranya adalah kerancuan antara materi umum dengan materi keagamaan. Inilah yang menjadi alasan klasik mengapa prestasi materi umum yang disampaikan di lembaga Pendidikan Islam kalah saing dengan Prestasi yang dicapai di sekolah umum.

Sebaliknya, penyampaian materi keagamaan di sekolah umum tidak segemilang materi di pesantren. kenyataan inilah yang setidaknya mendorong orang tua murid mengambil alternatif lain, yakni memercayakan anaknya pada lembaga pendidikan yang lebih menjanjikan masa depan. Sebab, faktanya madrasah dalam memberikan materi pembelajarannya parsial dan tidak menyentuh substansinya. Kemudian, Azyumardi Azra juga menyatakan kekecewaannya yang mendalam tentang kurangnya perhatian terhadap kajian Ilmu Pendidikan Islam. Ia mengatakan kajian kependidikan Islam nampaknya merupakan bidang yang belum tergarap secara serius. Bahkan, katanya lagi, lebih memprihatinkan lagi, kajian kependidikan Islam dalam konteks Indonesia lebih ketinggalan. Dia kecewa berat rupanya karena pada saat yang sama, aspirasi dan tuntutan masyarakat muslim terhadap (peningkatan mutu) pendidikan Islam semakin besar.

Sejak adanya fakultas Tarbiyah di IAIN, pendidikan Islam telah dijadikan salah satu bahan kajian. Pendidikan Islam telah muncul sebagai salah satu nama mata kuliah. Tetapi, dengan tidak bermaksud mengecilkan usaha tokoh-tokoh terdahulu, usaha mengembangkan Ilmu Pendidikan Islam yang serius di fakultas Tarbiyah IAIN memang barulah dimulai sekitar tahun 1993. Pada

bulan Oktober 1993 telah diadakan Musyawarah Nasional Ilmu Pendidikan Islam di Ciawi, Bogor, musyawarah itu diselenggarakan oleh Departemen Agama. Salah satu rekomendasi penting yang diberikan oleh musyawarah itu ialah agar ada usaha sungguh-sungguh untuk mengembangkan Ilmu Pendidikan Islam.

Sesungguhnya keinginan adanya usaha sungguh-sungguh untuk mengembangkan Ilmu Pendidikan telah ada sebelum pertemuan di Ciawi itu tetapi dapat dikatakan belum sungguh-sungguh. Keinginan itu didorong antara lain oleh kenyataan banyaknya sekolah Islam yang kurang baik mutunya. Mutu yang kurang baik itu diduga disebabkan oleh belum digunakannya teori-teori Pendidikan (Islami) yang sesuai dengan tuntutan zaman. Dugaan itu ternyata benar, itu Azra ketahui misalnya berdasarkan penelitian yang dia lakukan. Pada waktu itu (1988), Azra menemukan lebih banyak sekolah Katolik yang baik dibandingkan dengan sekolah Islam. Dalam perbandingan itu diungkapkan secara dramatis dalam susunan “Sulit mencari sekolah Islam yang baik, sama sulitnya dengan mencari sekolah Katolik yang buruk”.

Kemudian, penelitian ini dilanjutkan pada sekolah-sekolah Islam dan menghasilkan kenyataan lain yang sesungguhnya tidak mengejutkan. Banyak sekolah Islam yang dipimpin oleh kepala sekolah Islam yang tidak terdidik untuk itu, banyak guru yang mengajarkan mata pelajaran yang tidak disiapkan untuk tugas itu. Banyak sekolah yang dibangun tidak melalui perencanaan yang memadai. Banyak lembaga pendidikan yang kacau administrasinya. Kesimpulannya pengurus-pengurus sekolah Islam itu belum menerapkan paham profesionalisme dalam pengelolaan sekolah. Padahal hadis nabi menjelaskan bahwa menerapkan profesionalisme itu merupakan keharusan bagi orang Islam.

Pandangan dan pemikiran umat Islam tentang Pendidikan harus diperbaiki. Sesuai dengan kelemahan yang ada, maka perbaikan dilakukan dalam dua hal, pertama perbaikan segi pandangan atau sikap. Para ahli Pendidikan Islam harus memberikan penjelasan bagaimana pandangan dan sikap orang Islam itu seharusnya terhadap kekayaannya, terhadap kewajibannya, dan terhadap tanggung jawab sosialnya. Kelemahan segi penguasaan teori Pendidikan diperbaiki dengan cara menyediakan bagi mereka teori-teori pendidikan yang sesuai dengan tuntutan zaman.

Pembaharuan Pendidikan Islam perspektif Azyumardi Azra

Pendidikan Islam jelas mempunyai peranan penting dalam peningkatan SDM. Dalam kerangka fungsi idealnya untuk peningkatan kualitas SDM,

sistem pendidikan Islam haruslah senantiasa mengorientasikan diri untuk menjawab kebutuhan dan tantangan dalam masyarakat sebagai konsekuensi logis dari perubahan. Namun, pendidikan Islam hingga saat ini kelihatan masih terlambat merumuskan diri merespon perubahan dan kecenderungan perkembangan masyarakat sekarang dan masa akan datang. Sistem pendidikan Islam tetap lebih cenderung berorientasi ke masa silam ketimbang berorientasi ke masa depan, atau kurang bersifat *future-oriented*. Oleh karena itu, perlu ada nya usaha pembaruan dan pengembangan dalam sistem pendidikan Islam.

Kata pembaruan dalam Kamus Bahasa Indonesia, berarti proses, cara, perbuatan membarui. Pembaruan mengandung prinsip dinamika yang selalu ada dalam gerak langkah kehidupan manusia. Dalam hal ini, prinsip tersebut menuntut adanya perubahan secara terus menerus (kontinuitas). Sedangkan menurut Azyumardi Azra, upaya untuk menata kembali struktur-struktur sosial, politik, pendidikan dan keilmuan yang mapan dan ketinggalan zaman (*out dated*), termasuk struktur pendidikan Islam, adalah bentuk pembaruan dalam pemikiran dan kelembagaan Islam.

Menurut Azra, dalam pendidikan Islam perlu dikembangkan strategi pendekatan ganda dengan tujuan memadukan pendekatan-pendekatan situasional jangka pendek dengan pendekatan konseptual jangka panjang. Sebab, pendidikan Islam adalah suatu usaha mempersiapkan muslim agar dapat menghadapi dan menjawab tuntutan kehidupan dan perkembangan zaman secara manusiawi. Karena itu, hubungan usaha pendidikan Islam dengan kehidupan dan tantangan itu haruslah merupakan hubungan yang prinsipal dan bukan hubungan insidental dan tidak menyeluruh. Karena itu, diperlukan pendekatan dan inovasi yang objektif dan kreatif agar dengan demikian tercipta usaha-usaha pendidikan berdasarkan kepentingan peserta didik, masyarakat Islam dan umat manusia secara keseluruhan.

Hasil penalaran Azra, bahwa usaha pembaruan dan pengembangan sistem pendidikan Islam selama ini belum maksimal atau tidak komprehensif dan menyeluruh. Karena, sebagian besar sistem pendidikan Islam belum dikelola secara profesional. Kebanyakan lembaga pendidikan Islam masih dikelola dengan semangat “keikhlasan”, sehingga tidak terjadi esensial dalam pendidikan Islam tetapi menurutnya, tanpa harus mengorbankan semangat keikhlasan dan jiwa pengabdian, sudah waktunya sistem dan lembaga pendidikan Islam dikelola secara profesional, bukan hanya dalam soal penggajian, pemberian honor, tunjangan atau pengelolaan administrasi dan keuangan. Profesionalisme mutlak pula diwujudkan dalam perencanaan,

penyiapan tenaga pengajar, kurikulum dan pelaksanaan pendidikan itu sendiri.

Jadi, pembaruan pendidikan Islam mesti dilakukan tidak hanya sekedar *survive* di tengah persaingan global yang semakin tajam dan ketat, tetapi juga berharap mampu tampil di depan. Oleh karena itu, pembaruan pendidikan Islam dimulai dari sistem dan kelembagaan pendidikan Islam. Tegasnya adalah pembaruan pendidikan Islam yang didasarkan pada prinsip modern.

Modernisasi Pendidikan Islam perspektif Azyumardi Azra

Azyumardi Azra mengartikan modernisasi pendidikan Islam sebagai proses perubahan fungsional dan antarsistem pada tingkat konseptual. Perlunya modernisasi pendidikan Islam, yang dimaksud di sini adalah mengupayakan pengembangan kajian Islam sebagai disiplin keilmuan universitas, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pembentukan sekolah-sekolah yang unggul. Kemudian, hal tersebut juga dibarengi dengan adanya Integrasi ilmu umum dan ilmu agama, yang dimaksud di sini adalah pendekatan umum (Barat) dan pendekatan agama (Timur) dalam kajian Islam dan pendidikan Islam merupakan bagian yang seharusnya tidak dipertentangkan. Kedua pendekatan tersebut sebaiknya dipadukan guna mendominasi pemikiran Islam di tanah air.

Azyumardi Azra menyebutkan, bahwa pemikiran dan program modernisasi pendidikan Islam memiliki akar dalam pemikiran dan program modernisasi pemikiran serta institusi Islam secara keseluruhan. Baginya, modernisasi pemikiran dan kelembagaan merupakan prasyarat kebangkitan kaum muslimin di masa modern. Karena itu, pemikiran dan kelembagaan Islam termasuk pendidikan haruslah dimodernisasi dan diperbaharui sesuai dengan kerangka modernitas. Azra menekankan perlunya dilakukan modernisasi pada segenap aspek kehidupan masyarakat muslim, terlebih terkait dengan konsep pemikiran yang merupakan landasan bagi segenap aktivitas dan ide-ide pendidikan Islam. Kerangka berpikir selayaknya mengalami perubahan dan penyesuaian terhadap perkembangan zaman. Diperlukan pemikiran yang terbuka dengan wawasan yang luas dan adaptif agar mampu menyeleksi tren dan perkembangan gaya hidup. Dengan pemikiran serta wawasan yang terbuka juga mampu menyaring perkembangan dan kemajuan teknologi yang relevan sebagai bentuk pelayanan terhadap publik.

Hubungan antara modernisasi dan pendidikan menurut Azra, pada satu segi pendidikan dipandang sebagai suatu variabel modernisasi yang merupakan prasyarat dan kondisi yang mutlak bagi masyarakat untuk menjalankan program dan mencapai tujuan-tujuan modernisasi. tetapi pada

segi lain, pendidikan sering dianggap sebagai objek modernisasi. Dalam hal ini, pendidikan negara-negara yang tengah menjalankan program modernisasi pada umumnya dipandang masih terbelakang dalam berbagai hal. Oleh karena itu, sulit diharapkan bisa memenuhi dan mendukung program modernisasi. Pendidikan harus diperbarui atau dimodernisasi, sehingga dapat memenuhi harapan dan fungsi yang dipikulnya. Secara garis besar melihat dari *input* dan *output* dunia pendidikan Islam yang kemudian perlu disentuh dengan “modernisasi”. Secara umum Azyumardi Azra menggambarkan *input* dan *output* dalam modernisasi pendidikan Islam, sebagai berikut:

1. **Input dari masyarakat ke dalam sistem pendidikan**

- a. Ideologis-normatif: Orientasi-orientasi ideologis tertentu yang diekspresikan dalam norma-norma nasional (Pancasila, misalnya) menuntut sistem pendidikan untuk memperluas dan memperkuat wawasan peserta didik;
- b. Mobilisasi politik: Kebutuhan bagi modernisasi dan pembangunan menuntut sistem pendidikan untuk mendidik, mempersiapkan dan menghasilkan kepemimpinan modernitas dan inovator yang dapat memelihara dan bahkan meningkatkan momentum pembangunan;
- c. Mobilisasi ekonomi: Kebutuhan akan tenaga kerja yang handal menuntut sistem pendidikan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi SDM yang unggul dan mampu mengisi berbagai lapangan kerja yang tercipta dalam proses pembangunan. Dalam hal ini, lembaga-lembaga pendidikan Islam tidak sekedar menjadi lembaga transfer dan transmisi ilmu-ilmu Islam, tetapi sekaligus juga harus dapat memberikan keterampilan (*skill*) dan keahlian (*abilities*);
- d. Mobilisasi sosial: Peningkatan harapan bagi mobilitas sosial dalam modernisasi menuntut pendidikan untuk memberikan akses dan *venue* ke arah tersebut. Dengan demikian, pendidikan Islam bukan sekedar untuk memenuhi kewajiban menuntut ilmu belaka, tetapi harus juga memberikan modal sehingga kemungkinan akses bagi peningkatan sosial;
- e. Mobilisasi kultur: Modernisasi yang menimbulkan perubahan-perubahan kultur menurut sistem pendidikan untuk mampu memelihara stabilitas dan mengembangkan warisan kultural yang kondusif bagi pembangunan.

2. **Output bagi masyarakat**

- a. Perubahan sistem nilai: dengan memperluas peta kognitif peserta didik, maka pendidikan menanamkan nilai-nilai yang merupakan alternatif bagi sistem nilai tradisional.

- b. Output politik: Kepemimpinan modernitas dan innovator yang secara langsung dihasilkan sistem pendidikan dapat diukur dengan perkembangan kuantitas dan kekuatan birokrasi sipil-militer, intelektual dan kader-kader administrasi politik lainnya, yang direkrut dari lembaga-lembaga pendidikan, terutama pada tingkat menengah dan tinggi.
- c. Output ekonomi: dapat diukur dari tingkat ketersediaan SDM atau tenaga kerja yang terlatih dan siap pakai, baik *white collar* maupun *blue collar*.
- d. Output sosial: Dapat dilihat dari tingkat integrasi sosial dan mobilitas peserta didik ke dalam masyarakat secara keseluruhan.
- e. Output kultural: Tercermin dari upaya-upaya pengembangan kebudayaan ilmiah, rasional dan inovatif, peningkatan peran integratif agama dan pengembangan bahasa pendidikan.

Dengan kerangka modernisasi di atas, pendidikan Islam diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dunia modern. Dengan bermodalkan lahirnya lembaga pendidikan Islam yang berorientasi pada modernisme, hal tersebut akan melahirkan SDM yang profesional, dan mampu memberikan akses ke arah mobiltas sosial.



BAB V

TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA: SEBUAH UPAYA MELACAK JEJAK REKAM INTELEKTUAL A. MALIK FADJAR

*hanya orang yang berjalan
yang akan mengerti nasib
dan keberuntungannya
... kisah dan pengalaman
di pentas sekolah kehidupan adalah
semburat makna
jiwa masa depan
nyawa kehidupan (Rizie, 2001).*

Garis hidup seseorang laksana arus listrik. Menyala menuju satu titik cerah sesuai volume arus yang dirangkainya. Nyala hidup seseorang pun bergerak menuruti “anyaman” cita-cita dan mimpi-mimpi yang dikonstruksinya. Cita-cita dan mimpi-mimpi itu meniscayakan “transformasi” untuk menyatakan bagaimana bentuk dan warna corak hidup. Transformasi hidup manusia merupakan tawanan situasi geografis dan historis yang melatarinya sebagai sumber inspirasi dan aspirasi hidup yang dijalani.

Warna hidup kadang menyalahi bayangan sebelumnya. Ini karena garis hidup kadang menunjuk pada ruas “tidak-lurus” dengan pola hidup yang kausal, kondisional, dan kontekstual. Memahami klausal hidup yang “un-causal” ini karena bahwa manusia merupakan makhluk yang unik (*the unique creation*), yaitu makhluk yang dengan akal-nya cenderung mengalami perkembangan fluktuatif dan bahkan *un-predicable*. Hal ini disebabkan karena, sebagaimana digambarkan Ibn ‘Athâ’illâh al-Sakandary (w. 709

H), pada manusia memiliki dua kemungkinan kedudukan khusus dalam menapaki kehidupannya, yaitu *maqâm tajrîd* dan *maqâm asbâb*. Manusia yang berada pada *maqâm tajrîd* mengalami gerak hidup yang fluktuatif dan bahkan tak bisa diprediksi. Sebaliknya, manusia yang berada pada *maqâm asbâb* gerak hidupnya akan mengikuti laju kausalitas, kondisional, dan kontekstual sejarah yang dibangunnya. Melalui dua hal ini Tuhan seakan-akan ingin melukiskan bahwa manusia itu unik yang padanya dilingkupi berbagai potensi. Melalui dua hal ini pula Tuhan ingin mengajari manusia bahwa usaha yang dilakukan olehnya harus disertai dengan sikap pasrah kepada-Nya, dan sebaliknya, sikap pasrah kepada-Nya menyarankan adanya usaha dan kerja keras.

Salah satu usaha yang diyakini mampu menyatakan cita-cita dan mimpi-mimpi manusia adalah pendidikan. Secara sosiologis pendidikan selain memberikan amunisi memasuki masa depan, ia juga memiliki hubungan dialektikal dengan transformasi sosial-masyarakat. Transformasi pendidikan selalu merupakan hasil dari transformasi sosial-masyarakat, dan begitu sebaliknya. Berbagai pola dan corak sistem pendidikan menggambarkan corak dari tradisi dan budaya sosial-masyarakat yang ada. Maka hal paling mendasar yang perlu diperhatikan adalah suatu sistem pendidikan dibangun guna melaksanakan “amanah masyarakat” untuk menyalurkan anggota-anggotanya ke posisi-posisi tertentu. Artinya, suatu sistem pendidikan bagaimana mampu menjadikan dirinya sebagai mekanisme alokasi positionil bagi sivitas akademika untuk memasuki masa depannya.

Banyak usaha telah dilakukan oleh para pemikir, praktisi, dan pelaku pendidikan untuk mengkonstruksinya sebagai amunisi memasuki masa depan. Dalam konteks ini, kiranya nama Prof. DR. H. A. Malik Fadjar, M.Sc. bisa dinyatakan sebagai salah seorang pakar dan sekaligus praktisi pendidikan terkemuka di negeri ini yang gagasan-gagasan dan kebijakan-kebijakannya selalu mendapat respon positif bagi (pe/ke)-majuan pendidikan. Intelektualitas dan kapabilitasnya di bidang pendidikan bisa dilihat dari sejarah hidup yang diabdikannya pada lembaga-lembaga pendidikan yang dipimpinya sehingga mencapai kualifikasi *academic excellence* dan *competitive advantage* di era global.

Kecuali itu, sebagai abdi masyarakat, A. Malik Fadjar telah menghabiskan sebagian besar usianya untuk kepentingan bangsa dan negara. Beberapa jabatan strategis di pemerintahan seperti Dirjen Binbagais Departemen Agama RI, Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan Nasional RI, dan Menko Kesejahteraan Sosial ad-Interim, melukiskan Malik sebagai pribadi yang

kapabel di bidangnya.

A. Malik Fadjar adalah salah seorang pengusung reformasi. Bahkan, wacana reformasi yang digulirkan Amien Rais kala itu, demikian Marwan Saridjo (2003), sejatinya bermuara dari rumah A. Malik Fadjar ketika dia menjabat Dirjen Binbagais Departemen Agama RI, yaitu Jln. Indramayu No. 14 Menteng, Jakarta Pusat. Rumah A. Malik Fadjar ketika itu menjadi rumah penempatan rumusan reformasi yang dikomandani oleh Prof. DR. Nurcholish Madjid yang dikenal dengan “wali sembilan” atau “wali sepuluh” setelah nama Yusril Ihsa Mahendra masuk di dalamnya.

Sebagai tokoh reformis, A. Malik Fadjar mampu mengartikulasikan dirinya dalam tiga dimensi sekaligus, yaitu cendekiawan, intelektual, dan pengabdian. Gagasan segarnya khususnya mengenai pendidikan yang telah banyak dipublikasikan di media massa benar-benar menggambarkan komitmen dan dedikasinya sebagai figur dalam artikulasi tiga dimensi tadi. Tidaklah berlebihan bila dikatakan bahwa pada diri A. Malik Fadjar merupakan akumulasi pribadi utuh (*ulû al-albâb* atau *insân kâmil*) yang mampu mengkomunikasikan dua kepentingan sekaligus, yaitu kepentingan umat dan kepentingan pemerintah. Maka adalah relevan untuk mengabadikan sosok pribadi A. Malik Fadjar yang menyejarah ini sebagai usaha meneladaninya ke arah pembangunan (khususnya) pendidikan agama dan keagamaan di masa depan.

Biografi dan Sepak Terjang Karir Intelektual A. Malik Fadjar

Nama lengkapnya adalah Abdul Malik Fadjar, dilahirkan di Yogyakarta, 22 Pebruari 1939. Ayahnya bernama Fadjar Martodihardjo dan ibunya bernama Hj. Salamah Fadjar, keduanya sudah meninggal dunia. Malik merupakan putera keempat dari tujuh bersaudara, yaitu Abdul Aziz Fadjar, Abdul Madjid Fadjar, Abdul Ghafar Fadjar, Abdul Malik Fadjar, Siti Marfuah, Abdul Mukti Fadjar, dan Abdullah Fadjar.

Abdul Malik Fadjar yang biasa dipanggil Malik tumbuh di bumi keluarga terdidik (*educated village family*). Ayahnya adalah seorang guru agama. Melalui ayahnya, Malik banyak belajar ilmu agama dan keagamaan. Salah satu ajaran penting yang ditransmisikan kepada semua anak-anaknya adalah percaya diri dan keberanian diri. Hal ini karena ayah Malik dikenal sebagai pribadi yang “liberal,” dalam arti lebih banyak menampilkan “tutwuri” yang mendorong lahirnya sikap percaya diri dan keberanian diri yang semuanya berpangkal dari *îmân*. Modal ini memberi rasa optimis dalam kehidupan diri Malik, sehingga dia tidak pernah memikirkan kesulitan (pesimis) menghadapi masa depan, khususnya di bidang ekonomi.

Malik muda sudah menampakkan sikap-sikap percaya diri dan keberanian diri. Mulai dari bangku SR (Sekolah Rakyat) 6 tahun di Magelang (1952/1953), lalu PGAP (Pendidikan Guru Agama Pertama) 4 tahun di Magelang (1956/1957), dan PGAA (Pendidikan Guru Agama Atas) 2 tahun di Yogyakarta (1958/1959), kiranya Malik sudah mengepalai beberapa organisasi sekolah seperti ketua kelas, ketua OSIS, remaja masjid, dan sebagainya. Sikap percaya diri dan keberanian diri ini makin menaik manakala Malik memasuki dunia mahasiswa di UIN Malang d/h STAIN Malang.

Sebelum hijrah ke Malang, Malik pernah singgah di NTB sebagai guru agama di SDN Taliwang (1959-1960), guru agama pada SGBN Sumbawa Besar (1960-1961), dan guru agama pada SMPN Sumbawa Besar (1961-1963). Selain mengajar, Malik aktif menggerakkan kehidupan beragama (Islam) di masyarakat Sumbawa melalui pengajian-pengajian dan sekolah-sekolah diniyah. Aktivitasnya yang memasyarakat ini kemudian nama A. Malik Fadjar begitu akrab di masyarakat Sumbawa, NTB. Tidak saja sebagai guru agama di sekolah-sekolah formal milik pemerintah, melainkan ia menampilkan diri sebagai manusia pelayan dan pengabdian kepada masyarakatnya.

Begitu akrab dan harumnya nama A. Malik Fadjar di kalangan masyarakat Sumbawa, NTB, hingga gadis bernama Emma Jalaluddin terpikat kepadanya. Malik menikahinya pada tahun (?) dan dari pernikahannya ini ia dikarunia seorang putera bernama Nazaruddin Malik.

Pada tahun 1963 Malik kembali ke Jawa karena panggilan belajar, yaitu pada Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel di Malang (sekarang UIN Malang, yang sebelumnya STAIN Malang). Di kampus ini Malik memulai kehidupan baru sebagai mahasiswa dan aktivis organisasi HMI. HMI menjadi pilihan beraktivitas selama mahasiswa karena organisasi kemahasiswaan ini memiliki visi modernisme, yang secara konsisten banyak menyuarakan perubahan dan pembaruan di segala hal. Modernisme HMI adalah visi kemodernan yang menyarankan adanya integrasi dan holistika pemahaman akan al-Qur'an dan Hadis secara utuh dalam hal bagaimana menerjemahkannya ke dalam idiom-idiom budaya dan tradisi yang mengitarinya. Karena itu, demikian Malik, yang menjadi idola waktu itu adalah perjuangan pergerakan Masyumi yang dikomandani Muhammad Natsir dan perjuangan organisasi sosial-keagamaan Muhammadiyah yang diusung kali pertama oleh KH. Ahmad Dahlan. Kecuali itu, Malik juga mengagumi perjuangan tokoh-tokoh lain, seperti KH. Hasyim Asy'ari dan KH. Wahab Hasbullah (pendiri NU), H.O.S. Cokroaminoto (pendiri Sarikat Islam), A. Hassan (pendiri Persis), Dr. Soetomo (pendiri Budi Utomo), Ahmad Surkati (pendiri Al-Irsyad), dan lain-lain.

Visi modernisme HMI diyakini Malik sebagai visi yang selalu mengusung pluralisme baik pemahaman maupun aplikasinya. Geografi kultural, sosial, dan ekonomi serta agama, demikian Malik, merupakan kekayaan yang luar biasa yang harus diapresiasi secara profesional dan proporsional. Negara Indonesia yang kaya akan aneka ragam suku, bahasa, budaya, dan tradisi serta agama, kiranya mensyaratkan lahirnya anak-anak bangsa yang kaya akan pemahaman pluralisme dan multikulturalisme sehingga mampu mewujudkan dan memperkuat idealisme dan realitas negara kesatuan sebangsa dan setanah air. HMI sebagai organisasi kemahasiswaan sejak awal telah memproklamkan diri sebagai organisasi yang independen; bebas dari ideologi-ideologi keagamaan dan kesukuan. Maka implikasi yang muncul adalah bahwa alumni HMI bebas memilih memasuki ruang-ruang ideologi keagamaan dan bahkan partai politik. Alumni HMI menyebar ke berbagai organisasi sosial-keagamaan seperti Muhammadiyah, NU, Persis, dan sebagainya; organisasi sosial-politik seperti Golkar, PPP, PDI-P, PKB, PAN, PKS, PBB, dan sebagainya; dan organisasi-organisasi profesi lainnya.

Visi modernisme inilah yang memaksa Malik eksis di HMI hingga ia pernah dipercaya memangku jabatan-jabatan strategis di dalamnya. Dia pernah menjabat sebagai Ketua Umum HMI Cabang Malang (1964-1968), Ketua Umum Badko HMI Jawa Timur (1968-1970), anggota pleno PB HMI, dan anggota Badan Pekerja PB HMI. Bahkan A. Malik Fadjar tercatat sebagai salah seorang yang memprakarsai berdirinya KAHMI (Korp Alumni HMI) dan menjabat ketua KAHMI Malang. Melalui organisasi HMI ini Malik mengenal dan dikenal oleh tokoh-tokoh teras HMI, seperti Nurcholish Madjid, Dawam Rahardjo, Djohan Effendy, Ahmad Wahib, Parni Hadi, Fahmi Idris, Isma'il Materium, Mar'ie Muhammad, dan sebagainya.

Selain aktif di organisasi kemahasiswaan, Malik juga aktif di kegiatan-kegiatan masyarakat sekitar kampus. Malik banyak menoreh kebaikan di masyarakat dengan menghidupkan pengajian-pengajian dan kursus-kursus keagamaan, khususnya di daerah Ketawanggede, Dinoyo, Sumbersari, dan Merjosari di Malang. "Aktivitas keagamaan dan kemasyarakatan sejatinya harus ditekuni oleh semua orang beriman, sebagai pengejawantahan dari *imân*, yang harus memanifestasi ke dalam aspek kemanusiaannya secara menyeluruh." Ungkapan filosofik ini mendarah pada diri Malik sejak masih kecil di mana kedua orangtuanya meneladaninya. Diceritakan oleh Malik, demikian:

“Orangtua saya selalu mengajari anak-anaknya bagaimana menjadi orang yang berguna bagi sesamanya. Ajaran hadis Nabi Saw. yang menyatakan, “*khayr al-nâs anfa’uhum li al-nâs*” (sebaik-baik manusia adalah dia yang paling bermanfaat/berguna bagi sesamanya, hadis), selalu diingatkan ayah saya kepada anak-anaknya. Hal ini juga ditampilkan ayah dan ibu saya dalam kesehariannya. Mereka bekerja pagi sampai sore dan bahkan malam hari. Ayah, khususnya, pagi sampai sore mengajar di kelas-kelas yang berbeda di sekolah rakyat negeri (SRN), petang hari (menjelang malam) mengajari para perempuan di desa untuk keperluan pemberantasan buta huruf, dan malam hari—selain mengajar ngaji al-Qur’an—menyediakan bimbingan belajar untuk anak-anak yang duduk di kelas akhir (kelas VI SRN) untuk menghadapi ujian. Hal ini dilakukannya setiap hari, siang dan malam. Bahkan dalam beberapa kesempatan ayah masih meluangkan waktu menyampaikan pelajaran agama kepada masyarakat di masjid, di samping melibatkan diri dalam perkumpulan kemasyarakatan dan keagamaan.”

Nilai-nilai religiusitas dan humanitas dari ayahnya ini cukup mengakar kepada diri pribadi Malik dalam situasi dan kondisi apa pun yang dihadapinya. Tak berlebihan jika dikatakan bahwa A. Malik Fadjar adalah pribadi pejuang dan pengabdian yang penuh percaya diri dan keberanian diri dalam mengkonstruksi cita-cita dan mimpi-mimpinya, khususnya di bidang pengembangan pendidikan.

Jika perjuangan dan pengabdian Malik kali pertama dimulai sejak dia ditugaskan sebagai guru agama di Taliwang, Kabupaten Sumbawa, NTB, maka yang kedua dimulai sejak ia menyandang gelar sarjana (Drs.) dari Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel di Malang pada tahun 1972. Sejak tahun 1972 hingga tahun 1999 Malik tercatat sebagai Dosen dan Guru Besar di IAIN Sunan Ampel Malang (yang kini sudah berubah status menjadi UIN Malang).

A. Malik Fadjar merupakan dosen muda yang disegani di Malang. Gagasan-gagasan kependidikannya selalu mendapat respon banyak kalangan. Meskipun begitu tak jarang juga menuai banyak kritik karena apa yang digagas Malik cenderung menyalahi aturan-aturan birokrasi dan bahkan *unpredictable*. Sebagai contoh, sewaktu menjabat sebagai Sekretaris Fakultas pada Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Malang (1972-1979), Malik menggagas lahirnya *Forum Studi Pascasarjana* (FSP) IAIN Malang yang berfungsi sebagai media komunikasi, diskusi, perdebatan, dan sekaligus wadah mencari solusi bagi pencerahan pendidikan Islam di masa depan. Jadi, jauh sebelum adanya Program Pascasarjana di lingkungan IAIN di Indonesia Malik sudah menyuarakan akan pentingnya forum pascasarjana itu. Bahkan, lebih dari itu, hal perilaku akademik Malik yang paling menyalahi kinerja

birokrasi adalah diangkatnya KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sepulang dari Baghdad sebagai dosen luar biasa dengan pangkat dan golongan Penata Muda III/a (Asisten Ahli Madya) di IAIN Sunan Ampel di Malang, yang sebelumnya ditolak oleh IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Adapun lembaga lain yang pernah dihidupkan Malik sewaktu menjabat sekretaris fakultas adalah LP3M (Lembaga Pendidikan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat). Melalui lembaga ini banyak hasil penelitian dan pengabdian yang dilakukan IAIN Sunan Ampel Malang. Bahkan karenanya Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Malang dikategorikan sebagai *pilot project* Fakultas Tarbiyah di lingkungan IAIN se-Indonesia.

Masa pengabdianya sebagai sekretaris fakultas berakhir ketika Malik memperoleh kesempatan melanjutkan Studi S2 di Florida State University, The Departement of Educational Research, Development, and Foundation, Amerika Serikat dan memperoleh gelar Master of Science (M.Sc.) pada tahun 1981.

Malik adalah pribadi pengabdian. Tidak seperti kebanyakan mahasiswa lain yang biasanya berlama-lama menikmati kesempatan “berlibur” di luar negeri karena beasiswa yang diperolehnya masih bisa diperpanjang, Malik langsung kembali ke Malang dan menjadi dosen kembali. Mengajar baginya merupakan rekreasi akademik yang harus dinikmati, di samping sebagai bentuk pengabdian bagi agama, bangsa, dan negara khususnya bagi pembangunan generasi yang akan datang. Bukanlah suatu beban bagi Malik keberadaannya sebagai Menteri Agama, Mendiknas, dan Menko Kesra, untuk tetap meluangkan waktu memberikan kuliah bagi mahasiswa.

Melihat prestasi dan dedikasi Malik sekembali dari Amerika Serikat, UMM (Universitas Muhammadiyah Malang) memintanya untuk mengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (1982). Tidak berselang lama, hanya 1 tahun mengabdikan, pada tahun 1983 Malik diangkat menjadi Dekan. Lalu, pada tahun yang sama dia pun dipercaya sebagai Rektor UMM (1983-2000), suatu jabatan struktural akademik paling lama yang disandanginya. Sejak menjabat Rektor UMM inilah karir A. Malik Fadjar mulai menaiki pentas pergaulan nasional dan bahkan internasional.

Pengawal Reformasi

Jika melihat kilas balik sejarah, pada tahun 1998, terdengar kata “reformasi” yang mulai mengelinding di lingkungan akademisi sampai masyarakat. Ungkapan reformasi diintrodusir pertama kali oleh Prof. DR. M. Amien Rais, Dosen dan Guru Besar FISIP UGM, yang kemudian menjadi Ketua Umum MPR RI (1999-2004). Munculnya ungkapan reformasi berkenaan

dengan proses urgensi pergantian rezim Orde Baru, Soeharto, yang berkuasa selama \pm 32 tahun. Urgensi reformasi ini sedikitnya berkaitan dengan situasi Indonesia (khususnya Jakarta dan sekitarnya) yang sudah menaiki keadaan kritis, redup, mencekam, dan mengerikan. Di mana-mana terjadi pembakaran dan penjarahan. Yang menjadi sasaran amukan massa khususnya adalah toko, mobil, dan bangunan milik non-pribumi. Terjadi hiruk-pikuk orang berlarian dan berteriak: “kebakaran, kebakaran, kebakaran!”

“Reformasi,” dengan berbagai argumen yang dimunculkan diyakini sebagai “malaikat penolong” bagi keadaan kritis kala itu. Namun hal yang belum diungkap akan misteri reformasi ini adalah dari “rahim” manakah “makhluk” reformasi itu sebenarnya lahir? Siapakah yang paling berkompeten melahirkannya? Bagaimana pula proses lahirnya reformasi itu? Di bawah ini akan diurai bagaimana proses reformasi itu sesungguhnya mengemuka dan peran rumah dinas Dirjen Binbagais Departemen Agama RI, Jln. Indramayu 14 Menteng Jakarta Pusat.

Untuk menguak misteri lahirnya reformasi dan peranan rumah dinas Dirjen Binbagais Departemen Agama RI, Jln. Indramayu No. 14 Menteng, Jakarta Pusat, yang kala itu didiami oleh Prof. DR. H.A. Malik Fadjar, M.Sc., maka elaborasi terhadap tulisan Marwan Saridjo mengenai otobiografinya tak bisa dielakkan, selain merupakan hasil wawancara penulis dengan A. Malik Fadjar di kantornya, Gedung Mendiknas RI, Lt. II, Jln. Panglima Sudirman-Jakarta Pusat pada Kamis, 30 September 2004.

Rumah dinas Dirjen Binbagais Departemen Agama RI di Jln. Indramayu No. 14 Menteng, Jakarta Pusat, awalnya merupakan rumah peninggalan kolonial Belanda. Rumah itu terdiri dari 2 lantai dan 4 kamar tidur. Di lantai bawah terdiri dari 1 kamar utama, ruang tamu, dapur, kamar mandi, dan ruang makan. Sejajar dengan dapur dan kamar makan terdapat paviliun dan di tengahnya (antara paviliun dengan dapur dan ruang makan) terdapat taman dan tempat parkir. Pada penghujung tahun 1950-an, rumah itu dibeli oleh Departemen Agama dan pada tahun 1960-an dipergunakan sebagai sarana kuliah salah satu Fakultas IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, sebelum pindah ke Ciputat-Jakarta Selatan (sekarang masuk wilayah Tangerang-Banten). Usai dibangun gedung Departemen Agama yang di lapangan Banteng, rumah itu ditetapkan sebagai rumah dinas Dirjen Binbagais Departemen Agama RI.

Ketika Prof. H. A. Malik Fadjar, M. Sc. diangkat menjadi Dirjen Binbagais, demikian Marwan, rumah dinas itu masih ditempati oleh Bapak Zarkowi Sayuti, Sekjen Departemen Agama, karena rumah dinas Sekjen di

Jln. Brawijaya masih ditempati Bapak Tarmizi Taher, mantan Sekjen yang kemudian menjadi Menteri Agama. Untuk beberapa lama H. A. Malik Fadjar masih tinggal di rumah kontrakan di kawasan Perumahan Kayu Putih, kawasan Kelapa Gading, Jakarta. Tak berselang beberapa lama setelah kepindahan H. A. Malik Fadjar ke rumah dinas itu, Jakarta dan sekitarnya mengalami eskalasi situasi politik yang kritis dan mencekam. Para aktivis dan tokoh Islam berkumpul di Jln. Indramayu dan jadilah rumah dinas A. Malik Fadjar menjadi “markas” dan istrinya, Hj. Noorjanah, terpaksa menyelenggarakan “dapur umum” bagi aktivis dan tokoh Islam yang hadir.

Marwan Saridjo yang menulis kisah lahirnya reformasi dalam otobiografinya dengan “Pahlawan Reformasi dari Tikungan,” menceritakan demikian:

.... Dini hari, pukul 01.30 Wib tanggal 21 Mei 1998, di teras depan paviliun kediaman H. A. Malik Fadjar, Jln. Indramayu No. 14 Menteng-Jakarta Pusat, Dono (Wahyu Sadono, bintang film komedi [Warkop] terkenal yang telah meninggal dunia) duduk sendiri dengan berwajah sayu (atau setengah mengantuk?), sambil berucap: “Nanti akan muncul orang-orang dari tikungan yang mengklaim dirinya sebagai pahlawan reformasi.”

Di tengah hiruk-pikuk orang banyak di rumah itu, tidak ada orang yang mendengarkan ucapan dia. Dini hari itu, di ruang dalam paviliun sedang berlangsung konferensi pers dari Nurcholish Madjid dengan didampingi H. A. Malik Fadjar dan beberapa tokoh lain. Selesai Cak Nur (sapaan Nurcholish Madjid), disusul Amien Rais yang tampil di depan kamera TV, dengan didampingi Syafi’i Ma’arif. Acara konferensi pers itu dihadiri oleh wartawan dalam dan luar negeri (khususnya dari *The Washington Post*), tokoh LSM, dan para aktivis lain. Acara konferensi itu diadakan secara “dadakan.”

Sebelum itu, sekitar pukul 21.30 Wib tanggal 20 Mei 1998, Ir. Akbar Tandjung datang ke rumah Pak Malik dan naik ke lantai II menemui Nurcholish Madjid dkk. yang sedang diskusi tentang eskalasi situasi politik yang bergerak dengan cepat. Ir. Akbar Tandjung menyampaikan informasi bahwa 14 menteri termasuk dirinya, dengan diprakarsai Ginanjar Kartasasmita, telah membuat pernyataan untuk mundur dari anggota kabinet dan tidak bersedia masuk dalam kabinet hasil reshuffle. Ketika diminta copy pernyataan itu, Akbar menolak. Menurut Yusril dalam rapat beberapa jam sebelumnya—juga di rumah dinas A. Malik Fadjar di Jln. Indramayu 14 Menteng—yang disebut “rapat gelap-gelapan” karena lampu dipadamkan, foto-copy surat pengunduran diri para menteri itu telah diperlihatkan oleh Akbar dan telah diinformasikan kepada peserta pertemuan, seperti Amien Rais, Adi

Sasono, Parni Hadi, A. Malik Fadjar, dan lain-lain. Cak Nur dalam rapat gelap-gelapan itu tidak ikut. Setelah ngomong-ngomong sebentar, Akbar lalu pergi dan berjanji akan menyampaikan informasi perkembangan situasi selanjutnya. Waktu ia (Akbar) hendak pulang, saya (Marwan) “selundupkan” dia lewat kamar tidur Pak Malik untuk terus ke luar ke Jalan Raya (menghindari kepungan wartawan dan akitivis lainnya). Sebelumnya yang “diselundupkan” lewat kamar tidur Pak Malik adalah Eky Syahrudin. Hal ini dilakukan karena keberadaan tim di lantai II tidak (boleh) diketahui oleh hadirin yang ada di bawah (ruang paviliun).

Pukul 23.30 Wib (11.30 malam) diterima berita (dari Yusril, kemudian menyusul dari Akbar Tandjung) bahwa besok pagi pada tanggal 21 Mei 1998, Pak Harto akan menyampaikan “deklare” (pernyataan) pengunduran dirinya sebagai Presiden, dan sesuai ketentuan UUD 1945 Wakil Presiden Prof. DR. B. J. Habibie akan menggantikannya. Setelah dilakukan konfirmasi dan benar Pak Harto mengundurkan diri, diputuskan untuk menyelenggarakan konferensi pers. Nurcholish Majid menyiapkan poin-poin tertulis dengan dibantu Emha Ainun Najib dan kawan-kawan yang lain. Namun ketika Cak Nur hendak menuju ruang bawah, ternyata di sana sudah hadir Amien Rais. Cak Nur terkejut. Cak Nur agak enggan bersanding dengan Amien karena dikhawatirkan akan mempengaruhi fokus materi yang akan disampaikan pada konferensi pers. Tapi apa boleh buat, terpaksa ketika itu juga ada dua figur yang bakal menyampaikan materi konferensi. Sebab, sekalipun Amien bukan figur utama dalam penyampaian konferensi itu, dia akan tetap akan dimintai pendapatnya oleh wartawan seputar pengunduran diri Pak Harto. Cak Nur menuju ruang bawah (konferensi) didampingi A. Malik Fadjar, Fahmi Idris, Emha Ainun Nadjib, dan lain-lain. Lalu, konferensi pers dilaksanakan dengan Cak Nur sebagai figur pertama yang menyampaikan poin-poin materi reformasi dan kemudian disusul oleh Amien Rais dengan didampingi Syafi’i Ma’arif.”

Usai menyampaikan materi konferensi pers, wartawan menanyakan peran Cak Nur (sapaan akrab Prof. DR. Nurcholish Majid) dalam menggulirkan gerakan reformasi dan desakan kepada Soeharto turun dari kursi kepresidenan, dia berkata: “Gerakan reformasi itu ibarat satu titik, garis yang menuju ke sana itu banyak sekali. Nah, saya cuma salah satu dari garis itu. Tidak bisa langsung dibuat konklusi bahwa Pak Harto mundur gara-gara saya tidak mau duduk dalam Komite Reformasi. Itu kelewatan bener.”

Eskalasi situasi politik, khususnya di Jakarta dan sekitarnya, menaiki puncaknya yang mencekam sejak tanggal 12, 13, dan 14 Mei 1998. Rumah kediaman A. Malik Fadjar di Jln. Indramayu 14 Menteng, Jakarta Pusat, praktis menjadi markas para aktivis. Ada dua alasan mengapa rumah A. Malik

Fadjar menjadi markasnya: *pertama*, letaknya strategis (di tengah-tengah) dan *kedua*, faktor penghuninya. A. Malik Fadjar sendiri, demikian Marwan, merupakan bagian dari para aktivis dan hampir sepanjang hidupnya dikenal sebagai aktivis yang selalu bergumul dengan situasi kritis.

Kisah “wali sepuluh” yang sebelum nama Yusril Ihsa Mahendra masuk di dalamnya dikenal dengan “wali sembilan,” ketika mereka (kecuali Amien Rais) memenuhi undangan (menghadap) Pak Harto ke istana membicarakan eskalasi situasi politik, bermula dari pokok-pokok pikiran Nurcholish Madjid yang disampaikannya di depan para jenderal di Cilangkap pada tanggal 14 Mei 1998. Tiga pokok pikiran itu adalah: *Pertama*, Pak Harto agar menyampaikan pidato di depan umum, di depan rakyatnya, dan mengakui telah membuat kesalahan serta minta maaf atas kesalahan-kesalahannya. *Kedua*, menyatakan bersedia menyerahkan kekayaan diri dan keluarganya kepada negara. *Ketiga*, berjanji mengakhiri sesegera mungkin kepresidenannya secara damai melalui pemilihan umum.

Apa yang disampaikan Cak Nur di hadapan para jenderal menuai beragam tanggapan. Ada yang menanggapinya dengan positif dan tak sedikit pula yang mengatakannya sebagai “pikiran gila.” Tak satu pun dari para jenderal yang berani menyampaikan pokok-pokok pikiran Cak Nur itu ke Pak Harto. Atas ide A. Malik Fadjar, pokok-pokok pikiran itu sebaiknya disampaikan melalui Menteri Agama RI, Prof. DR. H. M. Quraish Shihab, yang biasa salat Jum’at bersama Pak Harto di Masjid Baitur Rahman. Tetapi gagal karena Menag M. Quraish Shihab ada acara lain. Akhirnya, pokok-pokok pikiran itu disampaikan ke Pak Harto melalui Menteri Sekretaris Negara, Sa’adillah Mursjid. Melalui Mensesneg Sa’adillah Mursjid inilah kemudian Pak Harto ingin bertemu dengan Cak Nur. Cak Nur masuk ke kediaman Pak Harto lewat jalan belakang (karena jalan depan penuh dengan wartawan) dengan didampingi Sa’adillah Mursjid dan Probosutedjo. Pertemuan Cak Nur dan Pak Harto mengerandakan pernyataan bahwa (besoknya) Pak Harto bakal mengundurkan diri, dan untuk itu, Pak Harto sebelumnya meminta ketemu dengan mereka yang kemudian disebut “wali sepuluh.” Akhirnya, mereka (“wali sepuluh,” dikomandani Prof. DR. Nurcholish Madjid) pada tanggal 19 Mei 1998 menghadap Pak Harto bersama-sama dari rumah A. Malik Fadjar, Jln. Indramayu No. 14 Menteng, Jakarta Pusat.

Hal yang perlu digarisbawahi adalah bahwa dari rumah dinas A. Malik Fadjar itulah sesungguhnya gerakan reformasi dilahirkan/dikumadangkan. Tak banyak yang memberikan apresiasi pada peran keberadaan rumah itu. Bisa dibayangkan di saat eskalasi situasi politik menaik dan keberadaan

kekuasaan Soeharto yang kala itu “dicap” otoriter, seseorang pemilik rumah merelakan rumahnya dijadikan “markas” para aktivis yang berpretensi untuk menurunkan rezim yang sedang berkuasa. Maka padanya relevan untuk diberikan predikasi “pahlawan reformasi.”

Menjadi Mendiknas (2001-2004): Menempatkan Pendidikan sebagai *Human Investment*

H. A. Malik Fadjar pada tahun 2001 diangkat sebagai Menteri Pendidikan Nasional. Selama lebih kurang tiga tahun menjabat Menteri Pendidikan Nasional, dirinya berupaya menempatkan pendidikan dalam kerangka *human investment* (investasi untuk pembangunan sumber daya manusia). Ia menyadari bahwa kerangka tersebut tak mudah dijabarkan dan langsung kelihatan hasilnya. Alasannya, ketika mulai menduduki jabatan tersebut, Juli 2001, bangsa Indonesia berhadapan dengan tantangan globalisasi di mana kualitas SDM merupakan keniscayaan. Namun, pada sisi lain, belum semua komponen bangsa siap menyambut dan melakoni perubahan tersebut (*Kompas*, 14 Oktober 2004).

Hal yang diawali bagi usaha menempatkan pendidikan ke dalam kerangka *human investment* ini, Malik mengupayakan dilangsungkannya program Wajib Belajar 9 tahun. Melalui ini dianggarkan lahirnya sebetulnya penanaman nilai-nilai akademis ke arah keberhasilan tahapan pendidikan selanjutnya. Apalagi konstitusi mengamanatkan agar negara memberikan layanan pendidikan kepada semua warganya.

Ada banyak hal yang dilakukan Malik ketika menjadi Mendiknas. *Pertama*, otonomi pendidikan. Otonomi pendidikan adalah pengalihan pengelolaan pendidikan dasar dan menengah dari pusat ke pemerintah daerah (Pemda), yang memandang hubungan pusat dan daerah tidak lagi dalam kerangka hierarkis, tetapi konsultatif. Di sini berarti pemberdayaan daerah adalah keniscayaan. Pemerintah pusat hanya bertindak selaku “pemantau” pemberdayaan dengan menyalurkan bantuan dalam model *block grant*, dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK).

Melalui kerangka otonomi pendidikan ini disarankan agar semua warga masyarakat mampu mengenyam pendidikan yang layak di daerahnya masing-masing. “Cukup rasional,” bila pada acara *roundtable discussion* mengenai *Masa Depan Madrasah* yang dikomandani oleh Prof. Dr. Azyumardi Azra dan Prof. Dr. Komaruddin Hidayat, dihadiri oleh Dirjen Dikdasmen beserta para direktur di bawahnya, Dirjen Bagais Departemen Agama beserta para direktur di bawahnya, anggota DPR, para pakar, dan ulama, Malik menolak

dipindahkannya pengelolaan madrasah ke Departemen Pendidikan Nasional. Alasannya, “hal itu hanya bersifat teknis-prosedural saja (masalah pendanaan) dan *lucu* di saat kita berbicara otonomi pendidikan malah ingin mengalihkan madrasah ke pusat.” Tentu apa yang menjadi kebijakan Malik mengenai otonomi pendidikan sangat beragam dan menuai sekaligus memompa pemerintah daerah khususnya dan masyarakat pada umumnya bekerja keras untuk menjadikan pendidikan sebagai investasi paling utama dari sekian sektor pembangunan yang harus dilakukan.

Kedua, sejalan dengan otonomi pendidikan, beberapa status perguruan tinggi negeri (PTN) diganti sebagai Badan Hukum Milik Negara (BHMN). Lagi-lagi kebijakan ini menuai banyak kritik dari berbagai kalangan, seperti biaya masuk PTN itu makin naik, standar kelulusan makin tak terkendali, dan kesempatan masuk PTN makin susah. Semua itu, demikian Malik, tak perlu dirisaukan bila semua pihak berpikir komprehensif. Mengelola pendidikan harus dicari makna-makna yang signifikan bagi pengembangan anak didik/mahasiswa secara luwes dan luas. Bahkan kadang-kadang, mengelola pendidikan itu terpaksa harus keluar dari kerangka normatif dan imperatif yang menghimpit guna menyesuaikan diri dengan ekspektasi atau harapan masyarakat yang terus berkembang.

Ketiga, menaikkan gaji dan tunjangan fungsional guru 100-150 persen. Usaha ini tidak mudah. Diakui oleh Malik, bahwa menaikkan pengahsilan guru Rp. 50.000,- saja per bulan per orang butuh anggaran negara Rp. 1,9 triliun per tahun. Tetapi, hal ini harus diusahakan guna meningkatkan kualifikasi dan kesejahteraan guru yang sampai sekarang ini kiranya masih memerlukan perhatian khusus pemerintah.

Keempat, mengesahkan berubahnya beberapa IAIN menjadi UIN. Ada tiga lembaga yang berubah status dari IAIN ke UIN, yaitu IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (Kppres Nomor 31 Tahun 2002), IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Keppres Nomor 50 Tahun 2004, tanggal 21 Juni 2004) dan STAIN Malang (Keppres Nomor 50 Tahun 2004). Untuk UIN Yogyakarta dan UIN Malang, sebelum dikeluarkan surat keputusan presiden adalah diterbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Pendidikan Nasional (H. Malik Fadjar) dan Menteri Agama (Said Agil Husin Al Munawar) RI No. 1/0/SKB/2004 dan No. ND/B.V/I/Hk.00.1/058/2004 tentang perubahan bentuk IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan STAIN Malang menjadi UIN. Sejatinya usaha ke arah lahirnya perguruan tinggi Islam yang berwawasan masa depan sebagai *center of excellence* dan memiliki *competitive advantage* di era global bagi para lulusannya, sudah diupayakan sejak ia menjadi

Menteri Agama. Melalui UIN ini, ia berharap umat Islam tidak saja sebagai pengadopsi dan penganut produk-produk luar sebagaimana selama ini terjadi tetapi bagaimana mereka menjadi penggagas, pencipta, dan pelaku sejarah keilmuan di dunia.

Melalui kebijakan di-BHMN-kannya sejumlah PTN oleh Pak Malik diharapkan ia bisa memaksimalkan fungsinya sebagai pemelihara moral dan peradaban bangsa, pemrakarsa kebenaran, kearifan dan keluhuran ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (*Kompas*, 24 April 2004). Yaitu menjadikan perguruan tinggi itu sebagai laboratorium mini bagi masyarakat secara luas. Masyarakat bisa mengakses apa saja di sana dengan menu yang beragam dan sekaligus spesifik. Karena itu, demikian Malik, spesifikasi keunggulan akan keilmuan pada masing-masing perguruan tinggi kadang harus merupakan keniscayaan. ITB, misalnya, bisa unggul di bidang teknologi industri. Kemudian UI pada bidang kedokteran atau ekonomi. UGM mungkin di bidang hukum. Dan untuk itu, guru besar pun seharusnya didaftar sesuai dengan kepakaran dan asal universitasnya sehingga kalau ada orang mau berguru tinggal melihat referensi saja (*Kompas*, 14 Oktober 2004).

Kelima, disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Usaha ini adalah suatu pekerjaan yang paling banyak menyita energi semua pihak dan menuai kritik di mana-mana. Tetapi, atas usaha yang gigih dari Mendiknas, pasal-pasal yang semula mengundang polemik dan kritik akhirnya disepakati dan disahkan. Menyita energi semua pihak karena UU ini merupakan landasan hukum paling utama bagi gerak sistem dan manajemen pengelolaan pendidikan di Indonesia. Dari dan ke mana suatu arah pendidikan dibangun adalah bermula dari UU ini.

Kecuali itu, Malik banyak melakukan pembaruan di bidang manajemen kelembagaan di lingkungan Depdiknas. Seperti digerakkannya Direktorat Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda (PLSP), ialah sebagai direktorat yang berusaha memberikan pelayanan pendidikan kecakapan hidup (*life skill*) bagi masyarakat agar mereka memiliki modal untuk bekerja secara profesional pada perusahaan dan atau berusaha/berbisnis sendiri dan memperoleh penghasilan yang layak. Sehingga dengan begitu diharapkan masyarakat memiliki kesiapan diri memasuki dunia kerja profesional/trampil sesuai kebutuhan dan tuntutan daerah masing-masing.

Program PLSP, sebagai jalur pendidikan nonformal, adalah memegang peran sangat penting dan strategis dalam memenuhi kebutuhan asasi pendidikan bagi seluruh warga negara tanpa diskriminatif. Selain mendapat dukungan dalam sistem pendidikan nasional, jalur tersebut harus pula

dikuatkan oleh masyarakat. Malik menuturkan bahwa pendidikan nonformal semacam *life skill* telah membuktikan peran sebagai wahana, sarana, dan media pendidikan yang fleksibel, praktis, dan kontekstual. Oleh karena itu, demikian Malik, program kegiatannya harus disusun sesuai jenis mutu, tingkat kebutuhan masyarakat, dunia kerja, dan lingkungannya yang terus berubah (*Kompas*, 27 Agustus 2004).

Adapun kebijakan Malik yang banyak menuai kritik di akhir jabatannya sebagai Mendiknas adalah masalah UAN. Tetapi kebijakan itu kemudian disadari oleh semua pihak karena sertifikasi standar nasional merupakan sebuah keniscayaan. Seiring dengan perkembangan global yang menuntut kualitas SDM yang kompetitif maka langkah-langkah konstruktif dan produktif untuk menjaga hasil-hasil yang telah dicapai di dunia pendidikan adalah urgen. Termasuk menaikkan standar kelulusan UAN dari 3,01 menjadi 4,01 (*Kompas*, 6 Mei 2004).

Akhirnya, apa yang menjadi kebijakan Malik selalu diterima dengan lapang oleh mereka yang berkepentingan. Visi yang senantiasa dikedepankan olehnya adalah bahwa tuntutan ke arah peningkatan kualitas pendidikan nasional sudah tidak dapat dielakkan lagi. Oleh karena itu, kegiatan pendidikan baik formal, nonformal, maupun informal perlu ditangani secara lebih profesional. Tentu dengan arah mendidik generasi muda yang kompetitif sekaligus punya wawasan kebangsaan. Itulah kira-kira yang menjadi program dan kebijakan Malik ketika menjadi Mendiknas.

Satu hal karya Malik sebagai Mendiknas paling monumental di akhir jabatannya adalah diluncurkannya Televisi Edukasi (TV-E), pada Selasa, 12 Oktober 2004 (*Kompas*, 13 Oktober 2004). TV-E diharapkan menjadi media pembelajaran masyarakat melalui teknologi. TV-E ini dirancang untuk mendidik dan mencerdaskan masyarakat dengan disain yang arif dan etika yang tinggi. Hal ini urgen di tengah maraknya tayangan televisi yang glamour, sensual, mistis, dan tidak/kurang mendidik. Maka menjawab itu Depdiknas berkepentingan untuk menggunakan media televisi sebagai sarana pembelajaran masyarakat yang cerdas dan kreatif sekaligus menyenangkan dan mengasyikkan. Sungguh suatu ide yang gemilang dan futuristic.

Menjadi Menkokesra *ad Interim* (April-Nopember 2004)

H. A. Malik Fadjar dilantik menjadi Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat *ad interim* pada Jumat, 23 April 2004. Penunjukkan dirinya sebagai Menko Kesra, selain menjabat Mendiknas, adalah berkenaan dengan pengunduran M. Jusuf Kalla dari jabatan itu karena mencalonkan

diri sebagai wakil presiden sebagaimana tertuang dalam surat Keputusan Presiden RI Nomor B-137 tanggal 22 April 2004 (*Kompas*, 24-4-2004).

M. Jusuf Kalla menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Menko Kesra kepada Presiden Megawati Soekarnoputri di Istana Negara, Jakarta, Senin, 19 April 2004. Singkatnya, pertemuan antara Presiden Megawati dan M. Jusuf Kalla dilakukan, yaitu sesaat setelah rapat kabinet terbatas yang dihadiri oleh Wakil Presiden Hamzah Haz, Menperindag Rini MS Soewandi, Menteri Komunikasi dan Informasi Syamsul Muarif, Menteri Kehakiman dan HAM Yusril Ihza Mahendra, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Kwik Kian Gie, dan Kepala Kepolisian RI Jenderal (Pol) Da`i Bachtiar. Untuk itu, kemudian presiden meminta Sekretaris Negara/Sekretaris Kabinet Bambang Kesowo menyiapkan surat keputusan dan sekaligus gantinya. Pak Malik dipastikan sebagai gantinya Kalla, sesudah dihubungi via telepon oleh Sekneg, pada Senin, 19 April 2004, sekitar pukul 17.15 Wib (*Kompas*, 20-4-2004).

Tidak banyak karya yang dilakukan Pak Malik ketika menjabat Menko Kesra, kecuali hanya meneruskan apa yang sudah diprogramkan oleh menteri sebelumnya. Ada dua hal yang menjadi *mainstream* dari Pak Malik ketika itu, yaitu pendidikan dan kesehatan. Pendidikan dan kesehatan menjadi *mainstream* utama program Menko Kesra, A. Malik Fadjar, karena keduanya diyakini sebagai kunci dalam meningkatkan mutu bangsa Indonesia.

Rentang waktu yang hanya lima (5) bulan bagi seorang menteri memang terlalu singkat. Namun begitu, ia mendesak agar kedua program di atas menjadi prioritas utama. Sebab, bicara masalah kesejahteraan rakyat bagi Malik adalah bicara sesuatu yang agung dan luas. Tidak hanya persoalan fisik. Tetapi persoalan luas yang menyeruak hampir ke semua aspek kehidupan manusia, sebagai pangkal adanya problem sosial bangsa seperti pengangguran, kemiskinan, keterbelakangan, daerah rawan konflik, bencana alam, dan sebagainya. Oleh karena itu, skala prioritas secara sistemik perlu didahulukan, yaitu pendidikan dan kesehatan.

Apa pun dalihnya, pendidikan dan kesehatan masyarakat/bangsa merupakan kunci pembuka bagi problem-problem kemanusiaan. Jika ingin melihat maju tidaknya suatu bangsa, maka lihatlah tingkat pendidikan dan kesehatan yang dikandungnya. Keduanya adalah muara dan sekaligus jalan paling utama menuju kesuksesan suatu bangsa. Oleh karena itu, meski dengan pegawai yang hanya sekitar 100 orang, di samping strategi dan kerjasama yang baik digalang dengan departemen dan kementerian di bawah koordinasinya, Malik mampu memecuti gairah fungsional para pegawai

untuk mengimplementasikan program-program yang dicanangkan dalam konteks kesejahteraan rakyat dan bangsa Indonesia.

Terakhir, apa pun alasan yang dibikin oleh para pemerhati bisa disimpulkan bahwa A. Malik Fadjar adalah salah satu tokoh nasional yang membanggakan khususnya di bidang pengembangan pendidikan nasional di Indonesia. Dia pemerhati, pemikir, dan sekaligus pelaku yang senantiasa *concern* dengan pendidikan anak bangsa. Tak salah bila ia disebut sebagai “pahlawan reformasi,” khususnya di bidang pengembangan pendidikan di tanah air.

Karya-karya Malik Fadjar

Hadis Nabi Saw. yang selalu dikutip oleh A. Malik Fadjar dalam beberapa kesempatan adalah *khayr al-nâs ‘anfa’ahum li al-nâs* (sebaik-baik manusia adalah yang paling berguna bagi sesamanya). *Al-`ilm*, dalam konteksnya yang luas dan dalam, adalah amunisi paling berharga bagi manusia dalam hal bagaimana ia menjadi berguna. Untuk mengejawantahkan manifesto mulia ini maka pendidikan dan tradisi menulis adalah investasi paling dipercaya ke arah daya jual seseorang di dalam pergaulan sosial dan global (*social and global village*).

Tradisi menulis yang dilakukan Malik sesungguhnya sudah lama. Sejak dia memasuki dunia kampus (mahasiswa) di UIN Malang Malik kerap kali mengunjungi Gang Mojo di Malang yaitu sebuah pertokoan buku-buku baru dan bekas dari berbagai perspektif ilmu. Bahkan ketika sudah menjadi Rektor UMM kebiasaan membeli buku di Gang Mojo kerap kali dilakukannya. Tak peduli dengan lingkungan yang menyapanya di mana Gang Mojo menunjuk kepada keadaan lokasi yang relatif kurang nyaman dipandang. Malik mengutarakan bahwa kebiasaan mengunjungi toko-toko buku bekas (di Malang dan di Jakarta) dilakukannya karena ia merupakan rekreasi akademik di mana orang bisa menyaksikan banyak hal yang bisa diapresiasi: di antaranya adalah perkembangan ilmu melalui buku-buku, mobilitas kerja para pedagang buku, para konsumen/pembeli buku, dan suasana pasar yang bergelayut dengan berbagai corak manusia-manusia yang terlibat di dalamnya. Di sana ada ruang dialog. Pasar buku merupakan pasar dialog; dialog mengenai banyak hal.

Mengenai kebiasaan Malik membeli dan membaca buku-buku ini dikisahkan oleh salah seorang Sekretaris Mendiknas, Mas Supri, demikian: “Bapak itu punya kebiasaan berbeda dengan menteri-menteri sebelumnya. Beliau suka merokok sekaligus ngopi. Bila dia minta rokok dan kopi berarti

ada sesuatu yang penting dan harus ditulis. Bila hendak menulis, kopi dan rokok harus menemaninya. Tidak hanya itu, saya kadang-kadang diajaknya sore-sore atau hari libur ke toko-toko buku, khususnya di Kwitang-Senin, Jakarta, yang ramai dengan pengunjung dan pembeli buku. Rileks, santai, dan bahkan cuek dengan seseorang yang mengenalnya bahwa beliau adalah Mendiknas. Menyintai buku berarti menyintai diri dan lingkungannya.”

Tidak disangka bila kebiasaan menulis ini kemudian mengukuhkan Malik sebagai pribadi kreatif dan produktif. Benar apa yang diurai oleh Syaikh Ihsan Jampes, Kediri, penulis kreatif dan produktif dengan karyanya yang monumental *Sirāj al-Thâlibîn 2 Jilid*, menulis: “Barangsiapa yang mengarang buku maka sungguh dirinya telah tertolong. Juga barangsiapa menulis buku berarti ia telah meletakkan akalunya di suatu aras dan akan memperoleh kehormatan yang mulia dari manusia” (*man shannafa faqad as `afa, wa man shannafa faqad wadla`a `aqluhû fi thabaq wa `irdluhû `alâ al-nâs*). Tuhan, demikian Kiai Ihsan, adalah Pribadi Yang Mahakreatif dan Mahaproduktif di alam raya ini. Manusia yang tidak mau berkreasi dan bekerja keras di alam ini berarti ia mengingkari kesejatian Tuhan-nya. Di sini bisa dikatakan bahwa eksistensi manusia di dunia bergantung pada kualitas kreasi dan kerja kerasnya.

Memahami makna kreativitas dan produktivitas Tuhan di alam raya ini kiranya merefleksikan kinerja A. Malik Fadajar sebagai pribadi pengabdian untuk berkreasi dan bekerja keras. Ada beberapa buku yang bisa diidentifikasi sebagai hasil kreativitasnya, di antaranya adalah:

1. *Kuliah Agama Islam* (Surabaya: Al-Ikhlâs, 1981).
2. *Kepemimpinan Pendidikan* (Malang: Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Malang, 1983).
3. *Dunia Perguruan Tinggi dan Kamahasiswaan* (Malang: UMM Press, 1989).
4. *Dasar-Dasar Administrasi Pendidikan* (Yogyakarta: Aditya Media, 1993).
5. *Reorientasi Wawasan Pendidikan dalam Muhammadiyah dan NU* (Yogyakarta: Aditya Media, 1993).
6. *Pendidikan Islam: Paparan Normatif, Filosofis, dan Politis* (Malang: UMM Press, 1993).
7. *Visi Pembaharuan Pendidikan Islam* (Jakarta: LP3NI, 1998).
8. *Madrasah dan Tantangan Modernitas* (Bandung: Mizan, 1998).
9. *Reorientasi Pendidikan Islam* (Jakarta: Fajar Dunia, 1999).
10. *Pendidikan, Agama, Kebudayaan, dan Perdamaian* (Malang: UIN Malang Press, 2004).

11. *Sintesa Antara Perguruan Tinggi dengan Pesantren* (Malang: UIN Malang Press, 2004).
12. Berbagai artikel dan makalah yang menghiasi berbagai media baik nasional maupun internasional.

Esensi Pendidikan dan Kreatifitas menurut A. Malik Fadjar

Memertemukan pendidikan dan kreativitas peserta didik (anak) merupakan salah satu sarana utama yang perlu terus menerus dikritisi dan dicermati dalam sistem dan aktivitas sekolah. Proses pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam perkembangan kreativitas. Meskipun bukan satu-satunya penentu lahirnya orang-orang kreatif, pendidikan masih diyakini sebagai faktor utama ke arah lahirnya kreativitas. Sedangkan lembaga pendidikan/ perguruan, baik sekolah maupun madrasah, telah dikukuhkan dan disepakati sebagai tolak ukur baku dari perwujudan nyata pendidikan formal yang berjenjang dan berkesinambungan, sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik serta keluasaan dan kedalaman bahan pengajaran, bukan sesuatu yang sudah jadi, tersedia serta melekat pada sistem maupun kebijakan yang berlaku.

Kenyataan menunjukkan bahwa pendidikan dibangun dan dikembangkan sebagai sistem sekaligus aktivitas di masyarakat, bangsa, dan negara secara sengaja dan terencana. Tujuannya adalah untuk menumbuhkembangkan seluruh potensi yang dimiliki peserta didik, termasuk potensi memberikan respon kreatif terhadap hal-hal yang mengitari kehidupannya. Kreativitas itu dapat dibina, ditumbuhkan, dan ditemukan kembali; dan ini semua dapat dicapai melalui praktik pendidikan. Semua mata pelajaran mestinya menumbuhkan daya kreativitas. Dengan demikian, seandainya dirasakan daya kreativitas peserta didik rendah, maka dipastikan ada sesuatu yang “kurang mengena” (secara pedagogis) dalam sistem maupun praktik pendidikan.

Dalam kepustakaan pendidikan dan psikologis (misalnya James A. Smith, 1966) serta kenyataan-kenyataan empirik secara jelas menggambarkan bahwa hampir setiap peserta didik memiliki potensi-potensi kreatif. Potensi-potensi kreatif ini secara spesifik tidak hanya berhubungan dengan *fine arts* (seni) saja, tetapi menyangkut semua aspek kehidupan. Manusia pada satu sisi tidak hanya mempunyai potensi kreatif dalam merespon persoalan “biotik” yang mengitarinya, namun juga sosial, ekonomi, politik, sejarah, teknologi, sains, bahkan dalam hal-hal yang bertalian dengan agama. Pada sisi lain, kepustakaan dan kenyataan-kenyataan empirik juga menjelaskan bahwa perwujudan nyata dari kesanggupan merespon secara kreatif merupakan

'hasil olah' (*learning process*). Di sini jelas kontribusi sistem dan aktivitas pendidikan sebagai wahana penumbuhan kreativitas.

Kreativitas

Albert Einstein pernah mengatakan, *Imagination is more important than knowledge* (imajinasi lebih penting dari sekadar pengetahuan). Lahirnya berbagai karya manusia di sekeliling kita ini, seperti teknologi, pada mulanya sekadar imajinasi. Burung-burung yang terbang di udara dan ikan-ikan yang berenang di dasar samudra membangkitkan imajinasi para ilmuwan kreatif, sehingga akhirnya terciptalah kapal terbang dan kapal selam sebagai buah teknologi.

Imajinasi adalah upaya dan kekuatan membangun pencitraan mental suatu objek yang belum pernah ada sebelumnya. "Upaya" menyiratkan kesengajaan dan perencanaan, sedangkan "kekuatan" menyiratkan potensi-potensi internal manusia yang diberdayakan semaksimal mungkin, sehingga meledak dan berdaya. Bila tidak diberdayakan, maka potensi-potensi itu tidak akan tumbuh sebagai kekuatan. Terbukti, kreativitas pada sebagian orang mandul, karena potensi yang dimilikinya tidak teraktualisasikan.

Apa sesungguhnya kreativitas itu? Kreativitas didefinisikan secara berbeda-beda. Sedemikian beragamnya pengertian itu, sehingga pengertian kreativitas tergantung pada bagaimana orang mendefinisikannya *creativity is a matter of definition*. Di sini dapat dikemukakan beberapa definisi. Menurut Roger B. Yepsen, Jr (1996), kreativitas merupakan kapasitas untuk membuat hal yang baru (*creativity is the capacity for making something new*). Atau menurut Mihaly Csikszentmihalyi (1996), orang yang kreatif adalah orang yang berpikir dan bertindak mengubah suatu ranah atau menetapkan suatu ranah baru (*a creative person is someone whose thoughts or actions change a domain, or establish a new domain*). Dari dua pengertian di atas dapat dimengerti bahwa kreativitas adalah kemampuan memunculkan dan mengembangkan gagasan baru, ide baru sebagai pengembangan dari ide yang telah lahir sebelumnya serta memecahkan masalah yang dihadapi.

Ada beberapa kriteria yang dapat dikemukakan mengenai kreativitas meskipun terkesan sepihak. *Pertama*, dalam respon-respon kreatif tercermin watak *novelty* (kebaharuan atau *newness*) dan *original*. Ada sesuatu yang baru dan asli (tidak repetitif) dalam respon-respon yang ditampilkan oleh seseorang yang kreatif dalam menjawab atau menangani persoalan-persoalan yang dihadapi. Dalam diri manusia ada fitrah atau potensi untuk mengikuti kebiasaan atau struktur yang ada dan potensi untuk menghindarinya. Proses

dialektika antara integrasi dan disintegrasi terhadap struktur ini adalah proses “menjadi” (*becoming*) atau “tumbuh” sebagai pribadi. Dan sesungguhnya kreativitas itu adalah wujud respon personal yang unik terhadap konflik internal dalam menghadapi berbagai persoalan sepanjang hidupnya. *Kedua*, dalam respon-respon kreatif terbukti secara efektif menggambarkan koherensi, kecocokan (*adaptiveness*) dengan situasi-situasi riil yang dihadapi, yang terkadang dengan cepat mengalami perubahan. *Ketiga*, dalam respon-respon kreatif tergambar suatu bentuk “realisasi” yang bermanfaat dalam memecahkan segenap persoalan (*problems solving*) dasar kehidupan manusia. Ciri ini sekaligus menepis anggapan bahwa respon-respon kreatif bisa menampilkan utopia atau sekadar impian-impian. *Keempat*, watak menonjol dari respon-respon kreatif ialah bahwa respon-respon itu dilandasi kesanggupan berpikir maupun mencandra secara *divergent* (dari berbagai sudut pandang), bukan berpikir *convergent* (dari satu sudut pandang). Kesanggupan berpikir divergen menjadi sangat penting, karena hal ini memungkinkan manusia sanggup menjelajahi berbagai alternatif. Respon-respon kreatif semacam ini perlu mendapat pemupukan dan penumbuhan yang lebih subur dalam sistem dan praktik pendidikan yang harus diciptakan.

Kreativitas juga dapat menjadi determinan penting untuk memacu produktivitas. Namun ada sesuatu yang harus diperhatikan, bahwa kreativitas jangan sampai dikacaukan oleh produktivitas. Orientasi pada *mass-production* yang berlebihan bisa memerangkap manusia pada kiat-kiat reproduksi yang jauh dari kreativitas lagi. Inilah yang barangkali menjadi titik lemah lembaga-lembaga pendidikan yang berkembang selama ini.

Misalnya hasil penelitian yang dilakukan Hans Jellen dari Universitas Utah, AS dan Klaus Urban dari Universitas Hannover, Jerman, bulan Agustus 1987 terhadap anak-anak berusia 10 tahun (dengan sample 50 anak-anak di Jakarta) menunjukkan, tingkat kreativitas anak-anak Indonesia adalah yang terendah di antara anak-anak seusianya dari 8 negara lainnya. Berturut-turut dari skor tertinggi sampai terendah adalah Filipina, AS, Inggris, Jerman, India, RRC, Kamerun, Zulu dan Indonesia.

Terlepas dari pro dan kontra terhadap hasil penelitian tersebut, hal ini mengisyaratkan bahwa lembaga pendidikan di Indonesia masih kurang memberikan atmosfir bagi penumbuhan dan pengembangan kemampuan kreativitas peserta didik. Peserta didik cenderung dituntut untuk memberikan jawaban yang “benar” menurut guru dan kurang diberi kesempatan untuk memberikan alternatif-alternatif jawaban tertentu yang menumbuhkan kreativitasnya. Peserta didik tidak diberi ruang untuk berimajinasi dan

berkreasi. Peserta didik cenderung hanya menjadi obyek dan diposisikan tidak tahu apa-apa sehingga harus dijejali sesuai kemauan guru. Mungkin saja ini merupakan produk dari pendidikan yang menindas, kurang memberikan ruang bagi keterlibatan peserta didik secara aktif, di samping suasana kelas yang terkesan seperti penjara.

Beranjak dari uraian di atas, maka segera dapat dilihat betapa sistem dan praktik pendidikan perlu dirancang, dikembangkan agar secara nyata menumbuhkan daya cipta peserta didik melahirkan hal-hal yang baru, kemampuan berpikir secara divergen, kemampuan merealisasikan gagasan dan keinginan yang koheren dengan situasi baru, membangun konstruksi pemikiran dan aksi yang positif. Dapat dipastikan bahwa maksud serupa ini tidak akan bisa diwujudkan bila sistem dan praktik pendidikan yang dikembangkan bersifat “membelenggu”. Karena kreativitas peserta didik dimungkinkan tumbuh dan berkembang dengan baik, apabila lingkungan keluarga, masyarakat, maupun lingkungan sekolah, turut menunjang mereka dalam mengekspresikan kreativitasnya. Atau dengan ungkapan lain, bahwa lingkungan yang responsif merupakan dasar yang kuat bagi pertumbuhan kreativitas. Dan manusia yang berbakat dan kreatif merupakan modal utama kemajuan masyarakat.

Bukan Serba Instan

Memertemukan pendidikan dan kreativitas peserta didik tentu saja bukan sesuatu yang sudah instan dalam sistem maupun model pelebagaan yang serba terbakukan. Dengan perkataan lain, perlu ditumbuhkembangkan proses belajar mengajar yang memadukan pendekatan ilmu pengetahuan dan kehidupan nyata secara terus menerus sehingga memperkaya inisiatif (*human initiative*). Proses belajar mengajar ini diperlukan terutama untuk menghadapi situasi-situasi baru dalam kehidupan dengan tidak melepaskan peran sekolah/madrasah sebagai lembaga formal bagi proses belajar mengajar.

Dalam dunia bisnis, misalnya, kreativitas diniati untuk mampu menghasilkan kinerja unggul bagi pelanggan dan penanam modal. Program-program MBA di universitas-universitas Amerika kini melihat perlunya mencantumkan kajian kreativitas dalam kurikulum mereka. Tujuannya adalah dalam rangka menjangking pebisnis unggul yang mampu mengalahkan pesaingnya di muka bumi ini.

Selama ini proses belajar mengajar terasa “rutin” dan “statis”. Kalaupun ada perubahan atau perbaikan sifatnya masih sepotong-sepotong dan parsial.

Padahal pembaruan atau perbaikan tidak semata-mata menyangkut persoalan didaktik metodik saja, melainkan terkait pula dengan aspek-aspek pedagogis, filosofis, input, proses dan output. James W. Botkin menamai proses ini sebagai belajar dalam suasana inovatif (*innovative learning*).

Susana belajar yang inovatif dapat memecahkan persoalan-persoalan krisis dalam pendidikan. Di situ ada daya antisipasi dan partisipasi. Daya antisipasi bukan sekadar adaptasi dengan situasi baru, tetapi juga kemampuan untuk memelajari, memprediksi, melihat kecenderungan yang akan terjadi, dan mengevaluasi sebab akibat atau dampak yang ditimbulkan. Yang terpenting dalam antisipasi adalah bagaimana melihat yang terburuk (negatif) dan melakukan telaah lebih jauh sehingga tidak berdampak lebih buruk lagi, dan mencari alternatif-alternatif lain yang lebih baik. Misalnya, upaya mengolah kejenuhan atau kebosanan secara kreatif sehingga tidak membawa kepada akibat fatal, yaitu menjadi apatis. Tetapi, sebaliknya diolah menjadi optimisme.

Sementara daya partisipasi bukan sekadar adanya keterlibatan kedua belah pihak (peserta didik dan guru), melainkan tumbuhnya semangat kerjasama secara aktif dan saling mengerti. Dalam hal ini, yang perlu dipelihara adalah suasana edukatif dan pedagogis, serta terhindarinya kesan-kesan indoktrinatif yang memandulkan daya partisipasi.

Kedua hal di atas (inisiatif dan partisipasi) harus berlangsung secara padu dalam proses belajar mengajar. Tujuan dan nilai yang hendak dicapai dari keterpaduan itu adalah ketahanan individu maupun kelas (sekolah/madrasah) dalam menghadapi kehidupan serta menjaga harkat martabat manusia untuk tetap berkembang. Artinya, meskipun setiap individu berbeda-beda, tetapi semua harus ikut mengantisipasi dan berpartisipasi dalam menghadapi perubahan dan perkembangan baru.

Untuk memunculkan peserta didik yang kreatif dibutuhkan guru yang kreatif. Guru yang kreatif mengandung pengertian ganda, yaitu: guru yang secara kreatif mampu menggunakan berbagai pendekatan dalam proses belajar mengajar dan membimbing peserta didiknya; dan guru yang senang melakukan kegiatan-kegiatan kreatif dalam hidupnya. Guru demikian sangat mungkin untuk mampu mengapresiasi ekspresi kreativitas yang dimilikinya dan menjadi model identifikasi para peserta didiknya.

Tetapi masih dijumpai beberapa masalah dalam upaya pengembangan kreativitas peserta didik di sekolah. *Pertama*, para pendidik masih banyak yang belum memahami arti kreativitas dan bagaimana strategi pengembangannya

di lingkungan sekolah. *Kedua*, keadaan dan suasana sekolah cenderung kurang kondusif untuk berkembangnya kreativitas, seperti yang sering mengemuka adalah perbedaan pandangan antar peserta didik dengan para pendidik masih dianggap tabu dan pendidik masih menganggap bahwa dirinya merupakan sumber belajar utama yang tidak dapat disalahkan, dikritik, dan apalagi digugat. *Ketiga*, tuntutan pengembangan kreativitas dengan sistem penilaian/ujian yang berlaku masih dirasakan kurang relevan dengan perkembangan peserta didik.

Terkait dengan sistem evaluasi, berbagai metode pembelajaran yang menekankan kreativitas dan sikap kritis, seperti cara belajar peserta didik aktif atau *problem base learning*, sulit berhasil karena cara evaluasinya belum sesuai. Selama ini peserta didik cenderung ditagih daya ingatnya ketimbang melatih nalar kritisnya dan guru sibuk memberikan berbagai masukan yang harus dihafalkan. Peserta didik tidak ditempa untuk belajar, melainkan cenderung disuapin soal-soal ujian. Sejatinya dalam proses belajar-mengajar yang dipentingkan adalah suatu evaluasi untuk melihat bagaimana peserta didik itu berproses. Hal seperti ini terkait dengan kreativitas, praktik, dan evaluasi bagaimana menggunakan portofolio untuk melihat hasil kerja peserta didik, bukan yang diingot peserta didik.

Selanjutnya, munculnya gagasan untuk menghidupkan kembali pendidikan berbasis masyarakat (*community base education*) dan menjadikannya sebagai paradigma baru sekaligus model, merupakan salah satu alternatif yang patut disambut dan ditindaklanjuti. Karena keberadaan suatu sistem dan model pendidikan di masyarakat adalah penampakan dari kondisi sosial ekonomi dan budaya serta tradisi yang hidup dan mengitarinya. Seluruh lapisan masyarakat membenteng ke arah bagaimana warna corak pendidikan itu berada. Hal ini akan terus berlangsung dari generasi ke generasi. Cukup beralasan jika dikatakan bahwa pendekatan dan pemberdayaan model INPRES akan mengambang dan tak berakar pada masyarakat yang berlapis itu.

Lebih jauh lagi dalam konteks menumbuhkembangkan suasana kreativitas peserta didik, lapisan-lapisan itu akan lebih mengena dan murah. Sekurangnya seluruh potensi dan kekayaan masyarakat (komunitas basis) maupun pranata-pranata pendidikannya bisa dijadikan sebagai kekuatan pendukung. Sebab, sesungguhnya pendidikan berbasis masyarakat itu akan memerkuat posisi dan peran pendidikan sebagai modal sosial. Dan inilah yang menjadi obsesi Ki Hadjar Dewantara dengan Pancasila: (1) Kodrat Alam; (2) Kemerdekaan; (3) Kebudayaan; (4) Kebangsaan; dan (5) Kemanusiaan.

Akhirnya, jika pendidikan berhasil dengan baik, sejumlah orang kreatif akan lahir. Sebab tugas utama pendidikan adalah menciptakan orang-orang yang mampu melakukan sesuatu yang baru, tidak hanya mengulang apa yang telah dikerjakan oleh generasi lain. Sebagaimana diungkapkan oleh Piaget sebagai berikut: “*The Principal goal of Education is the create men who are capable of doing new things, not simply of repeating what other generations have done—men who creative, inventive, and discoverers.*” Wallahu a’lam

Pendidikan sebagai Praksis Pembelajaran Bangsa menurut A. Malik Fadjar

Keyakinan bahwa pendidikan merupakan wahana ampuh untuk membawa bangsa dan negara menjadi maju dan terpandang dalam pergaulan bangsa-bangsa dan dunia internasional, boleh dikatakan tidak ada keraguan lagi. John Naisbitt dan Patricia Aburdence dalam *Megatrend 2000* mengatakan, “Tepi Asia Pasifik telah memperlihatkan, negara miskin pun bangkit, tanpa sumber daya alam melimpah asalkan negara melakukan investasinya yang cukup dalam hal sumber daya manusia.” Oleh karena itu, katanya lebih lanjut, “Terobosan yang paling menggairahkan dari abad ke-21 bukan karena teknologi, melainkan karena konsep yang luas tentang apa artinya manusia itu.” Maka, mendiskusikan “Pendidikan sebagai Praksis Pembangunan Bangsa,” meskipun terkesan *klise*, namun tetap menarik dan penuh makna. Lebih-lebih di tengah-tengah suasana krisis multi dimensi yang berkepanjangan mendera bangsa dan negara, di mana peran pendidikan ikut dipertanyakan, bahkan “digugat.”

Mengingat topik di atas sangat umum dan luas cakupannya, maka di sini saya akan menitikberatkan pada pembahasan seputar “Peranan Pranata Pendidikan.” Melalui telaah spesifik ini, keterkaitan hubungan fungsional antara pendidikan dan pembangunan bangsa, baik yang bersifat “reflektif” (menggambarkan corak dan kondisi riil bangsa dan negara yang tengah berlangsung) dan yang bersifat “progresif” (menggambarkan peranan pendidikan dalam proses memajukan bangsa dan negara), bisa ditempatkan sebagai kenyataan-kenyataan yang perlu terus menerus dikritisi.

Peranan Pranata Pendidikan

Bila dicermati bahwa kenyataan-kenyataan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat (masyarakat basis), pendidikan sebagai praksis pembangunan bangsa menampakkan wujudnya dalam berbagai pranata (institusi) pendidikan, seperti guru dan pemimpin pendidikan, lembaga-lembaga pendidikan, lembaga-lembaga keagamaan, pusat-pusat keilmuan, dan pusat-

pusat seni dan budaya. Melalui pranata-pranata kependidikan itu, berbagai kegiatan pendidikan menjadi kekuatan riil bagi proses pembangunan bangsa. Proses pembangunan bangsa berarti pula memfungsikan dan mendinamisasikan peranan pranata-pranata kependidikan itu secara terpadu dan berkelanjutan.

Untuk mengetahui peranan pranata-pranata kependidikan tersebut, di bawah ini akan diurai secara garis besar mengenainya. *Pertama*, peranan guru dan pemimpin pendidikan. Semua pihak melihat dan merasakan bahwa keberadaan serta kiprah guru dan pemimpin pendidikan di mana saja berada dan dari waktu ke waktu, merupakan kunci terlaksananya berbagai bentuk dan jenis kegiatan pendidikan formal dan non-formal yang tumbuh dan berkembang di masyarakat (komunitas basis). Bahkan, dapat dikatakan merekalah yang paling mengetahui dan merasakan betapa berat misi dan tanggungjawab yang diemban dan harus dilaksanakan dalam rangka mencerdaskan dan memajukan peserta didiknya menjadi warga bangsa yang maju (modern) dan berkeadaban.

Peran dan tanggungjawab guru dan pemimpin pendidikan sama dengan para pemuka dan pemimpin bangsa, serta para pejabat pemerintahan. Tugas dan tanggungjawab mereka bukan sebatas pada kerja-kerja rutin dan praktis, tetapi lebih dari itu adalah: a). Menerjemahkan nilai-nilai, norma-norma, dan muatan pendidikan yang dituntut oleh masyarakat, bangsa, dan negara yang terus bergerak secara dinamis; b). Mengelaborasi makna dan isi pendidikan sebagai praksis pembangunan bangsa sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun perkembangan dan perubahan yang tengah berlangsung; dan c). Menggali dan mencari alternatif-alternatif model dan jenis pendidikan yang berwawasan lingkungan, ekonomi, sosial, dan budaya.

Kedua, peranan lembaga-lembaga pendidikan formal seperti sekolah, madrasah, dan perguruan tinggi. Dunia sekolah, madrasah, dan perguruan tinggi merupakan perwujudan yang dibangun dan dikembangkan atas dasar sistem dan kebijakan tertentu untuk mewujudkan pendidikan formal secara nasional. Apa yang disebut sebagai “sistem pendidikan nasional,” pada dasarnya merupakan serangkaian kebijakan pemerintah dalam mewujudkan pendidikan nasional yang “berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.” Peran lembaga-lembaga pendidikan formal itu adalah memenuhi hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan dan sekaligus menjalani kewajiban belajar, khususnya pada tingkat pendidikan dasar. Maka peran dan tanggungjawab

yang paling banyak dituntut, antara lain: a). Kemampuannya dalam menjalankan serangkaian kebijakan pendidikan yang telah terbakukan lewat sistem yang berlaku secara nasional, baik kuantitas maupun kualitas; b). Kemampuannya dalam memenuhi dan mewujudkan pendidikan nasional secara akademik, khususnya yang berhubungan dengan mutu yang bertaraf nasional maupun internasional; dan c). Kemampuannya dalam mengemban visi dan misi bangsa, khususnya yang berhubungan dengan daya dan semangat inovasi menuju bangsa dan negara “modern.”

Ketiga, peranan lembaga-lembaga keagamaan sebagai wadah kegiatan pendidikan yang bersifat khusus dan non-formal, seperti pondok pesantren, tempat-tempat ibadat, dan organisasi-organisasi sosial keagamaan. Keberadaan dan kiprah lembaga-lembaga keagamaan itu terus tumbuh dan berkembang semakin kokoh serta berakar pada tataran komunitas basis (umat). Meskipun nampak “eksklusif,” namun di dalamnya menyimpan berbagai potensi yang dapat dijadikan kekuatan pendukung proses pembangunan bangsa. Peranan yang paling menonjol bisa ditunjukkan, di antaranya adalah: a). Menerjemahkan nilai-nilai dan norma-norma agama sebagai kekuatan yang mendasari cita-cita dan memotivasi berbagai kegiatan dalam seluruh aspek kehidupan; b). Mendorong dan membimbing masyarakat dan umat ke arah kemajuan melalui ikatan-ikatan sosial dan kultural maupun tradisi-tradisi yang dimilikinya; dan c). Menanamkan sifat-sifat dan perilaku yang terpuji dan luhur bagi terciptanya peradaban yang religius.

Keempat, peranan pusat-pusat keilmuan sebagai wadah kegiatan penelitian, pembelajaran, dan pelatihan. Sebagai bangsa dan negara yang memiliki sumber-sumber keilmuan yang mendukung kegiatan penelitian, pembelajaran, dan pelatihan yang cukup diakui dan dikagumi oleh dunia, terutama berupa kekayaan sumber daya alam, sesungguhnya lebih terbuka peluang untuk menjadi bangsa yang maju. Namun sumber-sumber keilmuan itu belum diolah dan dimanfaatkan dalam berbagai bentuk dan jenis pendidikan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Peran pusat-pusat keilmuan itu, terutama adalah dalam: a). Memanaj sumber-sumber keilmuan itu sebagai kekuatan yang mendukung pendidikan akademis, profesi, dan ketrampilan; b). Menjembatani dan menginformasikan sumber-sumber keilmuan itu untuk memajukan dan memperbaiki sistem dan kebijakan pendidikan nasional; dan c). Memelihara dan sekaligus mengembangkan sumber-sumber keilmuan itu sebagai bagian dari kekayaan dan kebanggaan bangsa dan negara.

Kelima, peranan pusat-pusat seni dan budaya sebagai wadah kegiatan pendidikan dan kebudayaan, seperti museum dan sanggar-sanggar seni dan budaya yang tersebar di berbagai daerah. Boleh dikatakan berbagai museum dan sanggar seni dan budaya itu merupakan wahana yang secara tidak langsung memiliki arti penting dan strategis bagi proses pembangunan bangsa. Peran utamanya adalah: a). Menerjemahkan nilai-nilai seni dan budaya yang dimiliki sebagai landasan proses pembangunan bangsa; b). Memosisikan seni dan budaya yang dimiliki sebagai kekuatan riil dalam proses pembangunan bangsa; dan c). Memelihara dan mengembangkan seni dan budaya sebagai kekayaan dan kebanggaan bangsa dan negara.

Mensinergikan Peranan Pranata Kependidikan

Selama ini peranan pranata kependidikan masih nampak bergerak sendiri-sendiri dan belum membentuk sinergi positif yang mendukung proses pembangunan bangsa. Masing-masing lebih banyak melihat dunianya sendiri dan kurang membuka dan saling memberi akses. Sehingga, makna pendidikan mengalami “penyempitan” dan “reduksi.” Bahkan “mandek,” terkurung dalam sistem sekolah, madrasah, dan perguruan tinggi.

Memang tidak salah dan harus diakui, bahwa sistem pendidikan nasional yang direpresentasikan oleh sekolah, madrasah, dan perguruan tinggi itu penting dan diperlukan untuk penanganan secara sistemik. Terutama dalam rangka memenuhi persyaratan formal berdasarkan standar baku nasional maupun internasional (secara akademis). Namun ini tidak berarti bahwa makna dan perwujudan pendidikan itu hanya melulu dan identik dengan sekolah, madrasah, dan perguruan tinggi. Lebih-lebih dalam kaitannya dengan pendidikan sebagai praksis pembangunan bangsa. Karena memosisikan pendidikan sebagai praksis pembangunan bangsa, secara tidak langsung tersirat maksud memerankan berbagai pranata kependidikan itu dalam satu visi, misi, dan komitmen yang utuh dan terpadu. Dalam hal ini, keberadaan dan peranan pranata kependidikan bisa saling mendukung dan mengisi, tanpa harus meninggalkan sistem maupun kekhususan-kekhususannya. Artinya, pranata kependidikan yang dikembangkan atas dasar sistem baku maupun yang dikembangkan atas dasar tradisi, tetap berlangsung.

Mensinergikan peranan pranata kependidikan itu diangankan mampu melahirkan semacam *inner power and beauty*, dan *power and beauty in simplicity*, dalam arti “murah dan sederhana, tapi kuat dan indah.” Ini penting dan cukup strategis, mengingat kenyataan-kenyataan obyektif di masyarakat (masyarakat basis), yang kondisi sosial ekonominya masih tergolong rendah.

Maka, kalau di kota-kota besar bermunculan sekolah-sekolah “unggulan” yang bernuansa “eksklusif,” elitis, mewah, dan mahal, mengapa di daerah-daerah pedesaan tidak dicarikan alternatifnya?

Dalam sejarah pendidikan Indonesia tercatat beberapa model dan jenis pendidikan yang dirintis dan dikembangkan oleh tokoh-tokoh pergerakan nasional dengan memadukan sistem modern dan tradisional. Pada zamannya, model-model dan jenis-jenis pendidikan itu mampu tampil dan cukup diperhitungkan. Bahkan, tidak sedikit yang melahirkan guru-guru dan pemimpin-pemimpin pendidikan yang kemudian tampil sebagai tokoh-tokoh pergerakan dan pembangunan pendidikan nasional.

Pada tahun 1958/1959, Kementerian Agama (Departemen Agama) pernah merintis usaha pembaruan sistem pendidikan pada madrasah dengan mengenalkan “Madrasah Wajib Belajar” (MWB) 8 tahun. 6 tahun pendidikan madrasah dan 2 tahun pendidikan ketrampilan hidup (*life skill*). Tujuannya selain untuk memenuhi kewajiban belajar, adalah sekaligus membekali modal ketrampilan berkerja, khususnya di sektor pertanian dan industri yang ada di masyarakat (komunitas basis). Pusat pelatihan calon guru MWB itu ada di Pacet, Jawa Barat. Sayang, proyek pemerintah ini tidak berlanjut dan terhenti sebelum berkembang. Padahal, ini adalah suatu model yang cukup kontekstual, baik dari sisi sosial, ekonomi, maupun kultural.

Pada tahun 1994/1995, salah seorang dari ITB Bandung, pernah memunculkan model “Pesantren Politeknik dan Pesantren Teknologi.” Model ini dimaksudkan untuk meningkatkan peranan pondok pesantren sebagai wadah pendidikan yang memadukan kegiatan yang berbentuk formal dan non-formal, dengan sasaran dan tujuan “mendidik pemuda-pemudi Indonesia alumni SLTA, baik umum maupun dari madrasah atau pesantren, guna mengisi tenaga trampil di bidang instrumentasi dan kontrol otomatis pada tingkat menengah maupun tingkat tinggi (D1, D2, D3, dan S1).” Jurusan/program yang dikedepankan meliputi: Instrumentasi Elektronika, *Computer Sciences and Engineering, Control Automatic and Robotic*, dan Bio Teknologi dan Agrobisnis.

“Lagi-lagi sayang,” konsep dan model pendidikan tersebut belum sempat diujicobakan. Padahal pondok pesantren di Indonesia jumlahnya hampir tak terbilan dan keberadaannya di masyarakat cukup kuat dan berakar. Untuk itu, ke depan kita perlu mengapresiasi setiap model baru pengembangan pendidikan sebagai praksis pembangunan bangsa dengan mempertimbangkan terlebih dahulu langkah-langkah: dari tahapan konsepsional, perancangan model dan disain, sampai pada tahapan perintisan dan pengembangan. Mari kita mulai dan selamat membangun model.

Dialog Perguruan Tinggi Negeri menurut A. Malik Fadjar

Tanpa ada maksud mengurangi keberadaan, fungsi dan peran strategis perguruan tinggi yang telah tumbuh dan berkembang selama ini, kiranya perlu kita menjadikan beberapa perguruan tinggi (universitas dan institut) sebagai pelopor penataan “sistem pendidikan tinggi.” Beberapa perguruan tinggi yang dimaksud adalah: USU, UNAND, UI, IPB, UNPAD, ITB, UGM, UNDIP, UNAIR, ITS, UNIBRAW, UNUD, UNHAS, UNSRAT, dan UPI.

Penataan sistem pendidikan tinggi terasa sangat mendesak, terutama dalam rangka memperkokoh citra, kepercayaan dan mutu pendidikan tinggi tempat melahirkan pemimpin dan ilmuwan. Bahkan dalam sejarah perjalanan bangsa, perguruan tinggi telah memainkan banyak peranan sebagai kekuatan moral dan intelektual.

Sebagai acuan dalam rangka penataan system pendidikan tinggi PROPENAS 2003-224, mengarahkan kegiatan pokok yang perlu dilakukan, yaitu:

1. Menyiapkan naskah akademik dalam rangka penyusunan RUU Perguruan Tinggi sebagai BHMN;
2. Menetapkan penerapan paradigma baru pendidikan tinggi melalui aktualisasi otonomi, akreditasi, akuntabilitas, evaluasi diri dan kualitas;
3. Melakukan penataan organisasi dan pengembangan system informasi manajemen, serta pengkajian perundang-undangan perguruan tinggi;
4. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas system akreditasi program studi untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi;
5. Menerapkan mekanisme perencanaan program dan penganggaran terpadu melalui mekanisme *block grant* berdasarkan kompetisi berjenjang;
6. Melakukan penyempurnaan mekanisme dan system evaluasi diri dan sosialisasi pentingnya evaluasi diri sebagai dasar (“*entry point*”) dalam perencanaan pengembangan perguruan tinggi; dan

Meningkatkan pemanfaatan sumberdaya pendidikan secara terpadu dan efisien untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Urgensi Tranformasi dari STAIN Menuju UIN dalam Perspektif A. Malik Fadjar

Sebelum menjadi menteri, Malik pernah menjabat sebagai Dirjen Binbagais (Pembinaan Kelembagaan Agama Islam) Departemen Agama RI. Jabatan Dirjen ini dilakoni Malik selama ± 2 tahun (1996-1998). Malik diusung ke

Jakarta oleh Menteri Agama Tarmizi Taher, yang semula diutarakannya ketika mengukuhkan Malik sebagai Guru Besar pada Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Malang pada penghujung tahun 1995. “Insya Allah, Pak Malik akan kita tarik ke Jakarta,” demikian ungkap Menag Tarmizi Taher ketika memberikan sambutan pada pengukuhan Guru Besar Prof. Drs. H. A. Malik Fadjar, M. Sc. Ternyata, benar beberapa bulan setelah itu Malik dipanggil ke Jakarta dan diangkat menjadi Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama RI, menggantikan Ibu Andi Rasdiyanah.

Diusungnya Malik ke posisi kedua di Departemen Agama ini mengimplikasikan dua kenyataan sekaligus. *Pertama*, keluarga besar UIN Malang d/h STAIN Malang d/h Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Malang merasa kehilangan salah seorang tokoh pemikir dan pengabdian yang mampu mengkonstruksi suasana akademik (*academic atmosphere*) kampus yang membanggakan. Malik yang bagi sivitas akademika UIN Malang dan UMM adalah seorang “resi” di mana pikiran-pikirannya mampu mewarnai “lubuk akademik” yang dikonstruksinya dikuatirkan akan “menghilang” dari komunitas yang selama ini mereka banggakan. *Kedua*, selain merasa kehilangan adalah keluarga besar UIN Malang dan UMM bangga karena salah seorang dari putra terbaiknya akan menjadi orang penting di Jakarta.

Ternyata apa yang dikuatirkan dan sekaligus dibanggakan oleh sivitas akademika UIN Malang dan UMM telah nyata. Malik, setelah purna tugas dari jabatan Menteri Agama, pindah tugas ke UIN Jakarta d/h IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Juga membanggakan karena beliau mampu menaiki puncak karier akademik dan sekaligus politik di tanah air, yaitu Menteri Agama (1998-1999), Menteri Pendidikan Nasional (2001-2004), dan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat ad-Interim (April-Oktober 2004).

Malik menceritakan proses pengangkatan dirinya menjadi Menteri Agama demikian:

“... sejak pemerintahan Soeharto pada tahun 1997, sesungguhnya nama saya sudah disebut-sebut dari tiga calon yang ada, yaitu M. Quraisy Shihab, A. Malik Fadjar, dan Sa’adillah Mursyid. Namun, entah atas pertimbangan apa Pak Harto, nama M. Quraish Shihab-lah yang masuk menjadi Menteri Agama dan saya tetap menjadi Dirjen Binbaga Departemen Agama. Kemudian reformasi bergulir dan kepemimpinan Soeharto sebagai presiden digantikan oleh B. J. Habibie. Tanggal 20 Mei 1998, saat Pak Harto mengundurkan diri belum ada pembicaraan mengenai menteri. Baru jam 5 sore (pukul 17.00 Wib) saya ditelpon Pak Habibie selaku presiden untuk memastikan bahwa saya bakal dilantik menjadi Menteri Agama RI, menggantikan M. Quraish Shihab. Jabatan

Menteri ini (Menteri Agama dan Mendiknas, *penulis*) sesungguhnya merupakan proses karier akademik dan juga politik, penulis yang saya bangun sejak awal dengan penuh dedikasi dan prestasi. Jadi keberadaan menteri ini bukan semata-mata aspek politik yang mendominasi, tetapi juga karier. Saya kan pegawai Depag, guru agama, guru besar (bidang pendidikan) di Fakultas Tarbiyah UIN Malang (yang sebelumnya STAIN Malang), lalu Dirjen Binbagais Departemen Agama RI, kemudian Menteri Agama dan Mendiknas.”

Menapaki liku seorang menteri A. Malik Fadjar kiranya bukan sesuatu yang sulit. Sebab, Malik di samping mudah ditemui dalam situasi dan kondisi apa pun merupakan perwujudan dan representasi profesional di dalam kabinet yang dipangkunya. Jabatan menteri baginya adalah profesi yang harus dijalani sesuai amanah yang diembankan kepadanya. Memaknai jabatan menteri sebagai profesi baginya merefleksikan tanggungjawab profesional dan sosial yang harus diejawantahkan ke dalam idiom-idiom politik, sosial, dan budaya yang mengitarinya. Tanggungjawab yang diemban pun, demikian Malik, mensyaratkan dedikasi yang tinggi agar mencapai kualitas kerja yang maksimal. Keikutsertaannya dalam mendirikan/mengembangkan ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) sejak tahun 1990-sekarang, menunjukkan bahwa Malik adalah menteri yang cendekiawan dan intelektual.

Sebagaimana diungkap di muka, Malik adalah menteri yang merefleksikan diri sebagai cendekiawan, intelektual, dan pengabdian. Sebagai cendekiawan, dia memiliki dan senantiasa menggunakan daya intelektualnya untuk bekerja atau melakukan berbagai kegiatan keilmuan dan kemanusiaan, yang oleh sebab itu padanya diidentifikasi sebagai orang yang memiliki berbagai kualitas. Sebagai intelektual, dia pun melakukan berbagai pencerahan, melakukan usaha sungguh-sungguh ke arah kebenaran, dan memberikan penilaian bagaimana seharusnya birokrasi berfungsi secara profesional dan sosial. Maka di sinilah bisa dibedakan kerja seorang cendekiawan/intelektual dan ilmuwan ketika memangku jabatan publik. Jika seorang ilmuwan cenderung berbicara secara universal, maka seorang cendekiawan/intelektual laksana nabi dan rasul berbicara dengan bahasa kaumnya. Jika seorang ilmuwan bekerja secara netral, maka cendekiawan/intelektual kadang mengikuti ideologi yang dianutnya. Maka karena itu, Malik sebagai cendekiawan dan intelektual yang dipercaya memangku jabatan publik senantiasa bekerja sesuai tradisi, peran, dan konteksnya.

Bekerja sesuai konteks, misalnya, di awal kepemimpinan Malik sebagai Menteri Agama adalah era reformasi. Suatu era yang meminta kesungguhan dalam bekerja. Usaha paling mendasar yang dilakukan Malik ketika menjabat

Menteri Agama adalah mengembalikan cita-cita diberdirikannya Departemen Agama.

“....sesungguhnya Departemen Agama itu bukan hanya mengurus hal-hal teknis, seperti mengurus haji, pernikahan, pengajian (agama), dan sebagainya. Melainkan ada tiga hal penting yang harus dipikirkan bersama sebagai visi dan misinya. *Pertama*, departemen yang berfungsi sebagai perangkum/perekat integrasi bangsa sebagai perwujudan pasal 29 UUD 1945 dengan menghidupkan suasana keberagamaan yang sehat. *Kedua*, departemen yang mampu berfungsi menggelar pendidikan agama yang lebih inklusif dan membentuk watak (suasana religiusitas), di samping berorientasi ke arah keseimbangan dengan persaingan global. *Ketiga*, departemen yang berfungsi mewujudkan amanat proklamasi, khususnya yang berkaitan dengan peradilan agama. Melalui peradilan agama inilah dibutuhkan pranata-pranata keadilan agama, sehingga dengan demikian lahirlah (di masa saya menjadi Menag, *penulis*) UU Zakat, UU Haji, UU Wakaf, dan sebagainya. Masa saya itu pula didirikan Sekolah Tinggi Agama Hindu di Bali, Sekolah Tinggi Teologi, dan tentu Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri. Semua itu dalam kerangka keadilan agama.”

Masalah integrasi bangsa pada masa H. A. Malik Fadjar menjadi Menteri Agama adalah sesuatu yang mendesak. Untuk itu, kehidupan keagamaan dan hubungan antar-umat beragama merupakan salah satu persoalan yang, meminjam istilah Taufik Abdullah, mendapat lampu sorot (fokus kerja) utama untuk segera dijawab. Merespon ini, Malik mencoba menghidupkan kembali pranata-pranata sosial-keagamaan di masyarakat (beragama) sesuai kultur, tradisi, dan budaya yang mengitarinya. Masjid, madrasah, pesantren, dan kiai adalah pranata sosial-keagamaan umat (Islam) yang perlu memperoleh apresiasi paling menonjol dari Departemen Agama. Tak kecuali adalah pura, gereja, pastor, biksu, dan pranata sosial-keagamaan (non-Muslim) lainnya, terhadapnya Malik berusaha memberikan apresiasi yang sama.

“Multikulturalisme dan pluralisme agama adalah keniscayaan sekaligus kekayaan di negeri ini, yang harus diberikan perhatian utama bagi kelangsungan kesatuan Republik Indonesia dan bagi terwujudnya keharmonisan bersama dan dalam kebersamaan. Untuk itu pula, pendidikan multikulturalisme urgen diberikan sejak di bangku sekolah dan menjadi mata pelajaran wajib. Dulu ada pelajaran bahasa daerah, *ono coroko, mdunten* (ènggi buntèn) *lho* bahasa Madura (dengan dibarengi kata, *ayu lho...*), dan banyak yang lain, seperti Aceh, Minang, Batak, Bugis, NTB, dan sebagainya. Mempelajari bahasa dan kultur daerah itu dimaksudkan sebagai usaha mendidik anak memiliki apresiasi terhadap kebudayaan, tradisi, dan nilai-nilai luhur yang dipeganginya. Madura,

misalnya, itu kaya akan budaya (sambil mengajak penulis untuk melakukan kajian intensif akan naskah-naskah Madura kuno); saya pernah mengundang D. Zawawi Imron (penyair asal Sumenep-Madura, *penulis*) ke UMM dalam acara Festival Istiqlal II dan dia mengungkapkan banyak hal akan budaya dan filosofi kehidupan orang-orang Madura yang patut dicontoh. Ini yang saya maksudkan perlunya pendidikan multikulturalisme dan pluralisme (agama) bagi anak didik.”

Memang harus dimaklumi bahwa pada waktu Malik menjadi Menteri Agama, eskalasi situasi kehidupan agama dan etnis terkoyak. Seperti pertikaian etnis di Sambas dan Sampit antara suku Madura dan Dayak/Melayu, konflik agama di Mataram, pembakaran rumah-rumah ibadat dan warga di Maluku, dan tak kalah pentingnya adalah masalah Aceh. Masalah Aceh adalah masalah paling krusial. Menjawab masalah Aceh ini Malik mengutus selain dirinya juga mengadakan dialog langsung dengan masyarakat Aceh di beberapa kesempatan yang lain Marwan Saridjo (Sekjen Depag RI) dan H. Amidhan (staf ahli Menteri dan sekaligus ketua MUI) ke Aceh. Di sana kedua utusan itu diterima oleh Prof. DR. Sofyan Idris, Rektor IAIN Ar-Raniry yang meninggal dunia karena ditembak di masa pencalonannya sebagai Gubernur Aceh, dan Prof. DR. Syamsuddin Mahmud, Gubernur Aceh. Sofyan Idris mengingatkan deligasi Departemen Agama (Marwan dan Amidhan) untuk tidak terkejut ketika berhadapan dengan warga Aceh yang dikenal keras dan memaksa.

Ada lima usulan dan permintaan yang disampaikan pengurus MUI dan tokoh-tokoh Aceh kepada pemerintah pusat (Departemen Agama). *Pertama*, agar pemerintah pusat c.q. Departemen Agama mengusahakan penegerian madrasah di Aceh, terutama Madrasah Ibtidaiyah dan mengangkat guru-guru yang telah lama mengajar di madrasah itu menjadi pegawai negeri. *Kedua*, agar ulama dan tokoh-tokoh Islam dan tokoh masyarakat Aceh yang selama ini tetap teguh berpihak pada NKRI dan selalu menolak ajakan GAM (Gerakan Aceh Merdeka), dapat diberi penghargaan, misalnya, dengan diangkat menjadi penyuluh agama. *Ketiga*, agar Departemen Agama mengusahakan (menetapkan) Bandara Blang Bintang menjadi Terminal Haji. *Keempat*, agar janda-janda dan anak yatim korban DOM (Daerah Operasi Militer) mendapat santunan dan beasiswa dari pemerintah pusat. *Kelima*, agar pemerintah pusat dan DPR RI menerbitkan sebuah Undang-Undang tentang kedudukan Daerah Istimewa Aceh.

Semua usulan dan permintaan warga Aceh kepada Departemen Agama, dijawab oleh Malik secara positif kecuali yang keempat (nomor 4) karena

tidak sepenuhnya menjadi tanggungjawab Departemen Agama. Sebanyak 100 madrasah dinegerikan dan guru-gurunya diangkat menjadi pegawai negeri. Bahkan, demikian Marwan, untuk mempercepat proses pengangkatan guru-guru itu, Biro Kepegawaian Departemen Agama Pusat dan Pejabat BAKN pindah berkantor di Banda Aceh. Di sini bisa dipahami bahwa Malik bekerja selalu dan senantiasa mengikuti kehendak dan aspirasi masyarakat dalam konteksnya yang profesional dan proporsional.

Situasi eskalasi kekerasan dan kejahatan kemanusiaan dalam konteks kehidupan beragama di masa Malik, memang memerlukan suatu sikap keberanian moral untuk melakukan “self review,” “self-assessment,” dan “self-evaluation” terhadap kinerja pemerintah yang selama ini dilakukan. Hal ini penting berkaitan dengan menaikinya eskalasi kekerasan dan kejahatan kemanusiaan yang tampil begitu nyata dan telanjang di negeri ini. Bersama itu kerinduan dan harapan akan kehidupan yang aman, damai, dan sejahtera semakin menggelora. Memaknai arti pentingnya perdamaian di muka bumi Malik mengurainya demikian:

“... masalah perdamaian ini tidak bisa dilihat sebagai substansi yang berdiri sendiri dan parsial. Sebagaimana terlihat dalam negasinya, kekerasan telah melibatkan berbagai faktor yang sangat mungkin satu sama lain berhubungan secara rumit, sehingga penanganannya memerlukan kesabaran yang luar biasa. Mengangkat beberapa kasus konflik dan kekerasan yang terjadi di Indonesia, sebagai contohnya, peristiwa-peristiwa di propinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, yang dikenal peristiwa Sambas dan Sampit, tidak bisa direduksi semata sebagai kekerasan antara suku-suku atau konflik agama saja. Riset antropologi terapan menggambarkan kekerasan yang menumpahkan banyak darah manusia itu melibatkan juga faktor kesenjangan ekonomi, tekanan demografis, penegakan hukum, persoalan adat, masalah politik, dan bahkan faktor yang tidak dapat dianggap remeh ialah “premanisme” dan peran yang sering disebut provokator. Demikian pula peristiwa yang terjadi di Ambon, Aceh, Irian, dan Timor Timur menggambarkan kompleksitas masalah konflik dan kekerasan. Bahkan kekuatan internasional ikut terlibat dalam beberapa kasus konflik dan kekerasan, sebagai risiko dari era globalisasi sekarang ini. Saya kira terorisme sebagai peristiwa kekerasan global sekarang ini hanya bisa diselesaikan dengan kearifan kemanusiaan dan kecerdasan insani yang religius. Watak permasalahan kekerasan atau perdamaian yang *multivariable* ini harus dipecahkan secara integral pula.”

Memang damai dan perang adalah dua hal yang saling mengisi sejarah manusia di dunia. Bahkan, diakui atau tidak, damai adalah masa jeda di antara perang dan perang. Tetapi manusia tidak boleh apatis untuk terus

memperjuangkan perdamaian di muka bumi. Malik berpesan, “sejauh mungkin jangan memperjuangkan perdamaian dengan jalan perang.” Naif, demikian Malik, membangun perdamaian dengan mengembangkan dan mendayagunakan teknologi persenjataan dan perang. Sebab pada akhirnya yang dimenangkan adalah kekerasan itu sendiri. Jalan damai adalah lebih baik daripada jalan kekerasan ketika seseorang ingin meleraikan kekerasan pada manusia. Tentu pemikiran dan kerja yang integral mengenai masalah yang dihadapi mutlak diperlukan.

Sikap dan pandangannya yang multikultural dan integral ini meleluaskan Malik bekerja secara maksimal. Bahkan apa yang menjadi gagasan dan kebijakannya sewaktu menjadi Menteri Agama selalu mendapat respon positif dari masyarakat beragama bagi kelangsungan kehidupan agama dan pendidikan agama.

Gagasan STAIN menuju UIN

Berbicara Malik fadjar karir intelektual Sedikitnya ada dua kecenderungan yang bisa diidentifikasi berkaitan dengan zaman globalisasi. *Pertama*, semakin kuatnya dominasi IPTEK (ilmu pengetahuan dan teknologi) dalam kehidupan manusia. IPTEK seolah-olah menjadi “malaikat imajinatif” bagi kreativitas dan produktivitas, mampu merekayasa apa saja semaksimal mungkin bagi kepentingan hidup manusia. Tak satu pun kekayaan alam bisa dieksplorasi, dieksploitasi, dan dimanfaatkan oleh manusia kecuali dengan penguasaan IPTEK secara sempurna. *Kedua*, kuatnya dominasi IPTEK pelan-pelan menggeser nilai-nilai luhur yang secara universal dijunjung tinggi oleh manusia. Nilai-nilai kemanusiaan, budaya, dan agama mengalami alienasi baik pemahaman, pelestarian, maupun aplikasinya. Hampir mayoritas pemerhati sosial dan keagamaan sependapat, bahwa globalisasi dan teknologi menyebabkan bergesernya nilai baik-buruk di masyarakat.

Dalam konteks itulah maka peran pendidikan sebagai pemasok utama manusia-manusia *skilled*, manusia yang memiliki kemahiran dan ketrampilan penguasaan Iptek, bertanggungjawab mengembalikan visi, konsep, dan orientasi penguasaan dan sekaligus penggunaan Iptek pada sesuatu yang bernilai. Atas dasar itulah, maka IAIN (sebagai Perguruan Tinggi Islam di bawah naungan Departemen Agama) sebagai bagian integral pendidikan nasional dituntut mampu mempertimbangkan perubahan dan transisi sosial, ekonomi, dan politik nasional dan global.

Merespon perkembangan global ini, Malik ketika menjabat Dirjen Binbagais Departemen Agama, mengusulkan pembenahan dan rasionalisasi

organisasi Perguruan Tinggi Agama Islam atau IAIN. Hasil dari rasionalisasi organisasi IAIN ini kemudian melahirkan Keputusan Presiden No. 11 Tahun 1997, yang menetapkan fakultas cabang di lingkungan IAIN berubah menjadi STAIN. Hal yang mendasari munculnya gagasan ini, Malik mengemukakan:

... Nama fakultas cabang sebetulnya bertentangan dengan Undang-Undang. Struktur Perguruan Tinggi yang benar adalah Universitas, Insititut, Sekolah Tinggi, Akademi, dan Diploma. Bukan fakultas cabang. Untuk kepentingan ini, saya melakukan komunikasi intensif dengan berbagai kalangan; dengan Depdiknas, Departemen Anggaran, Bappenas, Menpan, dan juga para DPR. Terbitlah kemudian Keputusan Presiden No. 11 Tahun 1997 yang menyatakan 33 Fakultas Cabang IAIN menjadi STAIN. Tantangan waktu itu keras. Mereka yang menolak berubahnya Fakultas Cabang IAIN menjadi STAIN sesungguhnya tidak paham mengenai College, School of Busness, dan sebagainya. Sebenarnya *foundang fathers* (bapak-bapak) kita terdahulu lebih paham melihat kebutuhan pendidikan ke depan. Dulu di IAIN kan ada banyak sekali jurusan dan program studi; ada Jurusan Tadris MIPA, Bahasa Inggris, Tata Negara, Civic Ekonomi, Bahasa Indonesia, dan sebagainya. Tetapi mengapa itu kemudian dihapuskan? Mengapa generasi berikutnya ini kok tidak mampu melanjutkan ide-ide besar yang dirintis pendahulunya? Tak terkecuali adalah mengenai kurikulum (khususnya pada Fakultas Tarbiyah IAIN), saya sedih melihat kurikulum yang ada bersifat *recehan* (kepingan-kepingan ilmu yang tak berdasarkan telaah ilmiah), seperti ada mata kuliah Fikih Tarbiyah, Tafsir Tarbiyah, Hadis Tarbiyah, dan lain-lain. Padahal saya sudah menginstruksikan agar kurikulum pun diotonomikan jauh sebelum banyak orang ngomong tentang otonomi pendidikan. Juga mengenai Program Pascasarjana yang ada di bawah IAIN Jakarta seperti PPs. IAIN Padang, PPs. IAIN Aceh, PPs. IAIN Ujung Pandang, saya keluarkan SK yang mengotonomikan Program Pascasarjana. Termasuk yang di swasta, seperti UMJ, UMS, UMM, dan UII. Bahkan PPs. Universitas Paramadina muaranya untuk membuka Program Pascasarjana dari kebijakan itu.

Memahami luas dan orientasi pendidikan Islam para pendahulu mengenai pendidikan, Malik (salah satunya) mengeluarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/107/1998 Tertanggal 13 Mei 1998 tentang Penyelenggaraan Jurusan Tarbiyah Program Studi Pendidikan Islam, Program Studi Tadris Matematika, Program Studi Tadris Ilmu Pengetahuan Alam, Program Diploma II (D-2) Pendidikan Agama Islam, Program Studi Kependidikan Islam; Jurusan Psikologi; Jurusan Adab/Bahasa Program Studi Bahasa Arab, Program Studi Bahasa Inggris; Jurusan Syari'ah Program Studi Ahwalus Syakhshiyah (Peradilan Agama) dan Program Studi Muamalah (Ekonomi Islam) pada STAIN Malang.

Usaha dan gagasan Malik mengenai STAIN dan UIN merupakan usaha mempertegas, mempertajam, dan memperbaharui pendidikan Islam dalam hal bagaimana melayani kebutuhan mendasar manusia. Sebab, demikian Malik, membicarakan pendidikan sama halnya dengan menimbang masa depan yang *sustainable* mengalami perubahan. Gagasan perubahan IAIN menjadi STAIN dan UIN dianggarkan Malik bukan sekadar perubahan “papan nama,” tapi sebagai model “reintegrasi keilmuan” yang menunjuk kepada satu bentuk pengembangan, peningkatan, dan pemantapan status akademik yang lebih profesional. UIN, misalnya, diprediksikan dapat menjadi model sistem pendidikan Islam yang memiliki “kualitas tinggi” dibandingkan dengan PTN/PTS yang lain yang memiliki status, peran, dan fungsi yang sama, di samping memiliki otonomi lebih luas baik dalam pengembangan akademik, manajemen, maupun administrasinya.

Imam Tholkhah dan Ahmad Barizi (penulis biografi ini) dalam karyanya “*Membuka Jendela Pendidikan: Mengurai Akar Tradisi dan Integrasi Keilmuan Pendidikan Islam*,” mengurai bagaimana sesungguhnya berdirinya UIN. UIN dicita-citakan sebagai *center of excellence* bagi pengembangan keilmuan pada umumnya dan keilmuan Islam pada khususnya, sehingga terbentuk komunitas ilmiah-religius (*religious-scientific community*) yang bersendikan ajaran agama. Bukan sekadar pengawal, penjaga, dan pelestari tradisi yang ada. UIN diharapkan tidak saja piawai sebagai pencetak ‘guru agama’ dan kiai tradisional, melainkan bagaimana bisa melahirkan kiai-kiai profesional di dalam mengurus pesantren perikanan, pesantren peternakan, pesantren perkebunan, pesantren pertambangan, pesantren perindustrian, dan sebagainya. Tentu dengan pengejawantahan secara profesional di setiap bidang akademik yang dibuka.

Apa yang digagas oleh Malik dalam konteks pembangunan STAIN dan UIN kiranya merupakan langkah strategis dan futuristik. Melalui pengembangan STAIN dan UIN ini Malik meyakini bahwa umat Islam bisa bermain dan memainkan peran yang sesungguhnya di dalam pergaulan global. Memaknai ini, Malik mengemukakan:

Masa depan harus dijemput. Sarananya adalah pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan harus diacu ke arah masa depan manusia. Di sinilah sesungguhnya makna pentingnya secara terus-menerus memperbaharui sistem pendidikan kita. Ungkapan *life long education*, sejatinya sudah disuguhkan oleh Nabi Saw. ketika menyuruh para sahabat belajar ilmu ke Cina (*uthlub al-‘ilm wa law bi al-shin* [carilah ilmu walau sampai ke negeri Cina], hadis) dan mencari ilmu sejak lahir sampai mati (*uthlub al-‘ilm min al-mahdi ilâ al-lahd* [carilah ilmu sejak dari buaian sampai

engkau meninggal dunia], hadis). Untuk itu, manusia harus senantiasa belajar dan belajar (*learn how to learn*, penulis). Belajar itu merupakan rekreasi ke arah masa depan.

Gagasan strategi pengembangan pendidikan agama dan keagamaan (melalui STAIN dan UIN) ini bagi Malik merupakan kebutuhan yang terus-menerus harus diusahakan. Usaha memecahkan persoalan pendidikan dan menjawab tantangan kehidupan pun harus dilakukan dengan memperluas komunikasi dan konsultasi akademik ke berbagai disiplin keilmuan; seperti filsafat, sejarah, bahasa, agama, antropologi, sosiologi, ekonomi, politik, biologi, informatika, dan manajemen (sebagai kunci keberhasilan diri dan sosial). Malik mengungkapkan bahwa mendekati ajaran-ajaran agama dan keagamaan dewasa ini memerlukan perangkat ilmu-ilmu lain seperti sosiologi, antropologi, dan arkeologi. Tentu suatu arah pengembangan mensyaratkan profesionalisme dalam konteks pengelolaan fisik-material, sosial, dan etik.

Demikian Malik mengungkapkan bahwa senyatanya UIN merupakan model sintesa antara pesantren dan perguruan tinggi. Tak bisa disalahkan bila UIN, selain mengembangkan aspek-aspek keilmuan dan profesionalisme, di dalamnya dikembangkan pula “ritual-ritual” pesantren, seperti khataman, tadarus al-Qur’an, dan bahkan hafalan al-Qur’an sebagaimana dikembangkan oleh UIN Malang. Mahasiswa yang hafal al-Qur’an bukan saja dari fakultas-fakultas agama, tetapi meluas ke berbagai cabang fakultas, jurusan, dan program studi (umum).

Malik mengemukakan mengenai masa depan UIN ini demikian:

... Mutu UIN tidak bisa dilihat sekarang. Perlu proses panjang. Berbagai pernyataan yang menaikkan kebencian dan bahkan hardikan akan gagalnya pendidikan selama ini perlu diluruskan. Kenapa? Karena berbicara masalah pendidikan adalah berbicara mengenai proses manusia dalam rentang waktu yang *tidak instan*, bukan sekadar dari fase ke satu fase, tapi proses yang berkesinambungan. Ada empat hal prinsip yang harus dicermati oleh mereka yang menangani pendidikan. *Pertama*, proses pertumbuhan (*growth*) baik dari aspek institusional, konseptual, maupun prosesnya. Perubahan STAIN Malang ke UIN Malang, misalnya, dan saya mengalami itu, bermula dari Fakultas Cabang IAIN Sunan Kalijaga, lalu menjadi Fakultas Tarbiyah Cabang IAIN Sunan Ampel Surabaya, kemudian STAIN Malang, dan akhirnya berubah menjadi UIN Malang. Hal ini perlu diperhatikan sebagai sebuah sejarah institusi yang harus dihadirkan ke publik bagaimana pergumulan itu terjadi. *Kedua*, perubahan (*change*). UIN adalah sebuah perubahan institusi pendidikan dari institut atau sekolah tinggi ke universitas. Perubahan ini harus disikapi dan diapresiasi secara profesional

bagaimana “merubah” struktur akademik, manajemen, dan macam-macamnya yang lain. *Ketiga*, pembaharuan (*reform*). UIN bukan sekadar perubahan status tetapi bagaimana mengembangkan pembaharuan baik ke dalam maupun ke luar. UIN Malang, misalnya, menunjukkan bahwa mahasiswa-mahasiswanya dari Jurusan MIPA, Psikologi, Bahasa dan Sastra, Ekonomi, dan Tarbiyah adalah mampu menguasai bahasa Arab dengan aktif dan bahkan sebagiannya hafal al-Qur’an. *Keempat*, kesinambungan (*continuity*). Mengelola pendidikan adalah mengelola masa depan. Masa depan adalah abad IT (Ilmu dan Teknologi). Untuk itu, maka mengelola pendidikan harus mampu menangkap, mengolah, dan mengelola informasi untuk memasuki dunia masa depan itu. Mas Imam (Prof. DR. H. Imam Suprayogo, Rektor UIN Malang, *penulis*) adalah salah satu orang di Malang yang cepat menangkap dan mengolah informasi itu.

Apa yang dibayangkan Malik mengenai pengembangan perguruan tinggi Islam (UIN) ini, adalah karena pendidikan bukan sekadar “perkumpulan kemasyarakatan” (*community*), melainkan sebuah investasi manusia/kemanusiaan (*human investment*) dalam rangka membangun peradaban. Peradaban Islam harus dibangun melalui UIN. Demikian Malik mengungkapkan sekurang-kurangnya, UIN adalah usaha memainkan peran umat Islam ke dalam persaingan dan pergaulan global (*the global game*) yang semakin menggelelak. “Umat Islam harus mengambil peran dalam permainan global ini. Bukan sekadar penonton, pengadopsi, dan pengonsumsi produk-produk global, tapi bagaimana menjadi penggagas utama perubahan dan pembaharuan global itu,” ungkap Malik. Maka, hal yang perlu diperhatikan dalam konteks global adalah masalah multikulturalisme dalam berbagai aspek yang menempel kepadanya. Mengelola pendidikan mensyaratkan pemahaman multikulturalisme dengan meluaskan pergaulan ke berbagai kawasan negara, ideologi, organisasi, dan bahkan keyakinan (agama). Melalui hal ini peradaban global Islam akan terbentuk secara damai, ramah, dan menyenangkan.

Merekonstruksi UIN ke masa depan sesuai tujuan yang dirumuskan dan disepakati bersama membutuhkan sebuah seni manajemen. Malik mengungkapkan, “*To manage business is to manage its future, and to manage the future is to manage information. Luck is the result of good planning and good planning is the result of information well applied.*” Malik menjelaskan bahwa manajemen UIN, harus benar-benar mampu mengakomodasi aspek-aspek ideal, struktural, personal, sosial, dan operasional sebuah perguruan tinggi yang menjanjikan masa depan. Telaah kritis dan padu secara konsisten terhadap nilai-nilai kefilosofatan (*educational philosophies*), unsur-unsur

masukan (*educational inputs*), proses pendidikan (*educational processes*), dan unsur-unsur keluaran (*educational aoutputs/outcomes*) harus segera di-(de/re) konstruksi secara profesional bagi pemajuan UIN.

Aspek kepemimpinan kiranya adalah sesuatu yang dominan bagi pengembangan lembaga pendidikan. Makna pendidikan sebagai human investment menyarankan adanya pengelolaan manajemen pendidikan seluas dan sedalam hidup dan kehidupan manusia dari berbagai aspeknya. Malik mengungkapkan model manajemen pendidikan demikian:

Untuk menuju PT (Perguruan Tinggi) bergengsi menuntut sistem dan model-model manajemen yang lebih modern. Apa yang sring disebut-sebut dengan sistem komputerisasi yang mendukung berkembangnya sistem informasi dan manajemen (SIM) dan sistem jaringan kerja (*network system*), mau tidak mau, perlu dirintis untuk kemajuan pendidikan, baik kualitatif maupun kuantitatif. Model manajemen modern ini juga meniscayakan pemahaman yang signifikan bagi adanya pemaknaan pendidikan sebagai *human capital*, yang diperhitungkan secara ekonomis (*rate of return*), yang menuntut profesionalisme secara utuh. Hal inilah yang pernah saya lakukan ketika saya memimpin Universitas Muhammadiyah Malang/UMM (1983-2000) dan Universitas Muhammadiyah Surakarta/UMS (1992-1996). Ternyata, UMM dan UMS dewasa ini merupakan salah satu PTS yang dibanggakan kan...

Memaknai saran dan usaha Malik dalam mengelola PT adalah layak memperoleh apresiasi. Apa yang diusahakan Malik dalam memajukan UMM dan UMS kiranya salah satu nilai yang bisa dibanggakan. Dari sebuah PT yang tidak pernah dilirik orang menjadi PT yang menarik kerumunan umat untuk memasukkan anak-anaknya ke sana. Dari kampus yang tak memiliki gedung sendiri dan terkesan kumuh sampai kini menjadi kampus paling megah dan terkesan elite bila disandingkan dengan kampus-kampus di sekitarnya. Dari program akademik yang kurang menjanjikan masa depan sampai kepada program akademik yang mampu melahirkan lulusan-lulusan yang memiliki *competitive advantage* di era global. Kata kuncinya, demikian Malik, hanya "satu," yaitu *angrem* di kampus bagi pemimpin dan sivitas akademiknya. "Jangan harap anak ayam akan menetas dengan baik jika induk ayam tak mau mengerami dengan sungguh-sungguh," katanya.

Sikap *angrem*/mengeram ini hanya dimiliki oleh ayam kampung. Pemimpin perguruan tinggi dan dosen harus selalu *angrem*/mengeram di kampus jika ingin melahirkan mahasiswa-mahasiswa yang siap menghadapi perubahan dan persaingan global. Dosen, misalnya, tidak cukup dengan hanya mengajar dan menyampaikan ilmu kepada mahasiswa, sesudah itu lalu

pulang dan tak peduli dengan apa yang terjadi dengan mahasiswanya. Sikap angrem/mengeram ini meniscayakan dosen harus selalu dan tetap tinggal di kampus, dengan banyak memberikan pelayanan, bimbingan, penyuluhan, dan bahkan kalau bisa menjadikan dirinya sebagai biro konsultan bagi seluruh mahasiswa. Bimbingan mulai dari cara mahasiswa belajar di kampus dengan baik sampai ia meraih gelar sarjana, bahkan kalau memungkinkan sampai mereka memperoleh pekerjaan. Bimbingan dari mulai sesuatu yang bersifat pribadi sampai pada sesuatu yang ada gayutannya dengan hubungan sosial-global. Sikap angrem/mengeram inilah yang banyak dilakukan dan seringkali disuarakan Malik dalam memajukan sebuah perguruan tinggi.

Dalam membina sebuah perguruan tinggi adalah membina orang-orang di dalamnya. Oleh karena itu, manajemen modern dan futuristik merupakan kebutuhan mendasar dalam mengantarkan dosen dan mahasiswa ke arah perubahan hidup dan kehidupan yang lebih layak. Sebab, membangun perguruan tinggi adalah membangun manusia profesional-intelektual dalam hal bagaimana mereka mampu bergaul di tengah-tengah komunitas global secara dinamis, kreatif, dan inovatif. Manajemen manusia membutuhkan kerja sungguh-sungguh yang *sustainable*, bukan instan dan dalam lipatan waktu yang singkat. Akhirnya, manajemen adalah kunci utama kesuksesan diri dan sosial manusia.

Membenahi Manajemen Haji

Haji merupakan totalitas ibadah manusia kepada Tuhan. Suatu ibadah yang mensyaratkan akumulasi berbagai “kemampuan” (*istithâ’ah*), yaitu kemampuan fisik, akal, dan spiritual serta materi. Tak pelak melakukan ibadah haji membutuhkan kesadaran eksistensial yang prima akan keberadaan hamba di hadapan Tuhan. Karena itu, ziarah religius haji menyisakan pengalaman-pengalaman berbeda masing-masing jama’ah. Hal ini berkaitan dengan “penghayatan keagamaan” yang dimiliki masing-masing orang berbeda. Ada yang secara sungguh-sungguh mampu menyentuh kesadaran eksistensinya, dan sebaliknya, tak jarang pula sekadar memahaminya sebagai safari biasa ke arah pencapaian status sosial yang diangankan.

Ibadah haji wajib hukumnya sekali dalam hidup. Oleh karena itu, membaca antusiasme umat dewasa ini untuk melakukan ibadah haji sampai berkali-kali perlu dikritisi kembali meminjam istilah Komaruddin Hidayat jangan sampai terjatuh pada “hedonisme religius.” Jangan sampai ibadah yang sejatinya mengarah ke kebaikan hidup pribadi dan sosial dicemari oleh sesuatu keinginan yang berlatarkan “gengsi sosial.” Untuk

itu, manajemen penyelenggaraan haji kiranya perlu diadakan skala prioritas dan dijawabkannya problem kemiskinan yang tak pernah berakhir.

Menyoal masalah penyelenggaraan haji yang dikomandani pemerintah yang diwakili oleh Departemen Agama RI sampai kini selalu menuai banyak kritik. Hal yang paling krusial adalah ongkos naik haji (ONH) yang dinilai kurang transparan (terbuka), kuota jama'ah, dan pelayanan di hari pelaksanaan. Menjawab masalah ini, Malik mengutarakan:

... Masalah haji adalah masalah kita bersama. Masalah haji hanyalah masalah transparansi saja. Manajemen haji harus terbuka. Mungkin hanya saya Menteri Agama yang nggak mau naik haji, sampai-sampai saya ditegur oleh Bapak Habibie karenanya. Ongkos haji, misalnya, perlu transparansi. Meminta jika kurang dan mengembalikan jika lebih. Masa saya, dua kali dana haji yang lebih saya kembalikan ke jama'ah. Kita kadang-kadang terjebak dengan sesuatu yang tidak perlu. Misalnya penyeragaman atribut-atribut haji seperti tas, koper, jaket, sandal, dan sebagainya. Bahkan, demi efisiensi dan efektivitas seharusnya tidak perlu para jama'ah menginap berlama-lama di asrama haji. Cukup istirahat satu malam atau beberapa jam saja. Mengenai kuota jama'ah juga perlu menganut manajemen *G to G*, dari pemerintah Saudai ke pemerintah Indonesia. Untuk itu, penyelenggaraan haji sudah harus diperjelas di MoU-nya antar-negara.

Masalah haji di masa Malik menjadi Menteri Agama memang krusial. Jumlah jama'ah haji merosot tajam dan ONH melonjak tajam berkaitan dengan krisis moneter yang meniscayakan harga rupiah anjlok di bawah dollar. Tahun 1999, jumlah jama'ah haji hanya 71.222 orang. Jauh di bawah jumlah jama'ah yang mencapai 200 ribu orang lebih. Ongkos haji yang sebelumnya berkisar pada 7,8 juta, pada masa Malik mencapai 20 juta dari harga yang semula ditetapkan pemerintah sebesar 27 juta.

Ada banyak masalah yang mengemuka mengenai penyelenggaraan ibadah haji. Antara lain, selain yang disebut di muka, adalah soal kuota haji, kloter (kelompok terbang), visa, jama'ah paspor hijau, kursi (*seat*) kosong, dan komersialisasi jama'ah ONH Plus. Berbagai masalah yang mendera ini memperbesar keinginan masyarakat yang menuntut perbaikan penyelenggaraan haji, yakni melalui peraturan perundang-undangan haji yang adil dan lengkap. Meskipun sebenarnya peraturan mengenai haji sudah ada sejak masa penjajahan Belanda, yakni Pelgrims Ordonantie Staatsbaad No. 698 Tahun 1922. Pasca-kemerdekaan RI, Tahun 1945, masalah haji diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) atau Keputusan Presiden (Keppres). Bisa dibaca mengenai pengaturan haji ini, misalnya, Peraturan

Presiden (c/q Pemerintah) RI No. 3 Tahun 1960 tentang Penyelenggaraan Urusan Haji; Keppres RI No. 112 Tahun 1964 tentang Penyelenggaraan Urusan Haji Secara Interdepartemental; Keppres RI No. 53 Tahun 1981 tentang Penyelenggaraan Urusan Haji; Keppres RI No. 63 Tahun 1983 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah.

Membaca problema haji di Indonesia yang selalu menuai kritik ini, Malik mengawali dibentuknya RUU Haji. RUU Haji yang disampaikan pada Rapat Paripurna DPR pada tanggal 18 Pebruari 1999 di Gedung DPR/MPR, Malik menanggapinya dengan positif. Malik sependapat dengan DPR bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan ibadah haji selama ini belum memadai. Malik menyarankan agar pemerintah senantiasa membenahi manajemen dan meningkatkan pelayanan dan perlindungan bagi calon jama'ah haji. Sedangkan keikutsertaan pihak swasta dalam penyelenggaraan ibadah haji adalah dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.

Atas dasar itulah, pada masa Malik lahir UU No. 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang ditandatangani/disahkan oleh Presiden B.J. Habibie pada tanggal 3 Mei 1999 dan dimasukkan ke dalam lembaran negara RI No. 53 Tahun 1999. Lahirnya UU ini menghapus seluruh produk hukum sebelumnya yang berkait dengan masalah haji, khususnya yang secara langsung disebut dalam UU itu, yaitu Pelgrims Ordonantie Staatsbaad No. 698 Tahun 1922 dan Pelgrims Vrordening Tahun 1938. Ada tujuh PP dan Keppres yang dihapus berkenaan dengan lahirnya UU No. 17 Tahun 1999 ini, yaitu: 1). PP No. 3 Tahun 1960 tentang Penyelenggaraan Urusan Haji; 2). Keppres RI No. 112 Tahun 1964 tentang Penyelenggaraan Urusan Haji Secara Interdepartemental; 3). Keppres RI No. 22 Tahun 1969 tentang Penyelenggaraan Urusan Haji oleh Pemerintah; 4). Keppres RI No. 53 Tahun 1981 tentang Penyelenggaraan Urusan Haji; 5). Keppres RI No. 63 Tahun 1983 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Umrah; 6). Keppres RI No. 62 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Urusan Haji; dan 7). Keppres RI No. 57 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah.

UU No. 17 Tahun 1999 ini memuat 16 Bab dan 30 pasal. Adapun signifikansi UU ini bagi implemementasi hukum Islam di Indonesia, sekurang-kurangnya bisa dibaca pada uraian pasal 5 yang menyatakan bahwa “penyelenggaraan ibadah haji bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya melalui sistem dan manajemen penyelenggaraan yang baik agar pelaksanaan ibadah haji dapat berjalan dengan aman, tertib, lancar, dan nyaman sesuai dengan

tuntutan agama.”

Di samping itu, Malik menghapuskan adanya ONH Plus yang berpretensi pembedaan pelayanan dan perlindungan bagi jama'ah haji. Malik bersama DPR bertekad untuk menetapkan mekanisme penyelenggaraan ibadah haji mulai dari pendaftaran calon jama'ah haji, pembinaan, pelaksanaan ibadah di Tanah Suci, sampai kembali ke Tanah Air, harus didasarkan pada prinsip kesamaan kedudukan sebagai warga negara. Maksud dihapuskannya ONH Plus ini merupakan pengejawantahan asas keadilan dan kesamaan bagi warga negara.

Membenahi manajemen penyelenggaraan haji menurut Malik bukanlah hal yang sederhana. Sebab, penyelenggaraan haji yang mengaitkan hubungan antar-negara membutuhkan perundang-undangan khusus yang mengatur akan hal itu. Maka, kehati-hatian dalam pelaksanaan program dan evaluasi harus terus dilakukan guna diperoleh pelayanan maksimal bagi para pengguna/jama'ah. Jadi, aspek pelayanan merupakan hal fundamental dalam penyelenggaraan ibadah haji. Sebab, demikian Malik, ibadah haji adalah dari dan untuk umat yang meniscayakan kenyamanan dan keamanan dalam pelayanan oleh pemerintah.

Transparansi dan akuntabilitas pelayanan dalam konteks penyelenggaraan haji oleh pemerintah memang mendesak. Masa Malik menjadi Menteri Agama, hal fundamental yang dibenahi adalah manajemen. Terbukti dengan dihapuskannya lembaga BPDAU (Badan Pengelola Dana Abadi Umat) yang disinyalir sebagai “sarang” mengendapnya dana haji yang mencapai milyaran rupiah dan penggunaannya kurang jelas. Tak pelak, Malik banyak mengucurkan dana bantuan pendidikan berupa beasiswa bagi mahasiswa S1, S2, dan S3. Melalui pemberian beasiswa diharapkan mahasiswa-mahasiswa itu bisa belajar dengan sungguh-sungguh sehingga mencapai cita-cita yang diinginkan sesuai bidang studi yang ditekuninya.

Kecuali itu, Malik juga melakukan verifikasi kelayakan terhadap beberapa yayasan dan lembaga penyelenggara haji swasta. Hal ini urgen guna diperoleh kepastian hukum dan kelayakan sesuai standar yang dibakukan oleh pemerintah. Melalui verifikasi kelayakan ini bisa diketahui bagaimana aspek pelayanan seharusnya diberikan kepada para jama'ah. Yaitu suatu bentuk pelayanan yang sehat. Mengenai buku haji, misalnya, Malik menyarankan adanya buku standard yang sederhana dan mudah dihafalkan.

Lebih daripada itu, Malik mengharapakan kepada Menteri Agama bahwa jabatan menteri itu sejatinya harus dipahami sebagai jabatan publik, yaitu

suatu bentuk jabatan yang “mengharamkan” terjadinya polarisasi yang tidak rasional. Apalagi polarisasi ke dalam aliran dan organisasi keagamaan. Memahami keniscayaan pluralisme dan multikulturalisme di negeri ini tidak sepantasnya seorang menteri membuat kapling-kapling keagamaan yang tidak bisa dipahami secara rasional.

Menyoal bahwa kursi Menteri Agama layak diberikan ke NU dan Mendiknas ke Muhammadiyah, Malik menjawab: “Sedih saya mendengar hal itu. Sakit saya jika saya duduk di sini (Mendiknas RI), hanya mewakili Muhammadiyah.” Untuk itu, Menteri Agama harus mengerti betul perkembangan hidup beragama baik dalam perspektif sosial, budaya/tradisi, politik, dan ekonomi. Artinya, keberadaan Menteri Agama diharapkan tidak terseret oleh dalil-dalil yang mempersempit langkah-langkah itu. Tidak perlu pemerintah yang direpresentasikan oleh Menteri Agama untuk mengatur hal-hal “rumah tangga agama,” seperti masjid, gereja, pura, dan termasuk di dalamnya adalah pesantren. Pemerintah cukup memberikan apresiasi dengan memberikan dukungan dan memfasilitasi pelayanan bagi pengembangan keagamaan yang ada. Melalui langkah-langkah demikian diharapkan keberadaan Departemen Agama RI kembali ke kesejatian pembentukan awal berdirinya.

Sintesa Perguruan Tinggi dan Pesantren menurut A. Malik Fadjar

Perguruan tinggi dan pesantren adalah dua tradisi pendidikan yang mempunyai banyak perbedaan. Perguruan tinggi merupakan gejala kota, sedang pesantren adalah gejala desa. Perguruan tinggi identik dengan kemoderenan, sedang pesantren identik dengan ketradisionalan. Perguruan tinggi lebih menekankan pendekatan yang bersifat *liberal*, sedang pesantren lebih menekankan sikap *konservatif* yang bersandar dan berpusat pada figur sang Kyai. Begitu seterusnya.

Persepsi dualisme-dikotomik semacam itu mungkin saja kurang begitu tepat karena dalam kenyataannya banyak juga pesantren yang telah melakukan perubahan baik secara struktural maupun kultural. Munculnya banyak pesantren dengan klaim pesantren modern, yang bisa saja terkesan *superfisial*, bagaimanapun telah menjadi petunjuk penting bahwa pesantren tidak selamanya memperlihatkan perkembangan yang statis atau *status quo*. Maka kalau perguruan tinggi sering diberi citra yang “wah,” tidak berarti keberadaannya lebih unggul ketimbang pesantren. Bahkan, kalau dilihat dari sisi kemandirian, pesantren mempunyai kelebihan. Dan kalau mau jujur, sebenarnya lembaga yang paling bertanggungjawab terhadap munculnya

fenomena masyarakat pendidikan berlebih (*over-educated society*) yang dapat dilihat pada semakin membludaknya pengangguran intelektual di kota-kota sekarang ini, adalah perguruan tinggi itu.

Berbicara tentang sisi kelebihan pesantren, saya teringat polemik kebudayaan yang berlangsung pada tahun 30-an. Salah seorang cendekiawan yang terlibat dalam polemik itu adalah Dr. Sutomo. Yang menarik dari pemikiran Sutomo, adalah anjurannya agar asas-asas sistem pendidikan pesantren digunakan sebagai dasar pembangunan pendidikan nasional Indonesia. Meskipun pemikiran Sutomo kurang memperoleh tanggapan yang berarti, tetapi patut digarisbawahi bahwa ternyata pesantren telah dilihat sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam proses pembentukan identitas budaya bangsa Indonesia.

Dalam sejarah pertumbuhan dan perkembangan pendidikan nasional di Indonesia, agaknya tidak dapat dipungkiri bahwa pesantren telah menjadi semacam *local genus*. Di kalangan umat Islam sendiri, pesantren sedemikian jauh telah dianggap sebagai model institusi pendidikan yang mempunyai keunggulan baik pada sisi tradisi keilmuannya, yang oleh Martin van Bruinessen dinilai sebagai salah satu tradisi agung (*great tradition*), maupun pada sisi transmisi dan internalisasi moralitasnya, sebagaimana diungkap oleh Nurcholish Madjid. Bahkan, demikian Nurcholish Madjid, pertumbuhan sistem pendidikan di Indonesia akan mengikuti jalur-jalur yang ditempuh pesantren-pesantren itu. Sehingga perguruan tinggi tidak akan berupa UI, IPB, UGM, Unair, Brawijaya, dan lain-lain, tetapi mungkin Universitas Tremas, Krapyak, Tebuireng, Bangkalan, Lasem, Gontor, dan sebagainya. Hal itu sebagai kemungkinan ditarik, lanjut Nurcholish Madjid, setelah melihat dan membuat kiasan secara kasar dengan pertumbuhan sistem pendidikan di negara-negara Barat yang terkenal adalah berasal dari cikal-bakal perguruan-perguruan keagamaan. Tetapi mungkin juga seandainya kita tidak pernah dijajah, pesantren-pesantren tidak begitu jauh terperosok ke dalam daerah pedesaan yang terpencil seperti sekarang melainkan berada di kota-kota pusat kekuasaan atau ekonomi, sekurang-kurangnya tidak terlalu jauh dari sana, sebagaimana halnya sekolah-sekolah keagamaan di Barat yang kemudian tumbuh menjadi universitas-universitas.

Pendapat Nurcholish Madjid di atas mungkin terkesan klise atau gagasan yang *utopis* bagi orang yang sudah telanjur terbingkai dalam wacana modernisme. Akan tetapi, sekali lagi, dengan mempertimbangkan kelebihan yang dimilikinya, bukan tidak mungkin pesantren akan dilirik sebagai alternatif di tengahnya suasana pendidikan formal di Indonesia, termasuk

juga perguruan tinggi sebagai jenjang pendidikan formal yang paling tinggi. Pada dekade 70-an dan 80-an ketika LSM menjadi *mainstream* gerakan pemberdayaan rakyat, pesantren seringkali dilibatkan sebagai mitra dalam pembangunan masyarakat pedesaan. Kenapa pesantren? Sebab jika dipandang dari perspektif *people centered development*, sebuah model pembangunan alternatif yang pernah diintrodusir oleh David C. Korten, pesantren dinilai lebih dekat dan mengetahui seluk beluk masyarakat yang berada di lapisan bawah. Maka dari ujung pulau Madura, sebuah pesantren yang dikenal dengan nama An-Nuqayah, yang terdapat di desa Guluk-Guluk, Sumenep, tampil dengan rintisan Program Pengembangan Lingkungan sekitar yang dikenal dengan Biro Pengabdian Masyarakat (BPM). Atas hasilnya itu, An-Nuqayah mendapatkan hadiah dan penghargaan Kalpataru karena prestasinya dalam menyelamatkan lingkungan.

Namun, demikian tidak berarti pesantren lepas dari kelemahan. Justru dalam zaman yang ditandai dengan cepatnya perubahan di semua sektor dewasa ini, pesantren menyimpan banyak persoalan yang menjadikannya agak tertatih-tatih, kalau tidak malah kehilangan kreativitas, dalam merespon perkembangan zaman. Beberapa pesantren yang ada pada saat ini, masih secara kaku (*rigid*) mempertahankan pola salafiyah yang dianggapnya *sophisticated* dalam menghadapi persoalan eksternal. Padahal, sebagai suatu institusi pendidikan, keagamaan, dan sosial, pesantren dituntut melakukan kontekstualisasi tanpa harus mengorbankan watak aslinya. Kenapa ini bisa terjadi?

Pertama, dari segi kepemimpinan pesantren secara kukuh masih terpola dengan kepemimpinan yang sentralistik dan hirarkhis yang berpusat pada satu orang Kyai. Ihwal pendirian pesantren memang mempunyai sejarah yang unik. Berdirinya pesantren biasanya atas usaha pribadi Kyai. Maka dalam perkembangan selanjutnya dia menjadi figur pesantren. Pola semacam ini tak pelak lagi melahirkan implikasi manajemen yang otoritarianistik. Pembaharuan menjadi hal yang sangat sulit dilakukan karena sangat (ber/ter)-gantungan pada sikap sang Kyai. Pola seperti ini pun akan berdampak kurang prospektif bagi kesinambungan pesantren di masa depan. Banyak pesantren yang sebelumnya populer, tiba-tiba “hilang” begitu saja karena sang Kyai meninggal dunia.

Kedua, kelemahan di bidang metodologi. Telah umum diketahui bahwa pesantren mempunyai tradisi yang kuat di bidang transmisi keilmuan klasik. Namun karena kurang adanya improvisasi metodologi, proses transmisi itu hanya melahirkan penumpukan keilmuan. Dikatakan oleh Martin van

Bruinessen, ilmu yang bersangkutan dianggap sesuatu yang sudah bulat dan tidak dapat ditambah. Jadi, proses transmisi itu merupakan penerimaan secara *taken for granted*. Muhammad Tholhah Hasan, mantan Menteri Agama dan salah seorang intelektual muslim dari kalangan pesantren NU, pernah mengkritik bahwa tradisi pengajaran yang mendapatkan penekanan di pesantren itu adalah fiqih (*fiqh oriented*), sehingga penerapan fiqih menjadi teralienasi dengan realitas sosial dan keilmuan serta teknologi kontemporer.

Ketiga, terjadinya disorientasi, yakni pesantren kehilangan kemampuan mendefinisikan dan memosisikan dirinya di tengah realitas sosial yang sekarang ini mengalami perubahan yang demikian cepat. Dalam konteks perubahan ini, pesantren menghadapi dilema antara keharusan memertahankan jati dirinya dan kebutuhan menyerap budaya baru yang datang dari luar pesantren. Kalau oleh MM. Bellah pesantren diberi ciri kontekstual, yaitu ciri-ciri lingkungan sekitar (sosial dan fisik) di mana pesantren berada, yang tersadap oleh dan memberi warna pada ciri-ciri pesantren, maka kini ciri kontekstual tersebut terjadi pemekaran, yang juga sudah mulai merambah ke desa. Pesantren dituntut melakukan reorientasi terhadap peran pendidikan, keagamaan, dan sosialnya. Kalau “tempoe doeloe” ketika struktur komunal desa masih bertahan, hubungan pesantren dengan masyarakat nampak begitu interaktif. Bahkan, pesantren dapat memerankan dirinya sebagai *cultural broker*, meminjam istilah Clifford Geertz. Bagaimana sekarang? Agaknya sudah menjadi fenomena umum, bahwa sebagian besar pesantren hanya sebagian peran melakukan konservasi atau cagar budaya.

Nah, kalau belakangan ini kita menyaksikan terjadinya sintesa atau konvergensi antara pesantren dan perguruan tinggi, maka hal itu dapat dipandang sebagai perkembangan yang konstruktif. Seperti kita ketahui, belakangan ini banyak pesantren yang mendirikan perguruan tinggi, dan sebaliknya perguruan tinggi mendirikan pesantren. Atau, di beberapa kota mulai didirikan pesantren yang bernuansakan dunia perguruan tinggi, meskipun di dalamnya tidak ada jenis pendidikan yang secara formal disebut perguruan tinggi. Di Surakarta, misalnya, terdapat Pondok Pesantren Hj. Nuriyah Sobron, yang didirikan oleh Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS). Di Sumenep, Madura, Pesantren An-Nuqayah mendirikan Sekolah Tinggi Keagamaan An-Nuqayah (STIKA). Di Paiton, Probolinggo, Pesantren Nurul Jadid mendirikan Institut Agama Islam Nurul Jadid. Di Malang, terdapat Pesantren Al-Hikam yang santrinya dari kalangan mahasiswa. Masih di Malang, Universitas Islam Negeri (UIN) Malang d.h. STAIN Malang mendirikan Ma’had Ali Sunan Ampel. Yang menarik lagi adalah ide dari

CIDES tentang pendirian Pesantren Politeknik. Perkembangan lainnya yang juga perlu dicermati, adalah pertumbuhan pesantren kilat yang menjadi *trendi* di beberapa kota di Indonesia seperti di Surabaya dan Jakarta.

Fenomena apa ini sebenarnya? Kenapa dua pendidikan yang tidak saja mencerminkan perbedaan secara institusional, tapi juga filosofis dan kultural, tiba-tiba saling mendekat dan menariknya terjadi konvergensi? Barangkali inilah yang disebut dengan zaman *pasca modern* atau *postmodern*. Dengan meninggalkan penjelasan di sekitar epistemologi *postmodern*, dalam era ini kita menyaksikan suatu bentuk realitas dunia yang mulai memelihatkan suatu unitas, tapi sekaligus di dalamnya ada pluralitas. Misalnya, kecenderungan besar (*mega-trend*) terjadinya globalisasi yang menjadikan dunia lain menjadi transparan. Tapi dalam globalisasi ini pula, kita dihadapkan pada persoalan pluralitas, yang tidak lagi dunia hanya dapat dibagi secara dualisme-dikotomik. Dalam kehidupan kultural, kita menyaksikan saling mendekatnya antara wacana tradisional dan modern. Dalam kehidupan agama dimensi spiritualitas dan mistisisme mulai mendapatkan perhatian. Dunia pendidikan nampaknya tidak dapat melepaskan diri dari arus besar ini. Maka pola pendidikan lama, yaitu pendidikan yang bercorak tradisional di satu pihak, dan pendidikan yang bercorak modern di pihak lain, kini mulai dikritik banyak orang, karena hanya menghadirkan pribadi yang pincang (*split personality*).

Perguruan tinggi yang mempunyai keunggulan dari sisi rasionalitas dan ditambah dengan pengayaan di bidang *skill*, tapi minus pengayaan moral, dalam kenyataannya hanya menghasilkan manusia yang cerdas tapi kurang mempunyai kepekaan etik dan moral. Sebaliknya, pesantren yang mempunyai keunggulan dari sisi moralitas tapi minus tradisi rasional, meskipun mampu melahirkan pribadi yang tangguh secara moral, tapi lemah secara intelektual. Dengan memerhatikan implikasi yang sifatnya demikian mendasar seperti telah digambarkan, jika pendidikan dibiarkan bertahan dalam pola dualisme-dikotomik, maka sudah waktunya dicari usaha ke arah terciptanya suatu sintesa, kovergensi, dan/atau sinergisitas antara perguruan tinggi dan pesantren sehingga dapat dicapai kesatuan antara moralitas dan rasionalitas, antara ruhaniah dan jasmaniah.

Persoalannya kini, bagaimana bentuk ideal sintesa yang diinginkan? Tentu saja bukan sekadar bentuk sintesa yang bersifat fisik semata karena sintesa semacam ini tidak akan mungkin mendapatkan hasil yang ideal. Menurut hemat saya, yang terpenting sintesa tersebut harus betul-betul mampu menggambarkan *integrasi keilmuan*. Karena itu, sintesa tersebut

hendaknya mampu melakukan dekonstruksi terhadap realitas keilmuan yang bersifat dualisme-dikotomik. Persoalan ini bukanlah persoalan yang sederhana karena menuntut kita untuk membongkar akar-akar teologis-filosofis terjadinya dualisme-dikotomik tersebut. Masalahnya bukan sekadar mencari pembenaran secara qur'ani yang terkesan artifisial dengan berbagai bentuk keilmuan yang berkembang sekarang ini, yang tidak berakar pada tradisi keilmuan dalam pesantren. Dalam pandangan saya, sudah waktunya kita melakukan (de/re)-rekonstruksi wacana keilmuan yang selama ini terpilah-pilah secara *rigid* antara “ilmu-ilmu agama” di satu pihak dan “ilmu-ilmu umum” di pihak lain. Kalau wacana seperti ini yang dipakai, jangan-jangan apa yang kita sebut dengan perguruan tinggi pesantren atau pesantren perguruan tinggi, bila siang diberi “ilmu-ilmu umum” dan bila malam dikasih kitab kuning “ilmu-ilmu agama,” akan menyata.

Jika kita coba menguak kembali konsep *‘ilm* dalam al-Qur’an, maka akan nampak jelas cacat teologis dan filosofis pembedaan keilmuan yang bersifat dualisme-dikotomik itu. Dalam sebagian besar ayat-ayat al-Qur’an, demikian Mahdi Ghulshyani menjelaskan, konsep ilmu secara mutlak, muncul dalam maknanya yang masih umum (generik). Lihat misalnya, Qs. al-Baqarah [2]: 31, Qs. Yûsuf [12]: 76, dan an-Nahl [16]: 70, Qs. al-Zumar [39]: 9. Bahkan, klasifikasi ilmu ke dalam ilmu agama dan non-agama (umum), menurut Murtadha Muthahhari, akan menyebabkan kesalahan memandang (miskonsepsi) bahwa ilmu “non-agama” terpisah dari Islam, dan dampak tidak sesuai dengan watak universalitas agama Islam yang menyatakan dapat merahmati kehidupan semesta ini.

Jika demikian masalahnya maka sintesa antara perguruan tinggi dan pesantren menghadapi persoalan yang cukup serius, karena kedua institusi tersebut sudah terlanjur dikembangkan dalam wacana keilmuan yang dualisme-dikotomik. Tapi masalah tersebut dapat segera dituntaskan jika ada keberanian moral dan intelektual dari semua pihak yang berkepentingan untuk menggagas sintesa antara perguruan tinggi dan pesantren dalam kerangka kesatuan ilmu tadi.

Di samping persoalan keilmuan di atas, persoalan lain yang perlu dipikirkan adalah masalah manajemen dan kepemimpinan, pembentukan tradisi baru, dan keterkaitan institusi dengan perkembangan masyarakat, sehingga sintesa yang diinginkan betul-betul menyeluruh, bukan artifisial.

Pengembangan Pendidikan Islam di Indonesia menurut A. Malik Fadjar

Dalam sejarah pendidikan Indonesia, maupun dalam studi pendidikan, sebutan “pendidikan Islam” umumnya dipamahi hanya sebatas sebagai “ciri khas” –jenis pendidikan yang berlatar belakang keagamaan. Demikian pula batasan yang ditetapkan didalam Undang-undang Nomer 2 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Zarqawi Soejoeti (1986) memberikan pengertian yang terperinci. *Pertama*, “pendidikan Islam” adalah jenis pendidikan yang [endirian dan menyelenggaraannya didorong oleh hasrat dan semangat cita-cita mengejawantahkan nilai-nilai Islam, baik tercemin dalam nama lembaganya maupun dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan. Di sini kata Islam ditempatkan sebagai sumber nilai yang akan diwujudkan dalam seluruh kegiatan pendidikan. *Kedua*, jenis pendidikan yang memberikan perhatian dan sekaligus menjadikan ajaran Islam sebagai pengetahuan untuk program studi yang diselenggarakan. Di sini kata Islam ditempatkan sebagai bidang studi, sebagai ilmu yang diperlakukan sebagaimana ilmu yang lain. *Ketiga*, jenis pendidikan yang mencakup kedua pengertian tersebut diatas. Di sini kata Islam ditempatkan sebagai sumber nilai sekaligus sebagai bidang studi yang ditawarkan lewat program studi yang diselenggarakan.

Dari pengertian yang diberikan Zarkowi itu kiranya bisa lebih dipahami bahwa keberadaan pendidikan Islam tidak sekedar menyangkut persoalan ciri khas, tetapi lebih mendasar lagi, yaitu tujuan yang dididamkan dan diyakini sebagai yang paling ideal. Tujuan itu sekaligus mempertegas bahwa misi dan tanggung jawab yang diemban pendidikan Islam lebih berat lagi. Dan yang dibicarakan di sini adalah jenis dan pengertian pendidikan Islam yang menyangkut ketiga-tiganya. Karena memang ketiga-tiganya itu yang selama ini tumbuh dan berkembang di Indonesia dan sudah menjadi bagian tidak terpisahkan baik dari sejarah maupun dari kebijakan pendidikan nasional. Bahkan tidak berlebihan kalau (secara politis) dikatakan bahwa kehadiran dan keberadaannya merupakan bagian dari andil umat Islam dalam perjuangan maupun dalam mengisi kemerdekaan.

Pendidikan Islam, dalam pengertian sebagaimana dikemukakan di atas, selanjutnya akan dibahas dari sudut pendekatan sistem pendidikan dan kelembagaannya sebagai “mekanisme alokasi posisional”. Artinya, sistem pendidikan dan kelembagaannya mendapat kepercayaan dari masyarakat untuk menyalurkan peserta didik ke dalam posisi atau peran ideal tertentu. Sudut pendekatan ini dipakai karena sedikit banyak memiliki dengan

topik bahasanya, dan terutam dengan kenyataan-kenyataan pendidikan yang kini kian dirasakan oleh masyarakat luas. Kenyataan-kenyataan ini menurut Waskito Tjiptossasmito (1976) cukup berpengaruh, baik pada penilaian maupun penerimaan masyarakat terhadap pendidikan. *Pertama*, sistem pendidikan dan kelebagaannya lebih merupakan cermin keadaan masyarakat. Dalam hal ini, keadaan masyarakat yang berlapis-lapis memantul dalam kenyataan pendidikan sebagai suatu sistem. Kini pemilahan lewat jalur kelembagaan ini telah berlaku pada tingkat pendidikan tinggi. Karena itu, setiap tahun ajaran baru masyarakat berdesak-desak untuk masuk ke perguruan tinggi.

Kedua, lembaga sekolah dan perguruan tinggi yang mempunyai kemampuan yang besar dalam menyalurkan lulusannya sesuai dengan harapan masyarakat, akan dikukuhkan kedudukannya secara lebih kuat lagi sebagai mekanisme alokasi. Sejalan dengan hal ini, akan berlaku suatu dalil bahwa semakin besar kemungkinan suatu sekolah dan/atau perguruan tinggi mengantarkan peserta didik/mahasiswanya ke posisi masyarakat yang terpendang. Maka semakin besar arus peserta didik/mahasiswa untuk masuk ke sekolah dan/atau perguruan tinggi itu. Dalam hal ini dapat dilihat besarnya arus peserta didik ke SMP dan SMU setiap tahun, karena karakteristik sekolah lebih memberikan kemungkinan untuk memilih perguruan tinggi. Begitu pula arus yang masuk ke fakultas ekonomi, kedokteran, dan teknik di perguruan tinggi cenderung semakin menguat karena dilihat lebih menjanjikan masa depan atau setidaknya lebih membuka jalan untuk memperoleh status sosial ekonomi yang mapan.

Ketiga, orientasi alokasi posisional akakn berdampak pada munculnya dorongan yang kuat di kalangan anggota masyarakat untuk mencapai tingkat pendidikan setinggi-tingginya. Hal ini segera bisa dipahami karena mereka yang memiliki pendidikan yang semakin tinggi itu akan memiliki “peluang” lebih terbuka untuk memasuki lembaga sosial ekonomi. Akhirnya, orientasi alokasi posisional juga mendorong masyarakat untuk memilih sekolah dan perguruan tinggi atas dasar “taraf” dan “mutu” –dalam jajaran yang sama. Misalnya, sama-sama negeri/swasta, sama-sama SMU, sama-sama universitas, dan seterusnya.

Begitu pula dengan kebijakan yang ditempuh Prof. H.A. Mukti Ali sewaktu menjabat Menteri Agama (1972-1977) melalui SKB Tiga Menteri (Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Dalam Negeri) tentang peningkatan mutu pendidikan pada madrasah. Kebijakan tersebut sesungguhnya adalah dalam rangka menempatkan

posisi peserta didik atau lulusannya pada taraf dan mutu, serta pada konteks kemasyarakatan yang lebih luas. Hal ini terungkap jelas dalam salah satu diktum pertimbangan, yaitu bahwa dalam rangka pencapaian tujuan nasional pada umumnya dan mencerdaskan kehidupan bangsa pada khususnya, serta memberikan kesempatan yang sama kepada tiap-tiap warga negara Indonesia untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, dan memberikan kesempatan untuk mendapat pengajaran yang sama bagi tiap-tiap warga negara Indonesia, perlu diambil langkah untuk meningkatkan mutu pendidikan pada madrasah agar lulusan dari madrasah dapat melanjutkan atau pindah ke sekolah-sekolah umumnya dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi.

Bertolak dari pendekatan sistem pendidikan dan kelembagaan pendidikan sebagai mekanisme alokasi posisional seperti dijelaskan di atas, segera dapat dipertanyakan posisi dan peran pendidikan Islam dengan keragaman lembaga yang dimilikinya, mulai yang berbentuk madrasah dan sekolah sampai dengan berbentuk perguruan tinggi. Secara jujur harus kita akui bahwa kehadiran madrasah, sekolah, dan perguruan tinggi yang pendirian dan pengelolannya berafiliasi pada ormas-ormas Islam seperti Muhammadiyah, NU dan Persis atau badan-badan/yayasan-yayasan perguruan Islam, kebanyakan belum mampu menduduki kualitas, posisi serta peran yang diidamkan. Baik bagi kalangan sendiri apalagi bagi lapisan masyarakat tertentu yang secara sosiologis berada pada posisi menengah dan atas. Pendidikan Islam nampaknya masih dalam posisi sebagai “cagar budaya” untuk mempertahankan paham-paham keagamaan tertentu, belum membantu menumbuhkan mobilitas antargenerasi demi generasi (Samuel Bowles, 1972). Karena itu, lembaga-lembaga tersebut masih jauh dari perannya sebagai pendidikan alternatif yang menjanjikan masa depan.

Niscaya bahwa kehadiran lembaga pendidikan Islam yang berkualitas dalam berbagai jenis dan jenjang yang pendidikan itu sesungguhnya sangat diharapkan oleh berbagai pihak, terutama umat Islam. Bahkan, hal itu terasa sebagai kebutuhan yang sangat mendesak terutama bagi kalangan Muslim kelas menengah ke atas yang secara kuantitatif terus meningkat belakangan ini. Fenomena sosial yang sangat menarik ini mestinya bisa dijadikan tema sentral kalangan pengelola lembaga pendidikan Islam dalam melakukan pembaharuan dan pengembangannya. Namun, yang kita saksikan justru sebaliknya, di berbagai tempat banyak lembaga pendidikan Islam, terutama yang tergolong “kelas pinggir” satu per satu mengalami penyusutan karena kehilangan kepercayaan baik dari umat maupun peminatnya. Sementara

itu, lembaga-lembaga pendidikan yang berlatar belakang keagamaan berbeda namun dikelola secara profesional dan menempatkan pada konteks kemasyarakatan yang belum luas, memperlihatkan perkembangan yang demikian pesat sehingga keberadaannya semakin kukuh.

Kenyataan itu secara tidak langsung menuntut para pengelola pendidikan Islam untuk lebih bersikap rasional dan berorientasi kepada kebutuhan masyarakat luas. Apalagi sekarang, mempersiapkan sumber daya manusia di masa mendatang dan bukan semata-mata sebagai alat untuk membangun pengaruh politik atau alat dakwah dalam arti sempit. Kalau persepsi yang terakhir ini diacu dan dijadikan dalih untuk tetap bertahan, maka boleh jadi pendidikan bukan saja tidak menolong masa depan peserta didik, tetapi lebih jauh kebalikan dari itu, dapat dinilai sebagai perbuatan yang merugikan. Oleh karena itu, persoalan dunia pendidikan sebenarnya termasuk peka dan rawan. Pendidikan yang tidak didasarkan pada orientasi yang jelas dapat mengakibatkan kegagalan dalam hidup secara berantai dan generasi ke generasi.

Kurang tertariknya masyarakat untuk memilih lembaga-lembaga pendidikan Islam sebenarnya bukan karena telah terjadi pergeseran nilai atau ikatan keagamaannya yang mulai memudar, melainkan karena sebagian besar lembaga tersebut kurang menjanjikan masa depan dan kurang responsif terhadap tuntutan dan permintaan saat ini maupun mendatang. Padahal, paling tidak ada tiga hal yang menjadi pertimbangan masyarakat dalam memilih lembaga pendidikan, yaitu nilai (agama), status sosial, dan cita-cita. Masyarakat yang terpelajar akan semakin beragam pertimbangannya dalam memilih pendidikan bagi anak-anaknya. Hal ini berbeda dengan kondisi *tempo deole* yang serba terbatas dan terbelakang.

Tempo deole, pendidikan lebih merupakan model untuk membentuk maupun pewarisan nilai-nilai keagamaan dan tradisi masyarakatnya. Artinya, kalau anaknya sudah mempunyai sikap positif dalam beragama dan dalam memelihara tradisi masyarakatnya, maka pendidikan dinilai sudah menjalankan messinya. Tentang seberapa jauh persoalan keterkaitan dengan kepentingan ekonomi, ketenagakerjaan dan sebagainya merupakan persoalan kedua. Akan tetapi, masyarakat yang sudah semakin terdidik dan terbuka, pada umumnya lebih rasional, pragmatis, dan berpikir jangka panjang. Dab karena pula, ketiga aspek tersebut (nilai, status sosial, dan cita-cita) dijadikan pertimbangan secara bersama-sama. Bahkan, dua pertimbangan terakhir (status sosial dan cita-cita) cenderung lebih dominan.

Sebenarnya komitmen masyarakat kita terhadap nilai-nilai agamanya masih cukup tinggi. Bahkan ada kecenderungan meningkat. Hal ini terlihat tatkala muncul pendidikan Islam yang dinilai bermutu dan menjanjikan, maka mereka akan menjadikannya sebagai pilihan pertama. Sebagai contoh dikemukakan di sini, kehadiran sekolah-sekolah pada perguruan Al-Azhar di Jakarta, Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) I di Malang, dan SMU Muhammadiyah I di Yogyakarta, yang tiap tahun pelajaran baru selalu dipadati calon siswa. Terhadap lembaga pendidikan seperti ini ternyata “daya beli” masyarakat tinggi walaupun biaya pendidikannya cukup tinggi. Dan pemerintah tampaknya tidak berkeberatan dan tidak membatasi upaya-upaya pengembangan lembaga-lembaga pendidikan yang menyandang ciri-ciri khas itu. bahkan, pemerintah merekomendasi sekolah tersebut sebagai salah satu model “sekolah unggul”.

Pengembangan pendidikan Islam bukanlah pekerjaan sederhana karena pengembangan tersebut memerlukan adanya perencanaan secara terpadu dan menyeluruh. Dalam hal ini perencanaan berfungsi membantu memfokuskan pada sasaran, pengalokasian, dan kontinuitas. Dan sebagai suatu proses berpilir untuk menentukan hal yang akan dicapai, bagaimana pencapaiannya, siapa yang mengerjakannya dan kapan dilaksanakan, maka perencanaan juga memerlukan adanya kejelasan terhadap masa depan yang akan dicapai atau dijanjikan. Oleh karena itu, dalam perencanaan ada semboyan bahwa: *“lick is the result of good planning, and good planning is the result of information well applied.”*

Selain perencanaan yang baik dan tepat, menurut Abdullah Fajar (1991), pengembangan pendidikan Islam yang lebih arif juga perlu didukung oleh kegiatan “riset dan evaluasi”. Dalam kajian Abdullah, riset dan evaluasi pendidikan merupakan dua jurus *“emperical inquiry”* yang dapat dijadikan landasn pengembangan secara baik. Sayangnya, kegitan riset dan evaluasi pendidikan Islam itu sampai sekarang belum ada yang menekuni. Meskipun demikian, dalam berbagai pembicaraan dan diskusi seputar pembinaan dan pengembangan pendidikan Islam sering disebut-sebut perlunya umat Islam memiliki “Lembaga Riset dan Evaluasi Pendidikan” atau *“Reeseach and Development”* (R&D).

Maka pertanyaannya, kapan umat Islam yang kaya dengan lembaga-lembaga pendidikan itu memiliki lembaga riset dan pengembangan pendidikan Islam yang tangguh dan mumpuni? Bukannkah sudah memiliki modalnya, baik yang berupa tenaga ahli maupun yang berupa kelembagaan (pondok pesantren, madrasah, sekolah dan perguruan tinggi)? Peratanyaan-

pertanyaan itulah barang kali yang perlu segera dijawab.

Paparan di atas sebegitu jauh telah memberikan gambaran yang cukup jelas bahwa potensi pendidikan yang dimiliki oleh umat Islam baik yang berbentuk madrasah dan sekolah maupun perguruan tinggi, tampaknya belum menjadi kekuatan aktual. Karena itu, pendidikan Islam masih jauh dari harapan untuk menjalankan fungsi-fungsi alokasi posisional secara makro yang dibutuhkan oleh masyarakat. Keadaan menuntut kita untuk melakukan pembenahan dan pengembangan yang lebih jauh dan dijanjikan masa depan. Pembenahan dan pengembangan ini dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu *macroscopic* (tinjauan makro). Dalam pendekatan pertama, pendidikan dianalisis dalam hubungan dengan kerangka sosial yang lebih luas. Sedangkan dalam pendekatan kedua, pendidikan dianalisis sebagai suatu kesatuan unit yang hidup dan terdapat saling interaksi di dalam dirinya sendiri.

Dua pendekatan yang disebut di atas bersifat saling melengkapi, terutama ditengah-tengah masyarakat yang semakin terbuka dan kompleks yang melahirkan interaksi dengan berbagai aspek kehidupan seperti saat ini. oleh karena itu, kalau kita ingin menatap masa depan pendidikan Islam yang mampu memainkan peran strategis dan memperhitungkan untuk dijadikan pilihan, maka perlu ada keterbukaan wawasan dan keberanian dalam memecahkan masalah-masalahnya secara mendasar dan menyeluruh, seperti yang berkaitan dengan hal-hal berikut ini. *pertama*, kejelasan antara yang dicita-citakan dengan langkah operasionalnya. *Kedua*, perbedaan (*empowering*) kelembagaan yang ada dengan menata kembali sistemnya. *Ketiga*, perbaikan, pembaruan, dan pengembangan dalam sistem pengelolaan atau manajemen. Dan *keempat*, peningkatan sumber daya manusia yang diperlukan.

Dengan langkah-langkah tersebut diharapkan pendidikan Islam dapat berperan lebih artikulatif di masa yang akan datang. Sesungguhnya harus disadari, secara kualitatif lembaga-lembaga pendidikan Islam yang sekarang ini muncul serta dinilai “terkemuka” (*outstanding*), masih jauh dari tuntutan ideal. Karena memang dalam bahasa pengembangan pendidikan berlaku adagium “*star from the beginning to the end, and end for the beginning*”.

Tentu terus diakui pula bahwa untuk semua itu dibutuhkan dana dalam jumlah yang besar. Sistem pendanaan ini harus mendapat perhatian khusus dari kalangan umat Islam. Sebagai alternatif, cara yang dapat ditempuh ialah dengan gerakan wajib berinfak. Atau dengan mengalokasikan *zakat mal'* yang khusus untuk dana pendidikan. Langkah-langkah itu ditempuh

dengan berpijak pada landasan niat dan tekad bahwa kita umat Islam, sudah seharusnya mewariskan sesuatu yang terbaik bagi generasi mendatang.

Madrasah dan Tantangan Peradaban Modern

Suatu kenyataan dan sekaligus keunggulan sistem pendidikan nasional dewasa ini adalah daya akomodatifnya dalam mengintegrasikan penata-penata pendidikan yang beragam kedalam satu bangunan sistemik pendidikan nasional. Yakni, dengan kesediaan mengakui ciri-ciri khas yang memiliki pranata masing-masing. Hal ini benar-benar menampilkan budaya simpatik jati diri bangsa yang berakar pada peradaban “Bhinneka Tunggal Ika”. Betapa simpatiknya pengakuan bahwa “madrasah” (ibtidaiyah, tsanawiyah, dan aliyah) merupakan sekolah umum yang berciri khas Islam dan menjadi bagian keseluruhan sistem pendidikan nasional di negara kita. pengakuan serupa ini secara kultural sungguh tepat, mengingat bangunan peradaban suatu bangsa bisa sangat kuat manakala bertumpu pada akar dan kesinambungan budaya. Pandangan keseharian, pandangan budaya, maupun pandangan ilmiah membenarkan kenyataan bahwa madrasah merupakan bagian dari tradisi pendidikan yang hidup di Indonesia.

Menggagas soal pendidikan pada dasarnya menggagas soal kebudayaan, soal peradaban. Bahkan secara spesifik gagasan pendidikan akan merambah wilayah pembentukan peradaban di masa depan. Pendidikan, memang, adalah upaya merekonstruksi pengalaman-pengalaman peradaban umat manusia secara berkelanjutan guna memenuhi tugas kehidupannya, generasi demi generasi. Upaya rekonstruksi pengalaman ini dapat kita pahami dari dua sisi sekaligus, yakni sisi proses dan sisi lembaga. Dalam konteks pemahaman ini diskursus yang akan dikemukakan berusaha mendudukan madrasah sebagai lembaga yang dalam rentang waktu cukup panjang telah memainkan peran tersendiri dalam panggung pembentukan peradaban bangsa. Di dalamnya berlangsung proses tak kunjung henti merekonstruksi pengalaman-pengalaman peradaban anak bangsa Indonesia yang dari segi jumlah tidak mungkin diabaikan.

Secara pribadi saya mempunyai keterlibatan fungsional maupun struktural mengurus keberadaan dan keberlanjutan pranata pendidikan nasional yang bernama madrasah ini. hal yang tak kunjung berhenti mengusik pikiran adalah mampukah madrasah ikut serta membangaun akar peradaban modern di negeri ini, dalam konteks gelombang-gelombang perubahan yang menerpa hampir kepada seluruh segmen peradaban pada ambang abad ke-21 ini. gelombang peradaban itu datang baik dari “gejolak magma”

kultural dari dalam, internal bangsa dan internal umat Islam, maupun dari arus globalisasi. Namun dalam waktu yang sama., hal ini mau tidak mau menuntut agenda perencanaan-perencanaan dan keputusan-keputusan yang terjabarkan secara spesifik.

Makna Harfiah

Madrasah dalam khasanah kehidupan manusia Indonesia merupakan fenomena budaya yang telah berusia satu abad lebih. Bahkan, bukan suatu hal yang berlebihan, madrasah telah menjadi salah satu wujud entitas budaya Indonesia yang dengan sendirinya menjalani proses sosialisasi yang relatif intensif. Indikasinya adalah kenyataan bahwa wujud entitas budaya ini telah diakui dan diterima kehadirannya. Secara berangsur namun pasti, ia telah memasuki arus utama pembangunan bangsa menjelang akhir abad ke-20 ini. dalam sensus kelembagaan pendidikan dasar oleh pemerintah (Bappenas), madrasah ibtdaiyah (MI) secara berdampingan dengan sekolah dasar (SD) menjadi sasaran pendataan tersebut. dapat kita perkirakan bahwa harapan akhirnya adalah menuju pemberdayaan secara optimal lembaga ini untuk membangun sumber daya manusia Indonesia. inilah salah satu fakta ilustratif keberadaan dan posisi madrasah sebagai salah satu wujud entitas budaya Indonesia.

Sungguhpun demikian, kita paham bahwa madrasah bukan suatu yang *indigenoes* (pribumi) daslam pesta dunia pendidikan di Indonesia. sebagaimana ditunjukkan oleh kata “madrasah” itu sendiri, yang berasal dari bahasa Arab. secara harfiah, kata ini berarti atau setara maknanya dengan kata Indonesia “sekolah” (yang notabene juga bukan kata asli dari bahasa kita. “sekolah” dialihkan dari bahasa asing, mislanya *school* ataupun *scola*.

Madrasah mengandung arti tempat atau wahana anak mengenyam proses pembelajaran. Maksudnya, di madrasah itulah anak menjalani proses belajar secara terarah, terpimpin, dan terkendali.dengan demikian, secara teknis madrasah menggambarkan proses pembelajaran secara formal yang tidak berbeda dengan sekolah. Hanya dalam lingkup kultural, madrasah memiliki konotasi spesifik.di lembaga ini anak memperoleh pembelajaran hal ihwal atau seluk-beluk agama dan keagamaan. Sehingga dalam pemakaiannya, kata madrasah lebih dikenal sebagai sekolah agama.

Kata madrasah, yang secara harfiah identik dengan sekolah agama, setelah mengarungi perjalanan peradaban bangsa diakui telah mengalami perubahan-perubahan walaupun tidak melepaskan diri dari makna asal sesuai dengan ikatan budayanya, yakni budaya Islam.

Dimensi Sejarah dan Budaya

Perjalanan sejarah bangsa telah mengentaskan suatu tatanan mozaik kebudayaan yang dapat kita gambarkan sebagai jajaran dan terkadang perpaduan tradisi-tradisi: a) tradisi prasejarah atau tradisi asli dan lokal; b) tradisi Hindu Budha; c) tradisi Islam; dan d) tradisi Barat atau modern. Keseluruhan tradisi ini telah menjadi unsur dari dan suatu ramuan yang kemudian membangun entitas budaya Indonesia. pembangunan entitas budaya semenjak tahapan kemerdekaan, pada saat mencari dan mengukuhkan kebudayaan nasional, sampai dengan tahapan kontemporer dewasa ini ketika pembangunan memasuki era industrialisasi, informasi, dan globalisasi yang lazim pula disebut era kebangkitan nasional II, telah mengalami pergumulan yang terkadang menegangkan (dalam kadar tertentu sampai merambah ke ketegangan politis). Dapat diibaratkan, tatanan mozaik kebudayaan terus mengalami dinamika secara keberlanjutan. Unsur-unsur ataupun sub-subentitas budaya tidak seluruhnya melebur dalam satu rumusan tunggal. Realitas kebinekaan betapapun diterima dengan kelapangan dada.

Berbekal kerangka konseptual sejarah dan budaya sebagaimana diutarakan di atas, kita coba menyimak pranata pendidikan Islam formal yang bernama madrasah. Seperti disinggung di muka, madrasah bukanlah sesuatu yang berwatak *indigenous*. Kalau kita mengkaji pranata pendidikan Islam, mestilah kita menatap pondok pesantren. Lembaga pendidikan pondok pesantren inilah yang oleh banyak peneliti, ilmuan, ataupun budayawan dipandang sebagai lembaga pendidikan Islam yang memiliki watak *indigenous*.

Pondok pesantren dipandang sebagai perangkat sosialisasi dan engkulturasi yang memiliki kontinum kebudayaan dengan lembaga pendidikan yang telah lama berakar, yang sering di sebut mandala. Pola pembelajaran pondok pesantren tidak jauh berbeda dengan sistem yang berlaku pada lembaga pendidikan “asli” tersebut. tentu dengan isi yang mulai berbeda, yakni memasukkan pelajaran atau ajaran “baru” yang kemudian dikenal sebagai agama Islam.

Mencermati pola pendidikan pondok pesantren pada tahap awal-awal pertumbuhan dan perkembangannya, pada dasarnya kita mengamati terjadinya peristiwa “okulasi” kebudayaan. Agar lembaga ini adaptis dengan pranata yang telah ada sebelumnya, maka isi ajaran yang disampaikan selama masa pembelajaran berupa pelajaran Islam yang lebih bercorak mistik.

Tentu dari segi ini ada alasan internal di dalam Islam dan dunia Islam yang sampai ke wilayah Nusantara ini. secara lambat laun, nuansa mistik ini di pondok pesantren makin berkurang bersamaan dengan semakin

dekatnya ke dalam jaringan Islam, ke *haramain*, tempat sumber yang "asli". Para pengamat dan pengkaji keislaman melihat fenomena Islam di pondok pesantren (dan sudah barang tentu juga di Indonesia) terus bergerak ke arah proses ortodoksi. Atau, pengantar peradaban di Indonesia menyebut adanya proses bergerak, dari Islam yang bercorak mistik menuju ke Islam Ssuni.

Suatu catatan menarik haruslah diberikan. Bahwasannya, proses bergerak menuju Islam yang lebih Sunni ini pun tidak menampilkan fenomena tunggal. Kita menyaksikan sekali lagi "kebinekaan" di dalam proses menuju ke Islam yang lebih Sunni, yang secara tersembunyi maupun terkadang secara terang-terangan menampilkan ketegangan dan gesekan kehidupan bermasyarakat ber-*tamaddun*.

Pengelolaan pendidikan Islam dengan sistem *madrasi* memungkinkan cara pembelajaran secara klasikal. Hal ini berbeda dengan cara yang berkembang di pondok pesantren yang semula telah membeku, yakni yang bersifat individual seperti terdapat pada sistem *sorogan* dan *wetonan*. Pengelolaan sistem *madrasi* juga memungkinkan adanya pengelompokan pelajaran-pelajaran tentang pengetahuan Islam yang penyampaianya di berikan secara bertingkat-tingkat. Pengelompokan ini sekaligus memperhitungkan rentang waktu yang dibutuhkan. Kalau dibahasakan secara teknis kependidikan sekarang, maka sistem *madrasi* mengorganisasi kegiatan kependidikannya dengan sisten kelas-kelas berjenjang dengan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pelajaran sudah dipolakan.

Formad madrasah dari waktu ke waktu majadi semakin jelas sosoknya. Sementara isi dan visi keislaman terus mengalami perubahan. Sejak akhir abad ke-19, kepustakaan mencatat perubahan-perubahan pemikiran Islam di wilayah Nusantara (Indonesia). hal ini seiring dengan semakin kuatnya proses pemnebtukan *intelektual webs* (jaringan intelektual) di kalangan umat Islam. Jaringan ulama semakin menentalkan corak Islam murni. Nuansa mistik tentu tidak hilang, namun semakin mendekati kaidah-kaidah syariah yang lebih Sunni. Hal ini kelak ditandai dengan muncul dan berkembangnya *neosufisme* dalam kehidupan Islam.

Pengalihan khazanah peradaban Barat ke wilayah Nusantara juga menjadi bagian tersendiri dari sejarah dan kehidupan bangsa. Proses ini berlangsung dalam kurun waktu panjang, sejalan dengan hegemoni politik Belanda atas negeri-negeri, pulau-pulau, atau wilayah-wilayah, bahkan seluruh kawasan nusantara yang dikemudian hari menjadi negara Indonesia. hegemoni politik di wujudkan dalam bentuk pemerintahan jajahan, yang disebut pemerintah Hindia Belanda.

Untuk memenuhi tuntutan akan sumber daya manusia yang bisa menopang kebutuhan roda pemerintahan serta oleh dalih etis, pemerintah Hindia Belanda melenggarakan pendidikan sekolah, intervensi pendidikan pemerintah Hindia Belanda menjadi intensif dan ekstensif selama beberapa dasawarsa dalam abad ke-20, sebelum mereka dikalahkan Jepang. Kebijaksanaan “*ereschald*” atau “balas budi”, atau yang kemudian dikenal dengan kebijaksanaan politik etis, menjadi sangat berarti bagi perluasan pendidikan Barat di Indonesia.

Perkembangan pendidikan Baarata sebagai buah dari intervensi budaya dan politik pemerintah Hindia Belanda dalam paruh pertama abad ke-20 ternyata terpengaruh pula terhadap pembentukan format madrasah. Gerakan internal pembaruan Islam sudah barang tentu merupakan variabel penting dalam pembentukan format madrasah. Ada dua kecenderungan yang dapat diidentifikasi.

Pertama, madrasah-madrasah *diniyah salafiyah* terus tumbuh dan berkembang dengan pertambahan jumlah maupun dengan penguatan kualitas sebagai lembaga *tafaguh fid-din*, yakni lembaga untuk (sematamata) mendalami agama.

Kedua, makin bermunculan madrasah-madrasah yang selain mengajarkan dan pendidikan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai Islam, juga memasukkan pelajaran-pelajaran yang diajarkan di sekolah-sekolah yang diselenggarakan pemerintah Hindia Belanda, seperti madrasah Adabiyah di Sumatera Barat, dan madrasah yang diselenggarakan oleh Muhammadiyah, pesantren Islam, PUI dan Nahdlatul Ulama. Bahkan menarik, ada pula madrasah yang sudah memasukkan ke dalam kegiatan kurikulumnya upaya membangun ekonomi kerakyatan di lingkungan umat Islam, seperti dilakukan oleh PUI di Majalengka. Pola-pola madrasah ini dapat ditemui sampai sekarang. Perubahan-perubahan mungkin sekali dialami oleh madrasah karena tuntutan penyesuaian maupun *reinvention* (penemuan kembali).

Realitas Dewasa Ini

Bagaimana realitas madrasah ini dalam kurun Indonesia merdeka, setelah negeri ini melewati ulang tahun emas? Semuanya mengetahui bahwa madrasah merupakan realitas pendidikan yang merampung aspirasi sosial-budaya-agama penduduk Indonesia yang memeluk agama Islam, yang secara kultural berakar kuat pada kelompok masyarakat yang disebut santri. Madrasah menjatuhkan pilihannya pada madrasah bagi wahana pendidikan putra-putrinya tentu dengan dorongan yang berbeda-beda. Akan tetapi,

secara umum dan kolektif, dorongan-dorongan tersebut, mencerminkan komitmen keagamaan yang kuat. Bisa terjadi mereka terpenggik oleh seruan *hendaklah ada di antara kamu sebagai yang terpenggil untuk mendalami agama (QS.Al-Taubah[9]:122)*.

Konsekuensi dan kemerdekaan ialah tuntutan dan kewajiban akan perlunya pengaturan pendidikan melalui birokrasi pemerintahan. Suatu realitas pula bahwa kemerdekaan melahirkan Kementerian (sekarang bernama departemen) yang mengurus pendidikan. secara birokratik, madrasah-madrasah berada di bawah naungan Kementerian dan Departemen Agama. sementara sekolah-sekolah pada umumnya berada di bawah naungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Pengaturan dua polaa pendidikan dalam naungan departemen itu memang secara kuat mengesankan kebijakan pendidikan yang dualistis yang dibidani oleh pemerintah kolonial Belanda di Indonesia. kesan itu tentu tidak keliru. Namun harus diingat bahwa dua pola pendidikan tadi menjadi keseluruhan elemen dari bangunan sistem pendidikan nasional.

Sungguhpun madrasah-madrasah lebih dinisbahkan sebagai lembaga pendidikan swadaya masyarakat (sebagaimana terlihat dari kenyataan terbesar berstatus swata), keterpenggilannya berperan serta melaksanakan gerakan wajib belajar cukup besar dan spontan. Patut dicatat, misalnya, ketika pemerintah melontarkan gerakan wajib belajar pada 1950-1960-an, tumbuh secara spontan MWB (madrasah wajib belajar). Cukup menarik bahwa seluruh MWB itu terletak di pedesaan. Oleh karena secara konseptual-teoritis maupun praktis, isu pembangunan masyarakat pedesaan (*rural development*) menjadi salah satu “cover issues”. Pada 1960-an telah muncul rancangan dan usaha-usaha implementasi agar MWWB menjadi salah satu lembaga yang bisa memerankan pembangunan pedesaan.

Untuk memenuhi tuntutan ini, jangka waktu belajar ditetapkan delapan tahun. kelas I hingga VI diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan wajib belajar enam tahun (sekarang wajib belajar hingga sembilan tahun). sedangkan yang dua tahun lagi, yakni kelas VII dan VIII, dimaksudkan sebagai kelas kemasyarakatan. Di kelas kemasya rakatan para siswa diberi pengetahuan, watak, dan keterampilan yang menjadikan mereka siap terjun di masyarakat. Guna memenuhi tenaga guru di MWB-MWB tadi, didirikanlah pusat pelatihan Guru Madrasah Wajib Belajar(TCGMWB) di Pacet, Cianjur, Jawa Barat. Pusat pelatihan itu bersifat nasional. Peserta pelatihan adalah para tamatan PGAA (Pendidikan Guru Agama Atas) di seluruh Indonesia. kurikulum pelatihan mencakup pertanian, peternakan, perikanan, kerajinan dan koperasi. Ada pula pendidikan olahraga dan agama.

Madrasah dewasa ini berdiri secara berdampingan dengan sistem persekolahan yang lain. Sebagian besar organisasi madrasah disusun serupa dengan organisasi persekolahan. Secara bertingkat ada madrasah ibtidaiyah atau MI; ada madrasah tsanawiyah atau MTs; ada madrasah aliyah atau MA. Madrasah-madrasah itu tingkat kesederajatannya sama dengan SD, SLTP, dan SMU. Komposisi mata pelajaran di madrasah mencakup komponen-komponen mata pelajaran agama, seperti al-Qur'an, hadis, fiqih, akidah dan akhlak, sejarah kebudayaan Islam. Serta bahasa Aarab. Komponen-komponen mata pelajaran ilmu sosial mencakup geografi, sejarah, pendidikan moral pancasila, sosiologi, dan antropologi. Komponen-komponen mata pelajaran eksakta mencakup ilmu pengetahuan alam, kimia, fisika, biologi, dan matematika. Selain itu, ada pula mata pelajaran seperti pendidikan olahraga dan kesehatan, kesenian, bahasa (Indonesia maupun Inggris), dan keterampilan.

Madrasah-madrasah yang menyelenggarakan pendidikan serupa ini jumlahnya sekitar 36.000, dan 96% lebih dari jumlah itu merupakan madrasah awasta. Diakui bahwa pertumbuhan dan perkembangan sekolah yang berada dalam wilayah supervisi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (serta Departemen Dalam Negeri) dalam masa 50 tahun Indonesia merdeka cukup menggembirakan. Cukup menarik bahwa pertumbuhan itu dibarengi dengan makin banyak berdiri madrasah-madrasah yang keseluruhan mata pelajarannya adalah mata pelajaran agama. dapat dipahami bahwa pertumbuhan madrasah-madrasah *diniyah*, yang saat ini jumlahnya berkisar 22.000, mengekspresikan tuntutan aspirasi masyarakat agar putra-putri mereka mengenyam pelajaran dan pendidikan agama lebih banyak. mereka umumnya merasa bahwa pelajaran dan pendidikan agama di sekolah-sekolah umum tempat putra-putri mereka belajar belum cukup. Realitas lain yang tidak bisa diabaikan adalah banyaknya penyelenggaraan MI, MTs, dan MA yang berada dalam naungan pesantren atau pondok pesantren.

Madrasah-madrasah serupa ini menciptakan satu mekanisme tersendiri guna menutupi kekurangan pelajaran dan pendidikan agama dalam kurikulum madrasah. Seperti sering terlontar di tengah-tengah masyarakat, kurikulum madrasah sekarang ini sangat memungkinkan para siswanya mendapat ilmu pengetahuan agama yang jauh dari memadai serta pemahaman dan penghayatan Islam yang dangkal. Madrasah yang berbeda dalam naungan pondok pesantren memberi kesempatan kepada para siswanya (santri) untuk menambah kekurangan ilmu pengetahuan agama melalui pengajian-pengajian kitaab diluar jam madrasah di bawah bimbingan para kiai dan ustad.

Dengan tinggal di pondok pesantren, siswa madrasah dapat memperoleh bimbingan dan kesempatan menjalankan agama lebih intensif. Demikianlah, realitas madrasah menampilkan sosok beragam sebagai dampak diversifikasi pendidikan yang berlangsung di dalamnya.

Kebijakan Menyongsong Perubahan

“Mengawali” perjalanan madrasah selama masa Indonesia merdeka, sebegitu jauh Departemen Agama berusaha mengembangkan intervensi-intervensi terencana untuk menjadikan madrasah fungsional sebagai salah satu lembaga layanan pendidikan bagi penduduk Muslim Indonesia yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Ia harus memiliki kekuatan tawar-menawar kultural dan, dalam kadar tertentu, bisa bersifat politis. Sekurang-kurangnya untuk melahirkan kebijakan madrasah perlu diakomodasikan berbagai kepentingan masyarakat.

Apa pun perubahan-perubahan yang ingin disongsong, kebijakan, kebijakan mengembangkan madrasah perlu mengakomodasi tiga kepentingan. Kepentingan pertama adalah bagaimana kebijakan itu pada dasarnya harus memberi ruang tumbuh yang wajar bagi aspirasi utama umat Islam. Yakni, menjadikan madrasah sebagai wahana untuk membina ruh atau praktik hidup keislaman. Dengan jargon santri dapat kita katakan bahwa madrasah didirikan untuk menanamkan dan menumbuhkan akidah putra-putri umat dan bangsa. Lebih dari itu diharapkan agar madrasah dapat melahirkan golongan terpelajar yang bisa menjalankan peran *tafaguh fid-din*.

Kepentingan kedua adalah bagaimana kebijakan itu memperjelas dan memperkuat keberadaan madrasah sebagai ajang membina warga negara yang cerdas, berpengetahuan, berkepribadian, serta produktif, sederajat dengan sistem sekolah. Porsi dari kebijakan ini tidak lain agar pendidikan madrasah sanggup mengantarkan peserta didik memiliki penguasaan pengetahuan dan kemampuan dasar dalam bidang bahasa, matematika, fisika, kimia, biologi, ilmu pengetahuan sosial dan pengetahuan kewarganegaraan. Madrasah juga merupakan tempat persamaian yang baik untuk menumbuhkan kreativitas seni, serta juga sebagai tempat berlatih dalam mengembangkan keterampilan bekerja.

Kepentingan ketiga adalah bagaimana kebijakan itu bisa menjadikan madrasah dapat merespons tuntutan-tuntutan masa depan. Untuk ini madrasah perlu diarahkan kepada lembaga yang sanggup melahirkan sumber daya manusia yang memiliki kesiapan memasuki era globalisasi, era industrialisasi, ataupun era informasi. Secara kultural tugas ini bisa sangat

menegangkan sebab tuntutan masa depan terkadang mengancam segmen dasar institusi yang memiliki kepentingan keagamaan.

Membangun Harapan

Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional telah digulirkan dan peraturan-peraturan pemerintah yang mengatur keberadaan madrasah telah diterbitkan. Berdasarkan ketentuan perundangan ini maka madrasah, sejak dari tingkat ibtidaiyah sampai dengan tingkat aliyah, ditempatkan dalam kedudukan yang sama dengan sekolah-sekolah umum. Perbedaan terletak pada ciri khas Islam yang dikenalkan kepada sistem madrasah. Ini tentu lebih mengukuhkan filosofis untuk mengakomodasikan kepentingan keagamaan dengan kepentingan kewarganegaraan.

Secara sah kita dapat menggantungkan harapan agar putra-putri bangsa “yang menjadi pusat *input* madrasah” diolah menjadi sumber daya manusia yang memiliki penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi secara memadai, serta memiliki daya kreativitas yang tinggi pula. Pada gilirannya diharapkan kaum terpelajar keluaran madrasah ini sanggup menjadi sumber daya manusia Indonesia yang bisa merespons masa depannya secara tepat.



BAB VI

PEMBAHARUAN PENDIDIKAN ISLAM DALAM TINJAUAN MUHAIMIN

Biografi dan karir intelektual Muhaimin

Prof. Dr. H. Muhaimin, M.A., atau biasa dikenal dengan Muhaimin dilahirkan di Lumajang pada 11 Desember 1956. Muhaimin merupakan putra dari pasangan H. Soelchan (alm.) dan Hj. Chotimah (alm.). Selama masa hidupnya, Muhaimin beralamat di Jalan Joyo Raharjo No. 150 Malang. Beliau juga tidak pernah bosan untuk selalu menambah pengalaman dan keilmuannya. Dalam hal ini, beliau merupakan dosen tetap sekaligus Guru Besar Bidang Ilmu Pendidikan Agama di Universitas Islam Negeri (UIN) Malang.

Perjalanan karirnya dalam menempuh guru besar tidak lepas dari pendidikan yang ditempuhnya mulai dari Madrasah Ibtidayah Nurul Islam Lumajang (1969), PGAN 4 Tahun (1973), PGAN 6 Tahun Lumajang (1975), Sarjana Muda/ S1 Jurusan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel di Malang (1976-1982), S2 di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1987-1989), dan S3 di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Muhaimin sering mengikuti beberapa kegiatan, antara lain *School Manajement Training* di Kanada bulan Oktober sampai dengan Desember pada tahun 2000, *Short Course* di Iran bulan September pada tahun 2003, Kunjungan kerja ke Sudan, Qatar dan Mesir bulan Januari sampai Februari pada tahun 2004, 2 kali Sandwich Program di Malaysia pada tahun 2004 dan 2005, serta pernah menjadi Narasumber pada seminar pendidikan Islam di Riyadh Saudi Arabia sekaligus mengadakan penyuluhan pendidikan pada sekolah-sekolah Indonesia di Jeddah, Mekah dan Riyadh pada bulan Mei tahun 2005.

Muhaimin merupakan sosok yang banyak berkontribusi untuk pendidikan agama Islam di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan beberapa kegiatan yang ia ikuti, seperti anggota Majelis Pertimbangan Pendidikan dan Pengajaran Agama Islam di Jawa Timur, menjadi Konsultan dan Pelatih Pengembangan Kurikulum Pendidikan TK/RA, Madrasah (MI, MTs, MA) dan Madrasah Diniyah, Tim Pengembangan Kurikulum PTAI Ditpertaids Depag RI, Pelatih Pengawas PAI dan Kepala Madrasah Kanwil Depag di Jatim, Konsultan Penulisan Buku Paket PAI SMP pada MGMP PAI Kotamadya Malang,

Selain itu, Muhaimin juga merupakan anggota Tim Pakar Penyusunan Kurikulum Berbasis Kompetensi PAI Madrasah Dimapendais Depag Pusat, Pelatih Pengembangan Madrasah di Kanwil Depan Provinsi Bali, Instruktur dan Pelatih pada Diklat Kanwil Depan Jawa Timur, Tim Asesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), Asesor Akreditasi Program Studi maupun Asesor Akreditasi Institusi sekaligus Direktur Lembaga Konsultasi Pengembangan Pendidikan Islam (LKP2-I) di Malang, Konsultan Pengembangan Madrasah Terpadu di Lumajang dan banyak lagi.

Muhaimin juga aktif dalam menulis buku, melakukan berbagai penelitian, menjadi narasumber di berbagai seminar mulai dari lokal, nasional hingga internasional dan workshop, serta beberapa kegiatan pelatihan, dan menulis artikel di beberapa majalah dan surat kabar. Buku-bukunya yang sudah diterbitkan, antara lain:

1. *Problematika Agama dalam Kehidupan Manusia*, diterbitkan oleh Kalam Mulia di Jakarta pada tahun 1989;
2. *Konsep Pendidikan Islam (Sebuah Telaah Komponen Dasar Kurikulum)*, diterbitkan oleh Ramadhani di Solo pada tahun 1991;
3. *Belajar sebagai sarana Pengembangan Fitrah Manusia*, diterbitkan oleh Kalam Mulia di Jakarta pada tahun 1991;
4. *Pengenalan Kurikulum Madrasah*, diterbitkan oleh Ramadhani di Solo pada tahun 1992;
5. *Pemikiran Pendidikan Islam (Kajian Filosofik dan Kerangka Dasar Operasionalnya)*, diterbitkan oleh Trigenda Karya di Bandung pada tahun 1993;
6. *Bekal para Juru Dak wah Masa Kini*, diterbitkan oleh Trigenda Karya di Bandung pada tahun 1994;
7. *Dimensi-dimensi Studi Islam*, diterbitkan oleh Karya Abditama di Surabaya pada tahun 1995;
8. *Strategi Belajar Mengajar (Penerapannya dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam)*, diterbitkan oleh Citra Media di Surabaya pada tahun 1996;

9. *Dasar-dasar Kependidikan Islam (Suatu Pengantar Ilmu Pendidikan Islam)*, diterbitkan oleh Karya Abditama di Surabaya pada tahun 1996;
10. *Tema-tema Pokok Dakwah Islam di Tengah Transformasi Sosial*, diterbitkan oleh Karya Abditama di Surabaya pada tahun 1998;
11. *Paradigma Pendidikan Islam Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama di Sekolah*, diterbitkan oleh Remaja Rosdakarya di Bandung pada tahun 2001 (Cet. I) dan 2002 (Cet. II);
12. *Wacana Pengembangan Pendidikan Agama Islam*, diterbitkan oleh Pustaka Pelajar di Yogyakarta pada tahun 2003 (Cet. I) dan 2004 (Cet. II);
13. *Arah Baru Pengembangan Pendidikan Agama Islam, Pemberdayaan, Pengembangan Kurikulum Hingga Islamisasi Pengetahuan*, diterbitkan oleh Nuansa Cendikia di Bandung pada tahun 2003;
14. *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi*, diterbitkan oleh RajaGrafindo Persada di Jakarta pada tahun 2005;
15. *Pengembangan Kurikulum di PTAI*, diterbitkan oleh Pustaka Pelajar di Yogyakarta pada tahun 2005;
16. *Kawasan dan Wawasan Studi Islam*, diterbitkan oleh Prenada di Jakarta pada tahun 2005;
17. *Manajemen Penjaminan Mutu di UIN Malang*, diterbitkan oleh UIN di Malang pada tahun 2005;
18. *Nuansa Baru Pendidikan Islam Mengurai Benang Kusut Pendidikan*, diterbitkan oleh RajaGrafindo Persada di Jakarta pada tahun 2006;
19. *Pedoman dan Implementasi Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) untuk Madrasah Ibtidaiyah (MI)*, diterbitkan oleh Kanwil Depag Jatim di Surabaya pada tahun 2007;
20. *Pedoman dan Implementasi Pengembangan kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) untuk Madrasah Tsanawiyahh (MTS)*, diterbitkan oleh Kanwil Depag Jatim di Surabaya pada tahun 2007;
21. *Pedoman dan Implementasi Pengembangan kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) untuk Madrasah Aliyah (MA)*, diterbitkan oleh Kanwil Depag Jatim di Surabaya pada tahun 2007;
22. *Pedoman dan Implementasi Pengembangan kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) pada Sekolah dan Madrasah*, diterbitkan oleh RajaGrafindo Persada di Jakarta pada tahun 2008;
23. *Model Pengembangan Rencana kerja Madrasah, Serial Manajemen Pendidikan Agama Islam*, diterbitkan oleh Kantor Wilayah Departemen Agama Jawa Timur bekerjasama dengan Lembaga Konsultasi Dan

Pengembangan Pendidikan Agama Islam (LKP2-I) Malang di Surabaya pada tahun 2007;

24. *Rekonstruksi Pendidikan Islam dari Paradigma Pengembangan hingga Manajemen Kelembagaan, Kurikulum, dan Strategi Pembelajaran*, diterbitkan oleh RajaGrafindo Persada di Jakarta pada tahun 2009;
25. *Manajemen Pendidikan: Aplikasinya dalam Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah/ Madrasah*, diterbitkan oleh Prenada Media di Jakarta pada tahun 2009;

Di samping kesibukannya tersebut, Muhaimin juga menulis buku-buku diktat perkuliahan yang dipublikasikan di kalangan mahasiswa, antara lain:

1. Kuliah Pengantrrar Ilmu Agama Islam;
2. Dirosah Islamiyah: Aspek Teologi;
3. Dirosah Islamiyah: Aspek Filsafat;
4. Manusia dan Pendidikan: Kajian tentang Belajar Menurut Konsep Islam;
5. Pergumulan Umat Islam di Pentas Sejarah: Seri Kuliah Sejarah Kebudayaan Islam;
6. Pemikiran Teologi Islam pada Periode Klasik;
7. Modul Ulum al-Hadits;
8. Strategi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam;
9. Bekal Pendidik Agama Islam Luar Sekolah;
10. Pengembangan Pendidikan Islam: Menggagas Format Pendidikan Islam di Masa Depan;
11. Problematika Pendidikan Islam;
12. Lima Belas Isu Penting dalam Pengembangan Pendidikan Islam;
13. Esei-esei Pemikiran Pengembangan Pendidikan Islam.

Selama ini Pendidikan Agama Islam (PAI) sekaligus guru PAI di sekolah dianggap kurang berhasil dalam menggarap sikap dan perilaku keberagaman peserta didik serta membangun moral dan etika bangsa. Dunia pendidikan Indonesia seringkali memperlihatkan fenomena yang kurang membanggakan. Pada hakikatnya, hampir tidak ada guru yang tidak menginginkan kesuksesan anak didiknya. Pendidikan yang benar dapat mendorong guru untuk selalu memberikan perhatian kepada persoalan yang dialami oleh anak didik. Akan tetapi, banyaknya kejadian di kalangan anak sekolah yang negatif membuat peran dan tugas guru dipertanyakan. Hal ini bisa dilihat dari tawuran yang sering terjadi dikalangan pelajar, perbuatan asusila yang dilakukan kaum terpelajar dan cendikiawan, hal itu berdampak pada penilaian yang kurang baik terhadap pendidikan.

Sebagai indikator-indikatornya, yakni *pertama*, membudayanya ketidakjujuran dan rasa tidak hormat anak kepada orang tua dan guru di kalangan anak dan remaja. *Kedua*, semakin maraknya anak-anak dan remaja yang gemar melihat konten dewasa yang tersebar luas di dunia maya. *Ketiga*, semakin maraknya pacaran yang melebihi batasan norma agama dan bahkan melakukan hubungan seksual di luar nikah. *Keempat*, meningkatnya tindak kekerasan dan pertengkaran di kalangan remaja. *Kelima*, lalai terhadap kewajiban agama. *Keenam*, semakin maraknya anak-anak dan kalangan remaja yang terjerumus dalam narkoba. *Ketujuh*, menurunnya semangat belajar, etos kerja, kedisiplinan dan kecenderungan untuk memperoleh hidup tanpa kerja keras. *Kedelapan*, munculnya sifat apatis terhadap kalangan sekitarnya.

Krisis pendidikan Islam yang sedang terjadi belakangan ini menurut Suwendi (2004), disebabkan karena beberapa hal, yakni krisis nilai, krisis konsep tentang kesepakatan arti hidup yang baik masyarakat mengalami, adanya kesenjangan kredibilitas, beban institusi sekolah terlalu besar sehingga melebihi kemampuannya, kurangnya relevansi program pendidikan di sekolah dengan kebutuhan, kurangnya idealisme dan citra remaja tentang perannya di masa depan, serta makin membesarnya kesenjangan antara si miskin dan si kaya.

Banyaknya permasalahan mengenai pendidikan di Indonesia tidak hanya menurunkan semangat dari para guru dan calon guru, akan tetapi juga semangat belajar dari para muridnya. Kondisi yang demikian membuat banyak pakar pendidikan di Indonesia memikirkan bagaimana cara mengembangkan pendidikan di Indonesia khususnya pendidikan Islam. Salah satu pakar pendidikan Islam di Indonesia adalah Prof. Dr. H. Muhaimin, MA. Dalam hal ini, beliau berfokus membahas mengenai bagaimana mengembangkan pendidikan Islam di Indonesia.

Kurikulum Pendidikan Agama Islam menurut Muhaimin

Secara harfiah kurikulum berasal dari bahasa Latin, *curriculum* yang berarti bahan pengajaran. Ada pula yang mengatakan bahwa kata tersebut berasal dari bahasa Perancis *courier* yang berarti berlari. Dalam Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, kata “kurikulum” berarti; perangkat mata pelajaran yang diberikan pada lembaga pendidikan, atau perangkat mata kuliah bidang khusus. Selain itu, pendidikan Islam juga menggunakan kata manhaj dalam menyebutkan istilah kurikulum yang diartikan sebagai rencana pengajaran, jalan yang terang, atau jalan yang dilalui oleh manusia pada berbagai bidang kehidupannya.

Menurut Muhaimin, pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam dapat diartikan dalam tiga perspektif, kegiatan yang menghasilkan kurikulum pendidikan agama Islam, proses yang mengaitkan satu komponen dengan komponen yang lainnya untuk menghasilkan kurikulum pendidikan agama Islam yang lebih baik, dan/atau kegiatan penyusunan (desain), pelaksanaan, penilaian, dan penyempurnaan kurikulum pendidikan agama Islam.

Dalam realitas sejarahnya, pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam (PAI), tersebut ternyata mengalami perubahan-perubahan paradigma, walaupun dalam beberapa hal tertentu paradigma sebelumnya masih tetap dipertahankan hingga sekarang. Hal ini dapat dicermati dari fenomena berikut:

1. Perubahan dari tekanan hafalan dan daya ingatan tentang teks-teks dari ajaran-ajaran agama Islam, serta disiplin mental spiritual sebagaimana pengaruh dari Timur Tengah, kepada pemahaman tujuan, makna dan motivasi beragama Islam untuk mencapai tujuan pembelajaran PAI;
2. Perubahan dari cara berpikir tekstual, normatif dan absolutis kepada cara berpikir historis, empiris dan kontekstual dalam memahami dan menjelaskan ajaran dan nilai-nilai agama Islam;
3. Perubahan dari tekanan pada produk atau hasil pemikiran keagamaan Islam dari para pendahulunya kepada proses atau metodologinya sehingga menghasilkan produk tersebut;
4. Perubahan dari pola pengembangan kurikulum PAI yang hanya mengandalkan pada para pakar dalam memilih dan menyusun isi kurikulum PAI ke arah keterlibatan yang luas dari para pakar, guru, peserta didik, masyarakat untuk mengidentifikasi tujuan PAI dan cara-cara mencapainya.

Dalam menyusun pengembangan kurikulum didahului oleh ide-ide yang akan dituangkan dan dikembangkan dalam program. Ide kurikulum tersebut bisa bersumber dari:

1. Visi yang dicanangkan. Visi adalah *the statment of ideas or hopes*, yakni pernyataan tentang cita-cita atau harapan-harapan yang ingin di capai oleh suatu lembaga pendidikan dalam jangka panjang;
2. Kebutuhan *stakeholders* (siswa, masyarakat, pengguna lulusan), dan kebutuhan untuk studi lanjut;
3. Hasil evaluasi kurikulum sebelumnya dan tuntutan perkembangan ipteks dan zaman;
4. Pandangan-pandangan para pakar dengan berbagai latar belakangnya;
5. Kecenderungan era globalisasi, yang menuntut seseorang untuk memiliki etos belajar sepanjang hayat, melek sosial, ekonomi, politik, budaya dan teknologi.

Kelima ide tersebut kemudian diramu sedemikian rupa untuk dikembangkan dalam program atau kurikulum sebagai dokumen, yang antara lain berisi informasi dan jenis dokumen yang akan dihasilkan. bentuk/format silabus; dan komponen-komponen kurikulum yang harus dikembangkan. Apa yang tertuang dalam dokumen tersebut kemudian dikembangkan dan disosialisasikan dalam pelaksanaannya, yang dapat berupa pengembangan kurikulum dalam bentuk satuan acara pembelajaran atau SAP, proses pembelajaran dikelas atau diluar kelas, serta evaluasi pembelajaran, sehingga diketahui tingkat efisiensi dan efektivitasnya. Dari evaluasi ini akan memperoleh (*feed back*) untuk digunakan dalam penyempurnaan kurikulum berikutnya.

Secara sepintas, model pengembangan kurikulum Muhaimin ini menginternalisasi nilai-nilai paradigma integrasi-interkoneksi dalam praktik pembelajarannya, yang pada ujungnya menghendaki ketiadaan dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum. Selain itu, yang menjadi *positive point* untuk gagasan pengembangan kurikulum versi Muhaimin ini adalah terdapat perpaduan beberapa unsur kecerdasan, sehingga lebih dapat menjawab kebutuhan output peserta didik.

Pembaharuan Pendidikan Islam perspektif Muhaimin

Pemikiran pembaharuan pendidikan Islam yang dimaksud oleh Muhaimin mengajak seseorang untuk berpikir analitis-kritis, kreatif dan inovatif dalam menghadapi berbagai praktik dan isu aktual di bidang pendidikan. Dalam hal ini, pemikiran tentang pembaharuan pendidikan Islam bermuara pada tiga permasalahan pokok, yakni:

1. *Foundational Problems* (masalah-masalah pondasi)

Foundational Problems merupakan masalah-masalah pondasi pendidikan Islam. Permasalahan pondasi terdiri dari *religious foundation* (pondasi agama), *philosophic foundational problem* (permasalahan pondasi filosofis), pondasi yuridis atau hukum, *empiric/ scientific foundational problem* (terdiri dari pondasi historis, sosiologis, psikologis, antropologis, ekonomi dan politik). Jika dijelaskan lebih terperinci, permasalahan pondasi yang dimaksud, yakni:

- a. Normatif-Teologis (pondasi religius), yakni ajaran dan nilai-nilai Islam yang diyakini sebagai kebenaran dan kebaikan, sehingga harus dijadikan pegangan secara kokoh, dilestarikan serta diwariskan kemudian dikembangkan melalui sistem pendidikan Islam;

- b. Filosofis (pondasi filosofis), yakni ada sesuatu dalam pendidikan Islam yang harus dipikirkan dan direnungkan secara mendalam, radikal, universal sehingga melahirkan keputusan yang bijaksana dalam penyelenggaraan sistem pendidikan Islam;
 - c. Psikologis (pondasi psikologis), yakni manusia sebagai individu memiliki potensi, karakteristik kejiwaan yang berbeda-beda dari segi kelemahan dan kelebihan masing-masing. Pondasi ini berperan untuk membantu setiap individu menonjolkan kelebihanannya;
 - d. Historis (pondasi sejarah), yakni pendidikan adalah masalah hidup dan kehidupan yang berada dalam proses sejarah, ruang dan waktu yang penuh dengan peristiwa dan tantangan yang selalu berjalan dan berubah selaras dengan perkembangan zaman;
 - e. Sosiologis (pondasi sosial), yakni setiap individu memiliki ketergantungan terhadap individu lainnya, kelompoknya, masyarakatnya, sehingga saling mempengaruhi satu sama lain;
 - f. Politik (pondasi politik), yakni kehidupan seseorang berada dalam sistem pemerintahan dan kekuasaan tertentu sehingga sistem dan corak politik ikut andil dalam mengatur sistem pendidikan;
 - g. Ekonomi (pondasi ekonomi), yakni pendidikan dipandang sebagai salah satu sarana untuk menyiapkan manusia atau tenaga kerja yang produktif dan siap pakai (jasanya) oleh masyarakat.
2. *Structural Problems* (masalah-masalah struktur)
Structural Problems merupakan masalah-masalah struktural pendidikan Islam. Permasalahan struktur terdiri dari:
- a. Struktur demografis dan geografis bisa dikategorikan ke dalam kota, pinggiran kota, desa dan desa terpencil;
 - b. Struktur perkembangan jiwa manusia bisa dikategorikan ke dalam masa kanak-kanak, remaja, dewasa dan manula;
 - c. Struktur ekonomi bisa dikategorikan ke dalam kaya, menengah dan miskin;
 - d. Struktur rumah tangga bisa dikategorikan ke dalam rumah tangga karir dan non karir;
 - e. Struktur jenjang pendidikan bisa dikategorikan ke dalam pendidikan dasar, menengah, pendidikan tinggi dan seterusnya.
3. *Operational Problems* (masalah-masalah operasional)
Operational Problems merupakan masalah-masalah operasional pendidikan Islam. Permasalahan operasional terdiri dari:

- a. Operasional mikro, yakni permasalahan mengenai keterkaitan faktor/ unsur/ komponen dalam pendidikan Islam. Misalnya, hubungan interaktif lima faktor pendidikan, yaitu tujuan pendidik dan tenaga kerja pendidikan, peserta didik, alat-alat pendidikan Islam dan lingkungan pendidikan;
- b. Operasional makro, yakni permasalahan mengenai keterkaitan pendidikan Islam dengan sistem di luar pendidikan Islam seperti sistem sosial, politik, ekonomi, budaya dan agama baik secara nasional maupun transnasional.

Selanjutnya, pembaharuan pendidikan Islam dalam pemikiran Muhaimin, memerlukan pemahaman berbagai disiplin ilmu. Dalam hal ini, Muhaimin memberikan beberapa pendekatan, antara lain:

1. Pendekatan multidisiplin, yakni pendekatan yang berupaya untuk berkonsultasi kepada ahli-ahli agama, sosiologi, psikologi, antropologi, politik, ekonomi dan sebagainya;
2. Pendekatan interdisipliner, yakni pendekatan yang berupaya untuk menghasilkan model pendidikan Islam dengan cara bekerja sama dengan sejumlah ahli dari beragam keahlian dan spesialisasi;
3. Pendekatan sistemik, yakni pendekatan yang berupaya untuk bekerja dengan cara mengolah ilmu yang bertolakbelakang dari asumsi (makna waktu, urutan kerja dan hasil).

Kemudian, pemikiran pembaharuan pendidikan Islam yang dimaksud oleh Muhaimin pendidikan dan berdasarkan persoalan hidup yang pada dasarnya merupakan salah satu tahapan dalam membentuk kepribadian. Paradigma yang dibangun oleh Muhaimin terbagi menjadi beberapa paradigma, antara lain:

4. Paradigma dari sisi historis-sosiologis
Dilihat dari sisi historis-sosiologis, setidaknya telah muncul beberapa paradigma pengembangan pendidikan Islam, antara lain:
 - a. Paradigma formisme atau dikotomis, yakni paradigma yang memandang aspek kehidupan dengan sangat sederhana. Segala sesuatu hanya dilihat dari dua sisi yang berlawanan, seperti laki-laki dan perempuan, ada dan tidak ada, bulat dan tidak bulat, dan seterusnya;
 - b. Paradigma mekanisme, yakni paradigma yang memandang kehidupan dari berbagai aspek pendidikan. Pendidikan dipandang sebagai penanaman dan pengembangan seperangkat nilai kehidupan yang masing-masing bergerak dan berjalan menurut fungsinya;

- c. Paradigma organisme, yakni paradigma yang memandang pendidikan Islam adalah kesatuan atau sebagai sistem yang berusaha mengembangkan pandangan Islam dan dimanifestasikan dalam sikap hidup serta keterampilan hidup yang Islami.
5. Paradigma dari sisi kepedulian
- Dilihat dari sisi kepedulian, setidaknya telah muncul beberapa paradigma pengembangan pendidikan Islam, antara lain:
- a. Paradigma ortodoksi, yakni memandang ajaran dan nilai Islam sebagai produk pemikiran Ulama terdahulu sebagai kriteria utama dalam membangun sistem pendidikan Islam dengan tetap mengacu pada pemikiran dan pengalaman generasi terdahulu;
 - b. Paradigma Islamisasi, yakni memandang pemikiran dan pandangan non-Muslim di bidang pendidikan sebagai ancaman yang sangat dominan dan orang-orang Islam harus melindungi kepercayaannya;
 - c. Paradigma modernisasi Islam, yakni memandang umat Islam semakin mundur dan berada dalam keterbelakangan. Hal ini, disebabkan oleh kepicikan, berpikir, kebodohan dan ketertutupan dalam memahami ajaran agamanya sendiri, sehingga sistem pendidikan Islam tertinggal terhadap kemajuan yang dicapai Barat atau dunia luar.

Dalam hal ini, juga dikenal dengan adanya dua pola pembaharuan, yaitu pola pemikiran yang bersifat tradisional dan rasional. Pola pemikiran tradisional memberikan ruang yang sempit bagi peranan akal dan peluang yang luas. Sedangkan pola pemikiran rasional merupakan kebalikannya, yakni memberikan tempat yang luas bagi peranan akal dan peluang yang sempit. Kemudian, Muhaimin membagi pemikiran Islam menjadi beberapa model, antara lain:

1. Tekstualis Salafi, yakni model pemikiran Islam yang berupaya untuk memahami ajaran-ajaran dan nilai-nilai mendasar yang terkandung di dalam al-Quran dan al-Sunnah dengan kurang mempertimbangkan situasi konkret dari dinamika masyarakat Muslim. Hal ini menunjukkan bahwa model tekstualis salafi lebih bersikap regresif (kemunduran) dan konservatif (tidak menginginkan adanya perubahan);
2. Tradisionalis Mazhabi, yakni model pemikiran Islam yang berupaya untuk memahami ajaran-ajaran dan nilai-nilai mendasar yang terkandung di dalam al-Quran dan al-Sunnah melalui bantuan khazanah pemikiran Islam klasik. Hasil pemikiran ulama terdahulu dianggap sudah pasti

tanpa mempertimbangkan situasi sosio-historis masyarakat setempat dimana ia berada;

3. Modernis, yakni model pemikiran Islam yang berupaya untuk memahami ajaran-ajaran dan nilai-nilai mendasar yang terkandung di dalam al-Quran dan al-Sunnah dengan hanya semata-mata mempertimbangkan kondisi dan tantangan sosio-historis dan kultural yang dihadapi oleh masyarakat Muslim kontemporer, tanpa mempertimbangkan khazanah intelektual Muslim era klasik;
4. Neo-Modernis, yakni model pemikiran Islam yang berupaya untuk memahami ajaran-ajaran dan nilai-nilai mendasar yang terkandung di dalam al-Quran dan al-Sunnah dengan mengikutsertakan dan mempertimbangkan khazanah intelektual Muslim klasik serta mencermati kesulitan-kesulitan dan kemudahan-kemudahan yang ditawarkan oleh dunia teknologi modern.

Berkaitan dengan pembaharuan pendidikan Islam, dalam hal ini Muhaimin memiliki peta kajian dalam mengembangkan pendidikan Islam. Peta kajian yang dimaksud sangat berkaitan erat dengan pengertian dari pendidikan Islam. Menurut Muhaimin, pembahasan mengenai pengertian dari pendidikan Islam terbagi menjadi dua, yakni:

1. Pendidikan Islam merupakan sistem pendidikan yang sengaja diselenggarakan atau didirikan dengan hasrat dan niat untuk menyebarluaskan ajaran dan nilai-nilai Islam;
2. Pendidikan Islam merupakan sistem pendidikan yang dikembangkan dari dan disemangati oleh ajaran dan nilai-nilai Islam.

Dari kedua pengertian tersebut, maka pengertian pertama lebih menekankan pada aspek kelembagaan dan program pendidikan Islam. Sedangkan pengertian kedua, lebih menekankan pada aspek spirit Islam yang melekat pada setiap aktivitas pendidikan. Namun, inti dari kedua pengertian tersebut pada dasarnya terletak pada substansi yang hendak mengembangkan spirit Islam dalam aktivitas pendidikan, baik dalam prosesnya, lembaganya, guru dan peserta didiknya, ataupun penciptaan lingkungannya. Peta kajian pengembangan pendidikan Islam menurut Muhaimin, jika dirumuskan dalam sebuah tabel, maka:

Jenis	Pendidikan Agama pada Satuan Pendidikan			Pendidikan Umum berciri Islam		Pendidikan Keagamaan Islam				
	Format	Non Format	Non Format tanpa jenjang	Format	Non Format	Diniyah			Pondok Pesantren	
						Format Berjenjang	Non Format tanpa Jenjang	Format	Non Format	Format
Tinggi	MK PAI PT		MP PAI pada kursus-kursus	PT Islam		PTKI	DT Aly	Majelis Taklim	Ma'had Aly	Ma'had Takhassus
Menengah	MP PAI SMA/LB SMK	MP PAI Paket C		MA, MA Kej.	Paket C	FDMA	DT Ulya	Pendidikan al-Quran, dll	Muadalah	Pengajian Kitab Ulya
Dasar	MP PAI, SD/LB, SMP/LB	MP PAI Paket A Paket B		MI, MTs	Paket A, Paket B, Waja Dikdas Salafiyah Ula dan Wustha	PDD, FDMP	DT Awaliyah, DT Wustha			Pengajian Kitab Ibtidai & Tsanawi
PAUD	MP PAI, TK	MP PAI		RA/BA			TKQ			

Tabel 6.1 Peta Kajian Pengembangan Pendidikan Islam

Pada tabel 6.1, Muhaemin menggambarkan apa yang menjadi perhatian dan wilayah kajian dari program studi pendidikan Islam

Jika melihat peta kajian pengembangan pendidikan Islam di atas, dengan rinci Muhaimin menggambarkan apa yang menjadi ranah kajian pengembangan pendidikan Islam. Dalam hal ini, peta kajian pengembangan pendidikan Islam tidak hanya berputar pada satu tingkatan pendidikan, akan tetapi Muhaimin membahas pendidikan Islam di tingkatan sekolah dasar (SD/MI), sekolah menengah pertama (SMP/MTs), sekolah menengah atas (SMA/MA/SMK) sampai dengan perguruan tinggi.

Tidak hanya itu, Muhaimin juga membahas pengembangan pendidikan Islam di lembaga non formal seperti halnya pesantren yang beraliran modern maupun pesantren yang beraliran klasik. Muhaimin dalam peta kajian ini berfokus dalam membahas pendidikan agama pada satuan pendidikan, pendidikan umum yang bercirikan Islam dan pendidikan keagamaan Islam. Dalam mewujudkan muslim yang diidealkan agama Islam, Muhaimin tidak hanya membatasi pendidikan hanya berada di ranah formal. Akan tetapi, bagaimana ilmu tersebut bisa diimplementasikan dalam kehidupan.

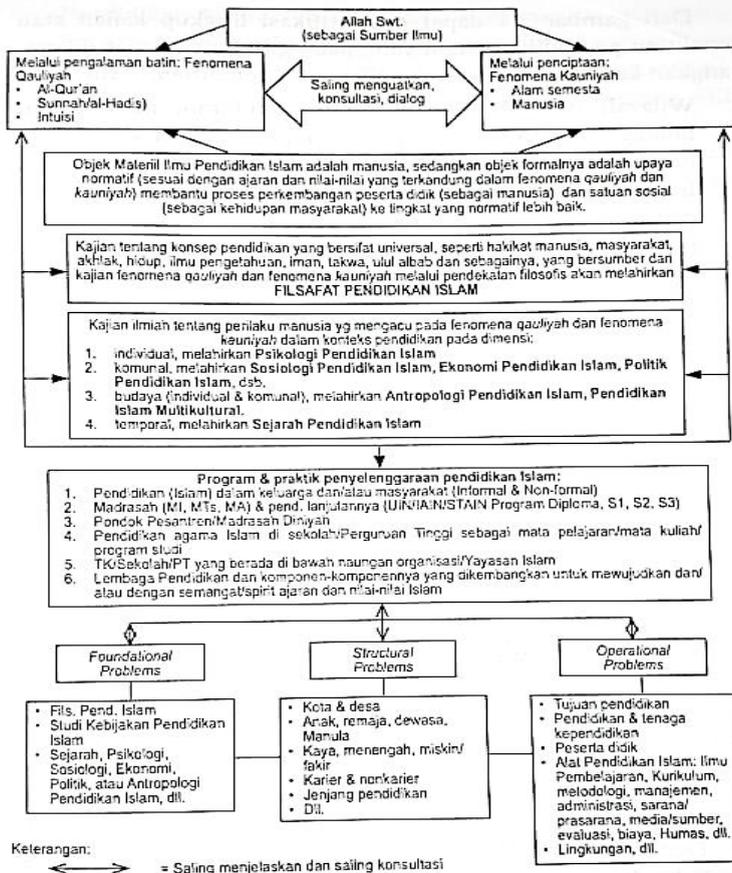
Pemikiran Muhaimin mengenai pengembangan pendidikan Islam, sangat kaya akan konsep dan gagasan yang baru. Tinggal bagaimana peran dari guru, calon guru, siswa, mahasiswa sampai dengan lembaga dapat memfasilitasi pemikiran tersebut. Pemikiran pengembangan pendidikan Islam tidak dapat bergerak sendiri, melainkan ada unsur-unsur yang mendorong dan mewujudkan pemikiran tersebut di ranah pendidikan. Pemikiran yang sangat menarik juga harus diimbangi dengan implementasi yang terus menerus hingga terciptanya lingkungan agama Islam yang ideal.

Selanjutnya Muhaimin juga menjelaskan pendidikan Islam jika dilihat dari asumsi filosofis. Pada hakikatnya, aktifitas ilmu digerakkan oleh pertanyaan yang didasarkan pada asumsi filosofis atau bisa disebut sebagai tiga masalah pokok. Asumsi filosofis terdiri dari *ontologi* (apakah yang ingin diketahui), *epistemologi* (bagaimana cara memperoleh pengetahuan) dan *aksiologi* (bagaimana penerapan nilai pengetahuan). Pengembangan pendidikan Islam menurut Muhaimin sangat berkaitan erat dengan asumsi filosofis.

Dari segi *ontologi*, objek kajian atau penelitian ilmu pendidikan Islam memiliki karakteristik tersendiri yang berasumsi bahwa sumber ilmu pengetahuan adalah Allah SWT. yang disampaikan melalui pengalaman batin Nabi Muhammad ﷺ. Dari kedua hal tersebut, dapat digali dan dikaji konsep-konsep pendidikan yang bersifat universal, sehingga melahirkan pemikiran-pemikiran filosofis dan asas-asas pendidikan Islam, yang kemudian diarahkan pada kegiatan penelitian ilmiah sehingga melahirkan

ilmu pendidikan Islam. *Ontologi* pendidikan Islam juga membahas beberapa hal di dalamnya, antara lain:

1. Permasalahan Pokok Kajian Pendidikan Islam, yakni permasalahan yang terdiri dari:
 - a. *Foundational problems*;
 - b. *Structural problems*;
 - c. *Operational problems*.
2. Kajian Ilmiah/ Empiris tentang Perilaku Manusia sebagai Individu dan Satuan Sosial, yakni kajian yang mengacu pada ajaran dan nilai-nilai yang terkandung dalam fenomena *qauliyah* dan *kauniyah*, pada beberapa dimensi, yakni:
 - a. Dimensi Individual yang melahirkan Psikologi Pendidikan Islam;
 - b. Dimensi Komunal yang melahirkan Sosiologi Pendidikan Islam, Ekonomi Pendidikan Islam, Politik Pendidikan Islam dan sebagainya;
 - c. Dimensi Budaya yang melahirkan Antropologi Pendidikan Islam, Pendidikan Islam Multikultural;
 - d. Dimensi Temporal yang melahirkan Sejarah Pendidikan Islam dan Psikologi Pendidikan Islam.
3. Kajian tentang Manusia dalam Konteks Lingkungan, yakni dimana pendidikan Islam itu diselenggarakan, antara lain:
 - a. Pendidikan (Islam) dalam keluarga;
 - b. Pendidikan (Islam) di sekolah/madrasah atau pada pendidikan keagamaan formal seperti Pondok Pesantren, dan Madrasah;
 - c. Pendidikan (Islam) di masyarakat;
 - d. Pendidikan (Islam) di masjid/ mushalla (tempat ibadah);
 - e. Pendidikan Islam di media massa.



Gambar 6.1 Ontologi Pendidikan Islam

Dari segi *epistemologi*, cara memperoleh materi dalam pengetahuan sangat bergantung pada karakteristik materinya. Muhaimin menjelaskan bahwa, apakah karakteristik materi tersebut berdasarkan pengalaman manusia yang empiris (sensual), rasional atau hermeneutis. Jika dijelaskan lebih lanjut, maka:

1. Karakteristik materinya empiris (sensual), maka metode yang digunakan adalah observasi, eksperimen dan induktif inferensial;
2. Karakteristik materinya rasional, maka metode analisis yang digunakan adalah metode deduktif;

3. Karakteristik materinya hermeneutis, maka metode yang digunakan adalah *verstehen* yakni menangkap makna yang lebih dalam sehingga diperoleh kesimpulan kasus dan/atau metode reflektif yakni metode analisis yang prosesnya berhubungan antara empiris yang abstrak.

Dari segi *aksiologi*, pengembangan dan penerapan ilmu pendidikan Islam diperlukan etika profetik, yakni etika yang dikembangkan atas dasar nilai-nilai Ilahiah (*qaulyiah*) bagi pengembangan dan penerapan ilmu. Jika dilihat hasil deduksi dari al-Quran, maka terdapat beberapa butir nilai etika profetik pengembangan dan penerapan ilmu pendidikan Islam, yakni:

1. Nilai Ibadah, yakni bagi pemangku ilmu pendidikan Islam, pengembangan dan penerapannya merupakan ibadah, hal tersebut bisa dilihat di QS. al-Zaryyat ayat 56 dan Ali Imran ayat 190-191;
2. Nilai Ihsan, yakni ilmu pendidikan Islam hendaknya dikembangkan untuk berbuat baik kepada semua pihak, dikarenakan Allah SWT. telah berbuat baik kepada manusia dan melarang untuk berbuat kerusakan apapun. Hal ini bisa dilihat di QS. al-Qashash ayat 77;
3. Nilai Masa Depan, yakni ilmu pendidikan Islam hendaknya ditujukan untuk menyiapkan generasi yang akan hidup dan menghadapi tantangan-tantangan masa depan yang jauh berbeda. Hal ini bisa dilihat di QS. al-Hasyr ayat 18;
4. Nilai Kerahmatan, yakni ilmu pendidikan Islam hendaknya ditujukan bagi kepentingan dan kemaslahatan seluruh umat manusia dan alam semesta. Hal ini bisa di QS. al-Anbiya' ayat 107;
5. Nilai Amanah yakni ilmu pendidikan Islam itu adalah amanah Allah SWT. bagi pemangkunya sehingga penerapannya dilakukan dengan niat, cara dan tujuan Allah SWT. Hal ini bisa dilihat di QS. al-Ahzab ayat 72;
6. Nilai Dakwah, yakni pengembangan dan penerapan ilmu pendidikan Islam merupakan wujud dialog dakwah menyampaikan kebenaran Islam. Hal ini bisa dilihat di QS. Fushshilat ayat 33;
7. Nilai *Tabisyir*, yakni pemangku ilmu pendidikan Islam senantiasa memberikan harapan kepada umat manusia tentang masa depan mereka, serta menjaga keseimbangan atau kelestarian alam. Hal ini bisa dilihat di QS. al-Baqarah ayat 119.

No.	Permasalahan	Uraian	Data Coding	Analisis dan Solusi
1.	<p>Dasar-dasar Pemikiran Pengembangan Pendidikan Islam menurut Muhaemin</p>	<p>1. Menurut Muhaemin, Pendidikan Islam adalah sistem pendidikan yang dipahami dan dikembangkan dari ajaran dan nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam sumber dasarnya, yaitu al-Quran dan al-Sunnah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Muhaemin, <i>Paradigma Pendidikan Islam: Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah</i>, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 36-37 2. Muhaemin, <i>Wacana Pengembangan Pendidikan Islam</i>, (Surabaya: Pusat Studi Agama, Politik dan Masyarakat (PSAPM) dan Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 23-24 3. Muhaemin, <i>Nuansa Baru Pendidikan Islam (Mengurai Benang Kusut Dunia Pendidikan)</i>, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 4-6 4. Muhaemin, <i>Rekonstruksi Pendidikan Islam: Dari Paradigma Pengembangan, Manajemen Kelembagaan, Kurikulum hingga Strategi</i> 	<p>Pendidikan Islam dan Pendidikan Agama Islam merupakan dua hal yang saling berkaitan. Dalam pemikiran Muhaemin, sebelum melangkah pada ranah pendidikan agama Islam, yang harus dikembangkan terlebih dahulu adalah sistem pendidikannya. Jika dilihat dari pengertiannya, tujuan dari sistem pendidikan Islam yakni memahami serta mengembangkan pendidikan Islam itu sendiri. Mulai dari sumber dasarnya yakni al-Quran dan al-Sunnah hingga menciptakan budaya yang Islami dalam lingkungan pendidikan.</p> <p>Pemikiran tersebut, jika selalu berhenti dalam konsep tanpa ada implementasi maka tidak akan terwujud yang namanya budaya Islami. Lingkungan yang memiliki budaya Islami, tidak akan terwujud dengan sendirinya. Harus ada peran dari unsur-unsur pendidikan itu sendiri, tidak hanya peran guru tapi</p>

		<p>2. Menurut Muhaimin, Pendidikan agama Islam adalah nama kegiatan atau usaha-usaha dalam mendirikan agama Islam yang bisa disebut sebagai pendidikan agama Islam</p>	<p>5. Muhaimin, <i>Pemikiran dan Aktualisasi Pengembangan Pendidikan Islam</i>, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 39-40</p> <p>6. Muhaimin, <i>Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi</i>, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 6-8</p>	<p>juga harus ada peran dari orang tua.</p>
		<p>2. Menurut Muhaimin, Pendidikan agama Islam adalah nama kegiatan atau usaha-usaha dalam mendirikan agama Islam yang bisa disebut sebagai pendidikan agama Islam</p>	<p>1. Muhaimin, <i>Nuansa Baru Pendidikan Islam (Mengurai Benang Kusut Dunia Pendidikan)</i>, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 4</p> <p>2. Muhaimin, <i>Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi</i>, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012),</p>	<p>juga harus ada peran dari orang tua.</p>

		<p>3. Perbedaan pendidikan Islam dan pendidikan agama Islam sangat jelas, yakni pendidikan Islam adalah sistemnya sedangkan pendidikan agama Islam adalah nama kegiatan atau usahanya.</p>	<p>hlm. 6</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Muhaimin, <i>Nuansa Baru Pendidikan Islam (Mengurai Benang Kusut Dunia Pendidikan)</i>, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 4 2. Muhaimin, <i>Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi</i>, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 6 	
	<p>4. Pengembangan pendidikan Islam bermuara pada tiga permasalahan pokok, yakni:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Permasalahan pondasi yang terdiri dari pondasi religius, pondasi filosofis, pondasi psikologis, pondasi sejarah, pondasi sosial, pondasi politik dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Muhaimin, <i>Wacana Pengembangan Pendidikan Islam</i>, (Surabaya: Pusat Studi Agama, Politik dan Masyarakat (PSAPM) dan Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 32 2. Muhaimin, <i>Nuansa Baru Pendidikan Islam (Mengurai Benang Kusut Dunia Pendidikan)</i>, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), 	<p>Sebelum mengimplementasikan konsep dari pemikiran pengembangan pendidikan Islam milik Muhaimin yang telah dipahami, kita harus memahami dengan benar mengenai dasar-dasar dari pemikiran tersebut. Mulai dari adanya perbedaan pendidikan Islam dengan pendidikan agama Islam, permasalahan pokok, pendekatan pemikirannya, paradigmanya hingga bagaimana pemikiran terdahulu dalam memaknai pengembangan</p>	

		<p>pondasi ekonomi; b. Permasalahan struktur yang terdiri dari struktur demografis dan geografis, struktur perkembangan jiwa manusia, struktur ekonomi, struktur rumah tangga dan struktur jenjang pendidikan; c. Permasalahan operasional yang terdiri dari operasional mikro dan operasional makro.</p>	<p>hlm. 17-18 3. Muhaimin, <i>Pemikiran dan Aktualisasi Pengembangan Pendidikan Islam</i>, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 2-3</p>	<p>pendidikan Islam milik Muhaimin. Muhaimin mengajak seseorang untuk berpikir analitis-kritis, kreatif dan inovatif dalam menghadapi berbagai praktik dan isu aktual di bidang pendidikan. Tidak lupa juga, Muhaimin sangat menekankan bagaimana seseorang tidak hanya memiliki kompetensi secara umum tetapi juga harus memiliki pemahaman lebih terhadap agama. Hal ini bertujuan untuk menjadikan sosok yang diidealkan agama Islam yakni berpegang teguh pada al-Quran dan al-Sunnah.</p>
	<p>5. Pemikiran pengembangan pendidikan Islam memiliki beberapa pendekatan, yakni: a. Pendekatan multidisiplin; b. Pendekatan Interdisipliner; c. Pendekatan</p>	<p>1. Muhaimin, <i>Pemikiran dan Aktualisasi Pengembangan Pendidikan Islam</i>, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 10-11</p>		

		<p>Sistemik.</p> <p>6. Paradigma yang dibangun oleh Muhaemin terbagi menjadi beberapa pandangan, yakni:</p> <p>a. Pandangan dari sisi historis-sosiologis terdiri dari tiga paradigma, yakni paradigma formisme atau dikotomis, paradigma mekanisme dan paradigma organisme;</p> <p>b. Pandangan dari sisi Kepedulian terdiri dari tiga paradigma yakni paradigma ortodoksi, paradigma Islamisasi dan paradigma modernisasi Islam.</p>	<p>1. Muhaemin, <i>Paradigma Pendidikan Islam: Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah</i>, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 39-47</p> <p>2. Muhaemin, <i>Rekonstruksi Pendidikan Islam: Dari Paradigma Pengembangan, Manajemen Kelembagaan, Kurikulum hingga Strategi Pembelajaran</i>, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2009), hlm. 59-68</p>	
	<p>7. Pemikiran Islam dalam pengembangan pendidikan Islam, yakni:</p> <p>a. Pemikiran</p>	<p>1. Muhaemin, <i>Nuansa Baru Pendidikan Islam (Mengurai Benang Kusut Dunia</i></p>		

		<p>Tekstualis Salafi; b. Pemikiran Tradisionalis Mazhabi; c. Pemikiran modernis; d. Pemikiran neo-modernis</p>	<p><i>Pendidikan</i>), (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 60-65</p> <p>2. Muhaemin, <i>Pemikiran dan Aktualisasi Pengembangan Pendidikan Islam</i>, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 24-31</p> <p>3. Muhaemin, <i>Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi</i>, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 88-97</p>	
<p>2.</p>	<p>Peningkatan Kualitas Guru Pendidikan Agama Islam berdasarkan Pemikiran Pengembangan Pendidikan Islam menurut Muhaemin</p>	<p>1. Muhaemin mendefinisikan guru menjadi beberapa panggilan, yakni: a. <i>Ustadz</i>, yakni seorang guru yang dituntut untuk komitmen terhadap profesionalisme dalam mengemban tugasnya; b. <i>Mua`allim</i>, yakni</p>	<p>1. Muhaemin, <i>Wacana Pengembangan Pendidikan Islam</i>, (Surabaya: Pusat Studi Agama, Politik dan Masyarakat (PSAPM) dan Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 209-213</p> <p>2. Muhaemin, <i>Pemikiran dan Aktualisasi Pengembangan Pendidikan Islam</i>, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 172-180</p>	<p>Panggilan guru dalam pemikiran pengembangan pendidikan Islam, tidak hanya sebatas menjadi sebuah panggilan. Akan tetapi, juga memahami makna dari setiap panggilan tersebut dan menerapkannya.</p> <p>Guru tidak hanya sebatas menyampaikan sebuah ilmu, tetapi dia juga harus bisa menjelaskan hakikat ilmu tersebut,</p>

		<p>seorang guru dituntut untuk mampu menjelaskan hakikat ilmu pengetahuan yang diajarkannya;</p> <p>c. <i>Murabby</i>, yakni seorang guru diharuskan bisa untuk menumbuhkan serta mengembangkan kreativitasnya agar mampu mengkreasi, mengatur dan memelihara alam seisinya;</p> <p>d. <i>Mursyid</i>, yakni seorang guru diharuskan untuk memahami ilmu pengetahuan dan teknologi serta dinafasi dan dijiwai oleh nur ilahi;</p> <p>e. <i>Mudarris</i>, diartikan sebagai orang yang berusaha</p>	<p>3. Muhaimin, <i>Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi</i>. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 44-52</p>	<p>mengembangkan kreativitas dirinya serta peserta didiknya, memberikan contoh dalam pengamalannya serta dalam membimbing peserta didik menjadi orang yang beradab dalam kehidupannya.</p> <p>Hal ini dapat terwujud jika, guru berkomitmen dalam meningkatkan kualitas serta memantaskan dirinya menjadi seorang guru pendidikan agama Islam. Peningkatan kualitas guru ini harus dimiliki oleh setiap guru mulai dari bagaimana mengelola pembelajarannya, meningkatkan serta memahami materi yang akan disampaikan, memiliki kepribadian yang luhur dan bisa dijadikan sebagai panutan tidak hanya di lembaga pendidikan tapi juga di lingkungan masyarakat serta bisa mengorganisasikan lingkungannya menjadi lingkungan yang berbudaya Islami.</p> <p>Sebelum itu diarahkan pada kompetensi, Muhaimin juga menjelaskan bahwa kita harus</p>
--	--	--	--	--

		<p>menularkan penghayatan akhlak kepada peserta didiknya;</p> <p>f. <i>Muaddib</i>, diartikan sebagai orang yang beradab sekaligus memiliki peran dan fungsi untuk membangun peradaban.</p>		<p>memahami hakikat pengembangan pendidikan Islam itu sendiri. Hakikat tersebut mulai dari pemahaman dengan benar terkait pendidikan Islam serta tujuan pendidikan Islam sendiri, menjadikan pengalaman sebagai wadah penerapan ilmu serta selalu meningkatkan ilmunya dan memberikan contoh terhadap peserta didiknya.</p>
<p>2. Muhaimin menjelaskan, dalam peningkatan kualitas guru membutuhkan beberapa faktor penting, yakni:</p> <ol style="list-style-type: none"> Memiliki keahlian khusus; Kemampuan untuk memperbaiki kemampuan; Penghasilan yang memadai sebagai imbalan. 	<ol style="list-style-type: none"> Muhaimin, <i>Wacana Pengembangan Pendidikan Islam</i>, (Surabaya: Pusat Studi Agama, Politik dan Masyarakat (PSAPM) dan Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 222 Muhaimin, <i>Pemikiran dan Aktualisasi Pengembangan Pendidikan Islam</i>, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 181 Muhaimin, <i>Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah, dan Perguruan</i> 			

		<p>3. Dalam penjelasannya, kompetensi yang secara jelas disebutkan Muhaimin, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kompetensi Pedagogik (kemampuan mengelola pembelajaran); b. Kompetensi Kepribadian (perilaku dan kepribadian guru); c. Kompetensi Sosial (sosok guru dalam tatanan sosial masyarakat); d. Kompetensi Profesional (penguasaan landasan kependidikan). <p>Akan tetapi, berdasarkan pemikiran Muhaimin,</p>	<p><i>Tinggi</i>, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 51</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Agama (Permenag) No. 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah, pasal 16 ayat (1) 2. Keputusan Menteri Agama (KMA) Republik Indonesia No. 211 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan Standar Nasional Pendidikan Agama Islam pada Sekolah, Bab IV tentang Pedoman Pengembangan Standar Pendidikan dan Kependidikan Pendidikan Agama Islam 3. Muhaimin, <i>Pemikiran dan Aktualisasi Pengembangan Pendidikan Islam</i>, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 191-192 4. Muhaimin, <i>Rekonstruksi Pendidikan Islam: Dari</i> 	
--	--	--	--	--

		<p>kompetensi yang harus dimiliki oleh guru selain 4 kompetensi di atas, yakni kompetensi kepemimpinan. Hal ini sejalan dengan pemikirannya, dengan alasan seorang guru juga diharuskan bisa mengorganisasi seluruh potensi sekolah dalam mewujudkan budaya Islami.</p>	<p><i>Paradigma Pengembangan, Manajemen Kelembagaan, Kurikulum hingga Strategi Pembelajaran</i>, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2009), hlm. 18-21</p>	
	<p>4. Peningkatan kualitas guru pendidikan agama Islam, harus dimulai dengan pemahaman dasar (filosofis) mengenai hakikat pendidikan Islam dan tujuannya. Hal ini dapat dilihat dari:</p> <p>a. <i>Ontologi</i>: yakni memahami objek kajian dari ilmu pendidikan Islam yang bersumber ilmu pengetahuan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Muhaimin, <i>Wacana Pengembangan Pendidikan Islam</i>, (Surabaya: Pusat Studi Agama, Politik dan Masyarakat (PSAPM) dan Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 17-24 2. Muhaimin, <i>Nuansa Baru Pendidikan Islam (Mengurai Benang Kusut Dunia Pendidikan)</i>, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 15-36 3. Muhaimin, <i>Pemikiran dan</i> 		

		<p>utama yakni Allah SWT. yang kemudian disampaikan Nabi Muhammad ﷺ;</p> <p>b. <i>Epistemologi</i>: yakni guru diharuskan untuk memperoleh materi dalam pengetahuan yang bergantung pada karakteristik materinya;</p> <p>c. <i>Aksiologi</i>: yakni diharuskan untuk selalu mengembangkan keilmuannya dan memberikan contoh terhadap peserta didiknya.</p>	<p><i>Aktualisasi Pengembangan Pendidikan Islam</i>, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 42-64</p> <p>4. Muhaimin, <i>Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi</i>, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 65</p>	
--	--	--	--	--

Tabel 6.2 Matrik Pengembangan Pendidikan Islam menurut Muhaimin

DAFTAR PUSTAKA

- A. Mujib, dkk. (2003). *Intelektualisme Pesantren*, ed. Mastuki HS, M Ishom El Saha *et.al.* Jakarta: Diva Pustaka.
- al-Sakandary, Syaikh Tāj al-Dīn Aḥmad ibn Muḥammad ibn ‘Abd al-Karīm ibn ‘Athā’illāh. (1420 H/2000 M). *al-Hikam al-‘Athā’iyyah wa al-Munājāh al-Ilāhiyyah*. dit-*ahqīq* oleh Yūsuf ibn Maḥmūd al-Hāj Aḥmad. T. Tempat: Maktabah al-‘Ilm al-Ḥadīts wa Dār Nūr al-Basyīr.
- Ayunina, Ilma. dkk. “Tujuan Pendidikan Islam dalam Membangun Karakter Siswa di Era Digital”.
- Azra, Azyumardi dan Saiful Umam [eds.]. (1998). *Menteri-Menteri Agama RI: Biografi Sosial-Politik*. Jakarta: INIS (Indonesian-Netherlands Cooperation in Islamic Studies), PPIM (Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat) UIN Jakarta, dan Departem Agama RI.
- Azra, Azyumardi. (1998). *Esei-esei Intelektual Muslim dan Pendidikan Islam*. Jakarta: Logos.
- Azra, Azyumardi. (2000). *Islam Substantif*. Bandung: Mizan.
- Azra, Azyumardi. (2007). *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII*. Jakarta: Kencana.
- Azra, Azyumardi. (2014). *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Milenium III*. Jakarta: Prenada.
- Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. (2019). *al-Qur’an dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan 2019)*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Bahrum, “Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi”, Jurnal: *Sulesana*, Vol. 8 No. 2, (2013).
- Bruinessen, Martin Van. (1999). *NU, Tradisi Relasi-relasi Kuasa Pencarian Wacana Baru*. Yogyakarta: LkiS.

- Dahlân, Syaikh Ihsân Muḥammad. (t.th.) *Sirâj al-Thâlibîn `alâ Syarḥ Mihâj al-`Âbidîn*. Beirut: Dâr al-Fikr. Jilid I.
- Dahlan, Zaini. (2018). *Sejarah Pendidikan Islam: Signifikansi Jejak Pendidikan Islam bagi Pengembangan Pendidikan Islam Masa Kini dan Masa Depan*. Medan.
- Damopoli, Muljono. (2011). *Pesantren Modern IMMIM: Pencetak Muslim Modern*. Jakarta: Rajawali Press.
- Daulay, Haidar Putra. (2012). *Kapita Selekta Pendidikan Islam di Indonesia*. Medan: Perdana Mulya Sarana.
- Departemen Agama RI. *Nama dan Data Potensi Pondok-pondok Pesantren Seluruh Indonesia*. Jakarta: 1984-1985.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Dharma, S. Satya. (2000). *Haji Kita: Fakta dan Problema Penyelenggaraan Haji di Indonesia 1990-2000*. Jakarta: Asosiasi Wartawan Muslim [AWAM] Indonesia.
- Dhofier, Zamakhsyari. (2011). *Tradisi Pesantren Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Dwifatma, Andina. (2011). *Cerita Azra Biografi Cendekiawan Muslim Azyumardi Azra*. Penerbit Erlangga.
- Fadjar, A. Malik. (2004). *Pendidikan, Agama, Kebudayaan, dan Perdamaian*. Malang: UIN Malang.
- Fadl, Khaled Abou El. (2002). *Musyawaharah Buku: Menyusuri Keindahan Islam dari Kitab ke Kitab*, terj. Abdullah Ali. Jakarta: Serambi.
- Hidayat, Komaruddin. (2000). "Dari Pondok Indah ke Mekah al-Mukarramah," dalam Nurcholish Madjid, *Perjalanan Religius 'Umrah dan Haji*. Jakarta: Paramadina. cet. Ke-2.
- Hidayat, Komaruddin. (2003). "Dari Wartawan ke Birokrat, Terakhir Berlabuh ke Pesantren: Sebuah Refleksi," tulisan pengantar pada Marwan Saridjo, *Bulan Sabit di Atas Kening: Sebuah Otobiografi*. Jakarta: Yayasan Ngali Aksara.
- Hidayat, Rahmat. (2016) *Ilmu Pendidikan Islam: Menuntut Arah Pendidikan Islam Indonesia*. Medan: Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia.
- Hidayati, Noorazmah. "Pemikiran Pendidikan Islam Ahmad Tafsir (Filsafat Pendidikan Islami)," *Jurnal Al-Risalah*, Vol. 15 (Juni, 2019).
- Indra, Hasbi. (2016). *Pendidikan Islam Tantangan dan Peluang di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Deepublish.

- Ismail, Faisal. (1998). *Paradigma Kebudayaan Islam Studi Kritis dan Refleksi Historis*. Yogyakarta: Titian Ilahi Press.
- Khuluq, Lathiful. (2000). *Ajar Kebangunan Ulama, Biografi K.H Hasyim Asy'ari*. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta.
- Kodir, Abdul. (2015). *Sejarah Pendidikan Islam: Dari Masa Rasulullah hingga Reformasi di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Koesoma, Doni. (2007). *Pendidikan Karakter: Strategi Mendidik Anak di Zaman Global*. Jakarta: Grasindo.
- Maksum. (1999). *Madrasah Sejarah dan Perkembangannya*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Masnun. (2001). *Organisasi Sosial dan Pendidikan Islam Muhammadiyah, dalam Sejarah Pertumbuhan Dan Perkembangan Lembaga-Lembaga Pendidikan Islam Di Indonesia*, Abudin Nata ed. Jakarta: PT Gramedia.
- Masruroh, Ninik dan Umiarso. (2011). *Modernisasi Pendidikan Islam Ala Azyumardi Azra*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Menko Kesra Ad. Interim [Prof. DR. H.A. Malik Fadjar, M.Sc.], "Multikulturalisme Pengetahuan Fungsional dan Spiritualitas Agama Sebagai Basis Program Kesejahteraan," *Makalah* pada Pertemuan dengan Jajaran Kementerian Kesra, 26 April 2004.
- Miftahuddin. (2017). *Sejarah Perkembangan Intelektual Islam Indonesia*. Yogyakarta: UNY Press.
- Misrawi, Zuhairi. (2010). *Hadratussyaikh Hasyim Asy'ari, Moderasi, Keumatan dan Kebangsaan*. Jakarta: Kompas.
- Muhaimin. (2001). *Paradigma Pendidikan Islam: Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhaimin. (2006). *Nuansa Baru Pendidikan Islam (Mengurai Benang Kusut Dunia Pendidikan)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Muhaimin. (2009). *Rekonstruksi Pendidikan Islam: Dari Paradigma Pengembangan, Manajemen Kelembagaan, Kurikulum hingga Strategi Pembelajaran*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Muhaimin. (2011). *Pemikiran dan Aktualisasi Pengembangan Pendidikan Islam*. Jakarta: Rajawali Press.
- Muhaimin. (2012). *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Muhaimin. (2012). *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Nata, Abuddin. (2009). *Akhlaq Tasawuf*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Nata, Abuddin. (2012). *Kapita Selekta Pendidikan Islam: Isu-isu Kontemporer tentang Pendidikan Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Nata, Abuddin. (2012). *Pemikiran Pendidikan Islam & Barat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Nata, Abuddin. (2016). *Inovasi Pendidikan Islam*. Jakarta Selatan: Salemba Diniyah.
- Nata, Abuddin. (2016). *Pendidikan dalam Perspektif al-Qur'an*. Depok: Prenadamedia Group.
- Nata, Abuddin. (2016). *Pendidikan dalam Perspektif al-Qur'an*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ni'am, Syamsun. (2011). *Wasiat Tarekat Hadratus Syaikh Hasyim Asy'ari*. Jogjakarta: Ar Ruz Media.
- Ni'mah, Zetty Azizaton. (2017) *Geneologi Revivalisme Pendidikan Islam di Indonesia: Melacak Konfigurasi Pembaruan Pendidikan Islam KH. Ahmad Dahlan & KH. Hasyim Asy'ari*. Malang: Instrans Publishing.
- Noer, Deliar. (1980). *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*. Jakarta: LP3ES.
- Nugroho, Adi. (2010). *KH. Ahmad Dahlan : Biografi Singkat 1869-1923*. Jogjakarta: Garasi House of Book.
- Pasha, Musthafa Kamal. dkk. (2003). *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Tajdid*. Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri.
- Rasmianto. (2004). "Prof. DR. H.A. Malik Fadjar, M.Sc.; Guru Agama Pemimpi Pendidikan Masa Depan," dalam M. Lutfi Mustofa, M.Ag [ed.], *Jejak Tokoh Pengembangan Universitas Islam Negeri [UIN] Malang*. Malang: Unit Penerbitan UIN Malang.
- Ridwan, Nur Khalik. (2010). *NU & Bangsa 1914-2010, Pergulatan Politik dan Kekuasaan*. Jogjakarta: Ar Ruzz Media.
- Rifa'i, Muhammad. (2010). *K.H. Hasyim Asy'ari, Biografi Singkat 1871-1947*. Jogjakarta: Garasi.
- Roqib, Moh. (2009). *Ilmu Pendidikan Islam: Pengembangan Pendidikan Integratif di Sekolah, Keluarga, dan Masyarakat*. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta.
- Safwan, Mardanas. (2001). *Sutrisno Kutoyo, KH. Akhmad Dahlan, Riwayat Hidup dan Perjuangannya*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya.
- Sagala, Syaiful. (2009). *Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Salam, Junus. (2009). *K.H. Ahmad Dahlan: Amal Dan Perjuangannya*. Banten: Al-Wasat.

- Salim, Peter dan Yenny Salim. (1991). *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Press.
- Salminawati. (2011). *Filsafat Pendidikan Islam: Membangun Konsep Pendidikan yang Islami*. Bandung: Citapustaka Media Perintis.
- Samani, Muchlas dan Hariyanto. (2012). *Konsep dan Model Pendidikan Karakter*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Saridjo, Marwan. (2003). *Bulan Sabit di Atas Kening: Sebuah Otobiografi*. Jakarta: Yayasan Ngali Aksara.
- Steenbrink, Karel A. (1994). *Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern*. Jakarta: LP3ES.
- Susanto, A.B. "Resensi Buku: Wacana Pengembangan Pendidikan Islam", *Jurnal At-Ta'dib*, IAIN Kendari, Vol. 3 No. 1, (2008).
- Suwendi. (2004). *Sejarah dan Pemikiran Pendidikan Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Tafsir, A. dkk. (2004). *Cakrawala Pemikiran Pendidikan Islam*. Bandung: Mimbar Pustaka: Media Transformasi Pengetahuan.
- Tafsir, Ahmad. (2000). *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Tafsir, Ahmad. (2004). *Filsafat Ilmu: Mengurai Ontologi, Epistemologi, Aksiologi Pengetahuan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Tafsir, Ahmad. (2006). *Filsafat Pendidikan Islami*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Tafsir, Ahmad. (2013). *Ilmu Pendidikan Islam*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Tafsir, Ahmad. (2014). *Filsafat Pendidikan Islami: Integrasi Jasmani, Rohani dan Kalbu Memanusiakan Manusia*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Tholkhah, Imam dan Ahmad Barizi. (2004). *Membuka Jendela Pendidikan: Mengurai Akar Tradisi dan Integrasi Keilmuan Pendidikan Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
- Wawancara (santai) dengan Mas Supri, Sekretaris Menteri Pendidikan Nasional RI, di ruang kerjanya pada Selasa, 12 Oktober 2004.
- Wawancara dengan Mendiknas Prof. DR. H.A. Malik Fadjar, M.Sc pada Kamis, 30 September 2004, di kantornya Departemen Pendidikan Nasional RI.
- Yusuf, Choirul Fuad dan Ahmad Syahid (ed). (2007). *Pemikir Pendidikan Islam: Biografi Sosial Intelektual*. Jakarta: PT. Pena Citasatria.

TENTANG PENULIS

Ahmad Barizi

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Email: *abarizi_mdr@uin-malang.ic.id*

Tempat dan Tanggal Lahir : Sumenep, 12 Desember 1973
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Golongan / Pangkat : Pembina Tk. I / IV-b
Jabatan Fungsional Akademik : Lektor Kepala
Perguruan Tinggi : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Alamat : Jl. Gajayana No. 50 Malang
Telp./Faks. : 0341-551354/0341-572533
Alamat Rumah : Jl. Joyosuko Metro II No. 42 Malang
Telp/HP : 08159943409

Masuk 100 Ilmuwan Sejarah, Filsafat, dan Teologi Terbaik Dunia di Indonesia, versi AD Scientific Index 2022 (<https://www.adscientificindex.com/top-...>)

PENDIDIKAN

- 2009 Dr. Konsentrasi Pemikiran Islam UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Disertasi berjudul "Tradisi dan Jaringan Intelektual Kyai Ihsan Jampes (1901-1952)"
- 2003 MA Konsentrasi Pemikiran Islam UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Tesis berjudul "Malaikat Dalam Konteks Budaya Manusia (Telaah Atas Pemikiran Antropomorfisme Malaikat Muhammad Abduh)".

(Peraih Penghargaan sebagai Penulis Tesis Terbaik V Direktorat Jenderal Pendidikan Islam KEMENAG RI 2007).

1996 S.Ag Jurusan PAI Fakultas Tarbiyah IAIN Malang (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang)
Skripsi berjudul "Paradigma Pendidikan Berbasis Pluralisme dan Demokrasi: Rekonstruksi dan Aktualisasi Tradisi Ikhtilaf dalam Islam"

(Wisudawan Terbaik se-IAIN Sunan Ampel di Surabaya, 12 Oktober 1996).

1992 MA An-Nuqayah Guluk-Guluk Sumenep
1989 MTs. An-Nuqayah Guluk-Guluk Sumenep
1986 SDN Cangkreng Lenteng Sumenep

KARYA ILMIAH/BUKU

No	Tahun	Judul Buku	Sifat/Kedudukan	Kota/Penerbit
1	2001	Paradigma Pendidikan Berbasis Pluralisme dan Demokrasi	Penulis, ditulis bersama Syamsul Arifin	Malang: UMM Press, 2001
2	2003	Berdampingan dengan Nasrani	Editor, karya A. Syarif, MA	Jakarta: Korpus, 2003
3	2004	Malaikat di Antara Kita	Penulis	Jakarta: Hikmah-Mizan, 2004
4	2004	Membuka Jendela Pendidikan: Mengurai Akar Tradisi dan Integrasi Keilmuan Pendidikan Islam	Penulis, ditulis bersama Imam Tholkhah	Jakarta: Rajawali Press, 2004
5	2004	Membiasakan Tradisi Agama: Arah Pengembangan Pendidikan Agama Islam (PAI) pada Sekolah Umum	Penulis	Jakarta: Direktorat Mapenda dan PAI pada Sekolah Umum Departemen Agama RI, 2004
6	2005	Holistika Pemikiran Pendidikan	Editor, karya A. Malik Fadjar	Jakarta: Rajawali Pers, 2005

7	2005	Cetak Biru Peran Agama: Merajut Kerukunan, Kesetaraan Gender, dan Demokratisasi Dalam Masyarakat Multikultural	Editor, karya Prof. Dr. Ridwan Lubis	Jakarta: Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, 2005
8	2007	Intelektualisme Islam Melacak Akar-akar Integrasi Ilmu dan Agama	Tim Penulis, dari buku kumpulan tulisan yang diedit oleh M. Lutfi Mustofa dan Helmi Syaifuddin	Malang: LKQS UIN Malang, 2007
9	2007	Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi, HAM Civil Society, dan Multikulturalisme	Tim Penulis	Malang: PuSAPoM/ Pusat Studi Agama, Politik, dan Masyarakat bekerjasama dengan TAF/The Asia Foundation, 2007
10	2008	Era Baru Departemen Agama: Kebijakan dan Kiprah Menteri Agama Muhammad M. Basyuni	Tim Penulis	Jakarta: Pusat Informasi Keagamaan dan Kehumasan Departemen Agama RI, 2008
11	2008	Dimensi-dimensi Pendidikan Islam	Editor, karya A. Fatah Yasin	Malang: UIN Malang Press, 2008
12	2008	Menyingkap Tabir Dua Kalimat Syahadah: Perspektif Semantik Tindak Tutur	Editor, karya Mamluatul Hasanah M.Pd	Malang: UIN Malang Press, 2008
13	2008	Ensiklopedi Tasawuf 3 Jilid	Tim Penulis Entri	Bandung: Angkasa, 2008

14	2009	Menjadi Guru Unggul: Bagaimana Menciptakan Pembelajaran yang Produktif dan Profesional	Penulis	Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2009
15	2011	Pendidikan Integratif: Akar Tradisi dan Integrasi Keilmuan Islam	Penulis	Malang: UIN Press, 2011
16	2011	Membangun Pendidikan Dalam Bingkai Islam Lintas Batas	Editor, bersama Mujtahid	Malang: UIN Press, 2011
17	2015	Studi Islam Kontemporer, Arus Radikalisasi dan Multikulturalisme di Indonesia (hal. 228-292)	Tim Penulis, dalam Prof. Dr. Symasul Arifin	Malang: Intrans, 2015

Nada OktaviaEmail: *nadaoktavia23@gmail.com*

Tempat dan Tanggal Lahir : Lamongan, 23 Oktober 1997
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Warga Negara : Indonesia
 Alamat KTP : RT.001 RW.001, Dusun Payaman, Desa Kuripan, Kec. Babat, Kabupaten Lamongan, 62271
 Alamat Domisili : Jalan Joyo Tambaksari No. 10, RT.005 RW.001, Kelurahan Merjosari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, 65144 (Wisma Seruni)
 Nomor Telepon / HP : 0857 3093 3457

Pendidikan Formal

Periode (Tahun)			Sekolah / Institusi / Universitas	Jurusan	Jenjang Pendidikan
2003	-	2009	SDN Kuripan	-	Sekolah Dasar (SD)
2009	-	2012	SMPN 1 Babat	-	Sekolah Menengah Pertama (SMP)
2012	-	2015	MAN Babat	Agama	Madrasah Aliyah Negeri (MAN)
2015	-	2019	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Pendidikan Agama Islam	Strata 1 (S-1)
2020	-	2021	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Magister Pendidikan Agama Islam	Strata 2 (S-2)

Pendidikan Non Formal / Training

Tahun	Lembaga / Instansi	Keterampilan
2015	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (Ma'had Sunan Ampel Al-Aly)	Ta'lim Qur'an, Ta'lim Afkar dan Shobahul Lughoh
2016	Lembaga Kajian, Penelitian dan Pengembangan Mahasiswa (LKP2M)	KATELAPO (Penelitian, Layouting, Polling)
2017	Lembaga Kajian, Penelitian dan Pengembangan Mahasiswa (LKP2M)	Kegiatan Sekolah Penelitian Pemula
2017	Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Tarbiyah UIN Malang	Kegiatan Latihan Kader 1 (LK-1)
2018	Kementerian Agama	Workshop tentang Multikultural
2019	Pesantren Universitas Brawijaya	Pelatihan Da'i Muda Digital
2019	Titik Nol English Course	Program <i>Basic</i>

Pengalaman Organisasi

Periode			Instansi	Posisi
2015	-	2016	Hai'ah Tahfidz Al-Quran (HTQ) UIN Malang	Anggota
2016	-	2017	Lembaga Kajian, Penelitian dan Pengembangan Mahasiswa (LKP2M)	Kepala Bidang Delegasi, Kompetisi dan Pendidikan Publik
2017	-	2018	Lembaga Kajian, Penelitian dan Pengembangan Mahasiswa (LKP2M)	Kepala Biro Keorganisasian
2018	-	2019	Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Tarbiyah UIN Malang	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan

Pengalaman Kerja

Tahun			Instansi	Jabatan
2021	-	2021	PJ Global School	Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam
2021	-	2021	Lembaga Kajian, Penelitian dan Pengembangan Mahasiswa (LKP2M)	Pelatih
2022	-	2022	MIS MINU Putri	Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam

Karya Ilmiah/Buku

No	Tahun	Judul	Sifat/Kedudukan	Kota/Penerbit
1	2018	Politik Identitas: Konstruksi Pemikiran Amy Gutmann dalam Menyikapi Pesta Politik Tahun 2019	Penulis, ditulis bersama Hairul Dharma Widagdo	Malang: Jurnal LoroNG, Vol. 7 No. 1, (November, 2018)
2	2019	Konsep Pengembangan Pendidikan Islam di Indonesia Telaah Pemikiran Muhaimin	Penulis	Malang: Skripsi, (Mei, 2019)
3	2021	Pemikiran Pendidikan Islam: Studi perbandingan pemikiran Muhaimin dan Abuddin Nata	Penulis	Malang: Tesis, (2021)

4	2021	Agama dan Perubahan Sosial di Basis Multikulturalisme: Sebuah Upaya Menyemai Teologi Pedagogi Damai di Tengah Keragaman Agama dan Budaya di Kabupaten Malang	Penulis, ditulis bersama Syamsul Arifin dan Moh Anas Kholis	Malang: Jurnal Nur El-Islam, Jurnal Pendidikan dan Sosial Keagamaan, Vol. 8 No. 2, (Oktober, 2021)
5	2022	Turki: Menuju Sistem Pendidikan Modern Dalam Sebuah Masyarakat Demokrasi	Penulis	Kediri: Jurnal Revorma, Jurnal Pendidikan dan Pemikiran, Vol. 2 No. 1, (2022)